PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026

GRESIK
1487 2026
Semangat Gresik Baru
Lebih Maju

LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

LKPJ
KEPALA DAERAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gresik Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan disampaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan LKPJ ini merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. LKPJ ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

LKPJ Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025. Laporan ini memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Gresik telah berupaya secara maksimal dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan perekonomian daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai capaian yang diraih merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat Kabupaten Gresik.

Namun demikian, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan masih terdapat kekurangan dan tantangan yang perlu terus diperbaiki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, saran, dan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Gresik sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gresik, Forkopimda, Perangkat Daerah, serta seluruh pemangku kepentingan atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Gresik yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM I-1
1.1.1 PEMBENTUKAN DAERAH I-1
1.1.2 DASAR HUKUM I-1
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH I-4
1.3 GAMBARAN UMUM DAERAH I-5
1.3.1 Data Geografis Wilayah I-5
1.3.1.1 Letak dan Kondisi Geografis I-5
1.3.1.2 Batas Wilayah Fungsional… I-8
1.3.1.3 Iklim I-13
1.3.1.4 Topografi I-14
1.3.1.5 Geologi I-15
1.3.1.6 Jenis Tanah I-18
1.3.1.7 Hidrologi I-19
1.3.1.8 Penggunaan Lahan I-20
1.3.1.9 Sumber Daya Alam dan Industri I-21
1.3.2 DATA DEMOGRAFIS I-42
1.3.2.1 Jumlah Penduduk I-42
1.3.2.2 Pertumbuhan Penduduk I-44
1.3.3 DATA KEPEGAWAIAN I-45
1.3.3.1 Pegawai Kabupaten Gresik menurut jenis kelamin I-45
1.3.3.2 Pegawai Kabupaten Gresik Menurut Golongan I-47
1.3.3.3 Pegawai Kabupaten Gresik Menurut Tingkat Pendidikan I-48
1.3.3.4 Pegawai Kabupaten Gresik Menurut Usia I-49
1.3.4 KONDISI EKONOMI I-51
1.3.4.1 Pertumbuhan Ekonomi I-51
1.3.4.2 Angka Kemiskinan I-55
1.3.4.3 Tingkat Inflasi I-59
1.3.4.3.1 Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2024 I-59
1.3.5 Data Capaian Pendapatan Daerah I-62
1.3.5.1 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan I-62

1.3.5.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) I-65
1.3.5.3 Pajak Daerah I-66
1.3.5.4 Retribusi Daerah I-70
1.3.5.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan I-73
1.3.5.6 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah I-74
1.3.5.7 Pendapatan Transfer I-81
1.3.5.8 Pendapatan Transfer I-81
1.3.5.8 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat I-81
1.3.5.9 Pendapatan Transfer Antar Daerah I-81
1.3.5.10 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah I-88
1.3.6 Realisasi Belanja I-88
1.3.7 Realisasi Pembiayaan Daerah I-92
1.3.8 Laporan Posisi Kas

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

2.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN II-1
2.1.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah II-2
2.1.1.1 Pajak Daerah II-3
2.1.1.2 Retribusi Daerah II-7
2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan II-10
2.1.1.4 lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah II-11
2.2 PENDAPATAN TRANSFER II-13
2.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat II-13
2.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah II-19
2.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH II-20
2.4 KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA II-21
2.4.1 Belanja Operasi II-22
2.4.1.1 Belanja Pegawai II-23
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa II-46
2.4.1.3 Belanja Bunga II-68
2.4.1.4 Belanja Hibah II-69
2.4.1.5 Belanja Bantuan Sosial II-72

2.4.2 Belanja Modal II-73
2.4.3 Belanja Tidak Terduga II-86
2.4.4 Belanja Transfer II-86
2.4.5 Pembiayaan Daerah II-88

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN…… III-2
3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN III-2
3.2.1 Strategi Yang Ditetapkan……. III-2
3.2.2 Arah Kebijakan Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-4
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA III-7
3.3.1Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan III-7
3.3.2 Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 III-12
3.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA III-155
3.4.1 Capaian Indikator Tujuan III-155
3.4.1.1 Indeks Pembangunan Manusia III-155
3.4.1.2 Indeks Pembangunan Gender III-157
3.4.1.3 Indeks Kesalehan Sosial III-159
3.4.1.4 Pertumbuhan Ekonomi III-159
3.4.1.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto III-162
3.4.1.6 Penurunan Emisi GRK III-163
3.4.1.7 Indeks Reformasi Birokrasi III-164
3.4.1.8 Tingkat Kemiskinan III-166
3.4.1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka III-167
3.4.2 Capaian Indikator Sasaran III-169
3.4.2.1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun III-170
3.4.2.2 Harapan Lama Sekolah III-171
3.4.2.3 Usia Harapan Hidup (UHH) III-172
3.4.2.4 Indeks Perlindungan Anak III-173
3.4.2.5 Indeks Pemberdayaan Gender III-174
3.4.2.6 Indeks Ketimpangan Gender III-175

3.4.2.7 Indeks Inklusi (GEDSI) III-176
3.4.2.8 Indeks Inklusi (GEDSI) III-178
3.4.2.9 Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur III-179
3.4.2.10 Rasio Net Ekspor III-181
3.4.2.11 Incremental Capital – Output Ratio (ICOR) III-182
3.4.2.12 Rasio Goverment Expenditure III-183
3.4.2.13 Indeks Daya Saing Daerah III-184
3.4.2.14 Indeks Infrastruktur III-186
3.4.2.15 Indeks Konektivitas Wilayah III-187
3.4.2.16 Indeks Risiko Bencana III-188
3.4.2.17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup III-189
3.4.2.18 Indeks Pemerintah Digital III-191
3.4.2.19 Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan III-194
3.4.2.20 Indeks Sistem Merit III-196
3.4.2.21 Indeks Pelayanan Publik III-197
3.4.2.22 Indeks Kemiskinan Multidimensi III-199
3.4.2.23 Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin III-200
3.4.2.24 Rasio Gini III-202
3.4.2.25 Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal III-204
3.5 INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH III-205
3.5.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar III-205
3.5.1.1 Pendidikan III-205
3.5.1.2 Kesehatan III-209
3.5.1.3 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang III-214
3.5.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman III-216
3.5.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat III-219
3.5.1.6 Sosial III-223
3.5.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar III-226
3.5.2.1 Ketenagakerjaan III-227
3.5.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak III-230
3.5.2.3 Pangan III-234
3.5.2.4 Pertanahan III-236
3.5.2.5 Lingkungan Hidup III-237

3.5.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil III-240
3.5.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa III-243
3.5.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana III-245
3.5.2.9 Perhubungan III-247
3.5.2.10 Komunikasi dan Informatika III-248
3.5.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah III-250
3.5.2.12 Penanaman Modal III-252
3.5.2.13 Kepemudaan dan Olahraga III-254
3.5.2.14 Statistik III-255
3.5.2.15 Persandian III-256
3.5.2.16 Kebudayaan III-257
3.5.2.17 Perpustakaan III-258
3.5.2.18 Kearsipan III-259
3.5.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan III-260
3.5.3.1 Pariwisata III-260
3.5.3.2 Perdagangan III-260
3.5.3.3 Kelautan dan Perikanan III-262
3.5.3.4 Pertanian III-264
3.5.3.5 Perindustrian III-266
3.5.4 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang Urusan III-267
3.5.4.1 Perencanaan Pembangunan III-267
3.5.4.2 Keuangan III-268
3.5.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan III-269
3.5.4.4 Penelitian dan Pengembangan III-271
3.5.4.5 Kesatuan Bangsa dan Politik III-272
3.5.4.6 Pengawasan III-273
3.5.4.7 Sekretariat DPRD III-274
3.5.4.8 Kesekretariat Daerah III-276
3.5.4.9 Kewilayahan III-279

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan…… IV-1

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya IV-1
4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya. IV-1
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya IV-2

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan	II-6
Tabel 1.2	CAT Kabupaten Gresik	II-9
Tabel 1.3	Wilayah Imbuhan Air Kabupaten Gresik	II-9
Tabel 1.4	Luas Ekoregion Kabupaten Gresik	II-10
Tabel 1.5	Wilayah Fungsional Kabupaten Gresik	II-11
Tabel 1.6	Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan Tahun 2025	II-21
Tabel 1.7	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman Tahun 2022-2025	II-22
Tabel 1.8	Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025	II-24
Tabel 1.9	Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025…	II-25
Tabel 1.10	Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2025…….	II-26
Tabel 1.11	Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025	II-28
Tabel 1.12	Produksi Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024	II-30
Tabel 1.13	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025	II-31
Tabel 1.14	Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025	II-31
Tabel 1.15	Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Domestik Di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2025	II-34
Tabel 1.16	Destinasi Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2025	II-35
Tabel 1.17	Daftar Industri di Kawasan Industri Maspion.	II-38
Tabel 1.18	Daftar Industri di Kawasan Industri Gresik (KIG)	II-39
Tabel 1.19	Daftar Industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik/Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE)	II-39
Tabel 1.20	Jenis Galian Kabupaten Gresik Berdasarkan Luas Usaha Penambangan dan Produksi	II-40
Tabel 1.21	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	II-41
Tabel 1.22	Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2024	II-42
Tabel 1.23	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021, 2022, 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025	II-43
Tabel 1.24	ASN Kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	II-44
Tabel 1.25	Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik (miliar rupiah) Tahun 2020 – 2025	II-50
Tabel 1.26	Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik (miliar rupiah) Tahun 2020 – 2025	II-52
Tabel 1.27	IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kabupaten Gresik Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2024	II-57
Tabel 1.28	Target, Realisasi, dan Tingkat Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahunan (Miliar Rupiah)	II-60
Tabel 1.29	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	II-60

Tabel 1.30 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 II-62
Tabel 1.31 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 II-63
Tabel 1.32 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 II-64
Tabel 1.33 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 II-67
Tabel 1.34 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 II-70
Tabel 1.35 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 II-72
Tabel 1.36 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 II-78
Tabel 1.37 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 II-79
Tabel 1.38 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 II-85
Tabel 1.39 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 II-87
Tabel 1.40 Target, Realisasi, dan Tingkat Capaian Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahunan (Miliar Rupiah) II-88
Tabel 1.41 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 II-88
Tabel 1.42 Proporsi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 II-90
Tabel 1.43 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 II-91
Tabel 1.44 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 II-93
Tabel 2.1 Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 II-1
Tabel 2.2 Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 II-2
Tabel 2.3 Perubahan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 II-3
Tabel 2.4 Perubahan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 II-7
Tabel 2.5 Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 II-10
Tabel 2.6 Perubahan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 II-12
Tabel 2.7 Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 II-13
Tabel 2.8 Perubahan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 II-14
Tabel 2.9 Perubahan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 II-20
Tabel 2.10 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 II-22
Tabel 2.11 Perubahan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 II-23
Tabel 2.12 Perubahan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 II-24
Tabel 2.13 Perubahan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 II-47
Tabel 2.14 Perubahan Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 II-69
Tabel 2.15 Perubahan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 II-70
Tabel 2.16 Perubahan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 II-73
Tabel 2.17 Perubahan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 II-74
Tabel 2.18 Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 II-86
Tabel 2.19 Perubahan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 II-87
Tabel 2.20 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 II-89

Tabel 3.1 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-156
Tabel 3.2 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2025 III-156
Tabel 3.3 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-157
Tabel 3.4 Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2025 III-158
Tabel 3.5 Capaian Indikator Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2025 III-159
Tabel 3.6 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Tahunan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2025 III-160
Tabel 3.7 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 III-161
Tabel 3.8 Capaian Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 III-162
Tabel 3.9 Capaian Indikator Penurunan Emisi GRK Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 III-164
Tabel 3.10 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 III-164
Tabel 3.11 Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-166
Tabel 3.12 Capaian Tingkat Kemiskinan Gerbangkertasusila Tahun 2021 - 2025 III-166
Tabel 3.13 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 III-168
Tabel 3.14 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2025 III-168
Tabel 3.15 Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-170
Tabel 3.16 Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-171
Tabel 3.17 Capaian Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-172
Tabel 3.18 Capaian Indikator Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-173
Tabel 3.19 Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-174
Tabel 3.20 Capaian Indikator Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-175
Tabel 3.21 Capaian Indikator Indeks GEDSI Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-177
Tabel 3.22 Capaian Indikator Indeks Harmoni Tahun 2024-2025 III-178
Tabel 3.23 Capaian Indikator Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-180
Tabel 3.24 Capaian Indikator Rasio Net Ekspor Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2025 III-181
Tabel 3.25 Capaian Indikator Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 III-182
Tabel 3.26 Capaian Indikator Rasio Government Expenditure Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 III-184
Tabel 3.27 Capaian Indikator Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 III-185
Tabel 3.28 Capaian Indikator Indeks Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025 III-186

Tabel 3.29 Capaian Indikator Indeks Konektivitas Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-188
Tabel 3.30 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-189
Tabel 3.31 Capaian Indeks Kualitas Lingkunga Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 III-190
Tabel 3.32 Capaian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-192
Tabel 3.33 Tabel Domain, Aspek, dan Bobot Penilaian Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 III-193
Tabel 3.34 Tabel Capaian Nilai Indeks SPBE Berdasarkan Domain Tahun 2025 III-195
Tabel 3.35 Capaian Indikator Indeks Sistem Merit Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-197
Tabel 3.36 Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025 III-198
Tabel 3.37 Capaian Indikator Indeks Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-200
Tabel 3.38 Capaian Indikator Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Gresik III-201
Tabel 3.39 Capaian Indikator Rasio Gini Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 III-202
Tabel 3.40 Capaian Indikator Rasio Gini Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 III-203
Tabel 3.41 Capaian Indikator Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Gresik Tahun 2025 III-204
Tabel 3.42 Capaian Indikator Sasaran Urusan Pendidikan Kabupaten Gresik III-206
Tabel 3.43 Capaian Indikator Sasaran Urusan Kesehatan Kabupaten Gresik III-210
Tabel 3.44 Capaian Sasaran Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik III-214
Tabel 3.45 Capaian Indikator Sasaran Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman III-216
Tabel 3.46 Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025 III-219
Tabel 3.47 Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik III-221
Tabel 3.48 Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025 III-222
Tabel 3.49 Capaian Indikator Sasaran Sosial Tahun 2024-2025 III-224
Tabel 3.50 Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025 III-227
Tabel 3.51 Capaian Indikator Sasaran Urusan Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik III-231
Tabel 3.52 Capaian Indikator Sasaran Urusan Pangan III-234
Tabel 3.53 Capaian Indikator Sasaran Urusan Pertanahan Kabupaten Gresik III-237
Tabel 3.54 Capaian Indikator Sasaran Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik III-237
Tabel 3.55 Capaian Indikator Sasaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil III-241
Tabel 3.56 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa III-243
Tabel 3.57 Capaian Indikator Sasaran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana III-246
Tabel 3.58 Capaian Indikator Sasaran Urusan Perhubungan III-248

Tabel 3.59	Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik	III-249
Tabel 3.60	Capaian Indikator Sasaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	III-251
Tabel 3.61	Capaian Indikator Sasaran Urusan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025	III-252
Tabel 3.62	Capaian Indikator Sasaran Kepemudaan dan Olahraga	III-254
Tabel 3.63	Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Gresik	III-255
Tabel 3.64	Capaian Indikator Sasaran Urusan Persandian Kabupaten Gresik	III-256
Tabel 3.65	Capaian Indikator Sasaran Urusan Kebudayaan Kabupaten Gresik	III-257
Tabel 3.66	Capaian Indikator Sasaran Urusan Perpustakaan Kabupaten Gresik	III-258
Tabel 3.67	Capaian Indikator Sasaran Urusan Kearsipan Kabupaten Gresik	III-259
Tabel 3.68	Capaian Indikator Sasaran Urusan Pariwisata Kabupaten Gresik	III-260
Tabel 3.69	Capaian Indikator Sasaran Urusan Perdagangan Kabupaten Gresik	III-261
Tabel 3.70	Capaian Indikator Sasaran Urusan Kelautan dan Perikanan	III-262
Tabel 3.71	Capaian Indikator Sasaran urusan Pertanian Kabupaten Gresik	III-265
Tabel 3.72	Capaian Indikator Sasaran urusan Perindustrian Kabupaten Gresik	III-266
Tabel 3.73	Capaian Indikator Sasasaran Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik	III-268
Tabel 3.74	Capaian Indikator Sasaran Keuangan Kabupaten Gresik	III-269
Tabel 3.75	Capaian Indikator Sasaran Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik	III-270
Tabel 3.76	Capaian Indikator Sasaran Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik.	III-271
Tabel 3.77	Capaian Indikator Sasaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik	III-272
Tabel 3.78	Capaian Indikator Sasaran Urusan Pengawas Kabupaten Gresik	III-274
Tabel 3.79	Capaian Indikator Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	III-275
Tabel 3.80	Capaian Indikator Sasaran Urusan Kesekretariatan Daerah Kabupaten Gresik	III-276
Tabel 3.81	Capaian Indikator Sasaran Urusan Kewilayahan Kabupaten Gresik	III-279
Tabel 3.82	Capaian Indikator Sasaran Urusan Kewilayahan Kabupaten Gresik	III-280
Tabel 4.1	Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah Nawakarsa ke dalam Nomenklatur Program RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029	IV-5
Tabel 4.2	Daftar Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029	IV-20
Tabel 4.3	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029	IV-35
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029	IV-228

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Gresik……	I-8
Gambar 1.2	Peta Wilayah Fungsional Kabupaten Gresik	I-13
Gambar 1.3	Peta Topografi Kabupaten Gresik.....…….	I-15
Gambar 1.4	Peta Geologi Kabupaten Gresik	I-17
Gambar 1.5	Peta Jenis Tanah Kabupaten Gresik	I-19
Gambar 1.6	PNS Kabupaten Gresik Berdasarkan Golongan Tahun 2025	I-47
Gambar 1.7	PPPK Kabupaten Gresik Berdasarkan Golongan Tahun 2025	I-48
Gambar 1.8	PNS Kabupaten Gresik Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	I-49
Gambar 1.9	PNS Kabupaten Gresik Berdasarkan Usia Tahun 2025	I-50
Gambar 1.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	I-56
Gambar 1.11	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2015 – 2025	I-57
Gambar 1.12	Inflasi Kab. Gresik, Tahun 2025	I-61
Gambar 3.1	Hasil Indeks Harmoni Kabupaten Gresik	III-179
Gambar 3.2	Diagram Radar Perbandingan Target dan Capaian Indeks SPBE Berdasarkan Aspek Penilaian Tahun 2025	III-193

BAB I PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

1.1.1 PEMBENTUKAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya.

1.1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta diubah Sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Kota Administratif Batu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025;
29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025;
30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.

Visi pembangunan Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026-2029 Kabupaten Gresik mengusung visi yaitu;

“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen

penyelenggara pemerintahan dalam 5 (lima) rencana strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2025-2029 sebagaimana berikut;

Misi ke-1

Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah;

Misi ke-2

Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Misi ke-3

Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;

Misi ke-4

Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat;

Misi ke-5

Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

1.3 GAMBARAN UMUM DAERAH.

1.3.1 Data Geografis Wilayah.

Kondisi fisik suatu wilayah menggambarkan karakteristik alamiah dan lingkungan yang membentuk suatu area geografis tertentu. Kondisi fisik suatu wilayah dapat mempengaruhi adanya perbedaan mata pencaharian dari masyarakat di wilayah tersebut (Santoso, 2019). Aspek-aspek yang akan dibahas terkait dengan kondisi fisik meliputi Letak dan Kondisi Geografis, Batas Wilayah Fungsional, Iklim, Topografi, Geologi, Jenis Tanah, Hidrologi, Sumber Daya Alam, Kebencanaan, Penggunaan Lahan, dan Perwujudan Wilayah.

1.3.1.1 Letak dan Kondisi Geografis.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang secara administratif memiliki posisi strategis karena

berbatasan langsung dengan Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan nasional. Secara geografis, Kabupaten Gresik terletak di bagian utara Provinsi Jawa Timur dan termasuk dalam kawasan metropolitan Gerbangkertosusila yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, industri, dan jasa di wilayah Jawa Timur.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112˚ sampai 113˚ Bujur Timur dan 7˚ sampai 8˚ Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian <200 sampai >500 meter di atas permukaan air laut. Batas-batas Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Selat Madura dan Kota Surabaya
Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto
Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Letak geografis tersebut menjadikan Kabupaten Gresik memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas regional, baik melalui jalur darat, laut, maupun kawasan industri dan pelabuhan.

Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah sebesar 126.039,84 Ha. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean. Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan. Dua kecamatan yang berada di Pulau Bawean adalah Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
Kecamatan Balongpanggang	6.437,63
Kecamatan Benjeng	6.223,11
Kecamatan Bungah	8.458,78
Kecamatan Cerme	7.118,47
Kecamatan Driyorejo	5.371,60
Kecamatan Duduksampeyan	8.235,49
Kecamatan Dukun	6.399,91
Kecamatan Gresik	758,54
Kecamatan Kebomas	3.477,14
Kecamatan Kedamean	7.008,61
Kecamatan Manyar	10.383,08
Kecamatan Menganti	6.985,22
Kecamatan Panceng	6.111,30
Kecamatan Sangkapura	12.796,12
Kecamatan Sidayu	5.354,57
Kecamatan Tambak	7.173,65
Kecamatan Ujungpangkah	11.651,20
Kecamatan Wringinanom	6.095,40
Luas Wilayah Kab. Gresik	**126.039,84**

Sumber : Badan Informasi Geospasial, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Sangkapura dengan luas sebesar 12.796,12 Ha dan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Gresik dengan luas sebesar 758,54 Ha. Terdapat perubahan luas wilayah pada tahun sebelumnya dikarenakan perubahan garis pantai.

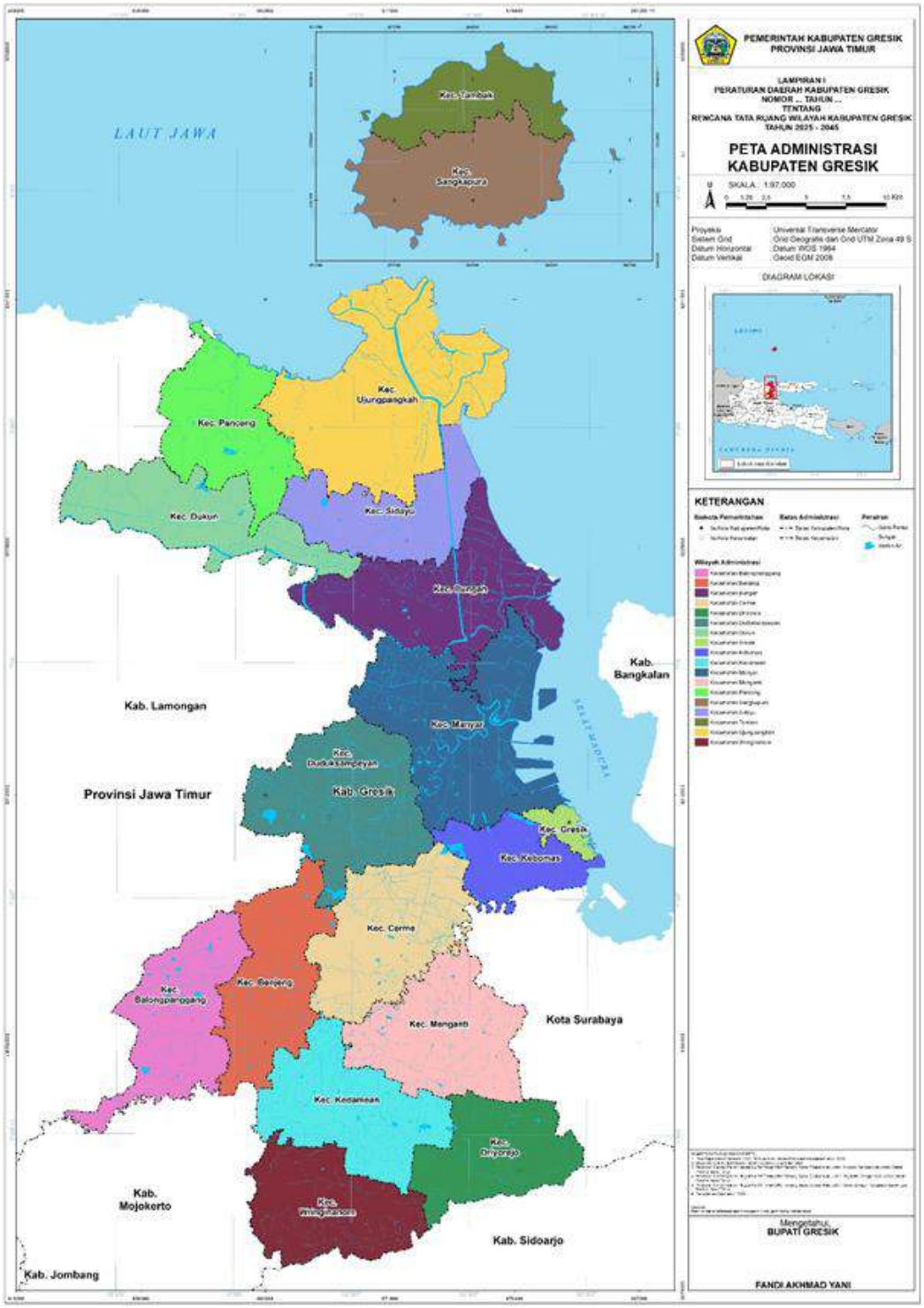

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik

Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik, 2025

1.3.1.2 Batas Wilayah Fungsional

Batas kawasan fungsional dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan pendekatan ekoregion ditetapkan berdasarkan karakteristik ekologis yang serupa, melintasi batas administratif, dan mencerminkan kesatuan ekosistem. Wilayah fungsional menggambarkan batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar.

Wilayah fungsional Kabupaten Gresik ditentukan berdasarkan karakteristik ekologis wilayah dengan mempertimbangkan:

- Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- Cekungan Air Tanah (CAT), yaitu suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.

Tabel 1.2 CAT Kabupaten Gresik

No	CAT	Luas (Ha)
1	CAT BRANTAS	608.989,32
2	CAT LASEM	12.558,99
3	CAT NGAWI-PONOROGO	932,31
4	CAT PANCENG	17.959,91
5	CAT PASURUAN	50.140,52
6	CAT RANDU BLATUNG	5.080,59
7	CAT SURABAYA-LAMONGAN	237.062,06
8	CAT TUBAN	57.014,35
9	NON CAT	432.003,95
Total		**1.421.741,99**

Sumber : KLHS RTRW Kabupaten Gresik, Tahun 2025

- Wilayah Imbuhan Air, yaitu zona atau area yang berfungsi sebagai tempat masuknya (recharge) air ke dalam tanah hingga membentuk air tanah, baik akuifer dangkal maupun dalam.

Tabel 1.3 Wilayah Imbuhan Air Kabupaten Gresik

No	Wilayah Imbuhan Air	Luas (Ha)
1	IMBUHAN	378.795,45
2	NON IMBUHAN	610.942,59

Grand Total	**989.738,04**

Sumber : KLHS RTRW Kabupaten Gresik,Tahun 2025

- Ekoregion, yaitu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Tabel 1.4 Luas Ekoregion Kabupaten Gresik

No	EKOREGION	FUNGSI	LUAS (Ha)
1	Bentang Pegunungan Kendeng Jati Kencana	Produksi primer, Produksi hewan, Pembentukan tanah, Siklus nutrien, Dekomposisi bahan organik, Mencegah kehilangan tanah, Penyimpanan air	33.361,63
2	Lahan Basah Muara Solo - Brantas	Produksi primer, Produksi hewan, Pembentukan tanah, Siklus nutrien, Dekomposisi bahan organik, Mencegah kehilangan tanah, Penyimpanan air, Retensi air	72.708,48
3	Nusa Vulkanik Bawean - Masalembo	Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah monsun merangas	19.969,75
Total			**126.039,86**

Sumber : KLHS RTRW Kabupaten Gresik, 2025

Penentuan wilayah fungsional ini dilakukan dengan analisis spasial melalui overlay Peta DAS, Peta CAT, Peta Wilayah Imbuhan Air, Peta Ekoregion dengan Peta Kabupaten Gresik agar dapat ditentukan batas wilayah fungsional secara ekologis.

Berdasarkan hasil overlay peta-peta tersebut, maka wilayah fungsional Kabupaten Gresik mempunyai luasan 3.148,567,86 Ha. Lingkup wilayah secara keseluruhanpada wilayah fungsional Kabupaten Gresik mencakup 20 (dua puluh) kecamatan/kota dan peairan laut. Luasan wilayah fungsional Kabupaten Gresik secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5 Wilayah Fungsional Kabupaten Gresik

No	Kecamatan/Kota	Luas (Ha)
1	Blitar	3.179,53
2	Bojonegoro	219.195,10

No	Kecamatan/Kota	Luas (Ha)
3	Gresik	125.313,25
4	Jombang	111.125,60
5	Kediri	152.310,01
6	Kota Batu	2.160,85
7	Kota Kediri	6.656,24
8	Kota Mojokerto	2.021,72
9	Kota Surabaya	33.540,37
10	Lamongan	175.231,51
11	Madiun	16.029,46
12	Malang	34.472,28
13	Mojokerto	98.438,07
14	Nganjuk	128.856,68
15	Ngawi	3,31
16	Pasuruan	39.409,55
17	Ponorogo	1.129,96
18	Sidoarjo	71.728,33
19	Tuban	198.358,59
20	Tulungagung	2.123,25
21	Perairan laut	1.727.284,21
Grand Total		**3.148.567,86**

Sumber : KLHS RTRW Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, wilayah delineasi fungsional dapat diinterpretasikan sebagai suatu kesatuan ruang yang memiliki keragaman fungsi namun saling terintegrasi dalam mendukung pembangunan wilayah secara menyeluruh. Kabupaten dan kota yang tercakup menunjukkan pembagian fungsi yang relatif jelas, mulai dari pusat pertumbuhan perkotaan dan industri, wilayah penyangga metropolitan, kawasan pertanian dan ketahanan pangan, hingga wilayah konservasi, pariwisata, dan kebudayaan. Keberadaan wilayah perairan laut melengkapi sistem wilayah ini dengan fungsi strategis di bidang perikanan, transportasi, dan ekologi pesisir. Secara keseluruhan, delineasi wilayah fungsional ini mencerminkan keterkaitan antarwilayah darat dan laut yang membentuk sistem pembangunan regional yang terpadu, seimbang, dan berkelanjutan, serta menjadi dasar penting dalam perencanaan tata ruang, pembangunan ekonomi, dan pengelolaan lingkungan hidup.

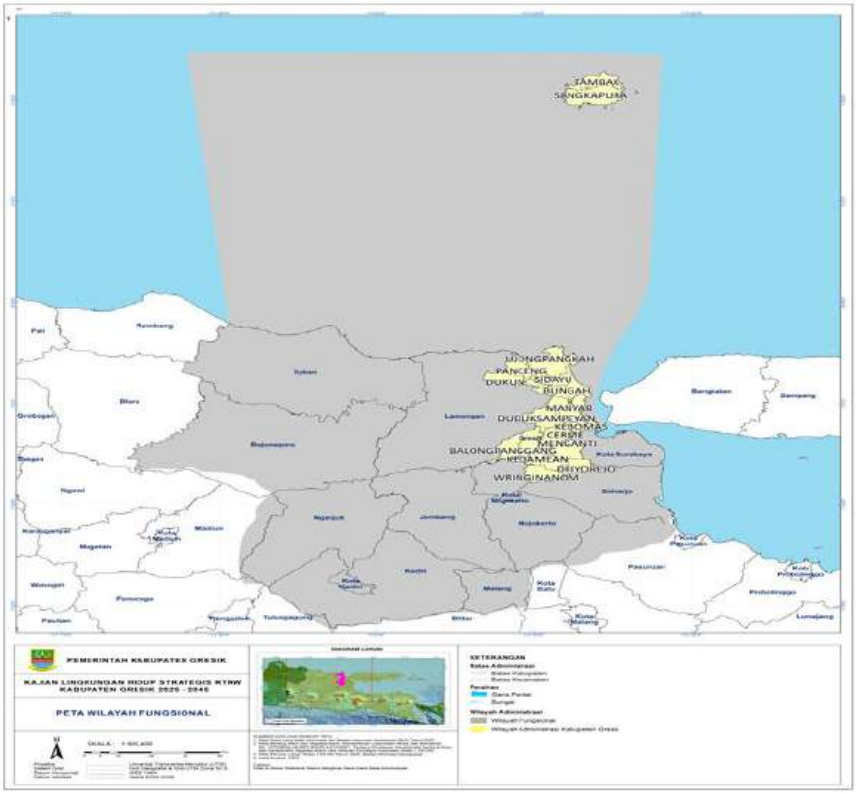

Sumb

1.3

Iklim Kabupaten Gresik termasuk ke dalam iklim tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84 % terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan.

Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Iklim di Kabupaten Gresik terdiri dari musim kering yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September, musim penghujan basah yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, musim peralihan dari musim kemarai sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November serta musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

1.3.1.4 Topografi

Wilayah Kabupaten Gresik berada pada ketinggian <200-1.500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut:

- Wilayah dengan ketinggian <200 mdpl seluas ± 120.645,66 ha atau sekitar 96,42%dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik;
- Wilayah dengan ketinggian 200-500 mdpl mempunyai luas ± 4.255,15 ha atau sekitar 3,40%; dan
- Ketinggian diatas 500-1.500 mdpl mempunyai luas ± 225,81 ha atau sekitar 0,18% dari selurh luas wilayah Kabupaten Gresik.

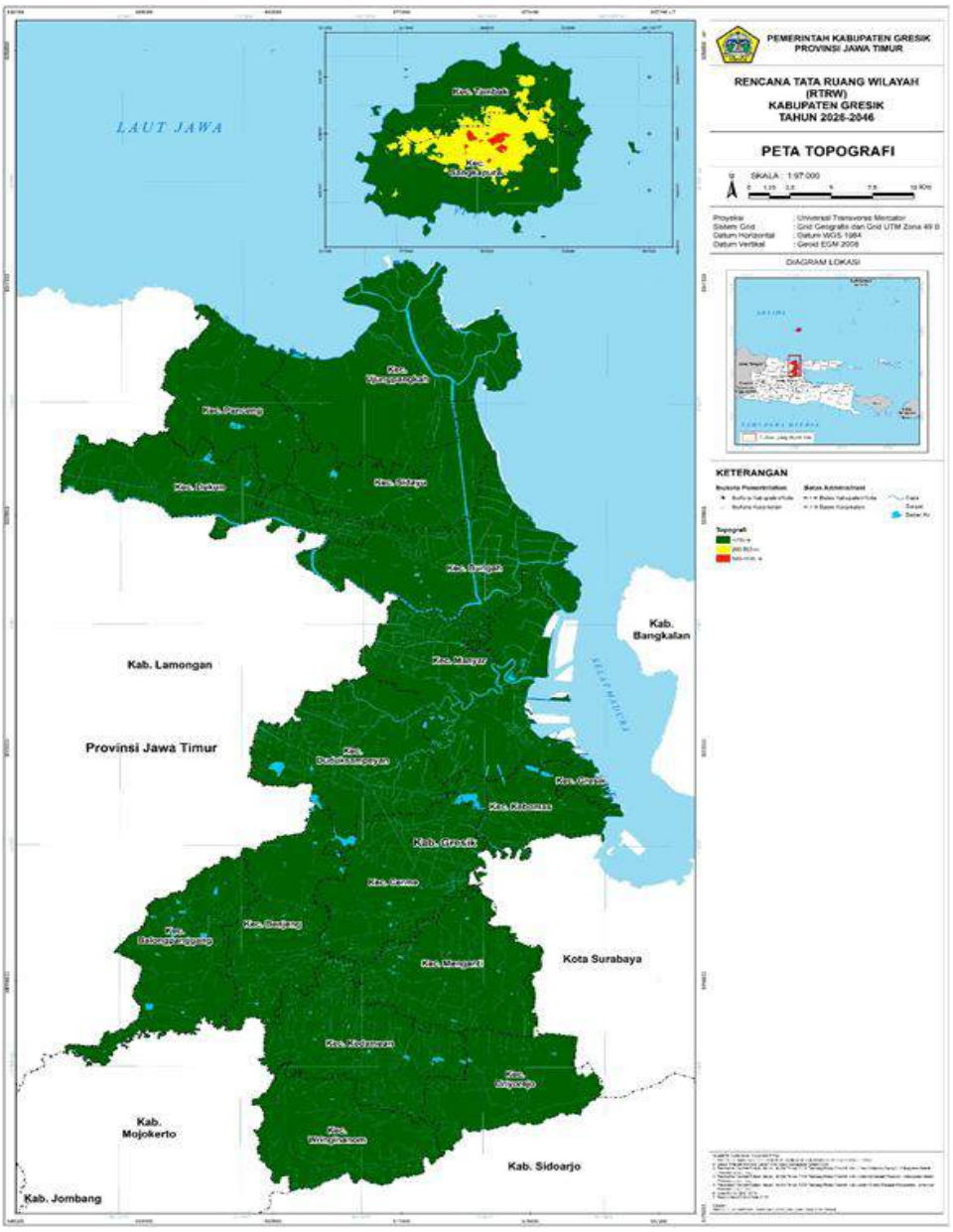

Gambar 1.3 Peta Topografi Kabupaten Gresik

Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik, 2025

1.3.1.5 Geologi

Sebagian besar geologi di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah, dan Litosol. Curah Hujan di Kabupaten Gresik relatif rendah, yaitu rata-rata 2.245 mm per tahun. Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

A. Kabupaten Gresik Bagian Utara
   Kabupaten Gresik bagian utara meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relative kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan Solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk industry, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.
B. Kabupaten Gresik Bagian Tengah
   Kabupaten Gresik bagian tengah meliputi wilayah Duduk Sampeyan, Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas yang merupakan kawasan dengan tanah relative subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.
C. Kabupaten Gresik Bagian Selatan
   Kabupaten Gresik bagian selatan meliputi wilayah Menganti, Kademan, Driyorejo, dan Wringin Anom yang merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industry, permukiman dan pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.
D. Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik
   Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini

merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial dengan adanya jenis bahan galian mineral non logam spedifik (batu onyx).

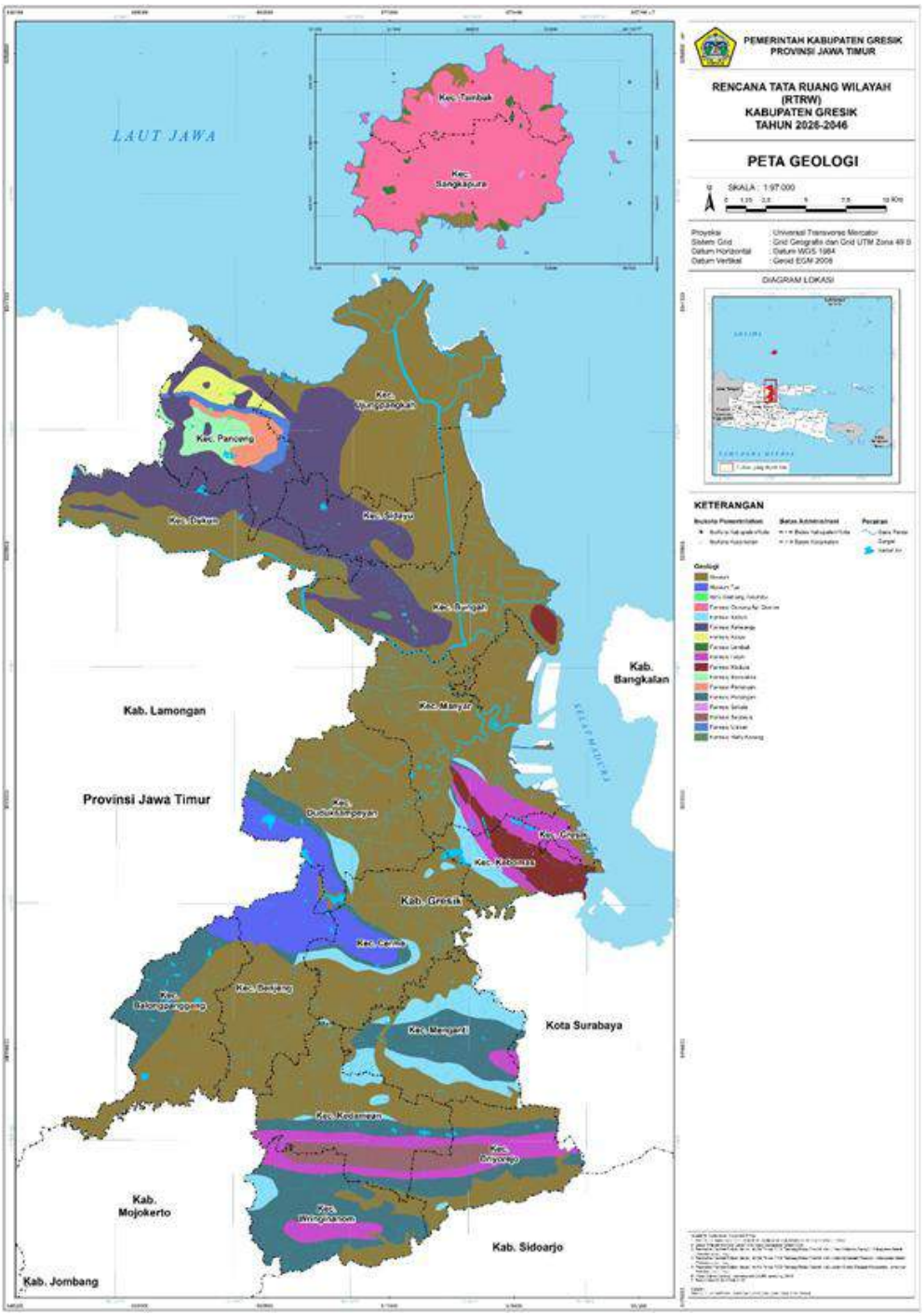

Gambar 1.4 Peta Geologi Kabupaten Gresik

Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik, 2025

1.3.1.6 Jenis Tanah

Kabupaten Gresik memiliki kondisi jenis tanah yang beragam sebagai hasil dari proses geologi, geomorfologi, dan sedimentasi yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Secara umum, jenis tanah di wilayah ini dipengaruhi oleh keberadaan kawasan pesisir, dataran aluvial, serta perbukitan kapur, yang masing-masing memiliki karakteristik fisik dan tingkat kesesuaian lahan yang berbeda. Variasi jenis tanah tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan lahan dalam mendukung kegiatan pertanian, permukiman, industri, serta fungsi lindung wilayah.

Jenis tanah aluvial banyak dijumpai pada kawasan dataran rendah dan sepanjang alur sungai utama. Tanah aluvial umumnya memiliki tekstur halus hingga sedang, tingkat kesuburan relatif baik, serta daya dukung yang cukup untuk kegiatan pertanian dan permukiman. Namun demikian, tanah jenis ini memiliki kerentanan terhadap genangan dan banjir, terutama pada wilayah dengan sistem drainase yang kurang memadai. Pada kawasan pesisir, dijumpai tanah marin dan tanah bertekstur halus dengan kandungan air dan garam yang relatif tinggi, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam pengembangan kawasan terbangun. Pada Kabupaten Gresik terdapat delapan jenis tanah yang tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik.

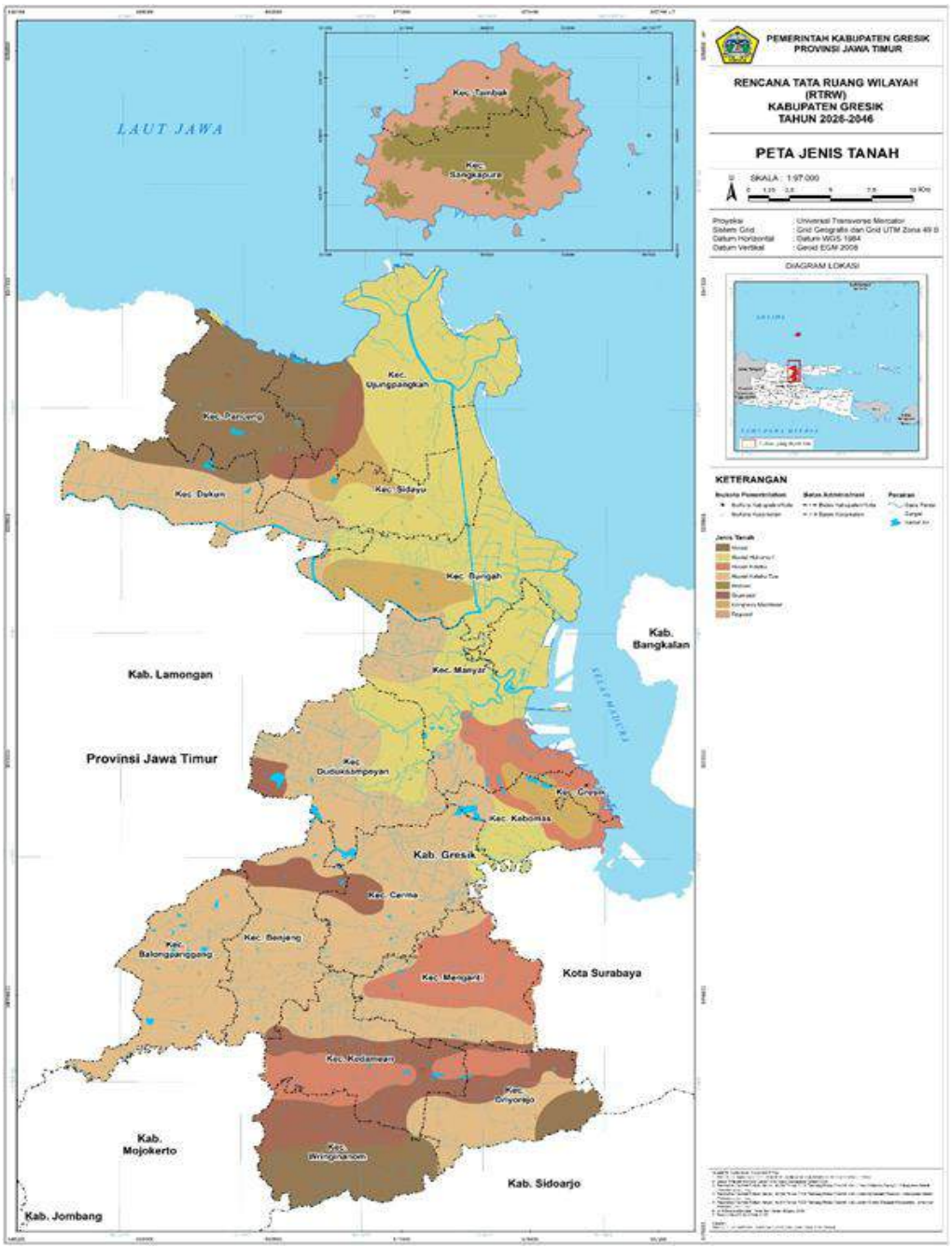

Gambar 1.5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Gresik

Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik, 2025

1.3.1.7 Hidrologi

Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai pemukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga

pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.

1.3.1.8 Penggunaan Lahan

Pada wilayah Kabupaten Gresik terdapat 19 penggunaan lahan yang beragam, penggunaan lahan berdasarkan peta dasar Kabupaten Gresik Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya luas penggunaan lahan pada Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6 Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan Tahun 2025

Rencana Pola Ruang	Persub 2023	Updating 2025
Badan Air	2.285,95	2.306,19
Kawasan Perlindungan Setempat	1.403,45	919,51
Cagar Alam	615,51	532,59
Suaka Margasatwa	3.918,88	4.023,79
Kawasan Ekosistem Mangrove	1.869,28	2.265,71
Kawasan Lindung	**10.093,07**	**10.047,78**
Badan Jalan	361,55	327,41
Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.032,77	1.032,84
Kawasan Tanaman Pangan	38.537,41	39.883,22
Kawasan Hortikultura	11.950,66	3.784,24
Kawasan Perkebunan		7.966,29
Kawasan Perikanan Tangkap		1,34
Kawasan Perikanan Budi Daya	19.824,00	20.341,13
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	82,91	112,53
Kawasan Peruntukan Industri	10.469,60	10.993,58
Kawasan Permukiman Perdesaan	17.514,18	14.928,53
Kawasan Permukiman Perkotaan	15.531,69	15.281,13
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	178,78	452,70
Kawasan Pariwisata	99,34	99,57
Kawasan Transportasi		787,54
Kawasan Budi Daya	**115.582,89**	**115.992,06**
Total	**125.675,96**	**126.039,84**

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik, Tahun 2025

1.3.1.9 Sumber Daya Alam dan Industri

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber Daya Alam (SDA) adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita (R. latifah et al., 2023). Potensi sumber daya alam dan perkembangan sektor industri di Kabupaten Gresik

merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Secara geografis, wilayah ini memiliki sumber daya pesisir dan kelautan yang berbatasan dengan Laut Jawa, potensi lahan pertanian dan tambak, serta ketersediaan bahan baku yang mendorong berkembangnya kegiatan produksi. Di sisi lain, struktur perekonomian daerah juga ditopang oleh sektor industri pengolahan yang berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap pembentukan nilai tambah regional. Dengan demikian, pengelolaan SDA yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam ini dapat digunakan secara efektif dan tidak merusak lingkungan hidup di masa depan.

A. Hortikultura

Produksi hortikultura di Kabupaten Gresik mencakup berbagai komoditas yang meliputi sayuran, buah-buahan, tanaman obat (biofarmaka), dan tanaman hias yang dihasilkan dari kegiatan budidaya masyarakat. Tingkat produksi dihitung berdasarkan luas panen dan jumlah tanaman produktif dalam periode waktu tertentu, baik bulanan maupun tahunan. Perkembangan produksi hortikultura mencerminkan dinamika pemanfaatan lahan, produktivitas tanaman, serta kondisi iklim dan pola tanam di daerah. Berikut merupakan tabel-tabel penjelasan produksi hortikultura di Kabupaten Gresik dari tahun 2022 hingga 2025.

Tabel 1.7 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman Tahun 2022-2025

Jenis Tanaman	Produksi tanaman sayuran dan Buah-Buahan Semusim (Kuintal)			
	2022	2023	2024	2025*
Sayuran				
Bawang Daun	-	-	-	-
Bawang Merah	1.056,00	1.796,80	543,00	1.265,00
Bawang Putih	-	-	-	-
Bayam	4.233,00	3.341,00	3.008,00	6.131,00
Buncis	-	-	-	-
Cabai Besar	49.240,00	28.797,00	33.991,00	23.660,00
Cabai Keriting	-	-	-	107,00
Cabai Rawit	208.456,00	119.260,50	206.238,50	221.008,50
Jamur Tiram	-	7,05	11,90	119,35
Jamur Merang	-	-	-	-
Jamur Lainnya	-	-	-	-
Kacang Panjang	565,00	2.963,00	394,00	798,50

Jenis Tanaman	Produksi tanaman sayuran dan Buah-Buahan Semusim (Kuintal)			
	2022	2023	2024	2025*
Kangkung	8.182,00	10.456,00	11.842,00	7.186,25
Kembang Kol	-	-	-	-
Kentang	-	-	-	-
Ketimun	-	-	940,00	1.514,00
Kubis	-	-	-	-
Labu Siam	-	-	-	-
Petsai	4.427,00	10.977,00	31.142,00	8.372,50
Terung	2.947,00	5.199,00	1.351,00	1.906,00
Tomat	2.179,00	4,336,00	1.715,00	2.581,00
Wortel	-	-	-	-
Buah - Buahan				
Melon	120,00	574,00	-	1.000,00
Semangka	204,00	1.223,00	199,00	995,00

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2026
**Angka Sementara*

Berdasarkan tabel produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim di Kabupaten Gresik tahun 2022–2025, kinerja produksi hortikultura menunjukkan dinamika antar komoditas dengan cabai rawit sebagai penyumbang produksi terbesar dan cenderung meningkat dari 208.456,00 kuintal pada tahun 2022 menjadi 221.008,50 kuintal pada tahun 2025, sementara cabai besar berfluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 49.240,00 kuintal menjadi 23.660,00 kuintal pada periode yang sama. Produksi bayam menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2025 mencapai 6.213,00 kuintal, sedangkan kangkung relatif stabil pada kisaran 7.186,25–11.842,00 kuintal. Komoditas petsai meningkat tajam hingga 31.142,00 kuintal pada tahun 2024 sebelum menurun pada tahun 2025, dan produksi terung serta tomat menunjukkan fluktuasi moderat. Pada kelompok buah-buahan semusim, produksi melon dan semangka meningkat pada tahun 2025 masing-masing sekitar 1.000,00 kuintal dan 995,00 kuintal. Secara umum, perkembangan tersebut mencerminkan variasi produktivitas yang dipengaruhi oleh pola tanam, luas panen, dan kondisi iklim, serta menunjukkan peran subsektor hortikultura dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah.

Tabel 1.8 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Jenis Tanaman	Produksi Tanaman Biofarmaka (kg)				
	2021	2022	2023	2024	2025*
Jahe	106.570	800.977	347	1.338	5.168

Jeruk Nipis	9.669.810	19.193.400	18.543.860	23.098.150	24.060.585
Kapulaga	-	-	-	-	-
Kencur	130	239	240	411	298
Kunyit	23.118.596	24.817.192	19.709.250	1.996.290	3.580.215
Laos	250	199	384	671	95
Lempuyang	1.200.000	650.000	-	-	-
Lidah Buaya	7	-	-	-	15
Mahkota Dewa	120	150	-	-	-
Mengkudu	830	1.100	578	85	20
Temuireng	5.184	3.682	4.855	2.710	190
Temukunci	2.139	2.582	165	429	40
Temulawak	11.946.05	9.389.172	4.526.231	530.353	930.170
Sambiloto	-	-	-	-	-
Serai	1.650	123.600	922.253	1.411.200	1.081.050

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2026
**Angka Sementara*

Berdasarkan data produksi tanaman biofarmaka di Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, secara umum menunjukkan dinamika produksi yang beragam antar komoditas. Komoditas jeruk nipis menjadi penyumbang produksi terbesar dengan tren meningkat dari 9.669.810 kg pada tahun 2021 menjadi 24.060.585 kg pada tahun 2025. Produksi kunyit menunjukkan fluktuasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 24.817.192 kg, kemudian menurun hingga 3.580.215 kg pada tahun 2025. Komoditas temulawak mengalami penurunan dari 11.946.050 kg pada tahun 2021 menjadi 930.170 kg pada tahun 2025, sementara serai menunjukkan tren peningkatan signifikan dari 1.650 kg pada tahun 2021 menjadi 1.081.050 kg pada tahun 2025. Produksi jahe juga meningkat dari 106.570 kg pada tahun 2021 menjadi 5.168 kg pada tahun 2025, sedangkan komoditas lain seperti kencur, laos, mengkudu, temuireng, dan temukunci cenderung berfluktuasi dengan volume relatif lebih kecil. Secara keseluruhan, perkembangan produksi biofarmaka mencerminkan potensi pengembangan tanaman obat sebagai bagian dari diversifikasi komoditas pertanian daerah yang mendukung ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Tabel 1.9 Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Jenis Tanaman	Produksi Tanaman Hias (Tangkai)				
	2021	2022	2023	2024	2025*
Aglonema	3.600	2.700	620	1.093	1.156
Anggrek Pot	-	1.890	1.725	43	-
AnggrekPotong	-	-	-	-	-

Anthurium Bunga	-	-	-	39	-
Bromelia	-	-	-	-	-
Bougenville	870	1.439	1.017	34	109
Cordyline	-	-	-	-	-
Dracaena	-	-	-	-	-
Gerbera	-	-	-	-	-
Heliconia	-	-	-	-	-
Ixora	-	-	-	-	-
Krisan	-	-	-	-	-
Mawar	-	-	-	-	-
Melati (Kg)	45.600	42.225	33.005	2.410	960
Pakis	-	-	-	-	-
Palem	1.020	1.020	90	15	106
Phylodendron	-	-	-	-	-
Puring	-	-	-	64	666
Sansevieria	-	-	-	82	2.598
Sedap Malam	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2026
**Angka Sementara*

Berdasarkan data produksi tanaman hias di Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, perkembangan produksi menunjukkan variasi capaian antar komoditas dengan kontribusi utama berasal dari beberapa jenis tanaman tertentu. Komoditas melati menjadi penyumbang produksi terbesar dengan kecenderungan menurun dari 45.600 tangkai pada tahun 2021 menjadi 960 tangkai pada tahun 2025. Produksi aglaonema mengalami fluktuasi dari 3.600 tangkai pada tahun 2021, menurun hingga 620 tangkai pada tahun 2023, kemudian meningkat kembali menjadi 1.156 tangkai pada tahun 2025. Bougenville juga menunjukkan dinamika produksi dengan capaian 870 tangkai pada tahun 2021, meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.439 tangkai, kemudian menurun dan tercatat 109 tangkai pada tahun 2025. Komoditas palem relatif stabil pada awal periode dengan produksi 1.020 tangkai pada tahun 2021–2022, kemudian menurun dan tercatat 106 tangkai pada tahun 2025. Sementara itu, komoditas lain seperti purin dan sansevieria menunjukkan peningkatan pada periode akhir pengamatan dengan produksi masing-masing 666 tangkai dan 2.598 tangkai pada tahun 2025. Secara umum, perkembangan produksi tanaman hias mencerminkan potensi subsektor hortikultura non pangan yang tetap berkembang meskipun menghadapi fluktuasi produksi pada beberapa komoditas.

Tabel 1.10 Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2025

Jenis Tanaman	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan(Kuintal)				
	2021	2022	2023	2024	2025*
Buah-Buahan					
Alpukat	1.253,00	1.272,00	2.072,00	1.047,65	2.277,20
Anggur	-	-	1,10	3,40	-
Apel	-	-	-	-	-
Belimbing	6.896,00	7.074,00	6.978,59	20.796,75	21.941,33
Buah Naga	4.765,00	4.688,00	3.054,85	1.908,00	2.243,25
Duku	-	-	-	-	-
Durian	7.053,00	6.405,00	1.644,00	3.518,00	3.367,00
Jambu Air	9.389,60	9.337,00	10.032,72	5.968,17	8.375,40
Jambu Biji	15.497,00	16.957,00	14.280,11	25.930,61	20.888,75
Jeruk Pamelo	177,00	172,00	50,00	96,50	160,00
Jeruk Lemon	1.661,00	1.735,00	191,60	198,90	151,30
Jeruk Siam	4.600,00	4.880,00	6.653,00	20.192,48	2.194,21
Lengkeng	2,00	37,00	376,70	566,00	337,70
Mangga	871.346,40	786.538,88	831.044,57	763.122,75	607.657,03
Manggis	621,00	580,00	900,00	95,78	128,00
Nanas	-	-	-	-	3,00
Nangka	17.192,00	17.853,00	9.501,60	13.977,28	15.970,79
Pepaya	20.091,30	26.752,00	68.299,22	47.517,42	67.052,50
Pisang	311.148,00	384.351,00	313.122,59	305.298,64	496.428,99
Rambutan	11.535,00	11.337,00	511,60	1.198,90	301,20
Salak	-	-	6,70	58,00	14,00
Sawo	9.872,00	9.956,00	11.369,55	45.098,06	19.523,14
Sirsak	5.651,00	6.032,00	3.371,70	2.533,58	2.876,90
Sukun	7.342,00	6.694,00	3.952,70	5.447,29	7.055,20
Sayuran					
Melinjo	-	-	-	-	-
Petai	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2026
**Angka Sementara*

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan produksi menunjukkan dinamika yang cukup beragam antar komoditas dengan kontribusi utama berasal dari beberapa jenis buah unggulan daerah. Komoditas pisang menjadi penyumbang produksi terbesar dengan tren meningkat dari 311.148,00 kuintal pada tahun 2021 menjadi 498.428,99 kuintal pada tahun 2025. Produksi pepaya menunjukkan peningkatan signifikan dari 20.091,30 kuintal pada tahun 2021 menjadi 67.052,50 kuintal pada tahun 2025,

meskipun sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2023. Komoditas jeruk siam juga mengalami peningkatan dari 4.500,00 kuintal pada tahun 2021 menjadi 2.104,21 kuintal pada tahun 2025 dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 20.192,48 kuintal. Produksi mangga relatif fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari 871.346,40 kuintal pada tahun 2021 menjadi 607.657,03 kuintal pada tahun 2025. Sementara itu, komoditas jambu biji dan belimbing menunjukkan peningkatan pada beberapa tahun pengamatan, dengan jambu biji mencapai 20.888,75 kuintal dan belimbing 21.941,33 kuintal pada tahun 2025. Komoditas lain seperti durian, jeruk lemon, jeruk pamelo, sawo, sirsak, dan sukun menunjukkan perkembangan produksi yang fluktuatif dengan kontribusi relatif lebih kecil. Secara umum, perkembangan produksi buah-buahan mencerminkan potensi subsektor hortikultura yang tetap berkembang dan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan serta penguatan ekonomi berbasis pertanian daerah.

B. Perkebunan

Produksi perkebunan mencakup berbagai hasil panen yang diperoleh dari beragam jenis tanaman, termasuk tanaman tahunan dan tanaman semusim. Tanaman tahunan seperti karet, kelapa, kopi, kakao, teh, jambu mete, pal, dan lada, merupakan contoh tanaman yang secara berkelanjutan dapat ditanam setiap tahun. Sedangkan tanaman semusim seperti tebu, tembakau, dan nilam biasanya ditanam dalam satu musim dan kemudian dipanen sebelum musim berikutnya.

Tabel 1.11 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Jenis Tanaman	Produksi Perkebunan Rakyat (Ton)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tanaman Tahunan					
Kelapa Sawit	-	-	-		
Kelapa	5.050,56	5.049,77	5.044,73	5 044,75	5.027,15
Karet	-	-	-		
Kopi	-	-	-		
Kakao	-	-	-		
Teh	-	-	-		

Cengkeh					
Jambu Mete	-	-	-		
Pala	-	-	-		
Sagu	-	-	-		
Tanaman Semusim					
Tebu	159.790,50	159.805,45	159.622,71	158.589,19	159.521,60
Tembakau	375,00	900,00	1.629,00	3.248,89	1.448,44

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Perkembangan produksi perkebunan rakyat di Kabupaten Gresik periode 2021–2025 menunjukkan bahwa komoditas kelapa dan tebu masih menjadi penopang utama subsektor perkebunan. Produksi kelapa relatif stabil dengan kecenderungan menurun tipis dari 5.050,56 ton pada tahun 2021 menjadi sekitar 5.027,15 ton pada tahun 2025. Sementara itu, produksi tebu tercatat sangat dominan dengan capaian di atas 158 ribu ton setiap tahun dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 158.589,19 menjadi 159.521,60 ton pada tahun 2025. Adapun komoditas tembakau menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, meningkat dari 375,00 ton pada tahun 2021 hingga mencapai puncak sekitar 3.248,9 ton pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 1.448,44 ton pada tahun 2025. Komoditas perkebunan lainnya belum menunjukkan produksi yang tercatat secara signifikan. Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja subsektor perkebunan rakyat masih bertumpu pada komoditas utama dengan dinamika produksi yang dipengaruhi oleh faktor iklim, luas areal tanam, serta produktivitas lahan.

C. Perikanan

Kabupaten Gresik memiliki potensi wilayah perikanan yang didukung oleh karakter geografis pesisir dan kepulauan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya kegiatan perikanan tangkap dan budidaya, dengan sistem budidaya yang didominasi tambak air payau serta tambak air tawar yang tersebar di sebagian besar wilayah pesisir. Ketersediaan kawasan tambak yang luas, dukungan ekosistem pesisir, serta aksesibilitas wilayah perairan menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Secara komparatif, capaian produksi perikanan budidaya daerah menempati posisi strategis di tingkat Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep. Kondisi geografis tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Gresik memiliki prospek yang berkelanjutan,

dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan, musim, serta pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan.

Tabel 1.12 Produksi Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024

Sub Sektor	Produksi Perikanan (Ton)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Penangkapan di Laut	10.869,30	10.861,90	12.482,00	12.751,40	17.001,60
Budidaya					
Tambak Payau	63.885,76	68.664,95	71.210,02	88.222,43	82.978,37
Tambak tawar	67.610,49	66.267,61	64.237,68	63.959,45	64.252,44
Perairan Umum	11.240,65	16.766,34	17.469,78	3.790,14	13.208,27
Jumlah	153.606,20	162.560,80	165.399,48	168.723,42	177.440,68

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas, Produksi perikanan di Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan fluktuasi pada beberapa subsektor. Secara keseluruhan, total produksi perikanan meningkat dari 153.606,20 ton pada tahun 2021 menjadi 177.440,68 ton pada tahun 2025. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kontribusi subsektor perikanan budidaya, khususnya budidaya tambak payau yang menjadi penyumbang produksi terbesar. Produksi tambak payau meningkat dari 63.885,76 ton pada tahun 2021 menjadi 82.978,37 ton pada tahun 2025, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 88.222,43 ton. Sementara itu, produksi tambak air tawar cenderung relatif stabil dengan sedikit penurunan dari 67.610,49 ton pada tahun 2021 menjadi 64.252,44 ton pada tahun 2025. Pada subsektor perairan umum, produksi mengalami fluktuasi cukup signifikan, yaitu dari 11.240,65 ton pada tahun 2021, meningkat hingga 17.469,78 ton pada tahun 2023, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 3.790,14 ton, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 13.208,27 ton. Adapun pada subsektor penangkapan di laut, produksi menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, dari 12.751,40 ton pada tahun 2024 menjadi 17.001,60 ton pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perikanan di Kabupaten Gresik masih memiliki

potensi yang besar untuk terus dikembangkan, baik melalui optimalisasi kegiatan penangkapan di laut maupun peningkatan produktivitas budidaya perikanan.

D. Peternakan

Peternakan di Kabupaten Gresik didominasi oleh ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Contoh ternak besar seperti sapi dan kerbau digunakan untuk produksi susu dan daging, sementara ternak kecil seperti kambing dan domba digunakan untuk produksi daging dan wol. Kemudian, ternak unggas seperti ayam dan itik digunakan untuk produksi telur dan daging. Dengan demikian, peternakan di Kabupaten Gresik memiliki beragam jenis ternak yang berkontribusi pada keberlanjutan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik.

Tabel 1.13 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Jenis Ternak	Populasi				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sapi Potong	59.259	57.347	54.352	24.853	24.681
Sapi Perah	499	375	299	260	254
Kerbau	234	198	63	57	67
Kuda	239	195	149	149	127
Kambing	79.059	80.100	75.746	61.174	62.209
Kambing Perah	-	-	-	-	580
Domba	37.899	39.900	42.135	23.129	24.514

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Tabel 1.14 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Jenis Unggas		Populasi			
	2021	2022	2023	2024	2025
Ayam Ras Petelur	260.140	266.005	266.938	344.993	344.900
Ayam Buras	759.629	733.050	768.020	203.528	202.700
Ayam Ras Pedaging	24.612.357	24.256.355	24.438.606	24.314.449	23.076.024
Itik Pedaging	31.890	31.906	32.322	76.851	71.650
Itik Petelur	-	-	-	-	12.100

Jenis Unggas		Populasi			
	2021	2022	2023	2024	2025
Entok	32.081	32.097	32.210	10.332	10.500
Burung Puyuh	10.330	10.478	10.050	30.679	36.300
Burung Dara	16.362	16.362	16.062	5.627	5.685

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Berdasarkan perkembangan populasi peternakan di Kabupaten Gresik periode 2021–2025, subsektor peternakan menunjukkan dinamika pada kelompok ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Pada kelompok ternak besar, populasi sapi potong mengalami penurunan signifikan dari 59.259 ekor pada tahun 2021 menjadi 24.681 ekor pada tahun 2025. Penurunan juga terjadi pada sapi perah dari 499 ekor menjadi 254 ekor, kerbau dari 234 ekor menjadi 67 ekor, serta kuda dari 239 ekor menjadi 127 ekor. Pada kelompok ternak kecil, kambing masih mendominasi dengan populasi 79.059 ekor pada tahun 2021 dan 62.209 ekor pada tahun 2025, sementara domba berfluktuasi dari 37.899 ekor pada tahun 2021 menjadi 24.514 ekor pada tahun 2025. Pada tahun 2025 mulai tercatat populasi kambing perah sebesar 580 ekor. Sementara itu, pada kelompok unggas, populasi ayam ras pedaging tetap mendominasi meskipun menurun dari 24.612.357 ekor pada tahun 2021 menjadi 23.076.024 ekor pada tahun 2025. Populasi ayam ras petelur meningkat dari 260.140 ekor menjadi 344.900 ekor, sedangkan ayam buras menurun dari 759.629 ekor menjadi 202.700 ekor. Jenis unggas lainnya seperti itik pedaging meningkat dari 31.890 ekor menjadi 71.650 ekor, burung puyuh dari 10.330 ekor menjadi 36.300 ekor, dan pada tahun 2025 mulai tercatat itik petelur sebesar 12.100 ekor, sementara entok dan burung dara cenderung menurun.

E. Pariwisata

Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik daerah pesisir, kepulauan, serta hinterland kawasan metropolitan Gerbangkertosusila. Secara geografis, Gresik terdiri atas wilayah daratan utama dan wilayah kepulauan Bawean yang memberikan keunggulan komparatif dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis bahari, religi, budaya, dan ekowisata.

Struktur potensi pariwisata Kabupaten Gresik ditopang oleh empat pilar utama, yaitu:

1. Pariwisata Religi

   Gresik dikenal sebagai Kota Wali dengan keberadaan makam Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim yang menjadi destinasi ziarah nasional. Pariwisata religi menjadi sektor unggulan dengan kontribusi signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan domestik, khususnya pada momentum hari besar keagamaan dan tradisi haul.

2. Pariwisata Bahari dan Kepulauan

   Wilayah Pulau Bawean memiliki daya tarik berupa pantai berpasir putih, ekosistem laut, serta Danau Kastoba sebagai wisata alam unggulan. Potensi ini didukung oleh kekayaan biodiversitas, termasuk rusa Bawean (Axis kuhlii) sebagai satwa endemik yang memperkuat identitas ekowisata daerah.

3. Pariwisata Budaya dan Sejarah

   Kabupaten Gresik memiliki warisan sejarah Islam dan perdagangan maritim yang kuat, tercermin dalam situs cagar budaya, kampung heritage, tradisi lokal, serta event budaya tahunan. Hal ini menjadi modal sosial dan budaya dalam pengembangan destinasi berbasis kearifan lokal.

4. Pariwisata Buatan dan Ekonomi Kreatif

   Seiring perkembangan kawasan industri dan pertumbuhan ekonomi, Gresik juga mengembangkan wisata buatan, ruang terbuka publik, serta sentra UMKM dan ekonomi kreatif sebagai daya tarik alternatif bagi wisatawan regional.

Dari sisi aksesibilitas, Kabupaten Gresik didukung oleh jaringan jalan nasional dan provinsi yang terintegrasi dengan Kota Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak, serta infrastruktur penyeberangan menuju Pulau Bawean. Posisi strategis ini memberikan kemudahan konektivitas wisatawan domestik maupun mancanegara.

Namun demikian, pengembangan sektor pariwisata masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain: optimalisasi amenitas dan fasilitas pendukung destinasi, penguatan kapasitas SDM pariwisata, integrasi promosi digital, serta peningkatan kualitas infrastruktur kawasan wisata kepulauan. Selain itu, diperlukan penguatan kolaborasi pentahelix (pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, dan media) guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata daerah.

Tabel 1.15 Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Domestik Di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2025

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mancanegara	Orang	4.986	4.986	12.599	18.281	361	1.284
Domestik	Orang	2.070.567	2.002.078	4.120.683	4.280.847	4.513.723	4.828.786
Jumlah	Orang	2.075.553	2.007.064	4.133.282	4.299.128	4.514.084	4.830.070

Sumber : Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gresik

Berdasarkan data capaian indikator jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Gresik Tahun 2020–2025, terdapat dinamika perkembangan yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal, khususnya pemulihan pasca pandemi serta pergerakan wisata domestik dan mancanegara.

Pada periode 2020–2021, kunjungan relatif stagnan pada angka 4.986 orang sebagai dampak pembatasan mobilitas global. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan pemulihan sektor pariwisata, dengan puncak capaian sebesar 18.281 orang pada tahun 2023.

Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan tajam menjadi 361 orang, sebelum kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 1.284 orang. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara masih sangat sensitif terhadap faktor eksternal, konektivitas, serta promosi pasar internasional.

Pada tahun 2021 terjadi penurunan dibanding 2020, namun mulai tahun 2022 menunjukkan peningkatan signifikan hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Tren positif berlanjut hingga tahun 2025 dengan capaian tertinggi sebesar 4.828.786 orang.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Gresik ditopang kuat oleh pasar domestik yang relatif stabil dan terus bertumbuh.

Total kunjungan mengalami kontraksi pada tahun 2021, kemudian pulih signifikan pada tahun 2022 dan terus menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2025. Secara kumulatif, terjadi pertumbuhan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir, dengan capaian tertinggi pada tahun 2025 sebesar 4.830.070 orang.

Tabel 1.16 Destinasi Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2025

No.	Destinasi Wisata	No.	Destinasi Wisata
1	Air Panas Kepuh	42	Makam Sunan Prapen
2	Air Panas Sawah Mulya	43	Museum Sunan Giri
3	Air Panas Sungai Rujing	44	Wisata Alam Gosari (Wagos)
4	Air Terjun Kuduk-Kuduk	45	Pantai Dalegan
5	Air Terjun Laccar	46	Putri Cempo
6	Danau Kastoba	47	Kolam Renang Malindo
7	Kuburan Panjang	48	Dynasti Water World
8	Makam Cokrokusumo	49	Makam Siti Fatimah Binti Maimun
9	Makam Jujuk Campa	50	Mangrove Kalimireng
10	Makam Jujuk Tampo	51	Wisata Goa Lowo
11	Makam Pangeran Purbonegoro	52	Edu Wisata Lontar Sewu
12	Makam Waliyah Zainab	53	Wisata Telaga Pelem Watu
13	Mangrove Hijau Daun	54	Bukit Surowiti
14	Mayang Kara Kepuh	55	Doudo Eduwisata
15	Pantai Kerrong Mombhul	56	Wisata Kebun Pak Inggih
16	Pantai Labuhan	57	Kolam Renang Bajak Laut
17	Pantai Ria	58	Kolam Renang Raya Dewi Cerme
18	Pantai Terusan	59	Pesanggrahan
19	Pasir Putih Sukoneng	60	Makam Kanjeng Sepuh Sidayu
20	Penangkaran Rusa	61	Petilasan Sunan Kalijaga
21	Pulau Cina	62	Water Boom Sambipondok
22	Pulau Gili	63	Banyu Urip Mangrove Center
23	Pulau Gili Barat	64	Muara Bengawan Solo
24	Pulau Noko	65	Wisata Jati Sewu
25	Pulau Noko Gili	66	Kolam Renang Ocean Kids
26	Pulau Selayar	67	Wisata Desa Pandanan
27	Tanjung Geen	68	Wisata Gunung Pundut (Wgp)
28	Pusat Restorasi Dan Pembelajaran Mangrove Mengare	69	Wisata Selo Tirto Giri
29	Telaga Sharma Desa Kemangi	70	Wisata Desa Mojotengah
30	Lasem	71	Kampung Kreasi Sidokumpul
31	Wisata Banyu Biru Lowayu	72	Kampung Markisa
32	Kampung Kemasan	73	Kampung Siba
33	Kampung Kreasi	74	Taman Keluarga Siwalan (Takesi) Desa Siwalan

No.	Destinasi Wisata	No.	Destinasi Wisata
34	Makam Malik Ibrahim	75	Kolam Renang Desa Baron
35	Makam Nyai Ageng Pinatih	76	Wisata Desa Mentaras
36	Makam Pusponegoro	77	Klenteng Kim Hin Kiong
37	Makam Raden Santri	78	Gresik Universal Science (Gus)
38	Pepustakaan Daerah	79	Wisata Desa Suci Kec. Manyar
39	Giri Kedaton	80	Wisata Desa Wotansari Kec. Balongpanggang
40	Makam Dewi Sekardadu	81	Wisata Kuliner Desa Betoyoguci Kec. Manyar
41	Makam Sunan Giri		

Sumber : Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gresik

Secara umum, sektor pariwisata Kabupaten Gresik memiliki potensi yang besar dan beragam dengan karakter religius-maritim yang khas. Dengan perencanaan yang terarah, penguatan tata kelola destinasi, serta integrasi dengan sektor ekonomi kreatif dan UMKM, pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan identitas daerah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

F. Industri

Kabupaten Gresik merupakan salah satu pusat pertumbuhan industri strategis di Provinsi Jawa Timur yang memiliki peran signifikan dalam struktur perekonomian regional maupun nasional. Secara geografis, Gresik berada dalam kawasan metropolitan Gerbangkertosusila dan berbatasan langsung dengan Kota Surabaya, sehingga memiliki keunggulan lokasi (locational advantage) dalam pengembangan sektor industri berbasis konektivitas darat dan laut.

Struktur perekonomian Kabupaten Gresik didominasi oleh sektor industri pengolahan yang secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Industri di Kabupaten Gresik berkembang dalam skala besar, menengah, dan kecil dengan karakteristik utama pada industri semen, petrokimia, pupuk, kimia dasar, logam, makanan dan minuman, serta industri pengolahan hasil perikanan dan pertanian. Keberadaan industri strategis nasional memperkuat posisi Gresik sebagai salah satu simpul industri utama di Jawa Timur.

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gresik terpusat pada beberapa kawasan yang telah memiliki infrastruktur relatif memadai,

termasuk akses jalan arteri dan tol, jaringan energi dan utilitas, serta kedekatan dengan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan pelabuhan penunjang lainnya. Dukungan infrastruktur tersebut menjadi faktor pendorong investasi serta meningkatkan efisiensi distribusi bahan baku dan hasil produksi.

Selain industri besar, Pemerintah Kabupaten Gresik juga mendorong penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai bagian dari strategi pemerataan ekonomi. IKM berkembang pada subsektor makanan olahan, kerajinan, konveksi, dan produk berbasis sumber daya lokal. Penguatan IKM diarahkan melalui fasilitasi perizinan, peningkatan kapasitas produksi, sertifikasi produk, kemitraan usaha, serta transformasi digital dalam pemasaran.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor industri merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Gresik, baik tenaga kerja lokal maupun dari wilayah sekitar. Hal ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan kawasan penunjang industri, termasuk sektor perdagangan, jasa, dan perumahan.

Namun demikian, dinamika sektor industri juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: kebutuhan peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, penguatan rantai pasok lokal, penerapan prinsip industri hijau dan berkelanjutan, pengendalian dampak lingkungan, serta adaptasi terhadap transformasi industri 4.0. Di samping itu, diperlukan peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara umum, sektor industri Kabupaten Gresik memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah. Dengan dukungan kebijakan yang terarah, peningkatan daya saing, serta penguatan tata kelola industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sektor ini diharapkan tetap menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik.

Tabel 1.17 Daftar Industri di Kawasan Industri Maspion.

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1	PT. Air Product Indonesia	22	PT. Liwayway
2	PT. Arsynergy Resources	23	PT. Manunggal Timur Property
3	PT. Arsynergy Nix Indonesia	24	PT. Maspion Energy Mitratama
4	PT. Aspal Multi Sarana	25	PT. Maspion Industrial Estate
5	PT. Batara Elok Semesta Terpadu	26	MKO. Maspion Terminal Kendaraan Indonesia

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
6	PT. Blueshark Indonesia	27	PT. Parna Maspion Sejahtra
7	PT. Cargill Indonesia	28	Petronas Carigali (PCK2L)
8	PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk.	29	Saka Indonesia Pangkah Ltd.
9	PT. Cemerlang Plastindo Sejahtera	30	PT. Sentana Adidaya Pratama
10	PT. Cemindo Gemilang	31	PT. Sentosa Jaya Properti
11	PT. Cheil Jedang Indonesia	32	PT. Shell Indonesia
12	PT. Continental Cargo Carrier	33	PT. Siam Maspion Terminal
13	PT. Dovechem Maspion Terminal	34	PT. Soyo Apik
14	PT. EcoOils Jaya Indonesia	35	PT. The Master Steel Mfg.
15	PT. Hanampi Sejahtera Kahuripan	36	PT. Tira Austenite
16	PT. Indal Reiwa Auto	37	PT. TPC Indo Plastic & Chemicals
17	PT. Indal Steel Pipe	38	PT. Warna Cemerlang Industri
18	PT. Inti Sumber Baja Sakti	39	CV. Dura Mortar
19	PT. Jebe Koko	40	CV. Multi Karya
20	PT. Jindal Stainless Indonesia	41	CV.Tirta Bahagia
21	PT. Knauf Gypsum Industry		

Sumber : KIM, Tahun 2025

Tabel 1.18 Daftar Industri di Kawasan Industri Gresik (KIG)

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1	PT. PETROKIMIA GRESIK	19	PT Bumi Mandiri Resource
2	PT. KELOLA MINA LAUTs	20	PT Mitra Nasional Kualitas (Minaku)
3	PT. BUMIMULIA INDAH LESTARI	21	PT Krakatau Wiremesh Surabaya
4	PT. PETROKIMIA KAYAKU	22	PT Colorpak Indonesia Tbk
5	PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA	23	PT Primergy Solution
6	PT. SUMBER BERSIH DUNIA	24	PT Sarana Karya Utama
7	PT. ANEKA JASA GRHADIKA	25	PT Ispat Panca Putera
8	PT. FOKUS JASA MITRA	26	PT Madsumaya Indo Seafood
9	PT. BUMI PERSADA KARYA	27	PT Kimika Usaha Prima
10	Eterindo Nusa Graha (ENG) Kawasan Industri Gresik	28	PT Petro Bumi Hijau
11	PT. Petro Jordan Abadi	29	Sika Indonesia
12	PT Petrowidada	30	PT DSI
13	PT Anugerah Inti Germanusa	31	Komotech
14	PT Ranteindo Teknik Mandiri	32	PT Wiharta Karya Agung
15	PT. Fruit ING Indonesia Kawasan Industri Gresik	33	PT Rollent Indonesia
16	PT Gotrans Logistics	34	PT Samator Gas Industri
17	PT Harvestar Flour Mills	35	PT Buana Tirta Utama
18	PT. Blue Gas Indonesia		

Sumber : KIG, Tahun 2024

Tabel 1.19 Daftar Industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik/Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE)

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1	PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	9	PT. Xinyi Solar Indonesia
2	PT. Fertilizer Inti Technology	10	PT. Berkah Buana Energi
3	PT. Adhimix PCI Indonesia	11	PT. Asih Eka Abadi
4	PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk.	12	PT. Xinkai Solar Indonesia
5	PT. Xinyi Glass Indonesia	13	PT. Unichem Candi Indonesia
6	PT. Hailiang Nova Material Indonesia	14	PT. Clariant Adsorbents Indonesia
7	PT. Berlian Manyar Sejahtera	15	PT. Waskita Beton Precast
8	PT. Anugerah Kreasi Pratama Indonesia		

Sumber : Administrator KEK, Tahun 2025

G. Pertambangan

Tabel 1.20 Jenis Galian Kabupaten Gresik Berdasarkan Luas Usaha Penambangan dan Produksi

No.	Galian	Luas Usaha Penambangan (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	Batu Gamping	124,35	2.400.000
2	Dolomit	36,13	528.960
3	Tanah Urug	26,54	270.000
4	Fosfat	4,13	39.600
5	Batu Gamping	8,50	54.720
6	Dolomit	309,13	6.000.000
7	Batu Gamping	2,60	95.625
8	Batu Gamping	5,00	112.500
9	Sirtu	6,94	432.000
10	Sirtu	22,82	72.000
11	Andesit	7,63	102.000
12	Batu Gamping	4,13	10.560

Sumber: ESDM Prov Jatim, Tahun 2022

Luas Area dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Gresik, seperti yang tercantum dalam Tabel 2.28, memberikan gambaran rinci mengenai sektor pertambangan. Berdasarkan data tersebut, jenis bahan galian yang paling banyak ditambang adalah dolomit, dengan luas usaha penambangan mencapai 309,13 hektar dan produksi mencapai 6 juta ton per tahun. Ini menunjukkan bahwa dolomit menjadi salah satu komoditas utama dalam sektor pertambangan di Kabupaten Gresik.

Selain dolomit, batu gamping juga menjadi bahan galian yang cukup signifikan, dengan beberapa lokasi penambangan yang tersebar di wilayah ini. Produksi batu gamping di Kabupaten Gresik bervariasi, mulai dari

2.400.000 ton per tahun hingga 112.500 ton per tahun, tergantung pada lokasi dan ukuran usaha penambangannya. Sementara itu, jenis bahan galian lain seperti tanah urug, fosfat, sirtu, dan andesit juga memiliki kontribusi penting terhadap sektor pertambangan di Kabupaten Gresik, meskipun dengan luas usaha dan produksi yang lebih kecil dibandingkan dengan dolomit dan batu gamping.

1.3.2 DATA DEMOGRAFIS

1.3.2.1 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2025 sebanyak 1.343.465 jiwa yang terdiri dari 675.387 laki-laki dan 668.078 perempuan, Sedangkan angka rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2025 sebesar 1:1 Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	KECAMATAN	JML DESA/ KEL	PENDUDUKAN AKHIR BULAN INI		
			L	P	L+P
1	DUKUN	26	33.580	33.009	66.589
2	BALONGPANGGANG	25	28.087	28.414	56.501
3	PANCENG	14	27.119	27.049	54.168
4	BENJENG	23	33.649	33.342	66.991
5	DUDUKSAMPEYAN	23	24.854	24.978	49.832
6	WRINGINANOM	16	37.564	37.006	74.570
7	UJUNGPANGKAH	13	26.731	26.190	52.921
8	KEDAMEAN	15	32.846	32.121	64.967
9	SIDAYU	21	22.665	22.418	45.083
10	MANYAR	23	62.891	61.861	124.752
11	CERME	25	42.870	42.075	84.945
12	BUNGAH	22	35.514	34.696	70.210
13	MENGANTI	22	69.257	68.028	137.285
14	KEBOMAS	21	58.466	58.371	116.837
15	DRIYOREJO	16	55.959	55.081	111.040
16	GRESIK	21	39.687	40.323	80.010
17	SANGKAPURA	17	27.959	27.385	55.344
18	TAMBAK	13	15.689	15.731	31.420
	JUMLAH	356	675.387	668.078	1.343.465

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 40-44 tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 7,99% kemudian kelompok umur 20 – 24 tahun mecapai 7,84% dan

selanjutnya kelompok umur 45–49 tahun mencapai 7,76%. Adapun rincian kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.22 Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1	0 - 4 Th	41.706	39.541	81.247
2	5 - 9 Th	52.399	48.757	101.156
3	10 - 14 Th	53.409	50.326	103.735
4	15 - 19 Th	53.324	49.628	102.952
5	20 - 24 Th	54.031	51.326	105.357
6	25 - 29 Th	52.829	51.168	103.997
7	30 - 34 Th	49.819	49.171	98.990
8	35 - 39 Th	45.745	45.161	90.906
9	40 - 44 Th	53.382	53.909	107.291
10	45 -49 Th	52.123	52.100	104.223
11	50 - 54 Th	47.779	48.086	95.865
12	55 - 59 Th	39.730	40.776	80.506
13	60 - 64 Th	30.850	32.472	63.322
14	65 - 69 Th	22.853	25.048	47.901
15	70 - 74 Th	14.184	13.933	28.117
16	>75 Th	11.224	16.676	27.900
	JUMLAH	**675.387**	**668.078**	**1.343.465**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025

1.3.2.2 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2025 mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 1.19% dibandingkan pada tahun 2024. Jumlah penduduk pada Tahun 2025 sebanyak 1.343.465 Jiwa naik 15.968 jiwa dibandingkan tahun 2024 sebanyak 1.327.497 jiwa. Berikut Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Kecamatan:

Tabel 1.23 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021, 2022, 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JML DESA\ KEL	2021	2022	2023	2024	2025
1	DUKUN	26	67.483	65.618	65.628	66.086	66.589
2	BALONGPANGGANG	25	58.166	56.340	56.397	56.862	56.501
3	PANCENG	14	53.305	52.340	52.831	53.606	54.168
4	BENJENG	23	67.102	65.424	65.904	66.608	66.991
5	DUDUKSAMPEYAN	23	50.748	49.407	49.597	49.736	49.832
6	WRINGINANOM	16	74.178	72.308	73.047	74.154	74.570
7	UJUNGPANGKAH	13	52.771	51.720	51.808	52.359	52.921
8	KEDAMEAN	15	64.984	63.138	63.709	64.213	64.967
9	SIDAYU	21	44.241	43.594	43.835	44.542	45.083

10	MANYAR	23	117.967	117.475	119.730	122.645	124.752
11	CERME	25	82.034	81.093	82.048	83.903	84.945
12	BUNGAH	22	69.280	67.983	68.598	69.581	70.210
13	MENGANTI	22	127.882	126.806	129.230	133.875	137.285
14	KEBOMAS	21	111.779	111.531	112.665	115.078	116.837
15	DRIYOREJO	16	104.820	103.718	105.501	108.924	111.040
16	GRESIK	21	81.494	80.136	79.457	80.005	80.010
17	SANGKAPURA	17	55.190	52.732	53.663	54.311	55.344
18	TAMBAK	13	31.471	30.155	30.555	31.009	31.420
	JUMLAH	**356**	**1.314.895**	**1.291.518**	**1.304.203**	**1.327.497**	1.343.465

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025

1.3.3 DATA KEPEGAWAIAN

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta dapat melayani masyarakat Kabupaten Gresik. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggerakkan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sebanyak 9.474 orang, terdiri dari PNS sebanyak 6.356 orang dan PPPK sebanyak 3.118 orang. Berdasarkan jumlah tersebut berikut uraian kondisi yang lebih rinci PNS Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan jenis kelamin, usia, golongan dan tingkat pendidikan.

1.3.3.1 Pegawai Kabupaten Gresik menurut jenis kelamin

Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender menunjukkan angka yang cukup proporsional dan berimbang. Pada tahun 2025, dari 9.474 ASN, sebanyak 36.57% berjenis kelamin laki-laki dan 63.43% berjenis kelamin perempuan. Secara lebih rinci kondisi tersebut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.24 ASN Kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	DINAS PENDIDIKAN	1537	3171	4708
2	DINAS KESEHATAN	552	1821	2373
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	71	40	111
4	DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	54	51	105
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	136	23	159
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	19	19	38
7	DINAS SOSIAL	12	16	28

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
8	DINAS TENAGA KERJA	23	21	44
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	59	15	73
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	65	36	101
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	29	31	60
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	17	37
13	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	30	37
14	DINAS PERHUBUNGAN	76	21	97
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24	27	51
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	43	23	66
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	35	32	66
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	18	23	41
19	DINAS PERIKANAN	21	23	44
20	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	26	24	50
21	DINAS PERTANIAN	62	69	131
22	INSPEKTORAT	34	34	68
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15	33	48
24	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	69	59	128
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25	35	60
26	SEKRETARIAT DAERAH	82	104	186
27	SEKRETARIAT DPRD	27	20	47
28	KECAMATAN GRESIK	46	40	86
29	KECAMATAN KEBOMAS	34	25	59
30	KECAMATAN MANYAR	16	6	22
31	KECAMATAN CERME	13	8	21
32	KECAMATAN BENJENG	16	8	24
33	KECAMATAN BALONGPANGGANG	16	8	24
34	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	16	7	23
35	KECAMATAN DRIYOREJO	17	4	21
36	KECAMATAN WRINGINANOM	11	9	20
37	KECAMATAN KEDAMEAN	12	10	22

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
38	KECAMATAN MENGANTI	15	8	23
39	KECAMATAN SIDAYU	12	9	21
40	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	9	7	16
41	KECAMATAN PANCENG	17	6	23
42	KECAMATAN BUNGAH	9	7	16
43	KECAMATAN DUKUN	17	9	26
44	KECAMATAN SANGKAPURA	14	5	19
45	KECAMATAN TAMBAK	15	3	18
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19	12	31
JUMLAH		**3465**	**6009**	**9474**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengadopsi konsep kesetaraan gender dalam karir dan jabatan selain mempertimbangkan aspek yang utama yaitu kompetensi, disiplin, integritas dan pendidikan melalui penerapan manajemen talenta. Keseimbangan proporsi PNS laki-laki dan perempuan untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam jajaran birokrasi di Pemerintah Kabupaten Gresik, terutama dilihat dari aspek kualitas dalam kaitannya dengan kedudukan PNS perempuan sebagai pemimpin di perangkat daerah. Namun sejalan dengan pelaksanaan Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, sejumlah PNS pada jabatan eselon IV mengalami perpindahan jabatan ke fungsional. Jumlah PNS perempuan pada Pemerintah Kabupaten Gresik yang menduduki jabatan Eselon II sampai dengan Eselon IV masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan PNS laki-laki.

1.3.3.2 Pegawai Kabupaten Gresik Menurut Golongan

Distribusi pegawai antargolongan secara proporsional dapat menunjang peningkatan profesionalisme PNS. Gambar 1.6 menunjukkan komposisi ASN Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan golongan.

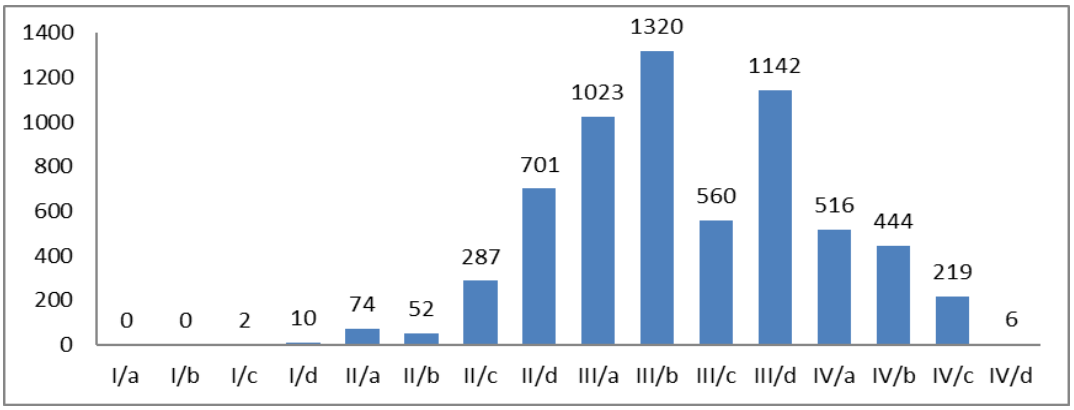

Gambar 1.6 PNS Kabupaten Gresik Berdasarkan Golongan Tahun 2025

Sumber: BKPSDM Kabupaten Gresik

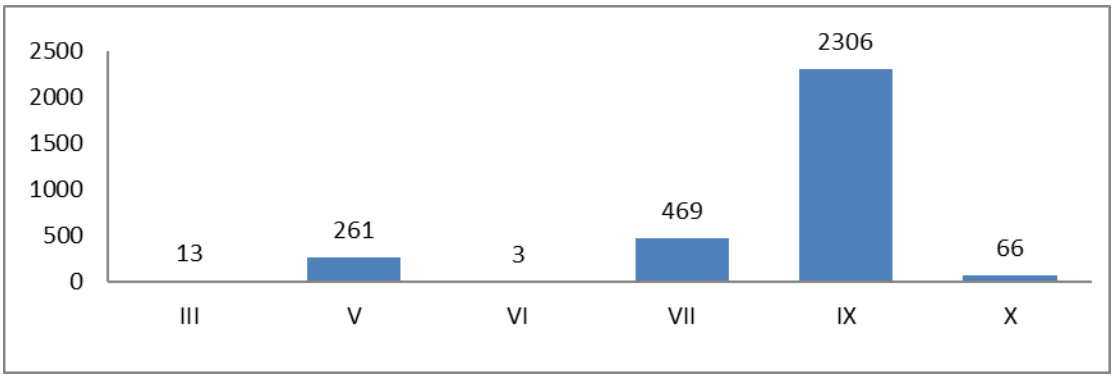

Gambar 1.7 PPPK Kabupaten Gresik Berdasarkan Golongan Tahun 2025

Sumber: BKPSDM Kabupaten Gresik

Berdasarkan Gambar 1.6, diketahui bahwa komposisi PNS Pemerintah Kabupaten Gresik sebagian besar merupakan pegawai golongan III/b dengan jumlah 1.320 orang (20,77%), diikuti dengan golongan III/d dengan jumlah 1.142 orang (17,97%), golongan III/a sebanyak 1.023 (16,10%). Dapat diketahui pegawai golongan III memiliki jumlah terbanyak yaitu sebesar 4.045 pegawai. Sedangkan 3.118 merupakan Pegawai PPPK dengan 6 Golongan. Golongan IX menempati pegawai PPPK tertinggi dengan jumlah 2.306.

1.3.3.3 Pegawai Kabupaten Gresik Menurut Tingkat Pendidikan

Secara umum kondisi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai apabila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir. Kondisi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik menurut tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagaimana gambar 1.8.

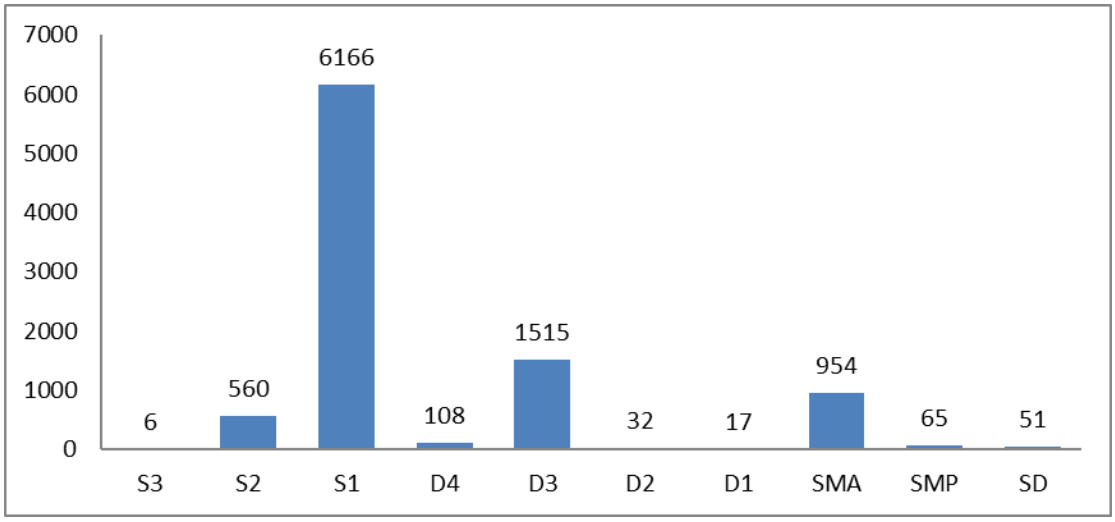

Gambar **1.8** PNS Kabupaten Gresik Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Sumber : BKPSDM Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 1.8, dapat dijelaskan bahwa Mayoritas pegawai memiliki pendidikan tinggi (S1, S2, dan S3), dengan jumlah pegawai S1 yang paling dominan diikuti oleh pegawai dengan pendidikan D3. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawaI Kabupaten Gresik memiliki kualifikasi pendidikan yang relatif tinggi. Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA/SMK mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat mencerminkan kebijakan rekrutmen yang lebih fokus pada lulusan perguruan tinggi. Jumlah terbesar berikutnya adalah pegawai dengan pendidikan S2 yang mencapai 560 pegawai, bahkan terdapat 6 pegawai dengan Pendidikan S3 Meskipun jumlahnya kecil, kehadiran mereka dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kapabilitas dan inovasi di organisasi.

1.3.3.4 Pegawai Kabupaten Gresik Menurut Usia

ASN Pemerintah Kabupaten Gresik yang berjumlah 9.474 orang terdistribusi di 46 Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Jumlah tersebut didominasi oleh ASN usia 41-45 tahun dengan jumlah sebanyak 1.694 pegawai. Adapun jumlah ASN berusia 36 – 40 tahun sebanyak 1.377 pegawai. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kompetensi ASN di setiap kelompok usia ASN. ASN diharapkan dapat memiliki kualitas diri yang lebih inovatif, kreatif dan visioner dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong birokrasi yang ada menjadi birokrasi yang lebih responsif dan adaptif (agile).Secara rinci data ASN Kabupaten Gresik berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar berikut:

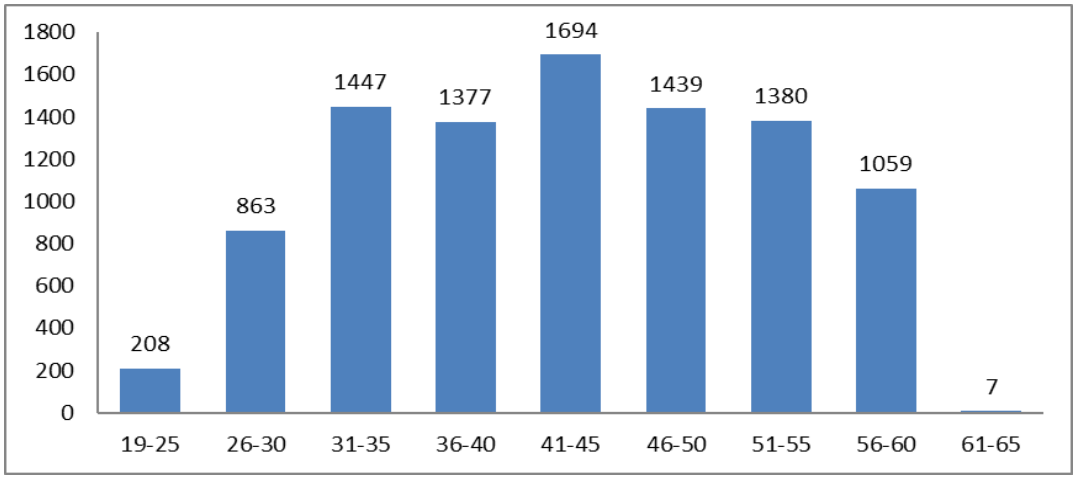

Gambar 1.9 PNS Kabupaten Gresik Berdasarkan Usia Tahun 2025

Sumber: BKPSDM Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 1.9, Dari total PNS tersebut, kelompok usia 41-45 tahun mendominasi jumlah ASN berdasarkan usia dengan jumlah 1.694 orang, diikuti kelompok usia 31-35 tahun dengan jumlah 1.447 orang. Pada kelompok usia 56-60 tahun meski jumlahnya tidak sebesar kelompok usia 41 – 50 tahun, namun harus menjadi perhatian karena jumlahnya mencapai 1.059 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok pegawai tersebut akan pensiun dalam kurun waktu 1-4 tahun mendatang. Sebagai upaya antisipasi, Pemerintah Kabupaten Gresik harus sudah siap dengan upaya perekrutan pegawai baru, baik itu yang berasal dari jalur rekrutmen CPNS maupun melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna memenuhi kebutuhan organisasi.

1.3.4 KONDISI EKONOMI

Kondisi ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2027 dapat dicerminkan melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi. PDRB menunjukkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Peningkatan nilai PDRB menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di daerah tersebut mengalami pertumbuhan. Kabupaten Gresik memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa. Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil sekitar 4–5 persen per tahun, PDRB Gresik diperkirakan terus meningkat hingga tahun 2027, yang menandakan perkembangan aktivitas produksi dan investasi.

1.3.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang diperoleh dari hasil penghitungan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB). Dimana PDRB dapat dihitung dengan pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi pada suatu wilayah. Sedangkan nilai tambah diperoleh dari output dari seluruh produksi barang dan jasa di wilayah tersebut yang dikurangi dengan nilai biaya antara pada masing- masing kegiatan ekonomi menurut lapangan usahanya.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) bertujuan untuk melihat perkembangan ekonomi secara riil, dimana kenaikan atau pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga (inflasi/deflasi). Oleh karena itu dari hasil penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) diperoleh indikator Pertumbuhan Ekonomi. Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Kontribusi menurut Lapangan Usaha, serta Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 1.25 Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik (miliar rupiah) Tahun 2020 – 2025.

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A.Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	10.337,08	10.160,48	11.085,25	11.969,33	12.352,11	13.182,68
B. Pertambangan dan Penggalian	8.000,41	10.034,94	13.757,11	12.126,94	11.575,10	10.234,73
C. Industri Pengolahan	66.583,60	72.264,74	81.039,11	88.719,44	96.658,21	106,223,73
D.Pengadaan Listrik dan Gas	682,84	683,07	733,13	765,89	803,73	820,1
E.Pengadaan Air, PengelolaanSampah, Limbah dan Daur Ulang	88,8	98,56	105,71	112,58	119,74	123,68
F. Konstruksi	12.642,99	12.903,96	14.327,94	15.484,98	16.343,28	17.322,42

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.742,78	18.260,50	20.775,08	22.770,34	24.312,14	25.629,01
H. Transportasi dan Pergudangan	3.334,17	3.431,93	4.096,71	4.893,73	5.407,01	5.887,08
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.785,41	1.958,41	2.232,16	2.495,87	2.724,15	2.995,41
J. Informasi dan Komunikasi	6.021,50	6.470,87	6.790,45	7.335,50	7.920,73	8.566,43
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.612,73	1.675,36	1.853,62	1.979,39	2.121,85	2.210,11
L. Real Estat	1.874,36	2.015,92	2.170,38	2.285,03	2.396,61	2.519,40
M,N. Jasa Perusahaan	430,9	446,03	482,81	534,48	586,18	654,29
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.893,90	1.896,02	1.961,23	2.069,32	2.358,70	2.449,87
P. Jasa Pendidikan	1.266,38	1.305,95	1.332,16	1.456,29	1.551,63	1.676,24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	602,43	646,79	664,82	712,26	766,17	641,64

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
R,S,T,U. Jasa Lainnya	368,27	402,54	500,27	549,62	607,18	668,02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**134.268,56**	**144.656,07**	**163.907,91**	**176.261,00**	**188.604,51**	**202.004,47**

**Angka sementara*
***Angka sangat sementara*
Sumber : BPS Kabupaten Gresik 2026

Tabel 1.26 Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik (miliar rupiah) Tahun 2020 – 2025

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.004,08	5.823,54	6.007,94	6.200,21	6.301,05	6.513,17
B. Pertambangan dan Penggalian	8.582,77	8.705,94	9.385,49	9.293,59	8.783,73	7.670,05
C.Industri Pengolahan	47.703,6	49.808,94	54.162,28	56.730,52	60.317,76	64.886,49
D. Pengadaan Listrik dan Gas	543,75	556,66	590,75	611,89	649,31	662,91
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	64,12	70,67	73,15	76,61	80,33	81,47
F. Konstruksi	9.234,80	9.418,46	9.929,74	10.477,02	10.939,71	11.479,77
G. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.509,21	12.342,99	13.245,02	14.007,86	14.649,08	15.140,48
H. Transportasi dan Pergudangan	2.209,85	2.284,80	2.603,66	2.915,52	3.169,39	3.401,93
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.158,99	1.209,20	1.317,23	1.407,88	1.504,02	1.621,52

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
J. Informasi dan Komunikasi	5.113,94	5.470,63	5.687,88	6.074,92	6.497,16	7.011,09
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	1.075,75	1.079,42	1.102,43	1.149,29	1.212,97	1.244,56
L. Real Estat	1.383,88	1.445,48	1.527,52	1.585,05	1.642,29	1.712,61
M,N. Jasa Perusahaan	290,78	297,42	312,43	336,28	362,88	395,58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.131,65	1.140,31	1.144,45	1.156,92	1.259,67	1.279,49
P.Jasa Pendidikan	916,57	937,05	939,42	1.002,26	1.050,63	1.116,86
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	441,85	462,55	452,58	469,68	500,12	533,88
R,S,T,U. Jasa Lainnya	250,75	264,62	314,89	329,93	354,3	374,00
PRODUK DOMESTK REGIONAL BRUTO	**97.616,60**	**101.318,69**	**108.796,88**	**113.825,43**	**119.274,42**	**125.125,85**

**Angka sementara*

***Angka sangat sementara*

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Laju pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Gresik tumbuh positif 4,91% . Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Jasa Perusahaan yaitu mencapai 9,01%

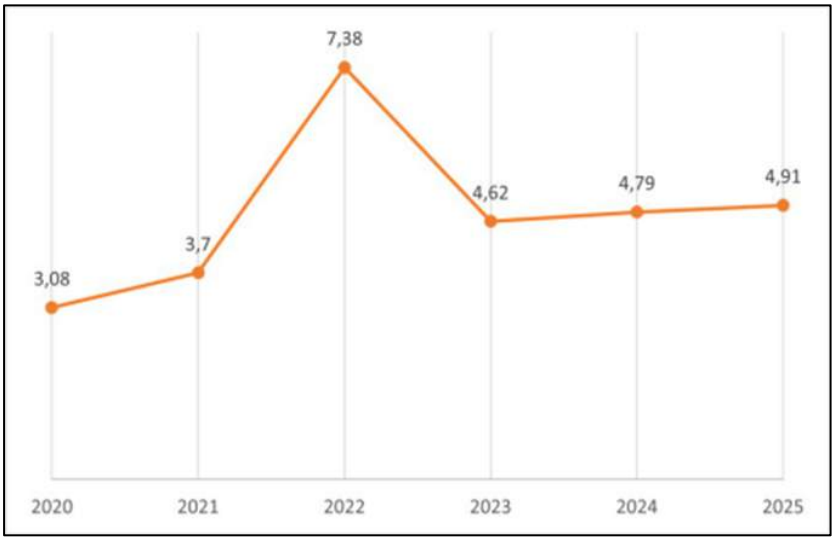

Gambar 1.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Selama tahun 2020 – 2025, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi dimana tahun 2020 sebesar 3,08 persen dan meningkat tajam dalam kurun lima tahun di angka 7,38 persen pada tahun 2022. Selanjutnya tahun 2023 kembali turun ke angka 4.62 dan di tahun 2025 bergerak naik pada posisi 4,01 persen.

1.3.4.2 Angka Kemiskinan

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Tabel di bawah ini memperlihatkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin wilayah Gerbangkertosusila, Jawa Timur, dan Nasional tahun 2021 – 2025. Fenomena angka kemiskinan yang meningkat terjadi hampir di semua wilayah Jawa Timur hingga tahun 2021. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga berdampak menurunnya perekonomian wilayah. Kelompok paling rentan yang terjun di bawah garis kemiskinan ialah pekerja informal

Gambar 1.11 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2015 – 2025

Sumber : BPS Kabupaten Gresik,Tahun 2025

Tabel 2.24 Tingkat Kemiskinan Gerbangkertasusila Tahun 2021 - 2025

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025

1	Kabupaten Gresik	12,42	11,06	10,96	10,32	9,95
2	Kabupaten Bangkalan	21,57	21,57	21,57	21,57	18,25
3	Kabupaten Mojokerto	10,62	10,62	10,62	10,62	8,79
4	Kota Mojokerto	6,39	6,39	6,39	6,39	5,05
5	Kota Surabaya	5,02	5,02	5,02	5,02	3,56
6	Kabupaten Sidoarjo	5,59	5,59	5,59	5,59	4,40
7	Kabupaten Lamongan	13,85	13,85	13,85	13,85	12,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2025, tingkat kemiskinan di wilayah Gerbangkertasusila selama periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan pada sebagian besar kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Gresik.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik mengalami penurunan secara konsisten dari 12,42% pada tahun 2021 menjadi 11,06% pada tahun 2022, 10,96% pada tahun 2023, 10,32% pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 9,95% pada tahun 2025. Penurunan sebesar 2,47 poin persentase dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Gerbangkertasusila, tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik berada pada posisi menengah. Angka kemiskinan Gresik masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan seperti Kota Surabaya (3,56% pada 2025), Kota Mojokerto (5,05%), dan Kabupaten Sidoarjo (4,40%). Namun, kondisi Gresik lebih baik dibandingkan Kabupaten Bangkalan yang masih mencatat angka kemiskinan cukup tinggi sebesar 18,25% pada tahun 2025 serta Kabupaten Lamongan sebesar 12,03%.

Sementara itu, Kabupaten Mojokerto juga menunjukkan penurunan signifikan menjadi 8,79% pada tahun 2025. Secara umum, wilayah dengan karakteristik perkotaan dan basis industri serta perdagangan yang kuat cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan wilayah dengan dominasi sektor pertanian dan kepulauan.

Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan daerah, termasuk perluasan perlindungan sosial, penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja, memberikan dampak positif. Namun demikian, dengan posisi kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata beberapa daerah penyangga perkotaan, diperlukan

strategi yang lebih terarah untuk mempercepat penurunan kemiskinan, terutama pada kelompok rentan dan wilayah kantong kemiskinan.

1.3.4.3 Tingkat Inflasi

Inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Gresik dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 2–4 persen, yang menunjukkan bahwa inflasi masih dalam kategori terkendali. Inflasi yang stabil mencerminkan kondisi perekonomian yang relatif sehat karena harga barang dan jasa tidak mengalami kenaikan yang terlalu tinggi. Dengan demikian, kombinasi antara pertumbuhan PDRB yang positif dan inflasi yang terkendali menunjukkan bahwa Gambaran kondisi ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2027 berada dalam keadaan yang cukup stabil dan terus berkmbang.

1.3.4.3.1 Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2024

Pada 2024 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Kabupaten Gresik sebesar 1,85 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,74. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,18 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,18 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,45 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,30 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,05 persen; kelompok transportasi sebesar 0,83 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,65 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,03 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,33 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu: dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,51 persen.

Tabel 1.27 IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kabupaten Gresik Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	IHK Desember 2023	IHK Desember 2024	Tingkat Inflasi *m-to-m* Desember 2024 1) (%)	Tingkat Inflasi *y-to-d* Desember 2024 2) (%)	Tingkat Inflasi *y-on-y* Desember 2024 3) (%)	Andil Inflasi *m-to-m* Desember 2024 (%)	Andil Inflasi *y-on-y* Desember 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (*Headline*)	103,82	103,82	105,74	0,44	1,85	1,85	0,44	1,85
Makanan, Minuman, dan Tembakau	104,82	104,82	108,15	1,34	3,18	3,18	0,43	1,03
Pakaian dan Alas Kaki	97,06	97,06	98,21	0,06	1,18	1,18	~0	0,06
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,11	101,11	101,56	0,00	0,45	0,45	~0	0,06
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,23	103,23	103,54	-0,26	0,30	0,30	-0,01	0,01
Kesehatan	104,53	104,53	105,63	0,02	1,05	1,05	~0	0,03
Transportasi	108,61	108,61	109,51	0,06	0,83	0,83	0,01	0,08
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,45	98,45	97,95	-0,02	-0,51	-0,51	~0	-0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,83	103,83	105,04	0,18	1,17	1,17	~0	0,02
Pendidikan	101,66	101,66	104,35	0,00	2,65	2,65	~0	0,22
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	107,21	107,21	109,39	0,05	2,03	2,03	0,01	0,24
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	104,67	104,67	107,11	-0,01	2,33	2,33	~0	0,13

Keterangan:
1) Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK November 2024.
2) Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK Desember 2023.
3) Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK Desember 2023.
Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2026

1.3.4.3.2 Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2025

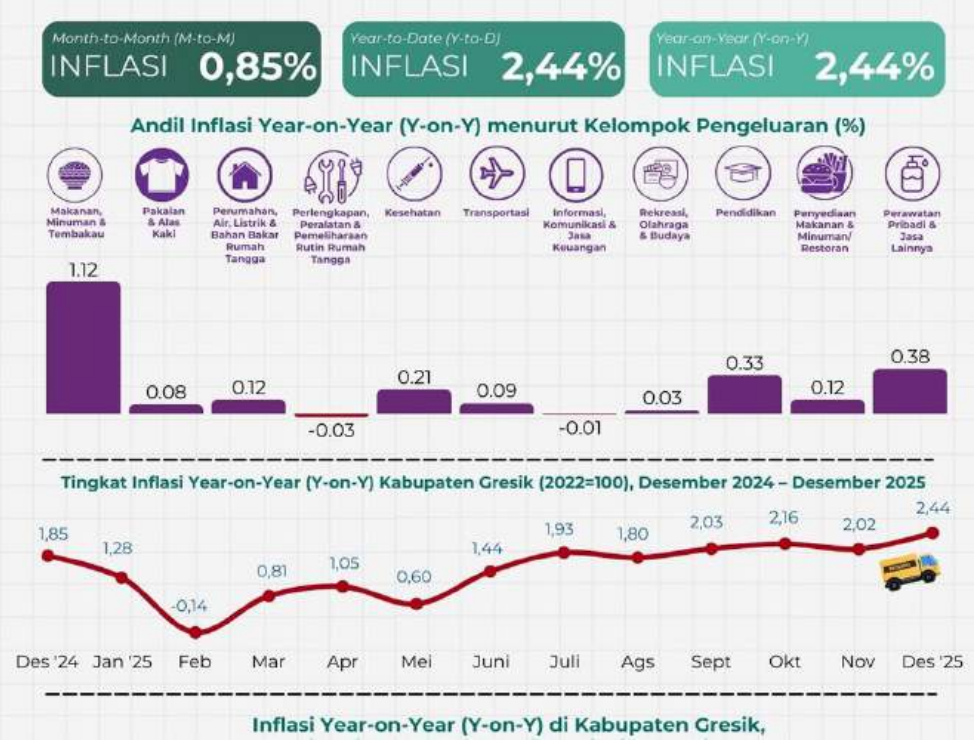

Gambar 1.12 Inflasi Kab. Gresik, Tahun 2025
Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Pada Desember 2025 secara year on year (y-on-y) Kabupaten Gresik mengalami inflasi sebesar 2,44 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,32. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,38 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,82 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,93 persen; kelompok kesehatan sebesar 7,91 persen; kelompok transportasi sebesar 0,97 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,42 persen; kelompok pendidikan sebesar 4,00 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,01 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,67 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,61 persen, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,25 persen.

1.3.5 Data Capaian Pendapatan Daerah

1.3.5.1 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan data target dan

realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021–2025, kinerja pendapatan Kabupaten Gresik menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun cenderung membaik pada dua tahun terakhir periode analisis. Secara nominal, target pendapatan daerah terus mengalami peningkatan dari Rp. 3.291.997.122.262,00 pada tahun 2021 menjadi Rp. 3.916.416.570.192,00 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya ekspansi kapasitas fiskal daerah serta optimisme terhadap peningkatan basis pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi pendapatan juga menunjukkan tren meningkat, dari Rp. 3.133.574.194.041,41 pada tahun 2021 menjadi Rp. 3.808.784.958.343,28 pada tahun 2025. Kenaikan realisasi ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah, meskipun tidak selalu selaras dengan target yang ditetapkan. Tingkat capaian mengalami penurunan bertahap dari 95,19% (2021) menjadi 88,21% (2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target meningkat, realisasi tidak mampu mengimbangi secara proporsional. Tahun 2024 menjadi titik balik dengan capaian 101,15% dan surplus realisasi terhadap target sebesar Rp. 185.996.557.266,24. Capaian di atas 100% mencerminkan penguatan kredibilitas fiskal daerah dan memberi ruang fiskal tambahan untuk belanja prioritas pembangunan.

Tabel 1.28 Target, Realisasi, dan Tingkat Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahunan (Miliar Rupiah)

TAHUN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	SELISIH (Rp)
2021	**3.291.997.122.262,00**	**3.133.574.194.041,41**	**95,19**	**158.422.928.220,59**
2022	**3.677.070.809.274,00**	**3.366.654.984.393,29**	**91,56**	**310.415.824.880,71**
2023	**3.873.145.748.086,00**	**3.416.390.957.965,09**	**88,21**	**456.754.790.120,91**
2024	**3.916.416.570.192,00**	**3.730.420.012.925,76**	**101,15**	**185.996.557.266,24**
2025	**3.863.790.043.589,08**	**3.808.784.958.343,28**	**98,58**	**55.005.085.245,80**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu), Data Diolah

Pada Tahun 2025, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan data reviu, sebesar Rp. 3.808.784.958.343,28 dengan capaian 98,58% dari anggaran yang telah ditetapkan pada Perubahan Anggaran.

Tabel 1.29 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SELISIH (Rp)
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.568.089.155.632,08**	**1.475.313.412.879,28**	**94,08**	**92.775.742.752,80**
4.1.01	Pajak Daerah	1.098.185.912.376,00	1.045.830.755.273,77	95,23	52.355.157.102,23

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SELISIH (Rp)
4.1.02	Retribusi Daerah	376.244.423.322,50	322.646.468.457,00	85,75	53.597.954.865,50
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.645.000.000,00	12.053.225.530,70	95,32	591.774.469,30
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	81.013.819.933,58	94.782.963.617,81	117	-13.769.143.684,23
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.295.700.887.957,00**	**2.333.406.670.464,00**	**101,6**	**-37.705.782.507,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.139.364.440.957,00	2.154.939.261.914,00	100,7	-15.574.820.957,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	156.336.447.000,00	178.467.408.550,00	114,2	-22.130.961.550,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**64.875.000,00**	**0**	**-64.875.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	64.875.000,00	0	-64.875.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.863.790.043.589,08**	**3.808.784.958.343,28**	**98,58**	**55.005.085.245,80**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 *reviu*, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik tercapai sebesar Rp. 1.475.313.412.879,28 dengan capaian 94,08%, terdiri dari:

a. Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 1.045.830.755.273,77 atau 95,23%;
b. Retribusi Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 322.646.468.457,00 atau 85,75%;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan realisasi sebesar Rp. 12.053.225.530,70 atau 95,32%; dan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp. 94.782.963.617,81 atau 117,00%.

Realisasi Pendapatan Transfer tercapai sebesar Rp. 2.333.406.670.464,00 dengan capaian 101,64%, terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp. 2.154.939.261.914,00 atau 100,728%;
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 178.467.408.550,00 atau 114,16%

Terakhir, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tercapai sebesar Rp. 64.875.000,00 melalui Pendapatan Hibah.

Tabel 1.30 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025

KODE	KOMPONEN PENDAPATAN	PROPORSI REALISASI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**38,73**
4.2	Pendapatan Transfer	**61,26**
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**0,0017**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu), Data Diolah

Proporsi realisasi komponen Pendapatan Daerah tertinggi berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 61,26% dari total Pendapatan Daerah, diikuti Pendapatan Asli Daerah sebesar 38,73% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,0017%. Pendapatan Transfer terbesar berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp. 2.154.939.261.914,00.

1.3.5.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 reviu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik tercapai sebesar Rp. 1.475.313.412.879,28 dengan capaian 94,08% dari target P-APBD 2025 sebesar Rp. 1.568.089.155.632,08. Proporsi realisasi komponen PAD tertinggi berasal dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar 70,89% dari total PAD, sedangkan proporsi terendah berasal dari Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,82% dari total PAD. Berikut merupakan proporsi realisasi komponen PAD:

Tabel 1.31 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025

KODE	KOMPONEN PAD	PROPORSI REALISASI TERHADAP PAD (%)
4.1.01	Pajak Daerah	**70,89**
4.1.02	Retribusi Daerah	**21,87**
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**0,82**
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	**6,42**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu), Data Diolah

1.3.5.3 Pajak Daerah

Pendapatan dari Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp. 1.045.830.755.273,77 atau 95,23% dari target P-APBD 2025 sebesar Rp. 1.098.185.912.376,00. Komponen Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Reklame tereralisasi Rp. 8.403.640.649,00 atau 102,11%;
2. Pajak Air Tanah terealisasi Rp. 6.097.095.679,00 atau 93,80%;
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi Rp. 3.226.328.000,00 atau 75,82%;
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) terealisasi Rp. 198.931.876.007,00 atau 87,44%;
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi Rp. 307.252.562.025,00 atau 89,06%;
6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terealisasi Rp. 337.447.475.763,77 atau 100,67%;
7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi Rp. 125.716.470.050,00 atau 107,38%; dan
8. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi Rp. 58.755.307.100,00 atau 107,97%.

Tabel 1.32 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.01	**Pajak Daerah**	**1.098.185.912.376,00**	**1.045.830.755.273,77**	**52.355.157.102,23**
4.1.01.09	**Pajak Reklame**	**8.230.000.000,00**	**8.403.640.649,00**	**173.640.649,00**

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.500.000.000,00	5.713.977.799,00	1.213.977.799,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.500.000.000,00	5.713.977.799,00	1.213.977.799,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	3.500.000.000,00	2.421.512.742,00	-1.078.487.258,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	3.500.000.000,00	2.421.512.742,00	-1.078.487.258,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	230.000.000,00	268.150.108,00	38.150.108,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	230.000.000,00	268.150.108,00	38.150.108,00
4.1.01.12	**Pajak Air Tanah**	**6.500.000.000,00**	**6.097.095.679,00**	**-402.904.321,00**
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	6.500.000.000,00	6.097.095.679,00	-402.904.321,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	6.500.000.000,00	6.097.095.679,00	-402.904.321,00
4.1.01.14	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**4.255.000.000,00**	**3.226.328.000,00**	**-1.028.672.000,00**
4.1.01.14.08	Pajak Dolomit	1.000.000.000,00	441.369.600,00	-558.630.400,00
4.1.01.14.08.0001	Pajak Dolomit	1.000.000.000,00	441.369.600,00	-558.630.400,00
4.1.01.14.19	Pajak Marmer	45.000.000,00	0	-45.000.000,00
4.1.01.14.19.0001	Pajak Marmer	45.000.000,00	0	-45.000.000,00
4.1.01.14.26	Pajak Phospat	110.000.000,00	6.000.000,00	-104.000.000,00
4.1.01.14.26.0001	Pajak Phospat	110.000.000,00	6.000.000,00	-104.000.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	100.000.000,00	0	-100.000.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	100.000.000,00	0	-100.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00	2.778.958.400,00	-221.041.600,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00	2.778.958.400,00	-221.041.600,00

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.01.15	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**227.500.000.000,00**	**198.931.876.007,00**	**-28.568.123.993,00**
4.1.01.15.01	PBBP2	227.500.000.000,00	198.931.876.007,00	-28.568.123.993,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	227.500.000.000,00	198.931.876.007,00	-28.568.123.993,00
4.1.01.16	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**345.000.000.000,00**	**307.252.562.025,00**	**-37.747.437.975,00**
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	345.000.000.000,00	307.252.562.025,00	-37.747.437.975,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	345.000.000.000,00	307.252.562.025,00	-37.747.437.975,00
4.1.01.19	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**	**335.200.000.000,00**	**337.447.475.763,77**	**2.247.475.763,77**
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	39.500.000.000,00	46.010.853.387,00	6.510.853.387,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	33.500.000.000,00	34.954.716.230,00	1.454.716.230,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	6.000.000.000,00	11.056.137.157,00	5.056.137.157,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	275.000.000.000,00	273.336.696.393,77	-1.663.303.606,23
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	259.000.000.000,00	253.849.491.585,00	-5.150.508.415,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	16.000.000.000,00	19.487.204.808,77	3.487.204.808,77
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	13.400.000.000,00	10.376.095.268,00	-3.023.904.732,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	13.100.000.000,00	10.239.490.135,00	-2.860.509.865,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	200.000.000,00	136.605.133,00	-63.394.867,00

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	100.000.000,00	0	-100.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	3.300.000.000,00	3.427.540.292,00	127.540.292,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	3.300.000.000,00	3.427.540.292,00	127.540.292,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	4.000.000.000,00	4.296.290.423,00	296.290.423,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	3.185.000.000,00	2.281.627.294,00	-903.372.706,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	180.000.000,00	19.528.700,00	-160.471.300,00
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	25.000.000,00	0	-25.000.000,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	932.500,00	-24.067.500,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	360.000.000,00	864.901.230,00	504.901.230,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	100.000.000,00	1.088.801.949,00	988.801.949,00

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	100.000.000,00	0	-100.000.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	25.000.000,00	40.498.750,00	15.498.750,00
4.1.01.20	**Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**	**117.081.160.323,00**	**125.716.470.050,00**	**8.635.309.727,00**
4.1.01.20.01	Opsen PKB	117.081.160.323,00	125.716.470.050,00	8.635.309.727,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	117.081.160.323,00	125.716.470.050,00	8.635.309.727,00
4.1.01.21	**Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**	**54.419.752.053,00**	**58.755.307.100,00**	**4.335.555.047,00**
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	54.419.752.053,00	58.755.307.100,00	4.335.555.047,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	54.419.752.053,00	58.755.307.100,00	4.335.555.047,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu)

1.3.5.4 Retribusi Daerah

Pendapatan dari Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp. 322.646.468.457,00 atau 85,75% dari target P-APBD 2025 sebesar Rp. 376.244.423.322,50. Komponen Retribusi Daerah terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum terealisasi Rp. 220.685.354.628,00 atau 86,55%
2. Retribusi Jasa Usaha terealisasi Rp. 62.972.425.887,00 atau 111,20%
3. Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi Rp. 38.988.687.942,00 atau 60,32%

Tabel 1.33 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**376.244.423.322,50**	**322.646.468.457,00**	**53.597.954.865,50**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**	**254.976.103.322,50**	**220.685.354.628,00**	**-34.290.748.694,50**
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	243.620.646.750,90	213.319.791.790,00	-30.300.854.960,90
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	16.345.814.232,00	19.989.440.553,00	3.643.626.321,00

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	227.034.832.518,90	193.047.247.237,00	-33.987.585.281,90
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	240.000.000,00	283.104.000,00	43.104.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.194.000.000,00	2.281.941.198,00	87.941.198,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.194.000.000,00	2.281.941.198,00	87.941.198,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.447.148.971,60	2.770.299.500,00	-3.676.849.471,60
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.447.148.971,60	2.770.299.500,00	-3.676.849.471,60
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.114.307.600,00	1.680.187.140,00	-434.120.460,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	2.114.307.600,00	1.680.187.140,00	-434.120.460,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	600.000.000,00	633.135.000,00	33.135.000,00
4.1.02.01.14.0003	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	600.000.000,00	633.135.000,00	33.135.000,00
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**56.628.320.000,00**	**62.972.425.887,00**	**6.344.105.887,00**
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	53.501.710.000,00		
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	50.505.810.000,00	56.351.342.421,00	5.845.532.421,00

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	2.025.900.000,00	952.925.000,00	-1.072.975.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	970.000.000,00	1.137.733.460,00	167.733.460,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Alat	0	15.300.000,00	15.300.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	117.610.000,00	275.000.000,00	157.390.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	117.610.000,00	275.000.000,00	157.390.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.734.000.000,00	2.544.900.000,00	810.900.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.734.000.000,00	2.544.900.000,00	810.900.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	175.000.000,00	176.540.000,00	1.540.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	175.000.000,00	176.540.000,00	1.540.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	740.000.000,00	1.318.130.506,00	578.130.506,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	740.000.000,00	1.318.130.506,00	578.130.506,00
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	360.000.000,00	200.554.500	-159.445.500,00
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	340.000.000,00	198.763.500,00	-141.236.500,00
4.1.02.02.10.0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	20.000.000,00	1.791.000,00	-18.209.000,00
4.1.02.03	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**64.640.000.000,00**	**38.988.687.942,00**	**-25.651.312.058,00**

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	60.000.000.000,00	32.364.870.892,00	-27.635.129.108,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	60.000.000.000,00	32.364.870.892,00	-27.635.129.108,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	4.640.000.000,00	6.623.817.050,00	1.983.817.050,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	4.640.000.000,00	6.623.817.050,00	1.983.817.050,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu)

1.3.5.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 12.053.225.530,70 atau 95,32% dari target P-APBD 2025 sebesar Rp. 12.645.000.000,00. Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Tabel 1.34 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**12.645.000.000,00**	**12.053.225.530,70**	**591.774.469,30**
4.1.03.02	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**	**12.645.000.000,00**	**12.053.225.530,70**	**408.225.530,70**

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.645.000.000,00	12.053.225.530,70	408.225.530,70
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.645.000.000,00	12.053.225.530,70	408.225.530,70
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.000.000.000,00	0	-1.000.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.000.000.000,00	0	-1.000.000.000,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu)

1.3.5.6 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp. 94.782.963.61,81 atau 117,00 dari target P-APBD 2025 sebesar Rp. 81.013.819.933,58. Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi Rp. 1.599.856.200,00
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi Rp. 197.910.890,00 atau 119,95%
3. Jasa Giro terealisasi Rp. .552.158.643,51 atau 142,09%
4. Pendapatan Bunga Rp. 1.169.863.013,40 atau 23,40%
5. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Negara terealisasi Rp. 72.614.572,04
6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi Rp. 529.270.732,45
7. Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi Rp. 2.068.130.701,00
8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi Rp. 532.368.234,00
9. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Rp. 136.254.296,00
10. Pendapatan dari Pengembalian terealisasi Rp. 11.865.034.933,77
11. Pendapatan BLUD terealisasi Rp. 73.059.501.401,64 atau 99,61%

Tabel 1.35 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**81.013.819.933,58**	**94.782.963.617,81**	**-13.769.143.684,23**
4.1.04.01	**Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan**	**0**	**1.599.856.200,00**	**1.599.856.200,00**
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	1.093.125.900,00	1.093.125.900,00
4.1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	61.682.300,00	61.682.300,00
4.1.04.01.02.0144	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0	726.000,00	726.000,00
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	1.497.000,00	1.497.000,00
4.1.04.01.02.0010	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	0	26.466.000,00	26.466.000,00

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
	Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan			
4.1.04.01.02.0013	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	37.634.000,00	37.634.000,00
4.1.04.01.02.0014	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0	258.183.000,00	258.183.000,00
4.1.04.01.02.0014	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	120.542.000,00	120.542.000,00
4.1.04.03	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**165.000.000,00**	**197.910.890,00**	**32.910.890,00**
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	20.000.000,00	139.545.000,00	119.545.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	20.000.000,00	139.545.000,00	119.545.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	145.000.000,00	58.365.890,00	-86.634.110,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	145.000.000,00	58.365.890,00	-86.634.110,00
4.1.04.05	**Jasa Giro**	**2.500.000.000,00**	**3.552.158.643,51**	**1.052.158.643,51**
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	3.552.158.643,51	1.052.158.643,51
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	3.060.662.470,32	560.662.470,32
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0	491.496.173,19	491.496.173,19
4.1.04.07	**Pendapatan Bunga**	**5.000.000.000,00**	**1.169.863.013,40**	**-3.830.136.986,60**
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	1.169.863.013,40	-3.830.136.986,60
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	1.169.863.013,40	-3.830.136.986,60
4.1.04.08	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	**0**	**72.614.572,04**	**72.614.572,04**
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0	72.614.572,04	72.614.572,04
4.1.04.11	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**0**	**529.270.732,45**	**529.270.732,45**
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	529.270.732,45	529.270.732,45
4.1.04.12	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**0**	**2.068.130.701,00**	**2.068.130.701,00**
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0	3.899.125,00	3.899.125,00

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0	1.740.824,00	1.740.824,00
4.1.04.12.14.0008	Pendapatan Denda Pajak Dolomit	0	2.813.184,00	2.813.184,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0	13.602.624,00	13.602.624,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0	1.911.196.264,00	1.911.196.264,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0	35.116.712,00	35.116.712,00
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	0	42.929.120,00	42.929.120,00
4.1.04.12.19.0002	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0	46.120.587,00	46.120.587,00
4.1.04.12.19.0004	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	0	610.317,00	610.317,00
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	0	1.525.324,00	1.525.324,00
4.1.04.12.19.0010	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen	0	23.472,00	23.472,00
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0	7.617.761,00	7.617.761,00
4.1.04.12.19.0024	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	0	2.345,00	2.345,00
4.1.04.12.19.0026	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	0	635.430,00	635.430,00
4.1.04.12.19.0027	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	0	14.500,00	14.500,00
4.1.04.12.19.0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	0	283.112,00	283.112,00

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.04.13	**Pendapatan Denda Retribusi Daerah**	**0**	**532.368.234,00**	**532.368.234,00**
4.1.04.13.01.0026	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	0	1.314.064,00	1.314.064,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	0	0	0
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	0	482.978.445,00	482.978.445,00
4.1.04.13.02.0014	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	0	5.565.800,00	5.565.800,00
4.1.04.13.02.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0	0	0
4.1.04.13.03.0016	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	0	42.509.925,00	42.509.925,00
4.1.04.13.03.0017	Pendapatan Denda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0	0	0
4.1.04.14	**Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan**	**0**	**136.254.296,00**	**136.254.296,00**
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	0	66.880.000,00	66.880.000,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan	0	69.374.296,00	69.374.296,00
4.1.04.15	**Pendapatan dari Pengembalian**	**0**	**11.865.034.933,77**	**11.865.034.933,77**
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0	63.332.648,00	63.332.648,00
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	3.249.000,00	3.249.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0	157.571.332,26	157.571.332,26
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0	84.552.034,00	84.552.034,00

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.04.15.08.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	0	2.736.238,00	2.736.238,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0	5.855.860,00	5.855.860,00
4.1.04.15.08.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0	0	0
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0	59.012.402,00	59.012.402,00
4.1.04.15.08.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	0	3.258.900,00	3.258.900,00
4.1.04.15.08.0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0	42	42
4.1.04.15.08.0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0	80.262,00	80.262,00
4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	0	240.789,00	240.789,00
4.1.04.15.11.0017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD	0	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.04.15.15.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	600.000,00	600.000,00

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	325.500,00	325.500,00
4.1.04.15.17.0565	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	0	4.483.000,00	4.483.000,00
4.1.04.15.18.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0	44.988.000,00	44.988.000,00
4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0	9.895.247.519,00	9.895.247.519,00
4.1.04.15.34.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0	500.000.000,00	500.000.000,00
4.1.04.15.37.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0	20.000.000,00	20.000.000,00
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	198.945.973,81	198.945.973,81
4.1.04.15.61.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0	122.593.776,16	122.593.776,16

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.04.15.61.0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0	13.950.000,00	13.950.000,00
4.1.04.15.65.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	0	517.033.115,31	517.033.115,31
4.1.04.15.65.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0	29.752.492,00	29.752.492,00
4.1.04.15.66.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0	54.765.000,00	54.765.000,00
4.1.04.15.66.0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0	55.836.194,23	55.836.194,23
4.1.04.15.67.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0	24.624.856,00	24.624.856,00
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD**	############	**73.059.501.401,64**	**-289.318.531,94**
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	68.132.379.889,95	69.012.755.514,00	880.375.624,05
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	68.132.379.889,95	69.012.755.514,00	880.375.624,05
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	5.072.488.211,71	3.913.696.304,33	-1.158.791.907,38
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	5.072.488.211,71	3.913.696.304,33	-1.158.791.907,38
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	143.951.831,92	133.049.583,31	-10.902.248,61
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	143.951.831,92	133.049.583,31	-10.902.248,61

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu)

1.3.5.7 Pendapatan Transfer

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 *reviu*, realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Gresik tercapai sebesar Rp. 2.333.406.670.464,00 dengan capaian 101,64% dari target P-APBD 2025

sebesar Rp. 2.295.700.887.957,00. Proporsi realisasi komponen Pendapatan Transfer tertinggi berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 92,35% dari total Pendapatan Transfer, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah proporsinya hanya sebesar 7,65%. Berikut merupakan proporsi realisasi komponen pendapatan asli daerah:

Tabel 1.36 Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025

KODE	KOMPONEN PAD	PROPORSI REALISASI TERHADAP PENDAPATAN TRANSFER (%)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**92,35**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**7,65**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu), Data Diolah

1.3.5.8 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp. 2.154.939.261.914,00 atau 100,728 dari target P-APBD 2025 sebesar Rp. 2.139.364.440.957,00. Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

1. Dana Desa terealisasi Rp. 315.970.754.200,00 atau 99,84%
2. Insentif Fiskal terealisasi Rp. 22.200.037.000,00 atau 100,00%
3. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 328.989.206.500,00 atau 114,02%
4. Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi Rp. 1.000.742.372.252,00 atau 99,39%
5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi Rp. 92.058.376.986,00 atau 84,26%
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi Rp. 394.978.514.976,00 atau 99,74%

Tabel 1.37 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**2.139.364.440.957,00**	**2.154.939.261.914,00**	**-15.574.820.957,00**
4.2.01.05	**Dana Desa**	**316.480.417.000,00**	**315.970.754.200,00**	**-509.662.800,00**
4.2.01.05.01	Dana Desa	316.480.417.000,00	315.970.754.200,00	-509.662.800,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	316.480.417.000,00	315.970.754.200,00	-509.662.800,00
4.2.01.06	**Insentif Fiskal**	**22.200.037.000,00**	**22.200.037.000,00**	**0**

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	22.200.037.000,00	22.200.037.000,00	0
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	22.200.037.000,00	22.200.037.000,00	0
4.2.01.07	**Dana Bagi Hasil (DBH)**	**288.540.736.000,00**	**328.989.206.500,00**	**40.448.470.500,00**
4.2.01.07.01	DBH Pajak	226.179.086.000,00	252.768.099.500,00	26.589.013.500,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	63.331.330.000,00	77.794.398.000,00	14.463.068.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	123.973.396.000,00	134.979.409.400,00	11.006.013.400,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.034.429.000,00	6.258.901.100,00	224.472.100,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.839.931.000,00	33.735.391.000,00	895.460.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	62.361.650.000,00	76.221.107.000,00	13.859.457.000
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	38.891.105.000,00	42.964.211.000,00	4.073.106.000,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	20.317.634.000,00	29.510.889.000,00	9.193.255.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	12.210.000,00	15.981.000,00	3.771.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.601.057.000,00	2.147.660.000,00	546.603.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	120.570.000,00	163.292.000,00	42.722.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.419.074.000,00	1.419.074.000,00	0
4.2.01.08	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**1.006.890.095.703,00**	**1.000.742.372.252,00**	**-6.147.723.451,00**
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	929.657.683.703,00	928.623.721.903,00	-1.033.961.800,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	929.657.683.703,00	928.623.721.903,00	-1.033.961.800,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	77.232.412.000,00	72.118.650.349,00	-5.113.761.651,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13.358.041.000,00	8.244.279.349,00	-5.113.761.651,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	34.734.009.000,00	34.734.009.000,00	0
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.940.362.000,00	23.940.362.000,00	0

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0	0	0
4.2.01.09	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	**505.253.155.254,00**	**487.036.891.962,00**	**-18.216.263.292,00**
4.2.01.09.01	DAK Fisik	109.254.038.000,00	92.058.376.986,00	-17.195.661.014,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0	0	0
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0	0	0
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0	0	0
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0	0	0
4.2.01.09.01.0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan	0	0	0
4.2.01.09.01.0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	0	0	0
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	10.164.147.000,00	6.328.873.731,00	-3.835.273.269,00
4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	493.828.000,00	341.068.600,00	-152.759.400,00
4.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	216.600.000,00	215.244.001,00	-1.355.999,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0	0	0
4.2.01.09.01.0083	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	1.200.985.000,00	1.197.748.808,00	-3.236.192,00
4.2.01.09.01.0085	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	4.656.223.000,00	4.653.664.500,00	-2.558.500,00
4.2.01.09.01.0086	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	18.898.113.000,00	18.588.555.095,00	-309.557.905,00
4.2.01.09.01.0101	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan	6.117.856.000,00	5.589.210.158,00	-528.645.842,00

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
	Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan			
4.2.01.09.01.0106	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar	14.178.933.000,00	11.638.944.133,00	-2.539.988.867,00
4.2.01.09.01.0108	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar	5.127.353.000,00	5.122.203.000,00	-5.150.000,00
4.2.01.09.01.0109	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri	1.200.000.000,00	600.290.000,00	-599.710.000,00
4.2.01.09.01.0115	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri	30.000.000.000,00	25.882.574.961,00	-4.117.425.039,00
4.2.01.09.01.0116	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri	17.000.000.000,00	11.899.999.999,00	-5.100.000.001,00
4.2.01.09.02	**DAK Non Fisik**	**395.999.117.254,00**	**394.978.514.976,00**	**-1.020.602.278,00**
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	131.145.900.000,00	131.089.545.920,00	-56.354.080,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.055.250.000,00	4.055.250.000,00	0
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	172.932.849.000,00	171.373.164.100,00	
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	590.250.000,00	1.179.750.000,00	
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	524.706.015,00	524.706.015,00	
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0	0	0
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0	0	0

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	496.465.663,00	496.465.663,00	0
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	208.561.050,00	241.680.000,00	33.118.950,00
4.2.01.09.02.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.225.500.000,00	3.225.500.000,00	0
4.2.01.09.02.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	3.763.906.000,00	3.763.906.000,00	0
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	37.830.960.000,00	37.818.967.755,00	-11.992.245,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	495.000.000,00	480.000.000,00	-15.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.646.890.000,00	3.646.699.998,00	-190.002,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	10.601.373.846,00	10.601.373.846,00	0
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	70.194.000,00	70.194.000,00	0
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.844.531.778,00	14.844.531.777,00	-1
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	11.476.779.902,00	11.476.779.902,00	0

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu)

1.3.5.9 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp. 178.467.408.550,00 atau 114,16 dari target P-APBD 2025 sebesar Rp. 56.336.447.000,00. Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Bagi Hasil terealisasi Rp. 162.926.131.550,00 atau 115,72%
2. Bantuan Keuangan terealisasi Rp. 15.541.277.000,00 atau 100,00%

Tabel 1.38 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**156.336.447.000,00**	**178.467.408.550,00**	**(22.130.961.550,00)**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**140.795.170.000,00**	**162.926.131.550,00**	**22.130.961.550,00**
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	140.795.170.000,00	162.926.131.550,00	22.130.961.550,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	472.000.000,00	8.972.647.900,00	8.500.647.900,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	230.000.000,00	5.838.706.800,00	5.608.706.800,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	73.741.000.000,00	79.536.571.800,00	5.795.571.800,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	584.000.000,00	896.471.350,00	312.471.350,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	65.768.170.000,00	67.681.733.700,00	1.913.563.700,00
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**	**15.541.277.000,00**	**15.541.277.000,00**	**0,00**
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	15.541.277.000,00	15.541.277.000,00	0,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	15.541.277.000,00	15.541.277.000,00	0,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu)

1.3.5.10 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp. 64.875.000,00 yang berasal dari Pendapatan Hibah Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.

Tabel 1.39 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	P- APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**64.875.000,00**	**64.875.000,00**
4.3.05.01	Pendapatan Hibah	0,00	64.875.000,00	64.875.000,00
4.3.05.01.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	64.875.000,00	64.875.000,00
4.3.05.01.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	64.875.000,00	64.875.000,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu)

1.3.6 Realisasi Belanja

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan instrumen utama Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kinerja realisasi belanja mencerminkan efektivitas perencanaan, ketepatan penganggaran, serta kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah. Belanja daerah memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan sosial. Tingkat realisasi belanja yang optimal akan menghasilkan multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi daerah. Berdasarkan data target dan realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2025, kinerja realisasi belanja daerah Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang relatif baik, dengan capaian rata-rata di atas 85 persen setiap tahunnya. Namun demikian, masih terdapat fluktuasi tingkat efektivitas belanja yang tercermin dari variasi capaian dan besaran selisih anggaran. Dari sisi nominal, realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.697.575.974.929,23 dengan capaian 93,03%.

Tabel 1.40 Target, Realisasi, dan Tingkat Capaian Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahunan (Miliar Rupiah)

TAHUN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	SELISIH (Rp)
2021	3.597.937.590.465,00	3.192.751.693.289,33	88,74	405.185.897.175,67
2022	3.940.289.380.229,00	3.554.078.352.827,67	90,20	386.211.027.401,33
2023	3.952.148.283.541,00	3.418.637.234.689,96	86,50	533.511.048.851,04
2024	3.974.761.570.922,00	3.697.575.974.929,23	93,03	277.185.595.992,77
2025	3.945.861.940.316,08	3.445.786.963.672,31	87,33	500.074.976.643,77

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu), Data Diolah

Pada Tahun 2025, realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan data reviu, sebesar Rp. 3.445.786.963.672,31 dengan capaian 87,33% dari anggaran yang telah ditetapkan pada Perubahan
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.945.861.940.316,08. Berikut merupakan rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

Tabel 1.41 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SELISIH (Rp)
5	**BELANJA DAERAH**	**3.945.861.940.316,08**	**3.445.786.963.672,31**	**87,33**	**500.074.976.643,77**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.679.314.549.333,97**	**2.411.809.366.852,63**	**90,01**	**267.599.024.163,34**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.243.218.642.996,52	1.178.154.662.397,98	94,77	65.063.980.598,54
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.152.962.238.635,82	1.000.044.599.636,19	86,74	152.917.638.999,63
5.1.03	Belanja Bunga	720.052.083,63	701.822.916,49	97,47	18.229.167,14
5.1.05	Belanja Hibah	268.525.152.800,00	220.697.040.401,97	82,19	47.828.112.398,03
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.982.304.500,00	12.211.241.500,00	87,33	1.771.063.000,00
5.2	BELANJA MODAL	468.761.401.780,03	284.130.000.828,68	60,61	184.631.400.951,35
5.2.01	Belanja Modal Tanah	61.742.872.000,00	9.091.558.797,00	14,72	52.651.313.203,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.601.202.458,53	72.316.878.023,54	73,34	26.284.324.434,99
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.857.341.580,90	108.317.193.228,72	88,17	14.540.148.352,18

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SELISIH (Rp)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	173.222.045.069,60	82.400.847.058,42	47,57	90.821.198.011,18
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.337.940.671,00	12.003.523.721,00	97,29	334.416.950,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.690.964.990,95	744.544.649,00	3,14	22.946.420.341,95
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.690.964.990,95	744.544.649,00	3,14	22.946.420.341,95
5.4	BELANJA TRANSFER	774.001.182.529,13	749.103.051.342,00	96,78	24.898.131.187,13
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	123.052.435.907,66	112.318.582.142,00	91,28	10.733.853.765,66
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	650.948.746.621,47	636.784.469.200,00	97,82	14.164.277.421,47

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu)

Secara rinci, komponen realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dari target Belanja Daerah P-APBD terdiri dari:

a. Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp. 2.411.809.366.852,63 atau 90,01%, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Belanja Pegawai terealisasi Rp. 1.178.154.662.397,98 atau 94,77%
    2. Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp. 1.000.044.599.636,19 atau 86,74%
    3. Belanja Bunga terealisasi Rp. 701.822.916,49 atau 97,47%
    4. Belanja Hibah terealisasi Rp. 220.697.040.401,97 atau 82,19%
    5. Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp. 12.211.241.500,00 atau 87,33%
b. Belanja Modal dengan realisasi sebesar 284.130.000.828,68 atau 60,61%, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Belanja Modal Tanah terealisasi Rp. 9.091.558.797,00 atau 14,72%
    2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi Rp. 72.316.878.023,54 atau 73,34%
    3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi Rp. 108.317.193.228,72 atau 88,17%
    4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi Rp. 82.400.847.058,42 atau 47,57%
    5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi Rp. 12.003.523.721,00 atau 97,29%
c. Belanja Tidak Terduga dengan realisasi sebesar Rp. 744.544.649,00 atau 3,14%

d. Belanja Transfer dengan realisasi sebesar Rp. 749.103.051.342,00 atau 96,78%, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Belanja Bagi Hasil terealisasi Rp. 112.318.582.142,00 atau 91,28%
    2. Belanja Bantuan Keuangan terealisasi Rp. 636.784.469.200,00 atau 97,82%

Tabel 1.42 Proporsi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025

KODE	KOMPONEN BELANJA DAERAH	PROPORSI REALISASI TERHADAP BELANJA DAERAH (%)
5.1	Belanja Operasi	**69,99**
5.2	Belanja Modal	**8,25**
5.3	Belanja Tidak Terduga	**0,02**
5.4	Belanja Transfer	**21,74**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu), Data Diolah

Proporsi realisasi komponen Belanja Daerah tertinggi berasal dari Belanja Operasi sebesar 69,99% dari total Belanja Daerah, diikuti Belanja Transfer sebesar 21,74%, Belanja Modal sebesar 8,25% dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,02%. Belanja Operasi terbesar berasal dari Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar Rp. 1.178.154.662.397,98 atau 48,85% dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.000.044.599.636,19 atau 41,46% dari total Belanja Operasi.

1.3.7 Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021–2025, Pembiayaan Daerah Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 89.071.896.727,00 dengan capaian 108,53% dari anggaran yang telah ditetapkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 82.071.896.727,00.

Tabel 1.43 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SELISIH (Rp)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**82.071.896.727,00**	**89.071.896.727,00**	**108,53**	**-7.000.000.000,00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**104.071.896.727,00**	**104.071.896.727,00**	**100**	0

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SELISIH (Rp)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.071.896.727,00	89.071.896.727,00	100	0
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	89.071.896.727,00	89.071.896.727,00	100	0
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	89.071.896.727,00	89.071.896.727,00	100	0
6.1.01.07.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	89.071.896.727,00	89.071.896.727,00	100	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100	0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**22.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**0**	**7.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00	0	0	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**452.069.891.397,97**		**-452069891397,97**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, LRA 2025 (reviu)

1.3.8 Laporan Posisi Kas

Laporan Posisi Kas merupakan bagian integral dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang menyajikan informasi mengenai saldo kas dan setara kas Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran. Laporan ini memberikan gambaran mengenai kondisi likuiditas daerah, kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, serta kapasitas pendanaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Posisi Kas Daerah mencerminkan hasil pengelolaan arus kas masuk yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, dibandingkan dengan dengan arus kas keluar yang diunakan untuk

membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, belanja tidak terduga, serta pengeluaran pembiayaan. Saldo kas pada awal tahun anggaran berasal dari saldo akhir tahun sebelumnya yang tercermin dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), dan menjadi sumber pembiayaan awal dalam menjalankan APBD tahun berjalan.

Tabel 1.44 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)
KAS DAN SETARA KAS				**452.069.891.397,97**
I	**KAS DI KAS DAERAH**		**433.859.266.204,72**	
	Kas di RKUD Kab gresik	**436.658.160.087,72**		
	Sisa Dana PFK dan Titipan	-2.798.893.883,00		
	PFK Jaminan Pemeliharaan	142.702.892,00		
	PFK Jaminan Jasa Bongkar	655.087.791,00		
	PFK Jaminan Jasa Rusunawa	155.480.000,00		
	Titipan BPPKAD	65.778.600,00		
	Titipan Dinas Pertanian	364.997.100,00		
	Titipan Dinas Koperasi	1.414.847.500,00		
	Penjelasan :			
	Saldo Bank Jatim	**436.658.160.087,72**		
	Sisa Dana PFK dan Titipan	**-2.798.893.883,00**		
	Sisa Dana Spesifik	**-19.582.585.536,00**		
	DAK Fisik	1.352.245.889,00		
	DAK Non Fisik	4.603.647.009,00		
	Dana Cukai Hasil Tembakau	4.810.594.404,00		
	Bantuan Keuangan Prov. Jawa Timur	2.404.657.515,00		
	DAU Earmaked	3.542.597.637,00		
	Insentif Fiskal	2.868.843.082,00		
	Kas Bebas	**414.276.680.668,72**		
II	**DEPOSITO**	**-**	**-**	

NO	URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)
III	**KAS DI KAS BENDAHARA**		**18.210.625.193,25**	
	Kas Di RSUD IBNU SINA	7.242.735.670,02		
	Kas Di RSUD UMAR MAS'UD	1.360.287.083,32		
	Kas Di BLUD PUSKESMAS	8.602.935.625,69		
	Kas Di BLUD Dinas CKPKP	125.326.592,39		
	Kas Di BENDAHARA PENGELUARAN	1.650.015,00		
	Kas Di BENDAHARA BOS	59.232.518,83		
	Kas Di BENDAHARA BOP	-		
	Kas Di BENDAHARA BOK PUSKESMAS	818.457.688,00		

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, 2025 (reviu)

Secara umum, posisi kas Pemerintah Kabupaten Gresik pada akhir tahun anggaran menunjukkan likuiditas yang terjaga. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki kemampuan yang memadai dalam menjaga kesinambungan pembiayaan program prioritas pembangunan. Namun demikian, besaran saldo kas akhir tahun yang relatif tinggi selain dapat mencerminkan efisiensi belanja dan pengendalian fiskal yang baik, saldo kas akhir tahun yang relatif tinggi juga dapat mengindikasikan belum optimalnya penyerapan anggaran.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

2.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN

Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran berjalan dilaksanakan sebagai respons atas dinamika perekonomian daerah, perkembangan regulasi, serta realisasi pendapatan semester pertama yang menunjukkan adanya deviasi terhadap asumsi yang telah ditetapkan dalam APBD murni. Penyesuaian ini dilakukan guna menjaga kredibilitas fiskal daerah, memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta menjamin kesinambungan pendanaan terhadap prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 3.848.347.186.713,60 dan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 3.863.790.043.589,08.

Tabel 2.1 Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.544.422.292.713,60	1.568.089.155.632,08	23.666.862.918,48
4.1.01	Pajak Daerah	1.083.685.912.376,00	1.098.185.912.376,00	14.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	367.265.955.771,50	376.244.423.322,50	8.978.467.551,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.645.000.000,00	12.645.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	80.825.424.566,10	81.013.819.933,58	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.303.924.894.000,00	2.295.700.887.957,00	(8.224.006.043,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.148.430.324.000,00	2.139.364.440.957,00	(9.065.883.043,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	155.494.570.000,00	156.336.447.000,00	841.877.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	DAERAH YANG SAH			
	JUMLAH PENDAPATAN	3.848.347.186.713,60	3.863.790.043.589,08	15.442.856.875,48

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.1.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Penyesuaian PAD dilakukan berdasarkan evaluasi realisasi semester pertama serta proyeksi capaian hingga akhir tahun anggaran. Kebijakan diarahkan pada optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, penguatan sistem digitalisasi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pengawasan yang lebih terintegrasi. Selain itu, dilakukan penyesuaian target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sesuai tren kinerja BUMD dan potensi riil yang dapat dicapai.

Tabel 2.2 Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.544.422.292.713,60	1.568.089.155.632,08	23.666.862.918,48
4.1.01	Pajak Daerah	1.083.685.912.376,00	1.098.185.912.376,00	14.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	367.265.955.771,50	376.244.423.322,50	8.978.467.551,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.645.000.000,00	12.645.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	80.825.424.566,10	81.013.819.933,58	0,00

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Pada P-APBD 2025, target Pendapatan Asli Daerah yang semula sebesar Rp 1.544.422.292.713,60 bertambah sebesar Rp. 23.666.862.918,48 atau 1,53%, sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik setelah perubahan yakni sebesar Rp. 1.568.089.155.632,08. Perubahan terjadi karena adanya penambahan anggaran pada Pajak Daerah sebesar Rp. 14.500.000.000,00 dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 8.978.467.551,00.

2.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen utama Pendapatan Asli daerah (PAD). Penguatan local taxing power kepada daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dilakukan sejalan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai undang-undang tersebut pajak daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota adalah sebanyak 11 jenis. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dipungut sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perubahan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 berasal dari penambahan target anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp. 14.500.000.000,00 atau 6,81%.

Tabel 2.3 Perubahan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.01	Pajak Daerah	1.083.685.912.376,00	1.098.185.912.376,00	14.500.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	8.230.000.000,00	8.230.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.255.000.000,00	4.255.000.000,00	0,00
4.1.01.14.08	Pajak Dolomit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.01.14.08.0001	Pajak Dolomit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.01.14.19	Pajak Marmer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
4.1.01.14.19.0001	Pajak Marmer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
4.1.01.14.26	Pajak Phospat	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
4.1.01.14.26.0001	Pajak Phospat	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	213.000.000.000,00	227.500.000.000,00	14.500.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	213.000.000.000,00	227.500.000.000,00	14.500.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	213.000.000.000,00	227.500.000.000,00	14.500.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	345.000.000.000,00	345.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	345.000.000.000,00	345.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	BPHTB-Pemindahan	345.000.000.000,00	345.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
.01.0001	Hak			
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	335.200.000.000,00	335.200.000.000,00	0,00
4.1.01.19 .01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	39.500.000.000,00	39.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19 .01.0001	PBJT-Restoran	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19 .01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19 .02	PBJT-Tenaga Listrik	275.000.000.000,00	275.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19 .02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	259.000.000.000,00	259.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19 .02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19 .03	PBJT-Jasa Perhotelan	13.400.000.000,00	13.400.000.000,00	0,00
4.1.01.19 .03.0001	PBJT-Hotel	13.100.000.000,00	13.100.000.000,00	0,00
4.1.01.19 .03.0006	PBJT-Losmen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.01.19 .03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.19 .04	PBJT-Jasa Parkir	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00
4.1.01.19 .04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00
4.1.01.19 .05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19 .05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	3.185.000.000,00	3.185.000.000,00	0,00
4.1.01.19 .05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari,	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	dan/atau Busana			
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	117.081.160.323,00	117.081.160.323,00	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	117.081.160.323,00	117.081.160.323,00	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	117.081.160.323,00	117.081.160.323,00	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	54.419.752.053,00	54.419.752.053,00	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	54.419.752.053,00	54.419.752.053,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	54.419.752.053,00	54.419.752.053,00	0,00

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah, retribusi memiliki imbal balik langsung berupa layanan atau fasilitas yang diterima oleh masyarakat. Kewenangan daerah untuk memungut retribusi daerah diatur pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Perda Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Sumbersumber penerimaan retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik diantaranya 7 (tujuh) jenis Retribusi Jasa Umum, 8 (delapan) jenis Retribusi Jasa Usaha dan 3 (tiga) jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Perubahan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 376.244.423.322,50 pada P-APBD 2025 berasal dari penambahan target Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 3.978.467.551,00 atau 1,59% dan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 15.000.000.000,00 atau 36,03%.

Tabel 2.4 Perubahan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.02	Retribusi Daerah	367.265.955.771,50	376.244.423.322,50	8.978.467.551,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	250.997.635.771,50	254.976.103.322,50	3.978.467.551,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	239.642.179.199,90	243.620.646.750,90	3.978.467.551,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	13.437.452.100,00	16.345.814.232,00	2.908.362.132,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	225.964.727.099,90	227.034.832.518,90	1.070.105.419,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.194.000.000,00	2.194.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.194.000.000,00	2.194.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.447.148.971,60	6.447.148.971,60	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.447.148.971,60	6.447.148.971,60	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.114.307.600,00	2.114.307.600,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	2.114.307.600,00	2.114.307.600,00	0,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.02.01.14.0003	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	41.628.320.000,00	56.628.320.000,00	15.000.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	38.501.710.000,00	53.501.710.000,00	15.000.000.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	35.505.810.000,00	50.505.810.000,00	15.000.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	2.025.900.000,00	2.025.900.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	970.000.000,00	970.000.000,00	0,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	117.610.000,00	117.610.000,00	0,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	117.610.000,00	117.610.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Tempat	1.734.000.000,00	1.734.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
.05	Khusus Parkir			
4.1.02.02 .05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.734.000.000,00	1.734.000.000,00	0,00
4.1.02.02 .07	Retribusi Rumah Potong Hewan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
4.1.02.02 .07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
4.1.02.02 .09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	740.000.000,00	740.000.000,00	0,00
4.1.02.02 .09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	740.000.000,00	740.000.000,00	0,00
4.1.02.02 .10	Retribusi Penyeberangan di Air	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
4.1.02.02 .10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00
4.1.02.02 .10.0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	74.640.000.000,00	64.640.000.000,00	-10.000.000.000,00
4.1.02.03 .07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	70.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
4.1.02.03 .07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	70.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
4.1.02.03 .08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	4.640.000.000,00	4.640.000.000,00	0,00
4.1.02.03 .08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	4.640.000.000,00	4.640.000.000,00	0,00

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Gresik merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari bagian laba atau dividen atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan porsi kepemilikan saham atau penyertaan modal yang ditetapkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah aset

daerah yang ditanamkan sebagai penyertaan modal dan pengelolaannya dipisahkan dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah secara langsung. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencerminkan kinerja investasi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik melalui BUMD. Semakin sehat dan produktif BUMD, semakin besar kontribusi dividen terhadap PAD dan kapasitas fiskal daerah. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 12.645.000.000,00.

Tabel 2.5 Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (RP)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.645.000.000,00	12.645.000.000,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.645.000.000,00	12.645.000.000,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.645.000.000,00	11.645.000.000,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.645.000.000,00	11.645.000.000,00	0,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (RP)
	Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)			
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.1.1.4 Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pendapatan ini cenderung bersifat fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh faktor non-rutin, seperti penjualan aset atau penerimaan denda. Oleh karena itu, dalam perencanaan penganggaran, penetapan target dilakukan secara hati-hati (prudent) dengan mempertimbangkan tren historis realisasi dan potensi riil tahun berjalan. Sumber Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada yang Dipisahkan pada P-APBD 2025 terdiri dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, dan Pendapatan BLUD. Perubahan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggran 2025 berasal dari penambahan target anggaran Pendapatan BLUD sebesar Rp. 188.395.367,48 atau 0,23%

Tabel 2.6 Perubahan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	80.825.424.566,10	81.013.819.933,58	188.395.367,48
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	73.160.424.566,10	73.348.819.933,58	188.395.367,48
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	68.015.762.212,00	68.132.379.889,95	116.617.677,95
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	68.015.762.212,00	68.132.379.889,95	116.617.677,95
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	4.987.429.711,71	5.072.488.211,71	85.058.500,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	4.987.429.711,71	5.072.488.211,71	85.058.500,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	157.232.642,39	143.951.831,92	-13.280.810,47
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	157.232.642,39	143.951.831,92	-13.280.810,47

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, serta pembiayaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pendapatan transfer memiliki peran strategis dalam struktur APBD karena memberikan kontribusi signifikan terhadap total pendapatan daerah, khususnya bagi Kabupaten Gresik yang kapasitas fiskalnya masih bertumpu pada dana perimbangan dan transfer lainnya. Proporsi Pendapatan Transfer P-APBD Kabupaten Gresik sebesar 59,42% dari Total Pendapatan Daerah. Target Pendapatan Transfer Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2025 berkurang sebesar (Rp. 8.224.006.043,00) atau -0,36%.

Tabel 2.7 Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.303.924.894.000,00	2.295.700.887.957,00	(8.224.006.043,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.148.430.324.000,00	2.139.364.440.957,00	(9.065.883.043,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	155.494.570.000,00	156.336.447.000,00	841.877.000,00

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

2.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, serta pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Transfer Pemerintah Pusat memiliki peran strategis dalam struktur APBD karena menjadi instrumen utama dalam menutup celah fiskal antara kebutuhan belanja daerah dan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). besaran pendapatan transfer pemerintah pusat sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional, kondisi makroekonomi, serta capaian kinerja daerah. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan perubahan APBD,

penyesuaian dilakukan berdasarkan pagu alokasi definitif dan realisasi penyaluran tahun berjalan.

Pendapatan transfer pemerintah pusat menjadi instrumen penting bagi Kabupaten Gresik dalam menjaga kesinambungan pembiayaan layanan dasar, mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mengakselerasi prioritas pembangunan daerah. Namun demikian, peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD tetap menjadi strategi utama untuk memperluas ruang fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. P-APBD 2025 menunjukkan adanya Pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp. 9.065.883.043,00) yang berasal dari penambahan target anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 26.999.082.703,00 atau 2,76% dan pengurangan target anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar (Rp. 36.064.965.746,00) atau -6,66%.

Tabel 2.8 Perubahan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.148.430.324.000,00	2.139.364.440.957,00	-9.065.883.043,00
4.2.01.05	Dana Desa	316.480.417.000,00	316.480.417.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	316.480.417.000,00	316.480.417.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	316.480.417.000,00	316.480.417.000,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	22.200.037.000,00	22.200.037.000,00	0,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	22.200.037.000,00	22.200.037.000,00	0,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	22.200.037.000,00	22.200.037.000,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	288.540.736.000,00	288.540.736.000,00	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	226.179.086.000,00	226.179.086.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	63.331.330.000,00	63.331.330.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	123.973.396.000,00	123.973.396.000,00	0,00
4.2.01.07.	DBH PPh Pasal 25	6.034.429.000,00	6.034.429.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
01.0003	dan Pasal 29/WPOPDN			
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.839.931.000,00	32.839.931.000,00	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	62.361.650.000,00	62.361.650.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	38.891.105.000,00	38.891.105.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	20.317.634.000,00	20.317.634.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.601.057.000,00	1.601.057.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	120.570.000,00	120.570.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.419.074.000,00	1.419.074.000,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	979.891.013.000,00	1.006.890.095.703,00	26.999.082.703,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	896.467.938.000,00	929.657.683.703,00	33.189.745.703,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	896.467.938.000,00	929.657.683.703,00	33.189.745.703,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	83.423.075.000,00	77.232.412.000,00	-6.190.663.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13.358.041.000,00	13.358.041.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	34.734.009.000,00	34.734.009.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.940.362.000,00	23.940.362.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	6.190.663.000,00	0,00	-6.190.663.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	541.318.121.000,00	505.253.155.254,00	-36.064.965.746,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	142.047.927.000,00	109.254.038.000,00	-32.793.889.000,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	27.714.913.000,00	0,00	-27.714.913.000,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14.178.933.000,00	0,00	-14.178.933.000,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.127.353.000,00	0,00	-5.127.353.000,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.078.976.000,00	0,00	-5.078.976.000,00
4.2.01.09.01.0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan	30.000.000.000,00	0,00	-30.000.000.000,00
4.2.01.09.01.0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	17.000.000.000,00	0,00	-17.000.000.000,00
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	10.164.147.000,00	10.164.147.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	493.828.000,00	493.828.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	216.600.000,00	216.600.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	6.117.856.000,00	0,00	-6.117.856.000,00
4.2.01.09.01.0083	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan	1.200.985.000,00	1.200.985.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Permukiman Kumuh Terpadu			
4.2.01.09.01.0085	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	5.856.223.000,00	4.656.223.000,00	-1.200.000.000,00
4.2.01.09.01.0086	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	18.898.113.000,00	18.898.113.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0101	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	0,00	6.117.856.000,00	6.117.856.000,00
4.2.01.09.01.0106	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar	0,00	14.178.933.000,00	14.178.933.000,00
4.2.01.09.01.0108	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar	0,00	5.127.353.000,00	5.127.353.000,00
4.2.01.09.01.0109	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
4.2.01.09.01.0115	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri	0,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
4.2.01.09.01.0116	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan	0,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Industri			
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	399.270.194.000,00	395.999.117.254,00	-3.271.076.746,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	131.145.900.000,00	131.145.900.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.055.250.000,00	4.055.250.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	172.932.849.000,00	172.932.849.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	590.250.000,00	590.250.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	535.975.000,00	524.706.015,00	-11.268.985,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	28.192.630.000,00	0,00	-28.192.630.000,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	70.194.000,00	0,00	-70.194.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	12.189.200.000,00	0,00	-12.189.200.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	496.465.663,00	-9.224.337,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	208.561.050,00	208.561.050,00
4.2.01.09.02.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.225.500.000,00	3.225.500.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	3.763.906.000,00	3.763.906.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	37.830.960.000,00	37.830.960.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	495.000.000,00	495.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.646.890.000,00	3.646.890.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00	10.601.373.846,00	10.601.373.846,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	70.194.000,00	70.194.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	14.844.531.778,00	14.844.531.778,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0,00	11.476.779.902,00	11.476.779.902,00

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya, baik Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, pemerataan fiskal, dan sinergi pembangunan lintas wilayah. Pendapatan transfer antar daerah memiliki peran penting dalam mendukung sinkronisasi pembangunan, khususnya dalam pembiayaan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta penguatan konektivitas wilayah. Optimalisasi koordinasi dan kepatuhan pelaporan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pemanfaatan dana transfer antar daerah. Perubahan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 berasal dari penambahan target anggaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 841.877.000,00 atau 5,73%.

Tabel 2.9 Perubahan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	155.494.570.000,00	156.336.447.000,00	841.877.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	140.795.170.000,00	140.795.170.000,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	140.795.170.000,00	140.795.170.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	472.000.000,00	472.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	73.741.000.000,00	73.741.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	584.000.000,00	584.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	65.768.170.000,00	65.768.170.000,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	14.699.400.000,00	15.541.277.000,00	841.877.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	14.699.400.000,00	15.541.277.000,00	841.877.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	14.699.400.000,00	15.541.277.000,00	841.877.000,00

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan daerah di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang diperoleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pos ini menampung penerimaan yang tidak termasuk kategori pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun transfer pusat dan antar daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berfungsi sebagai sumber pendanaan pelengkap yang dapat memperkuat kapasitas fiskal, terutama dalam mendukung kegiatan prioritas yang bersifat khusus atau

insidental. Pengelolaannya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak ditargetkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

2.4 KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan struktur dan alokasi belanja terhadap dinamika perkembangan fiskal, capaian kinerja sampai dengan semester pertama, serta perubahan asumsi ekonomi makro dan kebijakan nasional. Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian anggaran agar pelaksanaan APBD tetap realistis, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang berkembang. Penyesuaian belanja daerah didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap realisasi pendapatan dan belanja, proyeksi kemampuan keuangan daerah hingga akhir tahun anggaran, serta identifikasi kegiatan yang memerlukan penguatan maupun rasionalisasi. Perubahan belanja juga diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan prioritas dan mendesak, termasuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat, penguatan pelayanan dasar, serta dukungan terhadap program prioritas daerah yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan terhadap kegiatan yang capaian kinerjanya belum optimal, mengalami perubahan target, atau tidak dapat direalisasikan sampai akhir tahun anggaran, untuk selanjutnya dialihkan pada kegiatan yang lebih produktif dan berdampak langsung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Daerah Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 3.843.558.853.847,60 dan Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 3.945.861.940.316,08 berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tabel 2.10 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5	BELANJA DAERAH	3.843.558.853.847,60	3.945.861.940.316,08	102.303.086.468,48
5.1	BELANJA OPERASI	2.616.782.876.867,84	2.679.314.549.333,97	62.531.672.466,13
5.1.01	Belanja Pegawai	1.235.332.215.328,93	1.243.218.642.996,52	7.792.585.985,59
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.067.914.545.255,28	1.152.962.238.635,82	85.047.693.380,54
5.1.03	Belanja Bunga	720.052.083,63	720.052.083,63	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	298.983.759.700,00	268.525.152.800,00	(30.458.606.900,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.832.304.500,00	13.982.304.500,00	150.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	420.515.473.905,00	468.761.401.780,03	48.245.927.875,03
5.2.01	Belanja Modal Tanah	39.493.719.200,00	61.742.872.000,00	22.249.152.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.444.484.005,00	98.601.202.458,53	23.156.718.453,53
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.662.907.154,20	122.857.341.580,90	19.194.434.426,70
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	193.945.894.233,80	173.222.045.069,60	(20.723.849.164,20)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.968.469.312,00	12.337.940.671,00	4.369.471.359,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	23.690.964.990,95	3.784.806.672,95
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	23.690.964.990,95	3.784.806.672,95
5.4	BELANJA TRANSFER	786.260.503.074,76	774.001.182.529,13	(12.259.320.545,63)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	121.094.968.894,76	123.052.435.907,66	1.957.467.012,90
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	665.165.534.180,00	650.948.746.621,47	(14.216.787.558,53)

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.4.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin dan mendasar dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta pelayanan publik kepada masyarakat. kebijakan Belanja Operasi disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester pertama serta proyeksi kebutuhan hingga akhir tahun anggaran. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan kecukupan anggaran terhadap belanja yang bersifat wajib dan mengikat, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja subsidi dan bantuan keuangan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Rasionalisasi dilakukan secara selektif terhadap komponen belanja yang kurang prioritas atau yang realisasinya diperkirakan tidak optimal sampai akhir tahun. Pada P-APBD 2025, target Belanja Operasi bertambah sebesar Rp. 62.531.672.466,13 atau 2,39% menjadi Rp. 2.679.314.549.333,97 dari target APBD Rp. 2.616.782.876.867,84. Perubahan tersebut terjadi karena adanya penambahan target pada Komponen Belanja Pegawai Rp. 7.792.585.985,59, Belanja Barang dan Jasa Rp. 85.047.693.380,54, dan Belanja Bantuan Sosial Rp. 150.000.000,00. Selain itu terdapat pengurangan target pada komponen Belanja Hibah (Rp. 30.458.606.900,00).

Tabel 2.11 Perubahan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	2.616.782.876.867,84	2.679.314.549.333,97	62.531.672.466,13
5.1.01	Belanja Pegawai	1.235.332.215.328,93	1.243.218.642.996,52	7.792.585.985,59
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.067.914.545.255,28	1.152.962.238.635,82	85.047.693.380,54
5.1.03	Belanja Bunga	720.052.083,63	720.052.083,63	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	298.983.759.700,00	268.525.152.800,00	(30.458.606.900,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.832.304.500,00	13.982.304.500,00	150.000.000,00

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.4.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan komponen Belanja Operasi yang dialokasikan untuk memenuhi hak keuangan dan kesejahteraan aparatur sipil negara serta pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja ini mencakup gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai (TPP), insentif, serta pembayaran lainnya yang sah dan melekat pada status kepegawaian. Sebagai belanja yang bersifat wajib dan mengikat, Belanja Pegawai memiliki peranan penting dalam menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberlangsungan pelayanan publik. kebijakan Belanja Pegawai disusun berdasarkan evaluasi realisasi semester pertama, proyeksi kebutuhan hingga akhir tahun anggaran, serta penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional maupun daerah di bidang kepegawaian. Penyesuaian anggaran dapat dipengaruhi oleh perubahan jumlah

pegawai, pengangkatan CPNS/PPPK, kenaikan pangkat dan golongan, pemberian gaji berkala, serta kebijakan terkait tunjangan dan tambahan penghasilan. Penambahan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 7.792.585.985,59 atau 0,63% berasal dari Penambahan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp. 51.499.055.096,54, Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp. 50.223.428.898,00, dan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp. 8.196.070.841,95 yang terakumulasi dengan pengurangan target di beberapa komponen.

Tabel 2.12 Perubahan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.235.332.215.328,93	1.243.124.801.314,52	7.792.585.985,59
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	702.432.508.779,25	665.961.015.460,64	-36.471.493.318,61
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	509.769.820.467,12	481.957.839.458,56	-27.811.981.008,56
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	378.769.240.680,12	359.029.819.530,49	-19.739.421.149,63
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	131.000.579.787,00	122.928.019.928,07	-8.072.559.858,93
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	51.731.761.590,14	47.417.687.242,92	-4.314.074.347,22
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	37.660.993.626,16	34.250.736.721,79	-3.410.256.904,37
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.070.767.963,98	13.166.950.521,13	-903.817.442,85
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.667.543.680,00	5.901.317.350,00	-766.226.330,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.657.497.680,00	5.895.289.350,00	-762.208.330,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	10.046.000,00	6.028.000,00	-4.018.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	37.473.242.157,49	35.814.975.792,00	-1.658.266.365,49
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	25.822.045.707,00	24.402.625.190,00	-1.419.420.517,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	11.651.196.450,49	11.412.350.602,00	-238.845.848,49
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	5.724.771.550,00	5.178.468.174,00	-546.303.376,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	ASN			
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.772.624.600,00	4.452.473.750,00	-320.150.850,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	952.146.950,00	725.994.424,00	-226.152.526,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	30.243.563.016,27	27.515.629.207,60	-2.727.933.808,67
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.662.295.839,67	18.642.874.205,40	-2.019.421.634,27
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.581.267.176,60	8.872.755.002,20	-708.512.174,40
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.262.532.100,54	13.970.408.816,40	-292.123.284,14
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.224.685.317,54	13.970.408.816,40	-254.276.501,14
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	37.846.783,00	0,00	-37.846.783,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.341.765,01	9.172.631,33	-4.169.133,68
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.727.398,33	6.360.975,59	-3.366.422,74
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.614.366,68	2.811.655,74	-802.710,94
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	39.270.404.063,97	42.528.841.502,31	3.258.437.438,34
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	32.914.261.595,66	35.103.485.573,35	2.189.223.977,69
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.356.142.468,31	7.425.355.928,96	1.069.213.460,65
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.223.705.271,22	1.145.705.242,15	-78.000.029,07
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan	909.598.565,37	850.669.680,81	-58.928.884,56

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Kerja PNS			
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	314.106.705,85	295.035.561,34	-19.071.144,51
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.669.092.533,55	3.437.081.726,72	-232.010.806,83
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.726.782.675,10	2.551.992.035,19	-174.790.639,91
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	942.309.858,45	885.089.691,53	-57.220.166,92
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.382.730.583,94	1.083.888.316,65	-1.298.842.267,29
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.809.100.799,14	821.555.807,25	-987.544.991,89
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	573.629.784,80	262.332.509,40	-311.297.275,40
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	407.359.476.561,68	444.405.313.501,93	37.045.836.940,25
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	104.211.459.954,47	95.677.176.263,83	-8.534.283.690,64
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	97.454.488.246,78	91.143.202.790,65	-6.311.285.456,13
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.756.971.707,69	4.533.973.473,18	-2.222.998.234,51

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.665.307.619,66	1.560.376.727,49	-104.930.892,17
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.665.307.619,66	1.560.376.727,49	-104.930.892,17
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	62.436.999,51	57.635.000,00	-4.801.999,51
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	62.436.999,51	57.635.000,00	-4.801.999,51
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	86.260.098.382,54	80.450.896.808,57	-5.809.201.573,97
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	86.260.098.382,54	80.450.896.808,57	-5.809.201.573,97
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	215.160.173.605,50	266.659.228.702,04	51.499.055.096,54
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan			
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	288.050.000,00	388.050.000,00	100.000.000,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	227.500.000,00	327.500.000,00	100.000.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	148.925.000,00	148.925.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.856.852.675,00	7.856.852.675,00	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	14.471.012.086,50	14.471.012.086,50	0,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas	11.732.000.000,00	11.732.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)			
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.483.164.520,00	3.484.040.718,54	876.198,54
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.618.987.624,00	1.418.987.624,00	-200.000.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	172.932.849.000,00	223.156.277.898,00	50.223.428.898,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	590.250.000,00	1.865.000.000,00	1.274.750.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.773.832.700,00	1.773.832.700,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.825.830.211,00	32.761.208.000,00	-1.064.622.211,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	156.009.000,00	126.241.500,00	-29.767.500,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	156.009.000,00	126.241.500,00	-29.767.500,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	202.776.000,00	159.106.740,00	-43.669.260,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	202.776.000,00	159.106.740,00	-43.669.260,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	134.649.900,00	131.726.700,00	-2.923.200,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	134.649.900,00	131.726.700,00	-2.923.200,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.087.300,00	16.625.700,00	-1.461.600,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.087.300,00	16.625.700,00	-1.461.600,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	308.733.460,00	193.935,00	-308.539.525,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	308.733.460,00	193.935,00	-308.539.525,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00	703,40	703,40
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00	703,40	703,40

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	12.802.404.551,00	12.159.262.721,60	-643.141.829,40
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	485.555.196,00	483.165.825,60	-2.389.370,40
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.212.339,00	2.674.224,00	-1.538.115,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.637.016,00	8.022.672,00	-4.614.344,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	12.300.000.000,00	11.665.400.000,00	-634.600.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.348.000.000,00	6.312.880.000,00	-35.120.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.348.000.000,00	6.312.880.000,00	-35.120.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.515.708.000,00	3.640.368.000,00	124.660.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	109.200.000,00	101.400.000,00	-7.800.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	109.200.000,00	101.400.000,00	-7.800.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.240.000,00	4.188.000,00	-5.052.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.240.000,00	4.188.000,00	-5.052.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	196.840.000,00	98.300.000,00	-98.540.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	196.840.000,00	98.300.000,00	-98.540.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	12.167.000,00	5.215.000,00	-6.952.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	12.167.000,00	5.215.000,00	-6.952.000,00
5.1.01.05.	Belanja Tunjangan	453.000,00	316.566.000,00	316.113.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
05	PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH			
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	453.000,00	316.566.000,00	316.113.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	116.492.000,00	127.601.000,00	11.109.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	116.492.000,00	127.601.000,00	11.109.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	263.000,00	244.000,00	-19.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	263.000,00	244.000,00	-19.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	787.000,00	731.000,00	-56.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	787.000,00	731.000,00	-56.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2.872.000.000,00	2.797.000.000,00	-75.000.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Hiburan			
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	506.000.000,00	506.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	984.000.000,00	909.000.000,00	-75.000.000,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	845.000.000,00	845.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Bermotor (PKB)			
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	198.260.000,00	189.120.000,00	-9.140.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	160.000.000,00	152.000.000,00	-8.000.000,00
5.1.01.05.11.0032	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	38.260.000,00	37.120.000,00	-1.140.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.783.120.000,00	2.745.253.733,00	-37.866.267,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.390.000.000,00	2.352.133.733,00	-37.866.267,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.390.000.000,00	2.352.133.733,00	-37.866.267,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai	85.415.571.777,00	93.611.642.618,95	8.196.070.841,95

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	BLUD			
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	85.415.571.777,00	93.611.642.618,95	8.196.070.841,95
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	85.415.571.777,00	93.611.642.618,95	8.196.070.841,95
KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.235.332.215.328,93	1.243.124.801.314,52	7.792.585.985,59
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	702.432.508.779,25	665.961.015.460,64	-36.471.493.318,61
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	509.769.820.467,12	481.957.839.458,56	-27.811.981.008,56
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	378.769.240.680,12	359.029.819.530,49	-19.739.421.149,63
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	131.000.579.787,00	122.928.019.928,07	-8.072.559.858,93
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	51.731.761.590,14	47.417.687.242,92	-4.314.074.347,22
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	37.660.993.626,16	34.250.736.721,79	-3.410.256.904,37
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.070.767.963,98	13.166.950.521,13	-903.817.442,85
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.667.543.680,00	5.901.317.350,00	-766.226.330,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.657.497.680,00	5.895.289.350,00	-762.208.330,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	10.046.000,00	6.028.000,00	-4.018.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	37.473.242.157,49	35.814.975.792,00	-1.658.266.365,49
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	25.822.045.707,00	24.402.625.190,00	-1.419.420.517,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	11.651.196.450,49	11.412.350.602,00	-238.845.848,49
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.724.771.550,00	5.178.468.174,00	-546.303.376,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.772.624.600,00	4.452.473.750,00	-320.150.850,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	952.146.950,00	725.994.424,00	-226.152.526,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	PPPK			
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	30.243.563.016,27	27.515.629.207,60	-2.727.933.808,67
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.662.295.839,67	18.642.874.205,40	-2.019.421.634,27
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.581.267.176,60	8.872.755.002,20	-708.512.174,40
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.262.532.100,54	13.970.408.816,40	-292.123.284,14
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.224.685.317,54	13.970.408.816,40	-254.276.501,14
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	37.846.783,00	0,00	-37.846.783,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.341.765,01	9.172.631,33	-4.169.133,68
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.727.398,33	6.360.975,59	-3.366.422,74
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.614.366,68	2.811.655,74	-802.710,94
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	39.270.404.063,97	42.528.841.502,31	3.258.437.438,34
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	32.914.261.595,66	35.103.485.573,35	2.189.223.977,69
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.356.142.468,31	7.425.355.928,96	1.069.213.460,65
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.223.705.271,22	1.145.705.242,15	-78.000.029,07
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	909.598.565,37	850.669.680,81	-58.928.884,56
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	314.106.705,85	295.035.561,34	-19.071.144,51
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian	3.669.092.533,55	3.437.081.726,72	-232.010.806,83

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	ASN			
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.726.782.675,10	2.551.992.035,19	-174.790.639,91
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	942.309.858,45	885.089.691,53	-57.220.166,92
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.382.730.583,94	1.083.888.316,65	-1.298.842.267,29
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.809.100.799,14	821.555.807,25	-987.544.991,89
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	573.629.784,80	262.332.509,40	-311.297.275,40
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	407.359.476.561,68	444.405.313.501,93	37.045.836.940,25
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	104.211.459.954,47	95.677.176.263,83	-8.534.283.690,64
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	97.454.488.246,78	91.143.202.790,65	-6.311.285.456,13
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.756.971.707,69	4.533.973.473,18	-2.222.998.234,51
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.665.307.619,66	1.560.376.727,49	-104.930.892,17
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan	1.665.307.619,66	1.560.376.727,49	-104.930.892,17

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	berdasarkan Kondisi Kerja PNS			
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	62.436.999,51	57.635.000,00	-4.801.999,51
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	62.436.999,51	57.635.000,00	-4.801.999,51
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	86.260.098.382,54	80.450.896.808,57	-5.809.201.573,97
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	86.260.098.382,54	80.450.896.808,57	-5.809.201.573,97
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	215.160.173.605,50	266.659.228.702,04	51.499.055.096,54
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak	288.050.000,00	388.050.000,00	100.000.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Daerah-Pajak Reklame			
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	227.500.000,00	327.500.000,00	100.000.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	148.925.000,00	148.925.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.856.852.675,00	7.856.852.675,00	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	14.471.012.086,50	14.471.012.086,50	0,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	11.732.000.000,00	11.732.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.483.164.520,00	3.484.040.718,54	876.198,54
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.618.987.624,00	1.418.987.624,00	-200.000.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	172.932.849.000,00	223.156.277.898,00	50.223.428.898,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	590.250.000,00	1.865.000.000,00	1.274.750.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.773.832.700,00	1.773.832.700,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.825.830.211,00	32.761.208.000,00	-1.064.622.211,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	156.009.000,00	126.241.500,00	-29.767.500,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	156.009.000,00	126.241.500,00	-29.767.500,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	202.776.000,00	159.106.740,00	-43.669.260,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	202.776.000,00	159.106.740,00	-43.669.260,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	134.649.900,00	131.726.700,00	-2.923.200,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	134.649.900,00	131.726.700,00	-2.923.200,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.087.300,00	16.625.700,00	-1.461.600,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.087.300,00	16.625.700,00	-1.461.600,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	308.733.460,00	193.935,00	-308.539.525,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	308.733.460,00	193.935,00	-308.539.525,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00	703,40	703,40
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00	703,40	703,40
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	12.802.404.551,00	12.159.262.721,60	-643.141.829,40

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	485.555.196,00	483.165.825,60	-2.389.370,40
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.212.339,00	2.674.224,00	-1.538.115,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.637.016,00	8.022.672,00	-4.614.344,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	12.300.000.000,00	11.665.400.000,00	-634.600.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.348.000.000,00	6.312.880.000,00	-35.120.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.348.000.000,00	6.312.880.000,00	-35.120.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.515.708.000,00	3.640.368.000,00	124.660.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	109.200.000,00	101.400.000,00	-7.800.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	109.200.000,00	101.400.000,00	-7.800.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.240.000,00	4.188.000,00	-5.052.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.240.000,00	4.188.000,00	-5.052.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	196.840.000,00	98.300.000,00	-98.540.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	196.840.000,00	98.300.000,00	-98.540.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	12.167.000,00	5.215.000,00	-6.952.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	12.167.000,00	5.215.000,00	-6.952.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	453.000,00	316.566.000,00	316.113.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan	453.000,00	316.566.000,00	316.113.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Khusus KDH/WKDH			
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	116.492.000,00	127.601.000,00	11.109.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	116.492.000,00	127.601.000,00	11.109.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	263.000,00	244.000,00	-19.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	263.000,00	244.000,00	-19.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	787.000,00	731.000,00	-56.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	787.000,00	731.000,00	-56.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2.872.000.000,00	2.797.000.000,00	-75.000.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Reklame			
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	506.000.000,00	506.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	984.000.000,00	909.000.000,00	-75.000.000,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	845.000.000,00	845.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)			
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	198.260.000,00	189.120.000,00	-9.140.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	160.000.000,00	152.000.000,00	-8.000.000,00
5.1.01.05.11.0032	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	38.260.000,00	37.120.000,00	-1.140.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.783.120.000,00	2.745.253.733,00	-37.866.267,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.390.000.000,00	2.352.133.733,00	-37.866.267,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.390.000.000,00	2.352.133.733,00	-37.866.267,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	85.415.571.777,00	93.611.642.618,95	8.196.070.841,95
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	85.415.571.777,00	93.611.642.618,95	8.196.070.841,95
5.1.01.99.	Belanja Pegawai	85.415.571.777,00	93.611.642.618,95	8.196.070.841,95

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
99.9999	BLUD			

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan komponen Belanja Operasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Belanja ini mencakup pengadaan barang habis pakai, jasa kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas, jasa konsultansi, sewa, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya yang manfaatnya tidak melebihi satu tahun anggaran. kebijakan Belanja Barang dan Jasa disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester pertama serta proyeksi kebutuhan riil hingga akhir tahun anggaran. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan kecukupan dukungan operasional terhadap program dan kegiatan prioritas, sekaligus melakukan rasionalisasi terhadap komponen belanja yang kurang mendesak atau berpotensi tidak terealisasi secara optimal. Langkah ini bertujuan menjaga efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. P-APBD 2025 menunjukkan adanya penambahan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 85.047.693.380,54 yang berasal dari penambahan komponen Belanja Barang Rp. 28.619.320.811,34, Belanja Jasa sebesar Rp. 78.788.179.894,96, Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 6.217.926.675,93, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 9.303.064.389,00, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp. 7.302.731.126,86 yang terakumulasi dengan pengurangan komponen Belanja Perjalanan Dinas sebesar (Rp. 44.416.204.296,55) dan Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar (Rp. 767.325.221,00).

Tabel 2.13 Perubahan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan	1.067.914.545.255,28	1.152.962.238.635,82	85.047.693.380,54

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Jasa			
5.1.02.01	Belanja Barang	194.119.187.617,08	222.738.508.428,42	28.619.320.811,34
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	193.941.760.643,08	221.876.496.904,42	27.934.736.261,34
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.696.534.523,00	27.364.164.044,00	9.667.629.521,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.649.935.200,00	3.428.115.410,00	1.778.180.210,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.021.511.153,83	14.511.379.669,47	-510.131.484,36
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	378.699.100,00	506.062.100,00	127.363.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.541.450,00	31.241.700,00	22.700.250,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	77.268.525,00	94.104.676,00	16.836.151,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.939.865.100,00	12.756.658.442,00	1.816.793.342,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	647.810.750,00	1.421.710.024,00	773.899.274,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	109.322.171,00	510.000.000,00	400.677.829,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	24.198.000,00	25.755.600,00	1.557.600,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	55.647.700,00	32.081.100,00	-23.566.600,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	126.604.300,00	120.797.116,00	-5.807.184,00
5.1.02.01.	Belanja Suku	73.798.400,00	73.798.400,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
01.0023	Cadang-Suku Cadang Lainnya			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.046.244.876,00	6.867.892.912,99	821.648.036,99
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.128.158.833,97	5.006.782.683,49	-121.376.150,48
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.911.999.753,03	26.913.602.881,43	1.603.128,40
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	327.346.084,00	328.431.084,00	1.085.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.713.835.106,00	5.538.871.696,00	825.036.590,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.040.029.998,00	6.534.547.728,00	494.517.730,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.264.694.467,00	7.923.427.465,00	2.658.732.998,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.167.171.490,00	3.969.549.390,00	802.377.900,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	716.376.400,00	848.939.800,00	132.563.400,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.934.433.885,25	2.351.593.690,21	417.159.804,96
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	8.950.628.500,00	126.844.200,00	-8.823.784.300,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.712.363.955,09	10.628.051.228,09	5.915.687.273,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.616.205.600,00	39.333.202.300,00	7.716.996.700,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.707.821.539,91	8.785.387.435,91	1.077.565.896,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	59.160.000,00	59.160.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	215.659.000,00	206.600.000,00	-9.059.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.862.689.850,00	27.177.715.735,83	1.315.025.885,83
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.179.743.540,00	3.877.485.817,00	697.742.277,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	10.050.000,00	8.580.000,00	-1.470.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	683.402.000,00	605.447.000,00	-77.955.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	318.252.000,00	180.867.000,00	-137.385.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.591.251.667,00	2.635.298.300,00	44.046.633,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	267.750.000,00	391.451.250,00	123.701.250,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	13.500.000,00	3.375.000,00	-10.125.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	71.213.025,00	75.181.325,00	3.968.300,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	121.142.700,00	121.142.700,00	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	73.808.400,00	83.808.400,00	10.000.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	12.180.000,00	12.180.000,00	0,00
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	61.628.400,00	61.628.400,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	103.618.574,00	778.203.124,00	674.584.550,00
5.1.02.01.04.0010	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0023	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	7.490.800,00	606.754.800,00	599.264.000,00
5.1.02.01.04.0025	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	1.600.000,00	84.324.000,00	82.724.000,00
5.1.02.01.04.0044	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.616.000,00	3.616.000,00	0,00
5.1.02.01.	Belanja Peralatan dan	3.139.524,00	3.139.524,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
04.0079	Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting			
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	24.305.200,00	610.400,00	-23.694.800,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	45.034.650,00	63.955.800,00	18.921.150,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	854.800,00	854.800,00
5.1.02.01.04.0138	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	11.112.400,00	5.556.200,00	-5.556.200,00
5.1.02.01.04.0204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	671.600,00	671.600,00
5.1.02.01.04.0438	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa	439.683.724.170,56	518.471.904.065,52	78.788.179.894,96
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	276.135.986.857,81	319.959.974.495,86	43.823.987.638,05
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.511.186.008,00	30.680.846.130,00	12.169.660.122,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.396.650.000,00	2.386.870.000,00	-9.780.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	277.900.000,00	312.400.000,00	34.500.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	567.000.000,00	557.400.000,00	-9.600.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.089.870.000,00	1.536.820.000,00	446.950.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.600.000,00	64.400.000,00	53.800.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	524.400.000,00	524.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	39.867.600.000,00	68.588.400.000,00	28.720.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	28.031.664.300,00	27.712.034.300,00	-319.630.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	960.080.000,00	952.455.000,00	-7.625.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.096.159.588,64	5.525.597.828,00	-2.570.561.760,64
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	3.828.000.000,00	3.817.500.000,00	-10.500.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Masyarakat			
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.583.000.000,00	2.583.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.634.648.000,00	1.726.348.000,00	91.700.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	241.680.000,00	241.680.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	37.203.000,00	37.203.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	423.000.000,00	587.000.000,00	164.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.420.500.000,00	47.744.500.000,00	-676.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	166.097.506,00	155.597.506,00	-10.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	386.025.000,00	385.350.000,00	-675.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.503.200.000,00	1.520.700.000,00	17.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.634.615.100,00	19.589.714.600,00	-44.900.500,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.763.525.000,00	8.753.880.000,00	-9.645.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.713.056.000,00	3.168.053.250,91	-545.002.749,09
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	58.025.900,00	108.025.900,00	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	234.000.000,00	1.089.500.000,00	855.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	215.100.000,00	250.290.000,00	35.190.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Teknologi			
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	30.845.000,00	30.225.000,00	-620.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.953.503.000,00	3.096.085.000,00	1.142.582.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	51.500.000,00	104.500.000,00	53.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	145.414.550,00	229.472.550,00	84.058.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	217.400.000,00	233.213.000,00	15.813.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	388.909.800,00	330.530.000,49	-58.379.799,51
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	250.208.000,00	501.186.000,00	250.978.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.788.761.900,00	12.444.801.900,00	4.656.040.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.567.566.544,50	3.727.392.093,50	159.825.549,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.610.608.842,50	1.394.471.551,43	-216.137.291,07
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	51.006.575.668,17	50.023.972.565,53	-982.603.102,64
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	619.619.600,00	581.825.400,00	-37.794.200,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.332.509.650,00	6.286.537.150,00	-45.972.500,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.078.840.650,00	787.543.670,00	-291.296.980,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	816.220.000,00	1.053.510.000,00	237.290.000,00
5.1.02.02.	Belanja Pengolahan	14.500.000,00	19.500.000,00	5.000.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
01.0069	Air Limbah			
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	8.084.563.250,00	8.314.908.100,00	230.344.850,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	122.500.000,00	104.500.000,00	-18.000.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	60.235.000,00	60.235.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	109.014.740.005,00	136.709.798.205,00	27.695.058.200,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.702.128.000,00	7.702.128.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	98.384.151.105,00	125.384.151.105,00	27.000.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	476.928.000,00	576.000.000,00	99.072.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.107.487.200,00	1.462.512.800,00	355.025.600,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.344.045.700,00	1.585.006.300,00	240.960.600,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	52.700.000,00	52.700.000,00	0,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	52.700.000,00	52.700.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.082.590.958,00	12.476.146.447,00	2.393.555.489,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	17.999.840,00	2.000.000,00	-15.999.840,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	24.418.750,00	3.750.000,00	-20.668.750,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.574.448.950,00	2.545.985.850,00	-28.463.100,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.809.165.518,00	1.544.570.660,00	-264.594.858,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.564.800,00	3.750.000,00	-12.814.800,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.868.000,00	22.272.000,00	-3.596.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.705.090.700,00	6.601.217.577,00	1.896.126.877,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	408.685.400,00	857.949.600,00	449.264.200,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	332.949.000,00	767.840.760,00	434.891.760,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	167.400.000,00	108.810.000,00	-58.590.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	419.530.000,00	899.910.000,00	480.380.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	14.850.000,00	214.500.000,00	199.650.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	404.680.000,00	685.410.000,00	280.730.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.324.820.534,00	14.268.316.504,00	3.943.495.970,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	1.362.859.900,00	2.215.488.573,60	852.628.673,60
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi	345.983.000,00	463.722.000,00	117.739.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural			
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.364.020.000,00	4.740.617.000,00	2.376.597.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.128.315.000,00	2.694.021.250,00	565.706.250,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	777.558.000,00	1.060.976.000,00	283.418.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	436.961.000,00	534.513.546,40	97.552.546,40
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	424.374.000,00	449.720.500,00	25.346.500,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.577.249.634,00	1.374.257.634,00	-202.992.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	907.500.000,00	735.000.000,00	-172.500.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	21.476.328.215,72	21.790.124.468,66	313.796.252,94
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	609.066.500,00	609.066.500,00	0,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	3.304.866.070,72	3.357.423.912,72	52.557.842,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	3.225.500.000,00	2.742.500.000,00	-483.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	293.000.000,00	293.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	25.023.000,00	25.023.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	41.266.000,00	41.266.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	129.987.800,00	214.987.800,00	85.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi	9.163.730.400,00	9.992.426.055,94	828.695.655,94

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.314.403.600,00	1.266.756.800,00	-47.646.800,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.994.885.145,00	2.873.074.700,00	-121.810.445,00
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	10.599.700,00	10.599.700,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	1.021.000.000,00	1.021.000.000,00	0,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.021.000.000,00	1.021.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.837.829.000,03	10.082.620.000,00	244.790.999,97
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.442.869.000,03	6.046.660.000,00	-396.209.000,03
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	35.060.000,00	35.060.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	3.359.900.000,00	4.000.900.000,00	641.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1.318.198.600,00	1.211.313.945,00	-106.884.655,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	746.136.700,00	703.952.650,00	-42.184.050,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	572.061.900,00	507.361.295,00	-64.700.605,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	31.449.002.415,80	37.666.929.091,73	6.217.926.675,93
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.221.200,00	0,00	-1.221.200,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	1.221.200,00	0,00	-1.221.200,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.367.471.990,00	17.048.041.984,00	2.680.569.994,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	1.635.000.000,00	1.824.000.000,00	189.000.000,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	433.992.400,00	412.502.800,00	-21.489.600,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	222.008.100,00	231.518.000,00	9.509.900,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.763.543.060,00	2.352.299.860,00	588.756.800,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.502.791.400,00	5.058.661.400,00	555.870.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat	1.351.059.699,00	1.872.483.299,00	521.423.600,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	356.468.000,00	350.078.000,00	-6.390.000,00
5.1.02.03.02.0048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	31.959.100,00	31.959.100,00	0,00
5.1.02.03.02.0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	193.406.400,00	193.406.400,00	0,00
5.1.02.03.02.0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	7.200.000,00	57.000.000,00	49.800.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	92.561.275,00	97.623.775,00	5.062.500,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	178.115.556,00	276.815.100,00	98.699.544,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	70.200.000,00	76.600.000,00	6.400.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	964.742.100,00	992.522.550,00	27.780.450,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Pendingin			
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	237.855.300,00	238.710.000,00	854.700,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	93.891.900,00	105.976.200,00	12.084.300,00
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	732.600,00	732.600,00	0,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	164.191.600,00	166.388.500,00	2.196.900,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	882.813.800,00	1.005.514.900,00	122.701.100,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	619.216.700,00	675.416.700,00	56.200.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	46.961.100,00	46.961.100,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
02.0410	Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan			
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	460.156.700,00	704.481.300,00	244.324.600,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	44.605.200,00	234.890.400,00	190.285.200,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.442.793.125,80	13.784.371.007,73	3.341.577.881,93
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.909.092.467,80	9.657.728.618,73	2.748.636.150,93
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	26.075.200,00	0,00	-26.075.200,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	25.079.000,00	75.075.200,00	49.996.200,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.856.647.070,00	2.287.812.401,00	431.165.331,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	157.616.116,00	157.616.116,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Tempat Ibadah			
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	169.095.100,00	49.937.500,00	-119.157.600,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	178.444.800,00	205.627.200,00	27.182.400,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	752.583.000,00	723.246.000,00	-29.337.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	57.461.019,00	57.461.019,00	0,00
5.1.02.03.03.0019	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	54.576.000,00	54.576.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	176.123.353,00	176.142.953,00	19.600,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
03.0036	Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman			
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	59.148.000,00	59.148.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.611.757.600,00	6.808.757.600,00	197.000.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.939.681.850,00	3.939.681.850,00	0,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.496.061.950,00	1.496.061.950,00	0,00
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	111.295.000,00	111.295.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa	393.404.700,00	590.404.700,00	197.000.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Irigasi			
5.1.02.03.04.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.564.100,00	2.564.100,00	0,00
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.758.500,00	25.758.500,00	0,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	25.758.500,00	25.758.500,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	88.644.970.451,84	44.228.766.155,29	-44.416.204.296,55
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	87.738.996.371,84	44.228.766.155,29	-43.510.230.216,55
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.396.369.405,00	26.464.249.841,54	-28.932.119.563,46
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	79.090.000,00	43.748.900,00	-35.341.100,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.124.692.539,84	14.220.847.971,75	-7.903.844.568,09
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.536.334.527,00	1.212.531.027,00	-1.323.803.500,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.602.509.900,00	2.287.388.415,00	-5.315.121.485,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	905.974.080,00	0,00	-905.974.080,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	905.974.080,00	0,00	-905.974.080,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.156.716.901,00	55.459.781.290,00	9.303.064.389,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.464.867.000,00	28.504.467.000,00	3.039.600.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	647.900.000,00	758.000.000,00	110.100.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.987.000.000,00	2.091.500.000,00	104.500.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	0,00	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	22.789.967.000,00	22.789.967.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	40.000.000,00	15.000.000,00	-25.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.691.849.901,00	26.955.314.290,00	6.263.464.389,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	20.691.849.901,00	26.955.314.290,00	6.263.464.389,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	74.888.491.576,00	74.121.166.355,00	-767.325.221,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	74.262.109.826,00	73.494.784.605,00	-767.325.221,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	74.262.109.826,00	70.924.824.705,00	-3.337.285.121,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	0,00	2.569.959.900,00	2.569.959.900,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Kinerja			
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	98.349.500,00	98.349.500,00	0,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	98.349.500,00	98.349.500,00	0,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	528.032.250,00	528.032.250,00	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	528.032.250,00	528.032.250,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	192.972.452.123,00	200.275.183.249,86	7.302.731.126,86
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	192.972.452.123,00	200.275.183.249,86	7.302.731.126,86
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	192.972.452.123,00	200.275.183.249,86	7.302.731.126,86

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.4.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan pengeluaran daerah yang digunakan untuk pembayaran bunga atas kewajiban pokok utang pemerintah daerah, baik yang bersumber dari pinjaman pemerintah pusat, lembaga keuangan, maupun pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja ini bersifat wajib dan mengikat karena timbul sebagai konsekuensi atas perjanjian pinjaman yang telah disepakati, sehingga harus dialokasikan secara memadai dalam APBD untuk menjaga kredibilitas dan kesehatan fiskal daerah. Kebijakan Belanja Bunga dalam APBD Perubahan diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu, menjaga stabilitas fiskal daerah, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan pengelolaan yang disiplin dan terencana, Belanja Bunga diharapkan tidak

membebani struktur APBD secara berlebihan dan tetap sejalan dengan kapasitas fiskal daerah. Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 720.052.083,63.

Tabel 2.14 Perubahan Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.03	Belanja Bunga	720.052.083,63	720.052.083,63	0,00
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	720.052.083,63	720.052.083,63	0,00
5.1.03.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	720.052.083,63	720.052.083,63	0,00
5.1.03.03.04.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	720.052.083,63	720.052.083,63	0,00

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.4.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara/daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak bersifat wajib maupun mengikat secara terus-menerus. Pemberian hibah dimaksudkan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Belanja Hibah diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan yang memiliki dampak sosial dan pembangunan yang jelas, terukur, dan selaras dengan prioritas daerah. Oleh karena itu, pemberiannya harus didasarkan pada prinsip keadilan, kepatutan, rasionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban hibah dilakukan sesuai

ketentuan yang berlaku guna meminimalkan risiko penyimpangan serta memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Target Belanja Hibah pada P-APBD 2025 mengalami pengurangan sebesar (Rp. 30.458.606.900,00) atau -10,19% yang berasal dari pengurangan target Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar (Rp. 31.428.606.900,00) dan Belanja Hibah Dana BSOP sebesar (Rp. 2.780.000.000,00) yang terakumulasi dengan penambahan pada Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 3.750.000.000,00.

Tabel 2.15 Perubahan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.05	Belanja Hibah	298.983.759.700,00	268.525.152.800,00	-30.458.606.900,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.000.000.000,00	8.750.000.000,00	3.750.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.350.000.000,00	7.100.000.000,00	3.750.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.350.000.000,00	7.100.000.000,00	3.750.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	209.034.063.700,00	177.605.456.800,00	-31.428.606.900,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.964.080.000,00	14.164.080.000,00	200.000.000,00

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.964.080.000,00	14.164.080.000,00	200.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	178.924.983.700,00	146.696.376.800,00	-32.228.606.900,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	176.289.843.000,00	143.739.823.000,00	-32.550.020.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.635.140.700,00	2.956.553.800,00	321.413.100,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	16.145.000.000,00	16.745.000.000,00	600.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	16.145.000.000,00	16.745.000.000,00	600.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan	6.062.576.000,00	6.062.576.000,00	0,00

KODE	URAIAN	P-APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
	kepada Partai Politik			
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.062.576.000,00	6.062.576.000,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.062.576.000,00	6.062.576.000,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	78.887.120.000,00	76.107.120.000,00	-2.780.000.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	40.777.880.000,00	37.997.880.000,00	-2.780.000.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	40.777.880.000,00	37.997.880.000,00	-2.780.000.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	38.109.240.000,00	38.109.240.000,00	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	38.109.240.000,00	38.109.240.000,00	0,00

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.4.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial. Bantuan sosial bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya kerentanan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi dampak kondisi ekonomi dan sosial yang tidak menguntungkan. Belanja Bantuan Sosial mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan perlindungan sosial dan kapasitas anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, kebijakan dalam APBD Perubahan diarahkan untuk menjaga keberlanjutan intervensi sosial tanpa mengurangi ruang fiskal bagi program pembangunan prioritas lainnya. Dengan pengelolaan yang terencana dan berbasis data, Belanja Bantuan Sosial diharapkan mampu mendukung stabilitas sosial, memperkuat daya tahan masyarakat, serta berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Perubahan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 150.000.000,00 atau 1,08% berasal dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu.

Tabel 2.16 Perubahan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.832.304.500,00	13.982.304.500,00	150.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	13.832.304.500,00	13.982.304.500,00	150.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	13.520.000.000,00	13.670.000.000,00	150.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	13.520.000.000,00	13.670.000.000,00	150.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	312.304.500,00	312.304.500,00	0,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	312.304.500,00	312.304.500,00	0,00

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.4.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran serta menambah nilai aset pemerintah daerah. Belanja ini meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai instrumen pembangunan, Belanja Modal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas layanan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat daya saing daerah. Kebijakan Belanja Modal dalam APBD Perubahan bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas belanja pembangunan, mempercepat pencapaian target prioritas daerah, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan

ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pada P-APBD 2025, target Belanja Modal bertambah Rp. 48.245.927.875,03 atau 11,47% menjadi Rp. 468.761.401.780,03 dari target APBD 2025 sebesar Rp. 420.515.473.905,00. Perubahan tersebut terjadi karena adanya penambahan pada komponen Belanja Modal Tanah sebesar Rp.22.249.152.800,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.23.156.718.453,53, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.19.194.434.426,70, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.4.369.471.359,00 yang terakumulasi dengan pengurangan pada komponen Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar (Rp. 20.723.849.164,20).

Tabel 2.17 Perubahan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.2	BELANJA MODAL	420.515.473.905,00	468.761.401.780,03	48.245.927.875,03
5.2.01	Belanja Modal Tanah	39.493.719.200,00	61.742.872.000,00	22.249.152.800,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	39.493.719.200,00	61.742.872.000,00	22.249.152.800,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	900.600.000,00	0,00	-900.600.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	900.600.000,00	0,00	-900.600.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	38.593.119.200,00	61.742.872.000,00	23.149.752.800,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	29.893.119.200,00	29.142.272.000,00	-750.847.200,00
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	8.700.000.000,00	32.600.600.000,00	23.900.600.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.444.484.005,00	98.601.202.458,53	23.156.718.453,53
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.549.697.200,00	13.009.453.000,00	10.459.755.800,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.807.080.000,00	12.247.080.000,00	10.440.000.000,00
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	0,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.807.080.000,00	1.807.080.000,00	0,00
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	742.617.200,00	762.373.000,00	19.755.800,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	742.617.200,00	762.373.000,00	19.755.800,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	8.864.497.800,00	12.020.894.100,00	3.156.396.300,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.672.145.800,00	11.819.798.100,00	3.147.652.300,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.798.810.000,00	6.555.798.000,00	2.756.988.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.877.780.700,00	1.731.871.200,00	-145.909.500,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	387.000.000,00	107.500.000,00	-279.500.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	210.647.600,00	211.721.400,00	1.073.800,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.397.907.500,00	3.212.907.500,00	815.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	100.556.000,00	109.300.000,00	8.744.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	100.556.000,00	109.300.000,00	8.744.000,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	91.796.000,00	91.796.000,00	0,00
5.2.02.02.04.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	91.796.000,00	91.796.000,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat	312.141.310,00	516.737.520,00	204.596.210,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Bengkel dan Alat Ukur			
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	43.070.300,00	62.664.600,00	19.594.300,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	43.070.300,00	62.664.600,00	19.594.300,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	50.752.920,00	60.462.920,00	9.710.000,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	25.000.000,00	22.500.000,00	-2.500.000,00
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	25.752.920,00	37.962.920,00	12.210.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	218.318.090,00	393.610.000,00	175.291.910,00
5.2.02.03.03.0017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	196.805.000,00	393.610.000,00	196.805.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	21.513.090,00	0,00	-21.513.090,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	310.412.000,00	114.301.000,00	-196.111.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	310.412.000,00	114.301.000,00	-196.111.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	127.262.000,00	86.301.000,00	-40.961.000,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	183.150.000,00	28.000.000,00	-155.150.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.891.143.672,00	15.860.697.876,99	4.969.554.204,99
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.459.071.655,00	2.483.757.075,00	-2.975.314.580,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.197.800,00	2.197.800,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	124.474.775,00	188.247.675,00	63.772.900,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.332.399.080,00	2.293.311.600,00	-3.039.087.480,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.432.072.017,00	13.376.940.801,99	7.944.868.784,99
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.124.035.070,00	7.479.643.740,00	5.355.608.670,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.044.760.500,00	1.077.585.300,00	32.824.800,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	584.850.300,00	616.449.640,00	31.599.340,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	810.038.400,00	2.728.535.374,99	1.918.496.974,99
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	718.387.747,00	1.174.726.747,00	456.339.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.314.477.600,00	2.602.215.706,00	1.287.738.106,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	702.039.900,00	1.346.475.076,00	644.435.176,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	11.749.000,00	21.999.000,00	10.250.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	296.300.100,00	474.925.800,00	178.625.700,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	393.990.800,00	849.550.276,00	455.559.476,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	353.437.700,00	478.740.630,00	125.302.930,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	353.437.700,00	464.390.630,00	110.952.930,00
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	0,00	14.350.000,00	14.350.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	259.000.000,00	777.000.000,00	518.000.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	259.000.000,00	777.000.000,00	518.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat	10.975.685.700,00	14.196.705.900,00	3.221.020.200,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Kedokteran dan Kesehatan			
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.975.685.700,00	14.196.705.900,00	3.221.020.200,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.884.000,00	1.639.936.200,00	1.635.052.200,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	898.328.000,00	934.328.000,00	36.000.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	202.516.400,00	202.516.400,00	0,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	370.235.300,00	370.235.300,00	0,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	2.955.980.900,00	2.955.980.900,00	0,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	22.034.000,00	22.034.000,00	0,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.881.408.000,00	4.516.176.000,00	1.634.768.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.640.299.100,00	3.555.499.100,00	-84.800.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.128.690.900,00	1.550.796.140,00	422.105.240,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	757.933.300,00	996.027.500,00	238.094.200,00
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00
5.2.02.08.01.0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	2.615.800,00	0,00	-2.615.800,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	732.767.500,00	973.477.500,00	240.710.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	235.457.600,00	554.768.640,00	319.311.040,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	235.457.600,00	554.768.640,00	319.311.040,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	135.300.000,00	0,00	-135.300.000,00
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	135.300.000,00	0,00	-135.300.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.825.154.278,00	8.619.231.250,00	1.794.076.972,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.696.001.328,00	7.107.588.430,00	1.411.587.102,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	5.164.001.328,00	7.075.588.430,00	1.911.587.102,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	532.000.000,00	32.000.000,00	-500.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.129.152.950,00	1.511.642.820,00	382.489.870,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	811.349.800,00	1.278.617.770,00	467.267.970,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	317.803.150,00	233.025.050,00	-84.778.100,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	11.221.000,00	11.221.000,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	11.221.000,00	11.221.000,00
5.2.02.17.01.0024	Belanja Modal Mechanical Process	0,00	11.221.000,00	11.221.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	291.004.433,00	775.930.099,00	484.925.666,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	291.004.433,00	775.930.099,00	484.925.666,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	0,00	203.675.800,00	203.675.800,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu	90.452.933,00	327.135.799,00	236.682.866,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
01.0002	Tidak Bersuar			
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	200.551.500,00	245.118.500,00	44.567.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	20.610.500,00	20.610.500,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	20.610.500,00	20.610.500,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	610.500,00	610.500,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	14.235.332.112,00	13.292.470.172,00	-942.861.940,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	13.716.834.862,00	12.755.472.922,00	-961.361.940,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	13.716.834.862,00	12.755.472.922,00	-961.361.940,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	70.785.500,00	89.285.500,00	18.500.000,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	70.785.500,00	89.285.500,00	18.500.000,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	447.711.750,00	447.711.750,00	0,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	447.711.750,00	447.711.750,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	17.746.247.000,00	16.009.938.194,54	-1.736.308.805,46
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.746.247.000,00	16.009.938.194,54	-1.736.308.805,46

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	BLUD			
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	17.746.247.000,00	16.009.938.194,54	-1.736.308.805,46
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.662.907.154,20	122.857.341.580,90	19.194.434.426,70
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	83.555.927.954,20	109.587.842.909,00	26.031.914.954,80
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	83.555.927.954,20	109.587.842.909,00	26.031.914.954,80
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.196.621.549,00	20.509.477.549,00	6.312.856.000,00
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	90.960.000,00	0,00	-90.960.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.464.017.000,00	5.147.641.000,00	2.683.624.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	112.700.750,00	112.700.750,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.116.650.000,00	33.678.417.000,00	12.561.767.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	28.828.998.400,00	28.796.156.000,00	-32.842.400,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	75.800.000,00	75.800.000,00
5.2.03.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri	13.437.173.255,20	16.870.953.610,00	3.433.780.354,80
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	837.723.000,00	1.087.723.000,00	250.000.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	110.000,00	255.000.000,00	254.890.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.620.974.000,00	2.203.974.000,00	583.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.531.979.200,00	636.179.200,00	-895.800.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.531.979.200,00	636.179.200,00	-895.800.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	224.466.000,00	224.466.000,00	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.188.800.000,00	293.000.000,00	-895.800.000,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	118.713.200,00	118.713.200,00	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	18.575.000.000,00	12.633.319.471,90	-5.941.680.528,10
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	18.575.000.000,00	12.633.319.471,90	-5.941.680.528,10
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	18.575.000.000,00	12.633.319.471,90	-5.941.680.528,10
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	193.945.894.233,80	173.222.045.069,60	-20.723.849.164,20
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	155.920.035.365,73	137.968.344.502,25	-17.951.690.863,48
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	144.364.208.930,73	125.093.172.097,25	-19.271.036.833,48
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	136.557.353.879,00	118.922.207.379,00	-17.635.146.500,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	0,00	143.582.800,00	143.582.800,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	7.076.937.528,25	5.891.145.528,25	-1.185.792.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	729.917.523,48	136.236.390,00	-593.681.133,48
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	11.555.826.435,00	12.875.172.405,00	1.319.345.970,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	11.555.826.435,00	12.875.172.405,00	1.319.345.970,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	19.365.456.945,75	15.571.372.266,75	-3.794.084.679,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.211.005.000,00	6.673.117.000,00	-3.537.888.000,00
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	4.089.155.000,00	4.089.155.000,00	0,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	6.121.850.000,00	2.583.962.000,00	-3.537.888.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	9.154.451.945,75	8.898.255.266,75	-256.196.679,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	9.154.451.945,75	8.898.255.266,75	-256.196.679,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.764.299.471,32	2.467.198.900,00	-297.100.571,32
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	925.818.932,00	925.818.932,00	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	925.818.932,00	925.818.932,00	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.588.516.431,11	1.271.380.000,00	-317.136.431,11
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	127.017.209,79	0,00	-127.017.209,79
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.461.499.221,32	1.271.380.000,00	-190.119.221,32
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	249.964.108,21	269.999.968,00	20.035.859,79
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	49.964.140,21	70.000.000,00	20.035.859,79
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan	199.999.968,00	199.999.968,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Sampah Lainnya			
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	15.231.102.451,00	16.520.129.400,60	1.289.026.949,60
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	14.667.889.366,00	16.456.916.315,60	1.789.026.949,60
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	14.667.889.366,00	16.456.916.315,60	1.789.026.949,60
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	463.213.085,00	63.213.085,00	-400.000.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	463.213.085,00	63.213.085,00	-400.000.000,00
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.2.04.04.03.0005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	665.000.000,00	695.000.000,00	30.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	665.000.000,00	695.000.000,00	30.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	665.000.000,00	695.000.000,00	30.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.968.469.312,00	12.337.940.671,00	4.369.471.359,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.381.100,00	9.046.300,00	6.665.200,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.381.100,00	9.046.300,00	6.665.200,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	2.381.100,00	9.046.300,00	6.665.200,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	201.465.000,00	289.072.000,00	87.607.000,00
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang	201.465.000,00	289.072.000,00	87.607.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
01	Bercorak Kesenian			
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0,00	55.433.600,00	55.433.600,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	201.465.000,00	233.638.400,00	32.173.400,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	938.250.000,00	846.326.000,00	-91.924.000,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	938.250.000,00	846.326.000,00	-91.924.000,00
5.2.05.03.02.0001	Belanja Modal Ternak Potong	938.250.000,00	846.326.000,00	-91.924.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	199.646.900,00	75.600.000,00	-124.046.900,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	199.646.900,00	75.600.000,00	-124.046.900,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	199.646.900,00	75.600.000,00	-124.046.900,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.626.726.312,00	11.117.896.371,00	4.491.170.059,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	6.464.693.312,00	10.953.995.371,00	4.489.302.059,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	6.464.693.312,00	10.743.955.271,00	4.279.261.959,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	0,00	210.040.100,00	210.040.100,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	27.217.000,00	29.085.000,00	1.868.000,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	27.217.000,00	29.085.000,00	1.868.000,00
5.2.05.89.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	134.816.000,00	134.816.000,00	0,00
5.2.05.89.03.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	134.816.000,00	134.816.000,00	0,00

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.3.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran yang disediakan untuk mendanai kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, mendesak, dan tidak diharapkan berulang, serta belum tertampung dalam program dan kegiatan pada APBD. Belanja ini pada umumnya digunakan untuk penanganan keadaan darurat, bencana alam dan non-alam, kejadian luar biasa, serta kebutuhan mendesak lainnya yang apabila tidak segera ditangani dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan pelayanan publik yang lebih luas. Belanja Tidak Terduga pada P-APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 23.784.806.672,95 dengan penambahan sebesar Rp. 3.784.806.672,95 atau 18,92% dari APBD 2025 sebesar Rp. 20.000.000.000,00.

Tabel 2.18 Belanja Modal Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	23.784.806.672,95	3.784.806.672,95
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	23.784.806.672,95	3.784.806.672,95
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	23.784.806.672,95	3.784.806.672,95
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	23.784.806.672,95	3.784.806.672,95
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	23.784.806.672,95	3.784.806.672,95

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.4.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa sebagai bagian dari pelaksanaan hubungan keuangan antar pemerintahan. Belanja Transfer meliputi bagi hasil pendapatan daerah kepada pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lain, serta bantuan keuangan kepada desa. Pada P-APBD 2025, target Belanja Transfer berkurang (Rp. 12.259.320.545,63) atau -1,56% menjadi Rp. 774.001.182.529,13 dari target APBD 2025 sebesar Rp.

786.260.503.074,76. Akumulasi pengurangan ini berasal dari penambahan Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 1.957.467.012,90 dan pengurangan Belanja Bantuan Keuangan (Rp. 14.216.787.558,53).

Tabel 2.19 Perubahan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
5.4	BELANJA TRANSFER	786.260.503.074,76	774.001.182.529,13	-12.259.320.545,63
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	121.094.968.894,76	123.052.435.907,66	1.957.467.012,90
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	108.368.591.237,60	109.818.591.237,60	1.450.000.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	108.368.591.237,60	109.818.591.237,60	1.450.000.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	108.368.591.237,60	109.818.591.237,60	1.450.000.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	12.726.377.657,16	13.233.844.670,06	507.467.012,90
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	12.726.377.657,16	13.233.844.670,06	507.467.012,90
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	12.726.377.657,16	13.233.844.670,06	507.467.012,90
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	665.165.534.180,00	650.948.746.621,47	-14.216.787.558,53
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	665.165.534.180,00	650.948.746.621,47	-14.216.787.558,53
5.4.02.05.	Belanja Bantuan	665.165.534.180,00	650.948.746.621,47	-14.216.787.558,53

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
02	Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	175.968.117.180,00	161.751.329.621,47	-14.216.787.558,53
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	316.480.417.000,00	316.480.417.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	172.717.000.000,00	172.717.000.000,00	0,00

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

2.4.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan seluruh transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran dalam satu tahun anggaran. Berbeda dengan pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan tidak mempengaruhi kekayaan bersih pemerintah daerah secara langsung, melainkan merupakan mekanisme untuk menjaga keseimbangan APBD agar struktur anggaran tetap berimbang dan berkelanjutan. Pembiayaan Daerah disusun berdasarkan hasil audit dan penetapan SiLPA tahun sebelumnya, perkembangan kebutuhan pendanaan hingga akhir tahun anggaran, serta kemampuan fiskal daerah. Pada P-APBD 2025, target Pembiayaan Daerah bertambah Rp. 86.860.229.593,00 menjadi Rp.

82.071.896.727,00 dari target APBD 2025 sebesar Rp. 4.788.332.866,00. Penambahan ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Tabel 2.20 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	4.788.332.866,00	82.071.896.727,00	86.860.229.593,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.211.667.134,00	104.071.896.727,00	86.860.229.593,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.211.667.134,00	89.071.896.727,00	86.860.229.593,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	2.211.667.134,00	89.071.896.727,00	86.860.229.593,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.211.667.134,00	89.071.896.727,00	86.860.229.593,00
6.1.01.07.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.211.667.134,00	89.071.896.727,00	86.860.229.593,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.1.04.03.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6.1.04.03.04.0001	"Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek"	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
6.1.04.03.05	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	15.000.000.000,00	0,00	-15.000.000.000,00
6.1.04.03.05.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUM D-Jangka Menengah	15.000.000.000,00	0,00	-15.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Mi|ik Daerah (BUMD)	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMO	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.2.03.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.2.03.03.04.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.3	SISA LEBIH	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA)			
KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	4.788.332.866,00	82.071.896.727,00	86.860.229.593,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.211.667.134,00	104.071.896.727,00	86.860.229.593,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.211.667.134,00	89.071.896.727,00	86.860.229.593,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	2.211.667.134,00	89.071.896.727,00	86.860.229.593,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.211.667.134,00	89.071.896.727,00	86.860.229.593,00
6.1.01.07.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.211.667.134,00	89.071.896.727,00	86.860.229.593,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.1.04.03.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6.1.04.03.04.0001	"Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
	Pendek"			
6.1.04.03.05	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	15.000.000.000,00	0,00	-15.000.000.000,00
6.1.04.03.05.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUM D-Jangka Menengah	15.000.000.000,00	0,00	-15.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Mi|ik Daerah (BUMD)	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMO	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.2.03.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.2.03.03.04.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD (Rp)	P-APBD (Rp)	SELISIH (Rp)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber : Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Kemandirian Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan umum merupakan akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan desentralisasi. Sejalan dengan azas desentralisasi sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2025, adapun ruang lingkup LKPJ sebagaimana berikut :

1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan :
   a. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan beserta permasalahan dan tindak lanjut atas permasalahan setiap urusan pemerintahan yang berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan ;
   b. Capaian Indikator Kinerja Utama (tujuan dan sasaran) RPJMD Tahun 2025-2029 setiap urusan pemerintahan yang berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
   c. Capaian pelaksanaan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 setiap urusan pemerintahan yang berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
   d. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; serta
   e. tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
2. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan berupa capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintahan di atasnya serta capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

3.2.1 Strategi Yang Ditetapkan

No	Strategi Yang Ditetapkan
1.	Penguatan tata kelola pendidikan yang inklusif dan adaptif berbasis data spasial, perluasan akses infrastruktur dan konektivitas layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme pendidik melalui sistem pembinaan berkelanjutan, integrasi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan revolusi industri 5.0, serta penguatan kolaborasi multipihak secara partisipatif untuk mewujudkan generasi emas Gresik yang cerdas, unggul, dan berdaya saing global.
	Transformasi layanan kesehatan primer yang holistik dan berkelanjutan melalui penguatan sistem layanan berbasis keluarga dan komunitas, pemerataan infrastruktur dan tenaga kesehatan hingga wilayah terpencil, digitalisasi layanan dan integrasi data kesehatan untuk deteksi dini dan respons cepat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan yang profesional dan humanis, serta sinergi lintas sektor dalam mendorong perilaku hidup sehat dan ketahanan kesehatan masyarakat menuju Gresik yang sehat, tangguh, dan inklusif.
	Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam seluruh siklus pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi kelompok rentan, pemenuhan hak-hak dasar serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik, serta kolaborasi multipihak yang menjamin ruang partisipatif, nondiskriminatif, dan berkeadilan sosial dalam setiap kebijakan dan program pembangunan menuju Gresik yang setara, inklusif, dan berdaya.
	Penguatan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas; peningkatan kualitas layanan ramah anak di berbagai sektor; pemenuhan hak-hak sipil, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi anak tanpa diskriminasi; serta kolaborasi lintas sektor dan multipihak untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif guna memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi, serta berdaya sebagai subjek pembangunan masa depan.
	Penguatan nilai-nilai kearifan lokal, peningkatan literasi budaya dan toleransi antar kelompok, revitalisasi peran lembaga adat dan komunitas budaya, serta fasilitasi ruang-ruang interaksi sosial yang inklusif dan partisipatif, guna membangun solidaritas, saling menghargai, dan identitas kolektif yang kokoh dalam kerangka masyarakat madani yang berkeadaban.
2.	Pengembangan ekosistem industri berbasis riset dan inovasi, akselerasi adopsi teknologi industri 4.0, peningkatan kualitas SDM industri melalui kemitraan vokasi dan dunia usaha, insentif investasi sektor bernilai tambah tinggi, serta penguatan infrastruktur pendukung dan jaringan logistik terpadu guna menciptakan iklim industri yang adaptif, produktif, dan berorientasi ekspor.

No	Strategi Yang Ditetapkan
	Penguatan ekosistem wirausaha lokal, digitalisasi rantai pasok dan pemasaran UMKM, pengembangan pusat distribusi dan pasar rakyat modern berbasis kawasan, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk unggulan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan kemitraan strategis untuk mendorong ekspansi pasar yang inklusif dan berkelanjutan.
	Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan, pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas infrastruktur penunjang investasi, fasilitasi kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal, serta insentif investasi yang mendorong adopsi teknologi tinggi, keberlanjutan lingkungan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
3.	Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan perencanaan terpadu lintas sektor dan wilayah, optimalisasi pembiayaan kreatif, penguatan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan pelayanan publik yang prima.
	Pembangunan dan modernisasi infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi, peningkatan konektivitas antarwilayah dan kawasan industri, penguatan sistem logistik daerah, serta pemanfaatan teknologi cerdas dan ramah lingkungan untuk mendukung mobilitas, efisiensi ekonomi, dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan kompetitif.
	Penguatan daya tahan infrastruktur terhadap bencana dan perubahan iklim, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan green infrastructure, peningkatan kapasitas adaptif wilayah, serta integrasi sistem manajemen risiko dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
	Integrasi kebijakan rendah karbon dalam seluruh sektor pembangunan, optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi hijau, peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan kelembagaan, serta penguatan tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.
4.	Ppercepatan transformasi digital dalam pelayanan publik dan manajemen pemerintahan, penguatan sinergi kolaboratif lintas sektor dan pemangku kepentingan, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang profesional, akuntabel, dan berbasis sistem merit guna mewujudkan birokrasi yang lincah, responsif, dan berorientasi pada hasil.
5.	Perluasan dan percepatan pengurangan kemiskinan multidimensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh, penguatan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, perbaikan deprivasi sosial-materiil, peningkatan kapabilitas dan ketahanan keluarga miskin, serta perluasan akses terhadap keadilan, pemberdayaan hukum, dan partisipasi dalam pembangunan, yang didukung dengan integrasi data kemiskinan terpadu, serta tata kelola program pengentasan kemiskinan yang inklusif dan berbasis bukti hingga tingkat desa.

No	Strategi Yang Ditetapkan
	Pembangunan sistem perlindungan sosial yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan melalui perluasan cakupan program perlindungan sosial berbasis data terpadu, penguatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam menjangkau kelompok miskin dan rentan, penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program perlindungan sosial secara transparan dan berkeadilan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.
	Percepatan transformasi sosial ekonomi yang berkeadilan melalui pemerataan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan peluang ekonomi di seluruh wilayah, penguatan kebijakan afirmatif bagi kelompok marjinal dan wilayah tertinggal, optimalisasi distribusi program perlindungan dan pemberdayaan sosial berbasis data terpadu, serta peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna memastikan tidak ada kelompok atau wilayah yang tertinggal dalam proses pembangunan Kabupaten Gresik.
	Mengintegrasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal berbasis kebutuhan industri dengan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas melalui peningkatan akses pelatihan vokasi, pemagangan, dan sertifikasi kompetensi; penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM; optimalisasi penempatan tenaga kerja lokal dalam investasi daerah; serta kemitraan strategis antara dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pelatihan kerja yang adaptif terhadap transformasi ekonomi dan teknologi.

3.2.2. Arah Kebijakan Kabupaten Gresik Tahun 2025

Misi	Arah Kebijakan Tahun 2025
1	Penguatan peta jalan transformasi pendidikan Gresik yang inklusif dan berkeadilan berbasis data spasial, dengan melibatkan multipihak untuk merancang cetak biru layanan pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal dan tantangan masa depan.
1	Penguatan cetak biru transformasi layanan kesehatan primer berbasis keluarga dan komunitas dengan pendekatan promotif dan preventif, yang didukung oleh pemetaan kebutuhan wilayah serta pelibatan lintas sektor dalam pembangunan sistem layanan yang inklusif dan responsif.
1	Penguatan landasan kebijakan dan kelembagaan pengarusutamaan gender serta inklusi sosial melalui perumusan regulasi daerah, peta jalan, dan standar operasional yang menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan daerah dan desa.
1	Penguatan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas melalui regulasi, edukasi, serta peningkatan kapasitas aktor kunci dalam perlindungan anak.

Misi	Arah Kebijakan Tahun 2025
1	Penguatan nilai-nilai kearifan lokal dan etika sosial melalui pendidikan karakter, dialog budaya, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam memperkuat identitas budaya daerah.
2	Pengembangan ekosistem industri berbasis riset dan inovasi melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset untuk menciptakan nilai tambah dan efisiensi produksi.
2	Penguatan ekosistem wirausaha lokal melalui inkubasi bisnis, kemudahan perizinan, dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM berbasis potensi unggulan daerah.
2	Penguatan transformasi tata kelola BUMD berbasis prinsip good corporate governance melalui regulasi, pengawasan, dan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.
2	Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kepastian hukum, dan perbaikan layanan perizinan berbasis digital yang terintegrasi.
3	Penyusunan rencana induk infrastruktur daerah yang terpadu, responsif terhadap kebutuhan lintas sektor dan wilayah, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
3	Penyusunan peta jalan penguatan infrastruktur dan konektivitas daerah yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, dan wilayah tertinggal secara adil dan berkelanjutan.
3	Penyusunan strategi ketangguhan infrastruktur daerah melalui pemetaan risiko bencana dan kerentanan iklim sebagai dasar perencanaan pembangunan yang adaptif.
3	Penyusunan kebijakan rendah karbon dalam pembangunan daerah yang terintegrasi dengan seluruh sektor dan prioritas pembangunan.
4	Percepatan implementasi transformasi digital dalam sistem pelayanan publik dan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
5	Perluasan akses terhadap kebutuhan dasar secara menyeluruh untuk mengurangi kemiskinan multidimensi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5	Pembangunan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu untuk meningkatkan cakupan program bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
5	Percepatan transformasi sosial ekonomi dengan fokus pada pemerataan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan peluang ekonomi di seluruh wilayah.

Misi	Arah Kebijakan Tahun 2025
5	Pengintegrasian pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal berbasis pada kebutuhan industri dengan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas.

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Sebagai tindaklanjut atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati selama tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gresik dengan upaya dan kerja keras menindaklanjuti dengan meneruskan Rekomendasi DPRD sebagai acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025		Tanggapan Pemerintah Daerah
3.3.1 Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan		
1. Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan kapasitas SDM khususnya aparatur daerah dilakukan guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Peningkatan kedisplinan aparatur daerah melalui penertiban dan penindakan kepada yang bersangkutan mutlak diperlukan demi mendukung reformasi birokrasi di Kabupaten Gresik. Selain itu, transparansi pada seleksi dan promosi aparatur daerah/desa benar-benar harus dilakukanberdasarkan sistem meritokrasi. Aparatur daerah yang berkualitastentu akan mempengaruhi kinerja pelayanan pemerintahan sehingga akan meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi.	Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat kebijakan peningkatan kapasitas aparatur melalui berbagai program pengembangan kompetensi, antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, serta pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan yang direncanakan melalui dokumen RKPD, Renja Perangkat Daerah, serta penganggaran dalam APBD. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan aparatur, Pemerintah Kabupaten Gresik mengoptimalkan penerapan pembinaan dan penegakan disiplin ASN sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, termasuk melalui penguatan sistem pengawasan internal oleh perangkat daerah terkait.

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025	Tanggapan Pemerintah Daerah
	Selain itu, transparansi dalam seleksi dan promosi jabatan aparatur daerah telah dilaksanakan secara konsisten dengan menerapkan sistem merit sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka, pemetaan kompetensi, manajemen talenta (talent pool), serta penguatan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam pengelolaan manajemen ASN. Upaya peningkatan kualitas SDM aparatur tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi melalui penguatan area perubahan reformasi birokrasi, khususnya pada aspek penataan sistem manajemen SDM aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Program dan kegiatan terkait diselaraskan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta Renja Perangkat Daerah.

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025			Tanggapan Pemerintah Daerah
1. Peningkatan Kemampuan Fiskal Daerah		Kemampuan keuangan daerah yang kuat sangat diperlukan dalam membiayai seluruh program pembangunan daerah yang *pro poor*. Kabupaten Gresik yang merupakan salah satu daerah industri tentunya memiliki potensi besar dalam memperkuat kemampuan keuangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menurunkan tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat melalui skema pendapatan transfer. Pemerintah Kabupaten Gresik harus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah agar dapat menjadi penyokong keberhasilan Nawa Karsa. Komposisi belanja daerah harus didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas serapan belanja daerah khususnya pada belanja SPM pendidikan dan kesehatan. Selain itu, belanja daerah harus memperhatikan pemenuhan infrsatruktur daerah yang berhubungan langsung dengan aktifitas perekonomian masyarakat.	Pemerintah Kabupaten Gresik terus berupaya memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi daerah industri yang dimiliki Kabupaten Gresik, serta penguatan sistem digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) serta peraturan turunannya yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah secara lebih efektif. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah,

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025	Tanggapan Pemerintah Daerah
	Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dengan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, alokasi belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat, seperti pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, sarana pendukung kawasan ekonomi, serta infrastruktur pelayanan dasar lainnya. Kebijakan tersebut dirumuskan secara terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah, serta diimplementasikan melalui penganggaran dalam APBD setiap tahunnya.

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025		Tanggapan Pemerintah Daerah
1. Percepatan implementasi program Nawa Karsa dan RPJMD	Tahun 2025 termasuk sebagai periode tahun akhir Nawa Karsa dan RPJMD Kabupaten Gresik. Kondisi ini tentu menjadi fokus penyelenggaraan pemerintahan. Nawa Karsa yang diintegrasikan dengan program-program pembangunan daerah masih menyisakan beberapa masalah baik pada sisi realisasi program maupun dampak pembangunan bagi masyarakat. Target pembangunan daerah berdasarkan indikator kinerja utama menjadi fokus capaian pembangunan daerah.	Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan penguatan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang terintegrasi dalam Nawa Karsa. Evaluasi capaian kinerja pembangunan akan difokuskan pada indikator kinerja utama daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, termasuk terhadap indikator kinerja utama RPJMD. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah melakukan percepatan penyelesaian program prioritas serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah guna memastikan target-target pembangunan daerah dapat tercapai

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025		Tanggapan Pemerintah Daerah
		secara maksimal hingga akhir periode RPJMD. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Nawa Karsa dan capaian indikator kinerja pembangunan daerah menjadi bahan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan periode selanjutnya agar pembangunan daerah dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
3.3.2 Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025		
Indeks Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan kapasitas aparatur daerahsecara konsisten melalui penerapan meritokrasi. 2. Peningkatan kinerja OPD berbasis audit kebutuhan SDM di setiap OPD. 3. Optimalisasi SPBE untuk efektifitaspelayanan publik. 4. Peningkatan validitas pengukuran indeks kepuasan Masyarakat sebagai basis Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.	Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan melalui penguatan penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, termasuk dalam proses perencanaan kebutuhan ASN, pengembangan kompetensi, serta pengisian jabatan secara terbuka dan objektif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan pedoman penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan penguatan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia melalui

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025		Tanggapan Pemerintah Daerah
		analisis jabatan, analisis beban kerja, serta audit kebutuhan SDM pada setiap perangkat daerah. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar dalam perencanaan kebutuhan ASN, pengembangan kompetensi, serta penataan organisasi yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.
Indeks Daya Saing Daerah	1. Pemerataan aksesibilitas infrastruktur antar wilayah, antar perbatasan kabupaten, antar desa, dan lingkunganyang mampu mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. 2. Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor (antar kabupaten, Provinsi, BBWS) dan lintas daerah dalam upaya penuntasan pencegahan banjir. 3. Pemanfaatan CSR berdasarkan isu prioritas (tematik) pelayanan publik untuk kualitas pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan. 4. Perencanaan anggaran tahun jamak untuk program pembangunan infrastruktur, sarpras, maupun utilitas umum. 5. Mempercepatpenerbitan peraturan kepala daerah pelaksanaan dari Perda Fasilitasi Kemitraan Kegiatan Berusaha di Daerah dan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan untuk meningkatkan daya saing daerah dan perekonomian masyarakat.	Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah, termasuk antar desa, kawasan perbatasan kabupaten, serta lingkungan permukiman masyarakat guna mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan secara terintegrasi melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, RKPD, serta Renstra Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan wilayah dan prioritas pembangunan daerah. Dalam rangka penanganan banjir, Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah, baik dengan pemerintah kabupaten/kota

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025	Tanggapan Pemerintah Daerah
	sekitar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun instansi vertikal terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Sinergi tersebut diperlukan untuk mendukung penanganan banjir secara terpadu melalui pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, normalisasi saluran dan sungai, serta upaya mitigasi bencana yang berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik juga akan mendorong optimalisasi pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha yang ada di wilayah Kabupaten Gresik dengan mengarahkan program CSR pada isu-isu prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur sosial, serta penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan dan pemanfaatan CSR tersebut dilaksanakan melalui koordinasi yang terintegrasi dengan perangkat daerah terkait sehingga dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025		Tanggapan Pemerintah Daerah
		Selanjutnya, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik akan mempertimbangkan penerapan skema anggaran tahun jamak (multiyears) untuk pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, maupun utilitas umum yang memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun anggaran. Pelaksanaan skema tersebut akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah. .....
Pertumbuhan ekonomi	1. Penguatan data-data kelompok tani sebagai basis advokasi penambahan kuotapupuk perikanan dan pertanian. 2. Memperbaiki mekanisme distribusi dan tata niaga pupuk bersubsidi dengan memperkuat koordinasi OPDterkaitsehingga tepat jumlah dan sasaran. 3. Penggalian peluang kerjasama antara Perusahaan pupuk, distributor, dan BUMDes dalam penyediaan pupuk bersubsidi. 4. Pendampingan danedukasi kepada petanidalam penggunaan pupuk organik untuk mengeliminasi kelangkaan pupukkimia.	Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan penguatan basis data kelompok tani dan kelompok pembudidaya ikan melalui pemutakhiran data pada sistem pendataan kelompok tani dan registrasi petani sebagai dasar dalam perencanaan program pembangunan sektor pertanian serta sebagai bahan advokasi kepada pemerintah pusat terkait kebutuhan dan kuota pupuk bersubsidi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik akan meningkatkan koordinasi

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025	Tanggapan Pemerintah Daerah
5. Pembangunan JUT, JITUT untuk meningkatkan produktifitas pertanian. 6. Peningkatan produktifitas sektor unggulan dan potensial. 7. Meningkatkan efektifitas bantuan/hibah barang maupun pendanaan kepada kelompok masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	dengan perangkat daerah terkait, distributor pupuk, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperbaiki mekanisme distribusi dan tata niaga pupuk bersubsidi sehingga penyaluran pupuk dapat tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong peluang kerja sama antara perusahaan produsen pupuk, distributor, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka memperkuat ketersediaan dan distribusi pupuk bagi petani, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola pupuk bersubsidi. Di samping itu, upaya pendampingan dan edukasi kepada petani ditingkatkan melalui penyuluhan dan pelatihan terkait penggunaan pupuk organik dan praktik pertanian ramah lingkungan sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia serta mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025			Tanggapan Pemerintah Daerah
			pertanian, seperti Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), guna meningkatkan aksesibilitas lahan pertanian serta mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi kegiatan usaha tani. Selain itu, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan potensial daerah didorong melalui penguatan program pengembangan komoditas unggulan, peningkatan kapasitas petani, serta penguatan dukungan sarana dan prasarana pertanian. Terkait bantuan atau hibah kepada kelompok masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gresik meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan barang maupun pendanaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Indeks Manusia	Pembangunan	1. Secara konsisten memperkuat program-program enurunan angka stunting, AKI/AKBsecara integral antar OPD, Pemerintahdesa,maupun kemitraan atau partisipasi organisasi masyarakat.	Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat pelaksanaan program percepatan penurunan stunting serta penurunan AKI dan AKB secara terintegrasi melalui sinergi lintas

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025	Tanggapan Pemerintah Daerah
2. Peningkatan validasi pengukuran/ auditstunting dengan penyediaan anthrometri di setiap desa. 3. Berbasis hasil audit kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga Kesehatan,melakukan pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan khususnya di wilayah dengan indeks Pendidikan dan Kesehatan tertinggal. 4. Optimalisasi program UHC untuk meningkatkan akses masyarakat miskin, dengan mengoptimalkan kerjasama dengan Pemerintah desa dan pengusaha. 5. Melakukan validasi data PBI sehingga penyediaan dana UHC oleh Pemda lebih tepat sasaran, dan dapat memastikan besaran dan ketersediaan anggaran daerah untuk mencapai UHC.	perangkat daerah, pemerintah desa, serta kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan organisasi masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif secara terpadu guna meningkatkan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan anak. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik akan meningkatkan kualitas pelaksanaan audit stunting melalui penguatan validasi data dan penyediaan sarana pengukuran antropometri yang memadai di setiap desa, sehingga proses pengukuran status gizi balita dapat dilakukan secara lebih akurat dan menjadi dasar perumusan kebijakan intervensi yang tepat sasaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah melakukan penataan dan pemerataan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan sumber daya manusia pada masing-masing sektor. Penataan tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan tenaga yang memadai, khususnya pada wilayah dengan indeks

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025		Tanggapan Pemerintah Daerah
		pendidikan dan kesehatan yang masih relatif tertinggal. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Gresik mengoptimalkan pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) guna meningkatkan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan, terhadap layanan kesehatan. Optimalisasi program tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan pemerintah desa, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung perluasan kepesertaan jaminan kesehatan. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan pemutakhiran dan validasi data penerima bantuan iuran (PBI) secara berkala guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Validasi data tersebut juga menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan anggaran daerah untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan program UHC.
Tingkat Kemiskinan	1. Peningkatan program ekonomi produktif di ektor pertanian, perikanan dan UMKM 2. Program padat karya bagi kelompok perempuan dan kelompok rentan untuk meningkatkan penghasilan. 3. Pembaharuan dan perbaikan DTKS.	Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong peningkatan program ekonomi produktif pada sektor pertanian, perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penguatan dukungan sarana dan prasarana

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025	Tanggapan Pemerintah Daerah
4. Perluasan sasaran program RTLH.	produksi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran produk. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat perekonomian lokal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik juga akan mengembangkan program padat karya yang melibatkan kelompok perempuan dan kelompok masyarakat rentan sebagai upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja serta menambah penghasilan masyarakat. Pelaksanaan program padat karya tersebut akan disinergikan dengan program pembangunan infrastruktur lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan pemutakhiran dan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi data bersama pemerintah desa/kelurahan serta pemangku kepentingan terkait, sehingga data yang digunakan dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025			Tanggapan Pemerintah Daerah
			Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Gresik juga akan mendorong perluasan sasaran program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui sinergi pendanaan dari berbagai sumber, baik APBD, bantuan pemerintah pusat, maupun dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat program perbaikan rumah layak huni.
Tingkat Terbuka	Pengangguran	1. Mengantisipasi kecilnya penyerapan tenagakerja pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang lebih berorientasi padat modal dan teknologi tinggi, Pemkab Gresik hendaknya semakin mendorong tumbuhnya industri padat karya. 2. Meningkatkan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri melalui revitalisasi BalaiLatihan Kerja (BLK) 3. Implementasi Perda tentang Fasilitasi Kemitraan Berusaha dan Perda tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. 4. Penegakan peraturan hubungan industrial untukmelindungi hak-hak tenaga kerja danmencegahmaraknya perselisihanyang mengganggu stabilitas sosial.	Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong pengembangan sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas, termasuk mendorong tumbuhnya industri padat karya di samping pengembangan kawasan industri yang berorientasi pada investasi dan teknologi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik meningkatkan kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui penguatan dan revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025	Tanggapan Pemerintah Daerah
	kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Program pelatihan tersebut akan difokuskan pada pengembangan keterampilan berbasis kebutuhan industri sehingga dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong implementasi Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Kemitraan Kegiatan Berusaha di Daerah serta Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal secara optimal melalui penyusunan regulasi turunan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut oleh pelaku usaha. Pemerintah Kabupaten Gresik juga memperkuat penegakan peraturan di bidang hubungan industrial guna melindungi hak-hak tenaga kerja serta mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan iklim investasi daerah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan fungsi mediasi, pembinaan kepada perusahaan dan pekerja, serta peningkatan peran

Rekomendasi DPRD untuk Perencanaan Tahun 2025	Tanggapan Pemerintah Daerah
	perangkat daerah terkait dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN		1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
				1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				1.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
				1.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan			
				1.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis alat listrik dan ATK	60 Jenis	60 Jenis			
				1.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kursi dan lemari penyimpan arsip	4 Bulan	4 Bulan			
				1.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan dalam 1 tahu	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
				1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat (%)	76.15 %	76.25 %			
								Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)	83.82 %	83.95 %			
								Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat (%)	102.62 %	103.67 %			
								Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederaja (%)	94.15 %	91.02 %			
								Angka Partisipasi Murni PAUD (%)	79.30 %	79.24 %			
								Angka Partisipasi Murni Paud Sederajat dari Keluarga Miskin (%)	56.44 %	54.27 %			
								Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SD/MI/Sederajat (%)	93.09 %	93.77 %			
								Angka Partisipasi Murni Perempuan pada jenjang SMP/MTs/Sederaja (%)	72.77 %	73.06 %			
								Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat (%)	97.13 %	98.23 %			
								Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dari Keluarga Miskin (%)	74.80 %	74.52 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederaja dari Keluarga Miskin (%)	57.98 %	59.02 %			
								Kesetaraan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaik an Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan (%)	100 %	100 %			
								Rasio Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatk an pelayanan melalui UPT LPABK (%)	55.15 %	55.90 %			
								Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SD/MI/Sederajat di wilayah rentan (%)	90.63 %	91.35 %			
								Rasio APM Perempuan terhadap APM Laki - laki pada jenjang SMP/MTs/Sederajat di wilayah rentan (%)	95.54 %	96.33 %			
								Rasio Pemenuhan Program Jaketku terhadap pengajuan anak/penduduk yang belum sekolah (Angka)	100 Angka	100 Angka			
								Rasio sekolah yang melakukan pelatihan atau sosialisasi sekolah ramah anak kepada guru dan siswa setiap tahun (%)	34.64 %	77.87 %			
				1.01.02.2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga SD/MI yang difasilitas	823 Lembaga	823 Lembaga			
				1.01.02.2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga SMP/MTS yang difasilitas	253 Lembaga	253 Lembaga			
				1.01.02.2.03			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	60 %	60 %			
				1.01.02.2.04			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase lembagapendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin masih berlaku	100 %	100 %			
				1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase siswa SD yang melanjutkan ke jenjang berikutnya (%)	96.47 %	98.34 %			
								Persentase siswa SMP yang melanjutkan ke jenjang berikutnya (%)	62.23 %	58.17 %			
								Skor Numerasi Jenjang SD (%)	70.63 %	84.75 %			
								Skor Numerasi Jenjang SMP (%)	63.09 %	87.51 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.01.03.2.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	kosong	100 %	100 %			
				1.01.03.2.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kosong	100 %	100 %			
				1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP (%)	92.19 %	88.11 %			
								Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP (%)	98.69 %	95.35 %			
								Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP (%)	98.91 %	98.51 %			
				1.01.04.2.01			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,	umlah honorarium GTT/PTT SD/SMP Negeri (K2 dan Non K2)	98173 Guru	98173 Guru			
				1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP (%)	98.69 %	95.35 %			
								Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP (%)	92.19 %	88.11 %			
								Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP (%)	98.69 %	95.35 %			
								Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP (%)	98.91 %	98.51 %			
								Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP (%)	98.91 %	98.51 %			
								Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP (%)	92.19 %	88.11 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP (%)	100 %	100 %			
								Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP (%)	98.69 %	95.35 %			
								Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP (%)	100 %	100 %			
								Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP (%)	98.91 %	98.51 %			
				1.01.05.2.01			Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kosong	4083 Lembaga	4083 Lembaga			
				1.01.05.2.02			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kosong	1247 Lembaga	1247 Lembaga			
				1.01.06		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Skor Literasi Jenjang SD (%)	72.97 %	65.76 %			
								Skor Literasi Jenjang SMP (%)	81.86 %	81.41 %			
				1.01.06.2.01			Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1200 Siswa	1200 Siswa			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan		1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
				1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
								Cost Recovery Rate (CRR) (%) RSUD Umar Mas'ud	78.86 %	116.92 %			
								Tingkat kemandirian keuangan Rumah Sakit Daerah (%) RSUD Umar Mas ud	82.54 %	100 %			
								Cost Recovery Rate (CRR) (%) RSUD IBNU SINA	88.07 %	104.28 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan (%) RSUD IBNU SINA	88 %	80.65 %	Terdapat penurunan di nilai Sarana. Karena ada Sarana yang belum optimal (Januari 2026). Karena di RS sudah ada ruangan PICU tapi belum dioperasionalkan.	Pemenuhan alat utk ruang PICU.	
								Tingkat kemandirian keuangan Rumah Sakit Daerah (%) RSUD IBNU SINA	79 %	103.38 %			
								Cost Recovery Rate (CRR) (%) RSUD Gresik Sehati	0 %	0 %			
								Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan (%) RSUD Gresik Sehati	0 %	61.35 %			
								Tingkat kemandirian keuangan Rumah Sakit Daerah (%) RSUD Gresik Sehati	0 %	0 %			
				1.02.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan	100 %	100 %			
				1.02.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %			
				1.02.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi Dinas Kesehatan	100 %	100 %			
				1.02.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang	100 %	100 %			
				1.02.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitasi pemeliharaan	100 %	100 %			
							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					
				1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pengobatan Kasus TB (%)	93 %	93.58 %			
								CFR (Case Fatality Rate) DBD (%)	0.8 %	0.59 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								ODHA yang mendapatkan pengobatan (on ARV) (%)	82 %	70 %	Kurangnya kesadaran dan pemahaman pasien akan pentingnya ARV	Solusinya diperlukan pendekatan komprehensif, mulai dari edukasi personal, dukungan sosial, hingga pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan minum obat.	
								Penemuan Kasus Baru TBC (CDR) (%)	85.0 %	78.07 %	1. Kurang optimalnya skrining TB. 2. Kualitas dahak pada saat pemeriksaan	1, Implementasi Skrining Aktif Berbasis Komunitas, Optimalisasi Skrining	
											TCM kurang baik sehingga menimbulkan negatif palsu. 3. Terbatasnya pemeriksaan radiologi pada pasien suspek TB dengan TCM negatif.	Kontak (Contact Tracing). 2. Edukasi Pasien (Edukasi Cara Mengeluarkan Dahak), Teknik Peningkatan Kualitas Dahak (Fisioterapi/Hidrasi 3, Pemanfaatan Diagnosis Berbasis Gejala (Diagnosis Komprehensif), Peningkatan Akses Rontgen (Rujukan Jejaring).	).
								Persentase balita stunting dari keluarga miskin mendapatkan penanganan (%)	100 %	100 %			
								Persentase balita stunting mendapatkan penanganan (%)	100 %	100 %			
								Persentase bayi dari keluarga miskin yang	45 %	100 %			
								memperoleh pelayanan imunisasi dasar lengkap (BCG, DPT, Polio, Hib, Hepatitis B, Measles) pada usia yang ditentukan. (%)					
								Persentase bayi dari keluarga miskin yang mendapatkan layanan kesehatan neonatal, termasuk perawatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan terlatih. (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase bayi yang memperoleh pelayanan imunisasi dasar lengkap (BCG, DPT, Polio, Hib, Hepatitis B, Measles) pada usia yang ditentukan. (%)	95 %	93.04 %	1. Adanya perbedaan antara sasaran proyeksi dan riil yang ada di puskesmas 2. Peningkatan Drop Out sasaran imunisasi 3. Masih adanya penolakan 4. Pencatatan capaian imunisasi di kohort bayi belum lengkap	1. Melakukan validasi data sasaran bayi yang lebih terperinci 2. Melakukan sweepin dan imunisasi kejar 3. Melakukan KIE kepada Ortu dengan melibatkan petugas promkes tokoh agama dan masyarakat 4. Melakokan pencocokan data capaian setiap bulan di kohort bayi serta dilaporkan lewat aplikasi ASIK	
								Persentase bayi yang mendapatkan layanan kesehatan neonatal, termasuk perawatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan terlatih. (%)	100 %	80.61 %	Sebagian besar keluarga bumil tidak berasal dari Gresik, sehingga pada trimester ke 3, bumil memutuskan untuk kembali ke domisili asalnya.	Penguatan ANC berkualitas dan pendekatan ke ibu hamil.	
								Persentase ibu dari keluarga miskin yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan dilayani oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter/bidan). (%)	100 %	100 %			
								Persentase ibu hamil dari keluarga miskin yang memperoleh layanan antenatal (ANC) minimal 6 kali selama kehamilan. (%)	100 %	100 %			
								Persentase ibu hamil yang memperoleh layanan antenatal (ANC) minimal 6 kali selama kehamilan. (%)	100 %	75.72 %	Kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan kehamilan. Tidak tercapainya K1 sehingga berpengaruh ketidaktercapaian K6. Selain itu adanya bumil yang abortus, persalinan yang prematur dan pindah domisili.	Koordinasi dengan linsek dan jejaring (PMB/klinik/swasta dalam pelaporan KIA dan rujukan ANC terpadu ke puskesmas. Pendataan dan penandaan ibu hamil K1 dengan stiker P4K oleh kader serta memberikan sosialisasi dan pemeriksaan ibu hamil rutin 6x baik di RS atau di puskesmas.	)

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan dilayani oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter/bidan). (%)	100 %	78.63 %	Sebagian besar keluarga bumil tidak berasal dari Gresik, sehingga pada trimester ke 3, bumil memutuskan untuk kembali ke domisili asalnya.	Penguatan ANC berkualitas dan pendekatan ke ibu hamil.	
								Persentase Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai standar (%)	50 %	50 %			
								Persentase Pasien HIV yang Dilaksanakan Notifikasi Pasangan (%)	75 %	25 %	1. Takut Stigma dan Diskriminasi2. Kekhawatiran akan Kerahasiaan (Confidentiality).3. Kurangnya Pemahaman tentang Pentingnya Notifikasi.	Penguatan Konseling (PITC) dan Konseling Berpasangan, Pelibatan Komunitas dan Pendamping Sebaya, Pendekatan "Kontrak Sosial" (Contracting).	
								Persentase Pasien Malaria yang Dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Pasien Malaria yang Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar (%)	100 %	100 %			
								Persentase Pasien TBC yang Dilaksanakan Investigasi Kontak (%)	75 %	86.6 %			
								Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan (%)	88 %	89 %			
								Persentase penduduk yang menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kepesertaan mandiri (%)	60 %	38.22 %	Karena Kabupaten Gresik adalah kota industri, sehingga pekerjanya sudah banyak tercover pada PPU-BU. Jumlah masyarakat Kabupaten Gresik yang tercover PBI- JK sejumlah hampir 50% jumlah penduduk.	Mengedukasi masyarakat yang tercover dalam PBPU - BP Pemda dan sudah mampu untuk melakukan pembayaran mandiri agar mendaftar ke segmen kepesertaan mandiri.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna (%)	100 %	100 %			
								Persentase RS terakreditasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	100 %	100 %			
								Rasio Diagnosis TBC Menggunakan TCM Dibanding Pemeriksaan Radiologis (%)	70 %	89 %			
								Rasio Keluarga Miskin yang menjadi peserta UHC dengan status PBPU BP Pemda dan PBIJK (%)	70 %	100 %			
								Treatment Success Rate TB (%)	85 %	90.65 %			
								Average Lenght of Stay (ALOS) (%) RSUD Umar Mas'ud	3.5 Hari	3.51 Hari			
								Bed Occupancy Rate (BOR) (%) RSUD Umar Mas'ud	27.61 %	33.86 %			
								Bed Turn Over (BTO) (%) RSUD Umar Mas'ud	42.3 Kali	48.2 Kali			
								Gross Death Rate (GDR) (%) RSUD Umar Mas'ud	31.11 1.000 pasien keluar	21.16 1.000 pasien keluar			
								Net Death Rate (NDR) (%) RSUD Umar Mas'ud	10.51 1.000 pasien keluar	7.05 1.000 pasien keluar			
								Turn Over Internal (TOI) (Hari) RSUD Umar Mas'ud	6.1 Hari	5 Hari			
								Average Lenght of Stay (ALOS) (Hari) RSUD IBNU SINA	6 Hari	3.66 Hari			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Bed Occupancy Rate (BOR) (%) RSUD IBNU SINA	67.86 %	53.7 %	Bed Occupancy Rate (BOR) RSIS adalah 53,7% dari target 67,86%. Kondisi Bed Occupancy Rate (BOR) yang ideal adalah 70% – 80% (Depkes RI, 2005). Capaian BOR tersebut menggambarkan kondisi Pelayanan RSIS terhadap pasien rawat inap belum maksimal. Angka BOR RSIS 53,7% , menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang masih rendah	Sosialisasi ke masyarakat tentang pelayanan di RSUD Ibnu Sina, serta peningkatan pelayanan	
								Bed Turn Over (BTO) (Kali) RSUD IBNU SINA	40 Kali	45.84 Kali			
								Gross Death Rate (GDR) (%) RSUD	45 1.000 pasien	121.05 1.000 pasien	Banyak pasien yang datang sudah dalam	GDR (Gross Death Rate)/ Angka kematian kasar di RSUD	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Net Death Rate (NDR) (%) RSUD IBNU SINA	25 1.000 pasien keluar	77.83 1.000 pasien keluar	NDR mengukur kematian pasien yang dirawat >48 jam. Ini adalah indikator yang sangat sensitif terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Pasien yang dirawat lama berisiko terkena infeksi silang. Jika pengendalian infeksi di RSUD Ibnu Sina lemah, hal ini bisa memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan risiko kematian.	NDR (Net Death Rate) angka kematian bersih/angka kema > 48 jam setelah mendapatkan pelayanan di RSUD Ibnu Sina Kab Gresik sebesar 77,83‰ dari target ≤45‰, yang artinya setiap 1000 pasien keluar hidup dan mati terdapat 77,83 pasien meninggal > 48 jam setelah mendapatkan pelayanan. Ini tidak sesuai target dikarenakan dikarenakan RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik adalah rumah sakit tipe B rujukan wilayah Gresik dan sekitarnya serta rujukan trauma center di wilayah Gresik dan sekitarnya, dengan kondisi pasien kebanyakan adalah pasien kritis yang tidak bisa ditangani lebih lanjut oleh faskes perujuk dikarenakan beberapa faktor, seperti ketidak sediannya fasilitas dari faskes perujuk , maupun ketidak sediannya dokter spesialis/subspesia dari faskes perujuk. Kematian > 48 jam tidak dapat dihndari dikarenakan berkaitan dengan penyakitnya. Rencana tindak lanjut audit medis secara periodik, memperkuat SDM rawat inap dan fasilitas penunjang.	
								Turn Over Internal (TOI) (Hari) RSUD IBNU SINA	1 Hari	3.69 Hari			
								Average Lenght of Stay (ALOS) (Hari) RSUD Gresik Sehati	0 Hari	2 Hari			
								Bed Occupancy Rate (BOR) (%) RSUD Gresik Sehati	0 %	0.52 %			
								(Kali) RSUD Gresik Sehati	0 Kali	0.61 Kali			
								Gross Death Rate (GDR) (%) RSUD Gresik Sehati	0 1.000 pasien keluar	0 1.000 pasien keluar			
								Net Death Rate (NDR) (%) RSUD Gresik Sehati	0 1.000 pasien keluar	0 1.000 pasien keluar			
								Turn Over Internal (TOI) (Hari) RSUD Gresik Sehati	0 Hari	5.92 Hari			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.02.02.2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Fasilita Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 % s	100 %			
				1.02.02.2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Layana Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 % n	100 %			
				1.02.02.2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase FKTP Puskesmas melaksanakan SIK	100 %	100 %			
				1.02.02.2.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan RS	100 %	100 %			
				1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase petugas penanggung jawab PROGRAM esensial puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan teknis PROGRAM (%)	100 %	100 %			
								Persentase tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas dan jaringan dan RSUD yang memiliki ijin (%)	100 %	100 %			
				1.02.03.2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan yang dibutuhkan puskesmas dan jaringannya	100 %	100 %			
				1.02.03.2.03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis	100 %	100 %			
				1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan persyaratan perijinan (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase sarana Pengelolaan Makanan Minuman sesuai standar dan berijin (%)	96 %	75 %	Masyarakat industri Pengelolaa Makanan Minuman rumah tangga mayoritas dari kalangan menengah dan menengah kebawah, sehingga sulit untuk mengubah perilaku meskipun sudah dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara rutin.	Sosialisasi dan npembinaan pengawasan terus menerus. Serta penyuluhan keamanan pangan harus selalu diingatkan.	
								Persentase Sarana Produksi UMOT yang memenuhi ketentuan (%)	100 %	100 %			
				1.02.04.2.01			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase visitasi sarana kefarmasian / sarana pelayanan kefarmasian	100 %	100 %			
				1.02.04.2.03			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi ketentuan	100 %	100 %			
				1.02.04.2.06			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	100 %	100 %			
				1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif (%)	100 %	97.56 %	Dari 1.517 Posyandu di Kab. Gresik, 1.480 posyandu di wilayah kabupaten Gresik telah memenuhi indikator Posyandu Siklus Hidup yang Aktif pada Tahun 2025 dan sebanyak 91,10% (1382 posy) selalu buka/ memberikan layanan setiap bulan selama periode Januari s/d Desember 2025.	Penambahan Jumlah Kader pada Posyandu yang jumlah kadernya tidak sesuai standar, Menambah jam hari buka layanan Posyandu agar Posyandu dapat memberikan layanan Siklus Hidup (pelayanan siklus hidup di posyandu diatur sesuai jadwal dan sesuai kesepakatan antara sasaran dengan petugas/ kader dan nakes)	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase Puskesmas yang memiliki fasilitas ruang menyusui dan tempat bermain anak yang aman dan nyaman (%)	84 %	84 %			
				1.02.05.2.01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,	Persentase kegiatan UKBM	100 %	100 %			
							Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yag dilaksanakan					
				1.02.05.2.02			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang melaksanakan germas	100 %	100 %			
				1.02.05.2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengem dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	b1a0n0ga%n	100 %			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
				1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%) Realisasi Belanja Infrastruktur air minum, air limbah, drainase (%)	60 %	75.1 %			
				1.03.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas PUTR yang disusun	30 Dokumen	30 Dokumen			
				1.03.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun			
				1.03.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
				1.03.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
				1.03.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	36 Jenis	36 Dokumen			
				1.03.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	JUmlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	0 Jenis	0 Jenis			
				1.03.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	20 Jenis	20 Jenis			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.03.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	340 Unit	365 Unit			
				1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Kali dan anak kali lamong yang dinormalisasi tiap tahun (%)	14.29 %	14.29 %			
								Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun (%)	8.77 %	9.33 %			
								Persentase Waduk yang	5.77 %	6.41 %			
								dinormalisasi setiap tahun (%)					
								Realisasi Nilai Kesiapan Retarding Basin Kali Lamong (Angka)	2 Nilai	2 Nilai			
								Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Sumber Daya Air (%)	80 %	76.41 %	Pekerjaan fisik telah selesai dilaksanakan, namun beberapa administrasi keuangan pekerjaan belum dapat dituntaskan sehingga tercatat sebagai kurang bayar	Administrasi akan diselesaikan pada tahun 2026	
				1.03.02.2.01			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran pembuang dalam kondisi baik	73.31 %	73.31 %			
				1.03.02.2.02			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara dan	12920 Meter	14358 Meter			
								direhabilitasi setiap tahun					
				1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten (%)	33.680 %	24.93 %	Terdapat efisiensi dana transfer pusat ke daerah		
								Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa (%)	0.029 %	0.038 %			
								Realisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Jalan (%)	75 %	47.35 %	Pekerjaan fisik telah selesai dilaksanakan, namun beberapa administrasi keuangan pekerjaan belum dapat dituntaskan sehingga tercatat sebagai kurang bayar	Administrasi akan diselesaikan pada tahun 2026	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.03.10.2.01			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan dan dipelihara	55.83 Km	41.39 Km	Terdapat efisiensi anggaran		
				1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Industri sesuai dengan Peruntukan Ruang (%)	1.61 %	2.58 %			
								Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang kegiatan berusaha dan non berusaha (%)	100 %	103.92 %			
				1.03.12.2.01			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan juknis penyelenggaraan penataan 6 ruang yang dalam proses legalisasi	Dokumen	6 Dokumen			
				1.03.12.2.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan perencanaan tata ruang	7 Dokumen	7 Dokumen			
				1.03.12.2.03			Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
							Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah					
				1.03.12.2.04			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
				2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (Persentase)	10 %	10 %			
				2.10.04.2.01			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang difasilitasi	2 Sengketa	2 Sengketa			
				2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum (%)	20 %	46.457 %			
				2.10.05.2.01			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dibebaskan	20000 m2	31421 m2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
				1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Rasio rumah tangga perdesaan yang terlayani Air Bersih Perpipaan (%)	0.36 %	0.36 %			
				1.03.03.2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM yang terbangun	63.953 Sambungan Rumah	58.273 Sambungan Rumah	Penyesuaian target RENSTRA 2021-2025	Alokasi peningkatan kerangka pendanaan	
				1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Rumah Tangga yang terlayani akses sanitasi layak (%)	23.41 %	24.19 %			
								Persentase Rumah Tangga yang terlayani akses sanitasi layak (%)	94.29 %	93.58 %	Saat survey penjaringan lokasi desa pejangganan masih layak untuk menerima bantuan sanitasi. Setelah dilaksanakan persiapan penyusunan dokumen bahwa kondisi permukiman sangat padat sehingga kesulitan pemasangan pipa jaringan IPAL. Dan apabila tetap dilaksanakan biaya rekondisi lebih tinggi karena rumah banyak yang berhimpitan dan permanen. Maka pembangunan sanitasi IPAL komunal ditunda sampai tahun selanjutnya dimana masyarakat sudah siap menerima program tersebut.	tidak dilaksanakan, untuk pemenuhan target diupayakan swadaya masyarakat dilokasi PPKT dan Reguler	
				1.03.05.2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi	335 Rumah Tangga	583 Rumah Tangga			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase sistem drainase lingkungan permukiman yang berfungsi baik (%)	100 %	100 %			
				1.03.06.2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditingkatkan, direhab dan dipelihara	1.775 Meter	1.775 Meter			
				1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase gedung pemerintah yang menerapkan efisiensi energi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Infrastruktur Publik Ramah Kelompok Rentan (%)	100 %	100 %			
								Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis (%)	100 %	100 %			
				1.03.08.2.01			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Kumulatif Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang diberikan	819 Sertifikat	1.795 Sertifikat			
				1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase Pemeliharaan Gedung sesuai dengan Kebijakan Strategis (%)	100 %	0 %	tidak adanya kajian pemeliharaan gedung pada tahun n	anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi tingkat kerusakan bangunan	
				1.03.09.2.01			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		1 Unit	0 Unit	tidak adanya kajian pemeliharaan gedung pada tahun n	anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi tingkat kerusakan bangunan	
				1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang memenuhi ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi (%)	31.60 %	85.14 %			
								Persentase Rekomendasi Tenaga Kerja Kontruksi Bersertifikasi (%)	16.67 %	11.43 %	Kurangnya minat tenaga kerja kontruksi untuk sertifikasi mandiri	Memberi sanksi kepada tenaga kerja konstruksi	
				1.03.11.2.01			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya Tenaga Terampil Konstruksi di Kabupaten Gresik	6 Kali	4 Kali	Terbatasnya alokasi anggaran untuk pelatihan	Memaksimalkan ketersediaan anggran untuk mengadakan pelatihan	
				1.03.11.2.02			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Gresik	0 Media	0 Media			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.03.11.2.04			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pengawasan bidang Jasa Konstruksi	220 Pengawasan	184 Pengawasan	1. Masih ada Badan Usaha yang belum memahami terkait kewajiban yang tercantum dalam permen PUPR no 1 tahun 2023 khususnya tentang pengawasan tertib usaha jasa kontruksi 2. Masih ada PPKom yang belum mematuhi ketentuan terkait kewajiban yang tercantum dalam permen PUPR no 1 tahun 2023 khususnya tentang pengawasan tertib penyelenggaraan jasa kontruksi	diperlukan sosialisasi atau koordinasi lebih lanjut dengan BUJK dan PPKom terkait permen no 1 tahun 2023 atau menerepakan sanksi/teguran kepada BUJK dan PPkom yang belum mematuhi ketentuan dalam permen no 1 tahun 2023	
				1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
				1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	A	Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur Sektor Perumahan dan Permukiman (%)	94.5 %	94.60 %			
								Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				1.04.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen			
				1.04.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusuna laporan keuangan	n 25 Laporan	25 Laporan			
				1.04.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 Paket	45 Paket			
				1.04.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaa Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Laporan	90 Laporan			
				1.04.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Keluarga Miskin yang memiliki rumah layak huni (%)	33.45 %	33.13 %	penerima bantuan yang tidak segera mengerjakan pembangunan rumah dengan alaasan menunggu hari baik	adanya pembentukan panitai desa untuk membantu mengkoordinir dan mendata kesesuaian jadwal perencanaan dan pelaksanaan	
								Persentase rumah korban bencana atau relokasi yang dibangun atau direhabilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase keluarga MBR yang memperoleh akses terhadap rumah layak huni (%)	0.74 %	1.42 %			
				1.04.02.2.01			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah KorbanBencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan			
				1.04.02.2.03			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	55 Unit Rumah	216 Unit Rumah			
				1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase panjang jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani (%)	12.24 %	16.22 %			
								Persentase Rumah Swadaya tidak	15.40 %	18.79 %			
								layak huni yang ditangani (%)					
								Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani (%)	10.14 %	11.44 %			
				1.04.03.2.02			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	13 Dokumen	1 Dokumen	belum maksimalnya pembinaan KPP pada permukiman kumuh di kabupaten Gresik	memaksimalkan pembinaan KPP sehingga peran serta masyarakat dalam penanganan kumuh dapat teratasi	
				1.04.03.2.03			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pertumbuhan Rum Layak Huni	ah29.05 %	28.58 %	Database RTLH belum maksimal dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan perbaikan RTLH	dilaksanakannya sosialisasi dan sinkronisasi agar usulan kegaitan sesuai dengan perioritas perencanaan OPD	
				1.04.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani (%)	10.14 %	11.44 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.04.04.2.01			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen			
				1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik (%)	0.28 %	5.41 %			
								Persentase PSU Makam di permukiman dalam kondisi baik (%)	0.12 %	0 %	Tidak ada kajian untuk PSU makam di perumahan	Mengajukan usulan tambahan anggran untuk perawatan tahun selanjutnya	
								Persentase Saluran Lingkungan dalam kondisi baik (%)	0.4 %	1.01 %			
				1.04.05.2.01			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi Penyelenggaraan PSU Perumahan	26 Lokasi	1 Lokasi	minimnya jumlah jalan lingkungan yang belum diiserahterimakan ke pemerintah daerah.	Melakukan sosialisasi kepada pengembang agar segera/mengupaya serah terimakan aset ke Pemerintah daerah	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Satuan Polisi dan Pamong Praja		1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
				1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				1.05.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	8 Dokumen	8 Dokumen			
				1.05.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD	109 Orang/Bulan	109 Orang/Bulan	Pemahaman aparatur terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi	Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah secara berkala	
				1.05.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	262 Paket	262 Paket	Data kepegawaian belum sepenuhnya akurat dan mutakhir	Melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala melalui sistem informasi kepegawaian	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.05.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi umum OPD	6 Jenis	6 Jenis	Tata naskah dinas dan pengelolaan surat belum sepenuhnya tertib dan seragam	Melakukan pembinaan dan sosialisasi tata naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku	
				1.05.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD	2 Jenis	2 Jenis	Ketersediaan jasa penunjang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah	Melakukan perencanaan kebutuhan jasa penunjang secara lebih tepat dan terukur	
				1.05.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas	25 Unit	25 Unit	Kondisi sebagian Barang Milik Daerah mengalami penurunan fungsi akibat usia pakai	Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala sesuai standar teknis	
				1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Layanan Kepuasan pelayanan kepamongprajaan (%)	80 %	91.23 %	Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepamongprajaan belum mencapai target yang ditetapkan	Melakukan evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala sebagai dasar perbaikan layanan	
								Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya (%)	100 %	100 %	Kesempatan mengikuti diklat dan pelatihan PPNS masih terbatas	Meningkatkan koordinasi dengan instansi pembina dan lembaga penyelenggara pelatihan	
								Tingkat Kepatuhan Subjek Hukum terhadap Hasil Penyelesaian Pelanggaran (%)	90 %	90 %	Tingkat kepatuhan subjek hukum terhadap hasil penyelesaian pelanggaran belum mencapai target	Melakukan pembinaan dan pengawasan pasca penindakan secara berkelanjutan	
								Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis (%)	100 %	100 %	Persentase pengamanan kegiatan strategis belum sepenuhnya mencapai target	Menyusun perencanaan pengamanan kegiatan strategis secara terukur dan berbasis risiko	
								Layanan Kepuasan pelayanan Linmas (%)	80 %	80 %	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Linmas belum mencapai target	Melakukan evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala	
				1.05.02.2.01			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	450 Kali	450 Kali	Masih terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kabupaten/kota	Meningkatkan intensitas patroli dan kegiatan pengawasan wilayah	
				1.05.02.2.02			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penegakan pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	500 Kali	500 Kali	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota masih rendah	Melaksanakan sosialisasi dan edukasi Perda/Perkada secara berkelanjutan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.05.02.2.03			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan PPNS	1 Kali	1 Kali	Jumlah PPNS belum sebanding dengan kebutuhan penegakan Perda/Perkada	Mengusulkan penambahan dan penataan formasi PPNS sesuai kebutuhan	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH	AN	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN								
	PELAYANAN DASAR				KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
				1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
								Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (LHE INTERNAL) (Nilai)	93.29 Nilai	93.29 Nilai			
								Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				1.05.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Jenis	1 Jenis			
				1.05.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	38 Orang/Bulan	38 Orang/Bulan	Terdapat satu pegawai yang pensiun		
				1.05.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen			
				1.05.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan	7 Jenis	7 Jenis			
				1.05.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jenis	1 Jenis			
				1.05.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	2 Jenis	2 Jenis			
				1.05.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	3 Jenis	3 Jenis			
				1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100 %	100 %			
								Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100 %	100 %			
								Rasio Desa dengan Relawan Siaga Bencana Terlatih dan Aktif (%)	0.28 Rasio	0.28 Rasio			
								Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana (%)	100 %	100 %	Belum maksimalnya penghimpunan data kerugian pasca bencana pada berbagai sektor di Perangkat Daerah terkait	Dilakukan koordinasi atau rapat secara berkala untuk menghimpun data kerugian pasca bencana	
				1.05.03.2.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %			
				1.05.03.2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana masih rendah	Melakukan penyuluhan kebencanaan secara rutin kepada masyarakat	
				1.05.03.2.03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	Keterbatasan anggaran operasional dan logistik	Alokasi anggaran khusus operasional dan logistik	
				1.05.03.2.04			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana	100 %	100 %	Belum maksimalnya penghimpunan data kerugian pasca bencana pada berbagai sektor di Perangkat Daerah terkait	Dilakukan koordinasi atau rapat secara berkala untuk menghimpun data kerugian pasca bencana	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS SOSIAL		1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
				1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	A	Persentase ketercapaian sasaran program OPD (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.06.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 %	100 %			
				1.06.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan ASN Dinsos	100 %	100 %			
				1.06.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum	100 %	100 %			
				1.06.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %			
				1.06.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %			
				1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	5.68 %	5.68 %			
								Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi dalam Pelayanan Sosial (%)	17.28 %	27.38 %			
								Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikasi (%)	2.43 %	2.43 %			
				1.06.02.2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terbina	100 %	100 %			
				1.06.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	100 %	100			
								Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0 %	0 %			
				1.06.03.2.01			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		0 %	0 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Indeks (Skala 0-100))	72 Indeks	52.92 Indeks	1. Belum tersedianya data terpilah dan terverifikasi secara komprehensif2. Keterbatasan sistem pendataan dan integrasi data lintas sektor3. Belum optimalnya penilaian Indeks Kesejahteraan Sosial Disabilitas karena merupakan indikator baru sehingga membutuhkan sistem penilaian yang akurat	1. Melakukan penguatan sistem pendataan dan validasi2. Melakukan koordinasi dan penguatan terkait data lintas sektoral3. Melakukan optimalisasi sistem penilaian Indeks Kesejahteraan Sosial	
								Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100 %	100 %			
								Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100 %	100 %			
								Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100 %	100 %			
								Indeks Kesejahateraan Sosial Lanjut Usia (Indeks (Skala 0-100))	70 Indeks	56.27 Indeks	1. Belum tersedianya data terpilah dan terverifikasi secara komprehensif2. Keterbatasan sistem pendataan dan integrasi data lintas sektor3. Belum optimalnya penilaian Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia karena merupakan indikator baru sehingga membutuhkan sistem penilaian yang akurat	1. Melakukan penguatan sistem pendataan dan validasi2. Melakukan koordinasi dan penguatan terkait data lintas sektoral3. Melakukan optimalisasi sistem penilaian Indeks Kesejahteraan Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	48 %	48.37 %			
				1.06.04.2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	17457 Orang	17457 Orang			
				1.06.04.2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi	225 Orang	384 Orang			
				1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	0.34 %	0.58 %			
								Indikator Persentase Penerima Manfaat yang diberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	100 %	100 %			
								Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral (%)	2 %	2.08 %			
								Persentase Desa dan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin (%)	100 %	100 %			
								Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan (%)	87 %	87 %			
								Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan (%)	100 %	100 %			
								Persentase penyaluran perlindungan sosial sektor pangan (%)	36 %	36 %			
				1.06.05.2.01			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Panti Asuhan yang terbina	100 %	100 %			
				1.06.05.2.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang dinyatakan valid oleh Kementrian Sosial	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	59.75 %	60.28 %			
								Persentase Korban Bencana yg Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	30.07 %	31.81 %			
								Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	29.77 %	29.77 %			
				1.06.06.2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan permakanan dan dukungan psikososial	100 %	100 %			
				1.06.06.2.02			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Tagana yang difasilitasi	100 %	100 %			
				1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100 %	100 %			
				1.06.07.2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara dan direhabilitasi	11 Lokasi	11 Lokasi			
	URUSAN PEMERINTAHAN	DINAS TENAGA		2.07	URUSAN PEMERINTAHAN								
	WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KERJA			BIDANG TENAGA KERJA								
				2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase ketercapaian sasaran program OPD (%)	100 %	100 %			
				2.07.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 Jenis	6 Jenis			
				2.07.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah waktu pemenuhan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
				2.07.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum perangkat daerah	42 Paket	42 Paket			
				2.07.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		350 Laporan	350 Laporan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.07.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	44 Unit	44 Unit			
				2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan (Angka)	4 Level	4 Level			
				2.07.02.2.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah data dan informasi profil ketenagakerjaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja dari Keluarga Miskin yang Diberi Pelatihan (%)	20 %	38.11 %			
								Persentase Pencari Kerja Penyandang Disabilitas yang diberi pelatihan (%)	20 %	24.14 %			
								Persentase Pencari Kerja Perempuan yang diberi pelatihan (%)	20 %	20.69 %			
								Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan (%)	15 %	15.61 %			
								Rasio Pekerja Berpendidikan Tinggi terhadap Total Pekerja (%)	18 %	13.60 %	Jumlah lowongan NON-PENDIDIKAN TINGGI 86,44% Jumlah lowongan PENDIDIKAN TINGGI 13,56%Sehingga, realisasi rendah dikarenakan jumlah lowongan yang dibutuhkan lebih banyak lowongan dengan non pendidikan tinggi	Sosialisasi Perda No 7 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa jabatan tenaga kerja terampil di perusahaan paling sedikit 30% warga Gresik	
								Rasio Pekerja yang Mengalami Peningkatan Keterampilan atau Pendidikan (%)	55 %	59.28 %			
								Rasio Program Pelatihan Kerja yang Sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) (%)	70 %	100 %			
								Rasio Program Pelatihan Keterampilan yang Berkolaborasi dengan Industri atau Sektor Tertentu (%)	30 %	48.28 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Pekerjaan (%)	60 %	61.34 %			
				2.07.03.2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta pelatihan dan pembinaan LPKS	132 Orang	244 Orang			
				2.07.03.2.04			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100 perusahaan	100 perusahaan			
				2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja dari Keluarga Miskin yang Diberi Pelatihan (%)	20 %	22.41 %			
								Persentase Pencari Kerja Penyandang Disabilitas yang yang ditempatkan (%)	20 %	30.43 %			
								Persentase Pencari Kerja Perempuan yang yang ditempatkan (%)	24 %	57.9 %			
								Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	20 %	55 %			
								Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan di sektor manufaktur (%)	35 %	59.2 %			
								Rasio Pekerja Migran yang Terdaftar dalam Sistem Pendaftaran Tenaga Kerja Migran (%)	30 %	30.74 %			
								Tingkat Penyelesaian Kasus Pekerja Migran (%)	90 %	100 %			
				2.07.04.2.01			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja	345 Orang	487 Orang			
				2.07.04.2.03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pendaftar AK 1	1500 Orang	7621 Orang			
				2.07.04.2.04			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pelindungan bagi PMI Pra dan Purna Penempatan	110 Orang	380 Orang			
				2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Pembinaan terhadap Perusahaan yang Melanggar Upah Minimum (%)	65 %	71.12 %			
								Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (%)	27.89 %	29.93 %			
								Realisasi pengajuan klaim jaminan ketenagakerjaan untuk Pekerja dari Keluarga Miskin (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap Pendaftaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	40 %	48.91 %			
				2.07.05.2.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja, Jumlah peserta pembinaan Struktur dan Skala Upah, Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	1 Laporan	1 Laporan			
				2.07.05.2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial	140 Kasus	167 Kasus			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (LHE INTERNAL) (Nilai)	81.92 Nilai	81.96 Nilai	Meskipun capaian nilai LHE Internal AKIP DPKP Gresik tahun 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, laju kenaikan relatif stagnan dengan rata-rata pertumbuhan hanya sekitar 0,3 poin per tahun. Hal ini menandakan bahwa tata kelola internal dinas telah mencapai tingkat kematangan tertentu, namun belum mampu menghasilkan lompatan signifikan dalam akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sebagaimana diamanatkan oleh regulasi nasional, khususnya PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa	Untuk mengatasi stagnasi peningkatan nilai LHE Internal AKIP, DPKP Gresik perlu memperkuat konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam PermenPANRB No. 88 Tahun 2021. Langkah strategis yang dapat ditempuh adalah memperdalam integrasi antara perencanaan kinerja, pelaksanaan program, dan evaluasi hasil, sehingga setiap tahapan berorientasi pada pencapaian outcome yang nyata. Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala akan memastikan capaian kinerja terukur secara akurat dan berkesinambungan Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk menginternalisasi budaya akuntabilitas. DPKP Gresik dapat mendorong pelatihan berkelanjutan, forum pembelajaran bersama, serta pembinaan yang menekankan disiplin organisasi dan kepatuhan terhadap standar kinerja. Dengan demikian, tata kelola internal berkembang menjadi sistem yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Upaya ini sekaligus memperkuat posisi DPKP Gresik dalam kompetisi kinerja antar-perangkat daerah di Jawa Timur, serta memastikan keberlanjutan peningkatan nilai akuntabilitas di masa mendatang.	
				1.05.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Adanya risiko formalisme dalam penyusunan dokumen di mana ketersediaan tepat waktu belum sepenuhnya menjamin kedalaman analisis terhadap dinamika kebutuhan lapangan yang fluktuatif.	ransformasi proses penyusunan dokumen melalui diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) lintas bidang, serta melakukan monev silang secara langsung dengan masyarakat yang didampingi dengan legislatif untuk menajamkan analisis situasi dan validitas data evaluasi.	
				1.05.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi administrasi keuangan OPD	100 %	100 %	Rigiditas dan dinamika perubahan regulasi penatausahaan keuangan menuntut ketelitian tinggi guna menghindari asimetri informasi dalam pelaporan akuntansi pemerintahan.	Peningkatan kapasitas literasi regulasi bagi pejabat penatausahaan keuangan secara berkelanjutan untuk menjamin integritas dan kepatuhan administratif yang absolut.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.05.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	1	1	Meskipun indikator pemenuhan kebutuhan administrasi umum dan ketersediaan barang pendukung menunjukkan capaian 100% sesuai target, terdapat dinamika internal berupa beban kerja administrasi yang tinggi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan birokratisasi alur kerja yang memperlambat dukungan operasional, sehingga efektivitas pelayanan internal tidak sepenuhnya optimal. Situasi tersebut menuntut adanya penataan ulang mekanisme kerja agar tetapselaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional dan daerah. Selain itu, kompleksitas administrasi yang meningkat dapat memengaruhi kelancaran	Upaya yang dapat ditempuh adalah melakukan redesain alur kerja melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih ramping, terstruktur, dan berorientasi pada hasil. SOP yang disusun perlu menekankan kejelasan peran, tanggung jawab, serta tahapan kerja yang efisien, tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diatur dalam PermenPANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AdministrasiPemerintahan. Selain itu, penguatan disiplin organisasi melalui pembinaan internal dan forum evaluasi berkala akan memastikan setiap unit kerja mampu menjalankan SOP dengan konsisten. Dengan langkah tersebut, beban administrasi dapat dikelola secara lebih efektif, alur kerja menjadi lebih sederhana, dan dukungan operasional dapat diberikan dengan kecepatan serta kualitas yang lebih baik. Strategi ini sekaligus memperkuat tata kelola internal DPKP Gresik sebagai institusi yang akuntabel,efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.05.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Walaupun indikator pemenuhan ketersediaan barang pendukung menunjukkan capaian 100% sesuai target, terdapat dinamika sinkronisasi antara kebutuhan riil operasional dengan siklus pengadaan yang belum sepenuhnya presisi. Fluktuasi kebutuhan di lapangan sering kalimenimbulkan celah waktu (time-lag) antara pengajuan kebutuhan dari unit kerja dengan ketersediaan fisik barang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan hambatan administratif sesaat, meski pada akhirnya target tahunan dapat tercapai sesuai rencana.Selain itu, terdapat risiko heterogenitas kualitas barang pendukung apabila standarisasi teknis tidak dikawal secara ketat sejak tahap perencanaan kebutuhan. Situasi ini dapat	Untuk mengatasi tantangan tersebut, DPKP Gresik perlu memperkuat manajemen rantai pasok internal berbasis prediksi. Langkah ini dapat diwujudkan melalui perencanaan berbasis inventarisasi periodik dengan memanfaatkan data historis penggunaan untukmemetakan pola kebutuhan, sehingga ketersediaan barang selalu berada pada level aman sebelum digunakan.Selain itu, penyusunan standar spesifikasi teknis barang milik daerah serta penerapan mekanisme distribusi yang disiplin, seperti First-In-First-Out (FIFO), akan menjaga kualitas dan ketepatan peruntukan barang. Peningkatan kapasitas petugas penatausaha barang juga menjadi bagian penting, agar verifikasi administrasi dan fisik dilakukan dengan lebih teliti. Dengandemikian, capaian 100% tidak hanya bermakna secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan kualitas, ketepatan, dan keberlanjutan dukungan terhadap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Gresik.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.05.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Walaupun indikator tingkat pemeliharaan Barang Milik Daerah menunjukkan capaian 100% sesuai target, intensitas penggunaan sarana prasarana dalam operasi kedaruratan mempercepat proses penurunan fungsi aset. Kondisi ini menuntut perhatian lebihmendalam dibandingkan perawatan rutin, karena aset yang digunakan dalam situasi darurat memiliki tingkat risiko kerusakan yang lebih tinggi. Situasi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas dukungan operasional apabila tidak ditangani dengan pendekatan pemeliharaan yang terencana dan berkesinambungan Selain itu, pola pemeliharaan yang bersifat reaktif cenderung menimbulkan keterlambatan dalam menjaga kesiapan aset. Apabila pola ini terus	Langkah yang dapat ditempuh adalah mengimplementas sistem pemeliharaan preventif berbasis siklus hidup aset (life- cycle management). Pendekatan ini menekankan perencanaan jangka panjang terhadap pemeliharaan, mulai dari tahap penggunaan, pemeriksaan berkala, hinggapenggantian komponen sesuai usia teknis. Dengan demikian, aset dapat tetap terjaga dalam kondisi optimal dan mendukung efektivitas operasional secara berkelanjutan. Selain itu, distribusi tanggung jawab perawatan kepada tiap unit pengguna aset akan memperkuat rasa kepemilikan dan . kedisiplinan organisasi. Setiap unit memiliki peran dalam menjaga kondisi sarana prasarana yang digunakan, sehingga pemeliharaan menjadi lebih terintegrasi dan konsisten. Strategi ini selaras denganprinsip tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat akuntabilitas internal, serta memastikan keberlanjutan kesiapan operasional DPKP Gresik dalam melaksanakan tugas kedaruratan di Kabupaten Gresik.	ikan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	AN,	Persentase Capaian SPM Sub urusan Pemadam Kebakaran (%)	100 %	100 %	Walaupun capaian indikator SPM sub-urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan menunjukkan angka 100%, terdapat tantangan dalam memastikan mutu layanan yang seragamdi seluruh wilayah. Asimetri informasi antara pelaporan administratif dengan dinamika risiko di lapangan menimbulkan potensi kesenjangan pemahaman mengenai kualitas layanan. Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi bahwa pencapaian SPM lebih berorientasi pada pemenuhan prosedural, sementara aspek substantif seperti konsistensi kualitas layanan dan kesiapan sistem	Untuk menjaga kualitas capaian 100%, DPKP Gresik perlu menginternalisasi nilai konstitusional dalam tata kelola layanan. Langkah strategis dapat diwujudkan melalui audit mutu internalsecara berkala yang melibatkan unsur pengawas, sehingga setiap data capaian SPM diverifikasi secara substantif sesuai standar teknis sarana, prasarana, dan kompetensi sumber daya manusia. Pendekatan ini memastikan bahwa capaian yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, sejalan dengan kewajiban konstitusional negara.Selain itu, penguatan budaya organisasi berbasis keselamatan (safety culture) perlu ditanamkanagar paradigma kerja berorientasi pada pemenuhan hak warga negara. Rekayasa prosedur operasional terintegrasi dengan pemangku wilayah serta institusionalisasi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan akan memperkuat kesiapan personel dan konsistensi layanan. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, capaian 100% dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan kualitasnya, sehingga benar-benar mencerminkan kehadiran negara dalammelindungi masyarakat sesuai amanat Pasal 28G UUD 1945.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.05.04.2.01			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kebakaran	100 %	100 %	Kendati Kinerja Tercapai 100% namun fakta dilapangan sekitar 80% layanan yang sepenuhnya ditangani oleh DPKP Gresik hal ini di akibatkan oleh keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana operasional. Tercatat kurang lebih 35 laporan kebakaran lahan kosong atau sampah tepi jalan tidak tertangani akibat kendala teknis seperti mobil mogok, rembermasalah, dan ban pecah, namun pelayanan masih dapat dilakukan oleh Relawan Kebakaran. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara target administratif dengan realisasi di lapangan. Untuk kasus krusial dengan obyek kebakaran berupa rumah, industri, kendaraan, dan aset bernilai, penanganan	Strategi yang ditempuh adalah memperkuat koordinasi dengan FORPEKA dan pemangku wilayah untuk memastikan dukungan operasional pada obyek vital tetap terjaga. Penempatan unit reaksi cepat di titik rawan kebakaran juga menjadi langkah penting untuk mengurangi keterlambatan.Sela itu, diperlukan penguatan sistem pemeliharaan armada agar kesiapan teknis kendaraan lebih terjamin. Dengan langkah ini, capaian target dapat semakin mendekati angka ideal, sekaligus mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat secara menyeluruh.	
				1.05.04.2.02			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana Prasarana dalam kondisi baik	100 %	100 %	Capaian 100% menunjukkan keberhasilan administratif, namun cakupan inspeksi baru menjangkau 11,51% dari total 356 desa dan kelurahan di Kabupaten Gresik. Kondisi ini menimbulkan tantangan substantif, karena validitas capaian belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan perlindungan di seluruh wilayah.Keterbatas jumlah inspektur	Strategi dilakukan melalui internalisasi pengetahuan teknis dari inspektur bersertifikat kepada tim pendukung, serta penerapan manajemen beban kerja berbasis shift untuk menjaga ketelitian.Selain itu, fokus inspeksi diarahkan pada wilayah dengan tingkat risiko tinggi terlebih dahulu, ansehingga capaian tetap relevan dengan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
											bersertifikat juga menjadi faktor utama, sehingga pelaksanaan inspeksi belum mampu menjangkau seluruh area dengan standar teknis yang diamanatkan regulasi.	kebutuhan keselamatan publik. Dengan langkah ini, capaian 100% dapat dipertahankan sekaligus diperluas cakupannya secara bertahap.	
				1.05.04.2.04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah sosialisasi Pencegahan Kebakaran yang dilakukan	100 %	100 %	Capaian 100% menunjukkan keberhasilan administratif, namun cakupan pemberdayaan baru menjangkau 7,86% dari total desa dan kelurahan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pemerataan edukasi pencegahan kebakaran. Selain itu, keterbatasan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui diklat dan sertifikasi bagi 20 anggota pemadam berdampak pada kualitas kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini berimplikasi pada efektivitas transfer pengetahuan yang belum sepenuhnya optimal.	Strategi dilakukan melalui mekanisme transfer of knowledge dari personel berpengalaman kepada tim pendukung, serta penerapan manajemen penugasan berbasis rotasi untuk menjaga keseimbangan tugas operasional dan waktu istirahat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada wilayah dengan tingkat risiko kebakaran tinggi, sehingga cakupan yang terbatas tetap memberikan dampak signifikan terhadap keselamatan publik. Program Inovasi DAMKAR SIAP ("Sinergi, Inovasi, Aksi, Perlindungan Bersama Legislatif untuk Masyarakat") yang merupakan kolaborasi komisi III DPRD dan kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian target. DPKP Gresik dalam upaya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pembinaan relawan pemadam kebakaran, memiliki	
				1.05.04.2.05			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Persentase Operasi pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	Meski tercapai 100 % terdapat	Strategi dilakukan melalui pengembangan sistem prioritas layanan	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
				2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.11.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	7 Dokumen	7 Dokumen	Ketidakseimbanga antara Jadwal pemenuhan data terhadap meningkatnya beban kinerja pengelolaan data	n	
				2.11.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	110 Orang/Bulan			
				2.11.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis internal PD yang terlayani	5 Jenis	5 Jenis	Ketidaksesuaian detail spesifikasi barang pada DPA dengan kebutuhan riil di lapangan serta ketersediaan barang di pasaran, sehingga memerlukan penyesuaian dalam proses pengadaan		
				2.11.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	Realisasi dipengaruhi oleh besaran tagihan riil pemakaian (komunikasi, air, dan listrik) yang bersifat fluktuatif sehingga perencanaan anggaran tidak selalu sama dengan kebutuhan aktual.		
				2.11.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset terpelihara	340 Jenis	340 Jenis	Penyesuaian		
				2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Regulasi Pengelolaan Kualitas Air (%)	60 %	60.05 %	- Syarat yang diajukan oleh pelaku usaha dalam pengurusan Dokumen Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) kurang lengkap - Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaku usaha yang kurang memadai dalam penyusunan Dokumen Rincian Teknis TPS LB3	- Melengkapi syarat yang belum lengkap - Mengadakan sosialisasi ke pelaku usaha terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terhadap Kualitas Udara (%) Regulasi Pengelolaan	60 %	60.05 %			
				2.11.03.2.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang taat terhadap standart baku mutu	800 Lokasi	1019 Lokasi	banyak laboratorium swasta di sekitar gresik yang menawarkan harga pengujian yang jauh lebih murah		
				2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM HAYATI (KEHATI)	AN	Persentase Tutupan Lahan Hljau (%)	8 %	8 %	Meskipun target persentase tutupan lahan hijau telah tercapai, masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan tutupan hijau akibat keterbatasan lahan, tekanan alih fungsi lahan, serta kebutuhan pemeliharaan yang berkelanjutan.	Melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah, peningkatan kegiatan penanaman dan pemeliharaan vegetasi, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam upaya penambahan dan perlindungan tutupan lahan hijau.	
								Rasio Taman Ramah Anak, Perempuan,	0.167	0.167	Capaian rasio taman	Melakukan peningkatan sarana dan	
								Penyandang Disabilitas, dan Lansia (Rasio)			ramah kelompok rentan telah sesuai target, namun masih diperlukan peningkatan pemenuhan standar aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan secara merata pada seluruh taman yang dikelola.	prasarana taman agar memenuhi prinsip ramah anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, serta melakukan penyesuaian desain dan fasilitas sesuai standar aksesibilitas.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur RTH (%)	80 %	80 %	Realisasi belanja infrastruktur RTH telah mencapai target, namun pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala penyesuaian jadwal pelaksanaan, efektivitas pengadaan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran agar hasil pembangunan lebih maksimal.	Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran, serta penguatan pengendalian dan monitoring pelaksanaan belanja infrastruktur RTH.	
								Persentase RTH yang terkelola (%)	0.017 %	0.017 %	Meskipun persentase RTH yang terkelola telah sesuai target, masih terdapat keterbatasan sumber daya pengelolaan, khususnya dalam aspek pemeliharaan rutin dan pengawasan agar kualitas RTH tetap terjaga.	Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan RTH melalui penataan, perawatan rutin, serta peningkatan peran petugas pengelola dan keterlibatan masyarakat.	
				2.11.04.2.01			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang terkelola	142.43 Ha	142.43 Ha	Luas RTH yang terkelola telah mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat tantangan dalam menjaga kualitas vegetasi, keberlanjutan pemeliharaan, serta konsistensi standar pengelolaan pada seluruh lokasi RTH	Melakukan perluasan cakupan pengelolaan RTH secara bertahap melalui penambahan lokasi RTH yang dikelola, serta penguatan kegiatan pemeliharaan.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase Ketaatan Usaha/kegiatan/lok yang pengelolaan LB3 terhadap regulasi LH (%)	55 % asi	63.94 %	- Syarat yang diajukan oleh pelaku usaha dalam pengurusan Dokumen Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) kurang lengkap - Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaku usaha yang kurang memadai dalam penyusunan Dokumen Rincian Teknis TPS LB3	- Melengkapi syarat yang belum lengkap - Mengadakan sosialisasi ke pelaku usaha terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup	
				2.11.05.2.01			Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Usaha yang terawasi	90 Pelaku Usaha	90 Pelaku Usaha	- Syarat yang diajukan oleh pelaku usaha dalam pengurusan Dokumen Rincian	Melengkapi Syarat yang belum lengkap usaha terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup - Mengadakan sosialisasi ke pelaku	
				2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha atau Kegiatan terkait Persetujuan/Rekom LH (%)	20 % endasi	22 %	Keterbatasan jumlah SDM teknis dibandingkan dengan jumlah usaha yang ada, kendala anggaran operasional, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta belum optimalnya sistem monitoring dan pendataan usaha berizin secara terintegrasi	Telah terbit peraturan terbaru PermenLH 22/2025 terkait kewenangan persetujuan lingkungan, sehingga akan ada peningkatan jumlah permohonan persetujuan lingkungan ke kabupaten	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.11.06.2.01			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang yang memiliki izin	165 Pelaku Usaha	165 Pelaku Usaha	.kewenangan Perizinan Berusaha, terdapat banyak kegiatan yang berada di Kabupaten Gresik menjadi kewenangan Provinsi atau Pusat. Persetujuan Lingkungan atas kegiatan dengan skala resiko menengah rendah seringkali terbit otomatis melalui sistem OSS RBA. Adanya peraturan PP 5/2021 yang mengatur	Telah terbit peraturan terbaru PermenLH 22/2025 terkait kewenangan persetujuan lingkungan, sehingga akan ada peningkatan jumlah permohonan persetujuan lingkungan ke kabupaten	
				2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Kelompok/ Lembaga/ Organisasi yang aktif dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	55 %	55.14 %	Rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan SDM penyuluh, pembinaan yang belum berkelanjutan, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi lingkungan, penguatan kapasitas penyuluh, pembinaan berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi yang lebih optimal.	
				2.11.08.2.01			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok atau lembaga yang aktif terbina	180 Lembaga	180 Lembaga	Rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi SDM penyuluh, pembinaan yang belum berkelanjutan, serta belum optimalnya	Peningkatan partisipasi masyarakat serta monitoring dan evaluasi yang lebih optimal. melalui edukasi lingkungan, penguatan kapasitas penyuluh, pembinaan berkelanjutan,	
				2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Aduan Lingkungan Hidup di Badan Air yang difasilitasi (%)	100 %	100 %	:- Minimnya pelaku usaha tentang pengetahuan pengelolaan lingkungan	- Penambahan kegiatan anggaran - Mengadakan sosialisasi ke pelaku usaha terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup	
								Prosentase Aduan Lingkungan Hidup terhadap kualitas udara yang difasilitasi (%)	100 %	100 %	- Minimnya pelaku usaha tentang pengetahuan pengelolaan lingkungan	- Penambahan kegiatan anggaran - Mengadakan sosialisasi ke pelaku usaha terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup	
				2.11.10.2.01			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan terkait PPLH	30 Pengaduan	41 Pengaduan	- Minimnya pelaku usaha tentang pengetahuan pengelolaan lingkungan	- Penambahan kegiatan anggaran - Mengadakan sosialisasi ke pelaku usaha terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup	
						PROGRAM		Persentase Penanganan			1.Melakukan inovasi		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.11.11		PENGELOLAAN		Sampah (%)	58.80 %	58.80 %	terhadap penanganan		
								Persentase Pengurangan sampah (%)	18.52 %	18.52 %	1.Edukasi dan Monev OMS serta kampus lokal Kabupaten Gresik kurang optimal karena yang minim.3. Edukasi dan Monev Retail masih terpusat di area Gresik Tengah.4. Edukasi dan Monev Kantor Pemerintahan melalui Kegiatan Lomba Eco Office yang terlaksana setahun dua kali, namun hanya beberapa kantor saja yang menerapkan dengan baik.5. Paradigma masyarakat masih kumpul, angkut dan buang. anggaran yang minim dan perlu pendekatan agar menjadi kebijakan internal OMS dan kampus lokal.2. Edukasi dan Monev Perusahaan melalui pelaporan PROPER kurang optimal karena waktu		
								Persentase Realisasi Belanja Infrastruktur sektor Persampahan (%)	80 %	80 %			
								Rasio Bank Sampah dibandingkan	0.25	0.25	1. BankSampah masih terpusat		
								dengan Desa (Rasio)			di area Gresik Kota2. Bank Sampah didominasi dengan mengolah sampah lapak, belum organik		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Rasio TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	0.33	0.33	1.Perlu adanya optimalisasi TPS 3R untuk mengolah sampah organik pada setiap kawasan2. Pergeseran fasilitas persampahan dari TPS ke TPS 3R untuk mengurangi timbulan sampah ke TPST dan TPA.		
								Rasio TPST yang terbangun dan terkelola dibandingkan kebutuhan (Rasio)	0.17	0.17	1.Target TPST di area zonasi belum terpenuhi, TPST eksisting berada di area zona Gresik Tengah, Utara dan Sangkapura Pulau Bawean.2.Perlu adanya peningkatan kapasitas TPST		
				2.11.11.2.01			Pengelolaan Sampah	Jumlah lokasi yang tertangani	18 Lokasi	18 Lokasi			
								jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah	20 Kelompok	20 Kelompok			
								Jumlah sarpras yang layak	18 Unit	18 Unit			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
				2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase ketercapaian sasaran program OPD (%)	100 %	100 %			
				2.12.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	11 Dokumen	11 Dokumen			
				2.12.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban keuangan OPD	13 Dokumen	13 Dokumen			
				2.12.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengelolaan administrasi pegawai	100 %	100 %			
				2.12.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya daya dukung sarana kantor dan rapat koordinasi	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.12.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya daya dukung peralatan kantor	1 Unit	1 Unit			
				2.12.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100 %	100 %			
				2.12.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	23 Unit	23 Unit			
				2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase perekaman e-KTP keluarga miskin bagi yang melaporkan (%)	100 %	100 %			
								Persentase kepemilikan KIA anak pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	100 %	100 %			
								Persentase kepemilikan KK pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	100 %	100 %			
								Persentase perekaman e-KTP (%)	100 %	99.48 %	karena adanya data dinamis yakni usia anak 16 tahun menjadi 17 tahun yang menjadi wajib KTP.		
								Persentase kepemilikan	100 %	100 %			
								KTP pekerja migran bagi yang melaporkan (%)					
								Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	10 %	11.17 %			
								Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	75 %	80.73 %			
				2.12.02.2.01			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya dokumen pencatatan, penatausahaan, dan pendaftaran penduduk terkini	195460 Dokumen	273554 Dokumen			
				2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100 %	100 %			
								Persentase penerbitan akta kelahiran keluarga miskin bagi yang melaporkan (%)	100 %	100 %			
								Persentase kepemilikan akta kelahiran pekerja migran bagi yang melaporkan (%)	100 %	100 %			
								Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100 %	100 %			
								Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100 %	100 %			
				2.12.03.2.01			Pelayanan Pencatatan Sipil	Tercapainya pelayanan prima dan daya dukung dokumen administrasi kependudukan	100 %	100 %			
				2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100 %	100 %			
								Persentase layanan adminduk berstandarisasi ISO (Persentase)	100 %	100 %			
				2.12.04.2.01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terpenuhinya data kependudukan terkini	100 %	100 %			
				2.12.04.2.03			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya daya dukung fungsi informasi kependudukan sesuai perkembangan	100 %	100 %			
				2.12.04.2.04			Pembinaan dan Pengawasan	Terpenuhinya pengelolaan	100 %	100 %			
							Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	informasi kependudukan					
				2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100 %	100 %			
								Cakupan akumulatif sisa KK belum ber- barcode (%)	20 %	3.19 %			
				2.12.05.2.01			Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya dokumen data kependudukan sesuai perkembangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
				2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				2.13.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	3 Dokumen	3 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.13.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai penerima gaji dan tunjangan	39 Orang/Bulan	39 Orang/Bulan			
				2.13.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket			
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan			
				2.13.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	15 Laporan			
				2.13.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	65 Unit	65 Unit			
				2.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik (%)	38 %	71.71 %			
								Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100 %	100 %			
								Persentase Aset Produktif terhadap Total Aset Usaha Desa	64.66 %	74.53 %			
								Ketergantungan Pendapatan Asli Desa dibanding Bantuan Keuangan umum	89.96 %	89.96 %			
				2.13.02.2.01			Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Infrastruktur Desa yang difasilitasi	18 Infrastruktur	18 Infrastruktur			
				2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama (%)	6.36 %	23 %			
								Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100 %	100 %			
				2.13.03.2.01			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	23 Desa	23 Desa			
				2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Rasio Aparatur Pemerintahan Desa yang menerima pelatihan tematik per tahun	92.13 %	95.15 %			Mengoptimalkan pendampingan dan pembinaan kepala desa dan perangkatnya agar meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa, agar mampu mendayagunakan pades bagi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100 %	100 %			Mendampingi perencanaan dan pembangunan desa khususnya dalam pengentasan kemiskinan,swase pangan , dan pelayanan kepada masyarakat, persiapan program koperasi desa merah putih.
								Nilai Kapasitas Pemahaman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	72 %	73 %			Berkoordinasi dengan semua pihak terkait PILKADES sentak di 24 Desa di Kabupaten Gresik tahun 20245 agar dapat terselenggara dengan baik, aman dan tertip.
								Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMADES) dengan status Maju	8.48 %	9 %			Memvalidasi data BUMDES sesuai status Produktivitasnya untuk efektifitas pendampingan.
								Rerata Nilai Evaluasi Desa dengan Opini Baik	95 %	99.09 %			
								Rasio Kontribusi Usaha Desa terhadap Pendapatan Asli Desa	8.5 %	15 %			
								Rasio Pencatatan Aset Desa	100 %	100 %			
				2.13.04.2.01			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa dan anggota BPD yang mengikuti pelatihan	4810 Orang	5379 Orang			
								Jumlah bumdes dengan kategori maju	163 BUMDes	171 BUMDes			
								Jumlah desa cepat berkembang	250 Desa	292 Desa			
								Jumlah desa yang menggunakan aplikasi SIPADES	297 Desa	330 Desa			
								Jumlah desa yang merencanakan pembangunan	264 Desa	330 Desa			
				2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	AN,	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	80.64 %	90 %			Meningkatkan kinerja aparatur desa, terutama di tingkat RT dan RW melalui kebijakan tambahan tunjangan bagi pengurus RT/RW berdasar kemampuan keuangan daerah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Rasio Anggaran Program Pengentasan Kemiskinan Desa Terhadap APBDes	15 %	45 %			
				2.13.05.2.01			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga	6 Lembaga			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
				2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan yang Responsif Gender (%)	30 %	44 %			
				2.08.02.2.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya	10 Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah			
				2.08.02.2.02			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						
				2.08.02.2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi	3 Lembaga	3 Lembaga			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO Yang Berhasil Diselesaikan (%)	96 %	93 %	masing-masing kasus memiliki kebutuhan waktu penyelesaian yang berbeda- beda sesuai dengan jenis kasusnya. Selain itu terdapat kasus yang baru masuk di bulan desember / akhir desember sehingga masih dalam proses penyelesaian	dilakukan pendampingan sesuai kebutuhan kasus	
				2.08.03.2.01			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan	30 Perangkat Daerah	31			
				2.08.03.2.02			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil diselesaikan	115 Kasus	281 Kasus			
				2.08.03.2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi	3 Lembaga	3 Lembaga			
				2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Cakupan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar (%)	100 %	100 %			
				2.08.04.2.01			Peningkatan Kualitas Keluarga dan Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga sasaran yang pendapatannya diatas garis kemiskinan	32 Orang	32 Orang			
				2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
				2.08.05.2.01			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak (%)	60 %	93 %	data tersebut merupakan data realisasi tahun 2024, karena penilaian KLA dilaksanakan 2 tahun sekali		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.08.06.2.01			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/Perusahaan / Lembaga Masyarakat	12 Indikator	24 Indikator			
				2.08.06.2.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Ramah Anak Yang Sudah Diselenggarakan	7 Jenis	8 Jenis			
				2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Berhasil diselesaikan (%)	85 %	94 %			
								Rasio Anak Pekerja Migran Pasca Pemulangan yang Mendapatkan Akses Layanan Psikososial (%)	80 %	100 %	belum ada anak pekerja migran yang dipulangkan hingga akhir tahun 2025	hingga akhir 2025, tidak ada anak pekerja migran yang dipulangkan, namun fasilitas pendampingan sudah tersedia pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
				2.08.07.2.01			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan	25 Lembaga	25 Lembaga			
				2.08.07.2.02			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan	80 Kasus	264 Kasus			
				2.08.07.2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2 Lembaga	2 Lembaga			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
				2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				2.14.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen			
				2.14.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji dan Tambahan Penghasilan PNS yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.14.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kosong					
				2.14.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instansi listrik dan peralatan serta perlengkapan kantor / rumah tangga yang terpenuhi	15 Jenis	15 Jenis			
				2.14.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Operasional yang tersedia	55 Orang	55 Orang			
				2.14.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis			
				2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase Unit Pemberi Layanan yang telah Tersosialisasi Program Bangga Kencana (%)	100 %	100 %			
				2.14.02.2.01			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kosong					
				2.14.02.2.02			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data	1 Dokumen	1 Dokumen			
				2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	67.56 %	64.39 %			
								persentase pelayanan KB yang dibiayai oleh JKN PBI (%)	21 %	31.85 %			
				2.14.03.2.01			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi	18 Unit	18 Unit			
				2.14.03.2.02			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi	18 Unit	18 Unit			
				2.14.03.2.03			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akseptor MKJP yang dilayani	2500 Orang	4787 Orang			
				2.14.03.2.04			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yg berkontribusi terhadap pembangunan di wilayahnya	190 Unit	356 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Keluarga Desil 1 DTSEN yang mengakses layanan bimbingan konseling, kesehatan reproduksi dan/ atau perlindungan anak (%)	0 %	0 %	belum mulai dilakukan perhitungan	akan dilakukan perhitungan mulai Tahun 2026	
								Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun / Age Specific Fertility Rare (ASFR) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	7.85 Orang	9.9 Orang	Kelahiran di usia anak merupakan dampak dari kondisi yang lebih kompleks, diantaranya nilai / keyakinan di masyarakat untuk menikah muda, dan / atau Kehamilan Tidak Diinginkan; selain itu juga data tersebut masih data tahun 2024 karena belum ada publikasi data tahun 2025 pada aplikasi siperindu	Akan dilakukan upaya pencegahan yang terpadu dengan upaya pencegahan perkawinan anak dan upaya pendidikan kesehatan reproduksi untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan	
								Persentase Keluarga Remaja yang Mengakses Kegiatan Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesehatan Reproduksi, atau Perlindungan Anak (%)	15 %	15 %			
				2.14.04.2.01			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	7 Kelompok	7 Kelompok			
								Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang difasilitasi dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis					
				2.14.04.2.02			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi TPK dan akses internet mobile	356 Desa/Kelurahan	356 Desa/Kelurahan			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PERHUBUNGAN		2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				2.15.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Perencanaan, Pelaporan yang terfasilitasi	100 %	100 %			
				2.15.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terfasilitasi	100 %	100 %			
				2.15.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kosong					
				2.15.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kosong					
				2.15.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	100 %	100 %			
				2.15.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi	100 %	100 %			
				2.15.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terfasilitasi	100 %	100 %			
				2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Kendaraan Angkutan Lulus Uji (%)	96.37 %	99.17 %	Masih Adanya Kendaraan Angkutan yang tidak melaksanakan Uji Berkala	Melaksanakan Kegiatan Inspeksi ke Perusahaan yang memiliki Angkutan Umum serta melaksanakan Operasi Gabungan terhadap kendaraan angkutan umum yang buku ujinya tidak aktif	
								Cakupan Layanan Tertib Lalu Lintas dalam Kota Gresik (%)	62.86 %	62.86 %	Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam berlalulintas di jalan raya yang bisa menimbulkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas	menempatkan petugas tertib Lalu Lintas pada titik lokasi yang rawan kemacetan	
								Persentase Kelengkapan Jalan (Marka Jalan) yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal (%)	4.19 %	4.22 %			
								Persentase Kelengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal (%)	72.07 %	72.63 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase ketersediaan Fasilitas Keselamatan jalan (%)	72.5 %	74.29 %			
								Persentase Ketersediaan Tempat Parkir Khusus (%)	70 %	70 %			
								Persentase Konektivitas Darat (%)	63.16 %	72.63 %			
								Persentase Layanan Rekayasa Lalu Lintas (%)	100 %	100 %			
								Persentase penerangan jalan umum yang menggunakan lampu ramah energi (%)	75 %	77.49 %	masih adanya Lampu Penerangan Jalan Umum yang masih menggunakan Lampu jenis mercury yang memancarkan energy yang terlalu besarbelum ditargetkan pada tahun 2025	mengganti PJU yang menggunakan lampu jenis mercury dengan Lampu jenis LED yang ramah energy	
								Realisasi penerapan kesiapan kendaraan angkutan dengan bahan bakar non fossil di kawasan perkotaan (%)	0 %	0 %	belum ditargetkan pada tahun 2025		
				2.15.02.2.02			Penyediaan Perlengkapan	Persentase pelaksanaan Penyediaan	100 %	100 %	Jumlah komponen / suku cadang	Menambah ketersediaan jumlah suku	
							Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlengkapan Jalan yang terfasilitasi			pemeliharaan Lampu PJU tidak sebanding dengan jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang dikelola	cadang/ komponen pemeliharaan	
				2.15.02.2.03			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Type C yang dikelola	3 Unit	3 Unit			
				2.15.02.2.04			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir yang terfasilitasi	100 %	100 %	kurangnya kesadaran masyarakat untuk parkir di tempat yang telah ditetapkan menimbulkan munculnya juru parkir liar yang juga mengakibatkan hambatan hambatan jalan	meningkatkan pengawasandan penertiban parkir di tepi jalan umum serta menyediakan area Tempat Khusus Parkir	
				2.15.02.2.05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terfasilitasi	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.15.02.2.06			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	100 %			
				2.15.02.2.08			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang terfasilitasi	100 %	100 %			
				2.15.02.2.09			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota yang terfasilitasi	100 %	100 %	angkutan umum yang beroperasi saat ini sudah banyak yang tidak layak operasional lagi serta banyak yang tidak beroperasi dikarenakan biaya operasional yang tinggi	menyediakan angkutan Feeder sebagai pengganti angkutan existing guna menghubungkan trayek menuju jalur trayek Transjatim	
				2.15.02.2.11			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang terfasilitasi	100 %	100 %			
				2.15.02.2.16			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kosong	%	%			
				2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Konektivitas Laut (%)	60 %	60 %	belum adanya Kapal penyeberangan lintas Gresik- Bawean yang dapat beroperasi pada saat musim gelombang laut tinggi	berkoordinasi dengan PT. ASDP serta Armada TNI AL guna penyediaan Kapal yang bisa beroparasi pada saat usim gelombang laut tinggi	
				2.15.03.2.07			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 %	100 %			
				2.15.03.2.12			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dikelola	1 Unit	1 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.15.03.2.13			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Unit	Unit			
				2.15.05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)	66.67 %	66.67 %			
				2.15.05.2.02			Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlintasan Kereta Api Sebidang yang dikelola	10 Lokasi	10 Lokasi	masih adanya perlintasan KA sebidang yang belum memiliki sarana keselamatan KA sebidang	menyediakan serta melengkapi sarana Keselamatan KA sebidang di perlintasan KA	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
				2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	AAN	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks (Skala 0-100))	2.7 Indeks	2.7 Indeks	EPSS dilaksanakan 2 tahun sekali		
				2.20.02.2.01			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun atau mengolah data secara terpilah gender (Perangkat daerah)	5 Daerah	9 Perangkat	Terdapat jadwal pengumpulan dan diseminasi data sehinggan jumlah OPD yang menyusun/mengola data secara terpilah gender sudah ditentukan		
								Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral	45 Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah			
								Jumlah Data Induk yang dikelola	4 buah	4 buah			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
				2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		indeks KAMI (Indeks)	200 Indeks	541 Indeks	sudah menerapkan ISO sehingga data dukung yang diberikan mampu meningkatkan nilai indeks KAMI		
				2.21.02.2.01			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menerapkan management keamanan informasi (Perangkat Daerah)	9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
				2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN		Rerata Persentase Capaian	100 %	100 %			
						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Kinerja Program (%)					
				2.16.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dan kooordinasi penyusunan dokumen/laporan perencanaan dan capaian kinerja SKPD (%)	100 %	100 %			
				2.16.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan SKPD (%)	100 %	100 %			
				2.16.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase fasilitasi ketersediaan operasional dan administrasi umum perangkat daerah (%)	100 %	100 %			
				2.16.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	100 %			
				2.16.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	100 %			
				2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase keterpenuhan data dan/atau informasi publik yang ditentukan oleh komisi informasi (Self Assessment Questionnaire) (%)	97 %	97 %			
								Persentase Pengaduan Layanan Publik yang ditindaklanjuti (%)	97.1 %	99.6 %			
				2.16.02.2.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyediakan Daftar informasi dan dokumentasi publik (perangkat daerah)	9 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	Telah disusunnya SK DIDP beberapa dinas (Dinas pertanian, kec. Duduksampeyan, Disparekrafbudpora , Diskominfo, dst)		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasikan (konten)	2800 Konten	4675 Konten	Banyaknya Kegiatan Kepala Daerah dan OPD yang dipublikasikan di media sosial		
								Persentase OPD yang menindaklanjuti pengaduan tepat waktu (%)	95.7 %	93 %	Aplikasi sp4n- lapor beberapa kali mengalami gangguan teknis, sehingga menghambat pengelolaan pengaduan	Tindak lanjut aduan menjadi kewenangan OPD terdisposisi, Diskominfo sebagai pejabat pelaksana pengaduan daerah yg mana secara fungsi hanya memiliki kewenangan untuk mendistribusikan dan memantau pengaduan yg masuk ke daerah	
								Persentase panggilan kedaruratan yg ditindaklanjuti (%)	100 %	99.60 %	Terdapat beberapa panggilan non-kedaruratan yang masuk melalui panggilan 112, sehingga penyelesaiannya menggunakanSOP non kedaruratan	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan OPD terkait	
				2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Kapasitas bandwith jaringan intra pemerintah daerah (Angka)	2 GB	2 GB			
								Persentase aplikasi yang dimanfaatkan perangkat daerah (%)	85.4 %	85.4 %			
								Persentase pemenuhan kebutuhan server (%)	1.58 %	1.66 %	-. Adanya penambahan VPS dari PDN Pemprov Jatim-. Adanya penonaktifan VPS yang sudah tidak dipakai/tidak dimanfaatkan sehingga bisa digunakan kembali		
				2.16.03.2.02			Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah (%)	92 %	93.85 %	tanggap dan kecepatan tim teknis dalam menanganin gangguan-. ketepatan pic dari perangkat daerah dan kelurahan dalam menyampaikan gangguan koneksi		
								Jumlah OPD yang dibina untuk menerapkan manajemen Aset TIK (perangkat daerah)	15 Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah	Partisipasi aktif dari perangkat daerah		
								Jumlah VPS yang dikelola (VPS)	212 VPS	236 VPS	Partisipasi aktif dari perangkat daerah		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Jumlah API yang dikelola (API)	36 API	49 API	Adanya Aplikasi OpenDK yang membutuhkan Integrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID)		
								Jumlah pedoman pelaksanaan SPBE yang disusun dan dievaluasi (pedoman)	2 Pedoman	2 Pedoman			
								Jumlah Dokumen Perencanaan SPBE yang dievaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen			
								Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya	47 Indikator	47 Indikator			
								Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle) (aplikasi)	11 Aplikasi	11 Aplikasi			
								Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk (layanan)	33 Layanan	58 Layanan	Adanya perubahan pengelompokkan layanan di service desk		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
				3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	50 %	50 %			
				3.31.02.2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) yang disusun dan dievaluasi dalam 1 tahun anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen			
				3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0.04 %	0 %	Bidang perindustrian tidak menerbitkan izin usaha, tapi memberikan fasilitas untuk pendaftaran merk/HKI dan akun SIINas (verifikasi teknis)		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				3.31.03.2.01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah usulan izin usaha industri dan kawasan industri yang diterbitkan atau mendapat rekomendasi dalam 1 tahun anggaran	15 Rekomendasi Ijin	20 Rekomendasi Ijin			
				3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Rasio Ketersediaan Informasi Industri (Rasio)	100 %	100 %			
				3.31.04.2.01			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi industri yang mendukung proses perizinan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI dalam 1 tahun anggaran	40 %	100 %			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
				3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100 %	100 %			
								Presentase sarana perdagangan yang dipelihara (%)	100 %	100 %			
				3.30.03.2.01			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah unit sarana distribusi perdagangan yang dibangun, direvitalisasi, atau difasilitasi pengelolaannya dalam 1 tahun anggaran	9 Unit	2 Unit	Alokasi anggaran yang belum mencukupi untuk membangun atau merevitalisasi sarana distribusi perdagangan	Mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber seperti APBD, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), kerja sama pemerintah dengan swasta (KPS), atau bantuan pihak ketiga	Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin saranaperdagang termasuk pasar-pasar di kecamatan
				3.30.03.2.02			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat yang dibina dalam 1 tahun anggaran	30 %	30 %			
				3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Indeks harga konsumen (Indeks)	105 Point	107 Point			
				3.30.04.2.02			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting dengan harga terkendali di pasar kabupaten/kota dalam 1 tahun anggaran	28 Laporan	28 Laporan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Pertumbuhan nilai ekspor (%)	5 %	8 %			
				3.30.05.2.01			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi dagang (pameran dan misi dagang) yang diselenggarakan untuk produk ekspor unggulan daerah dalam 1 tahun anggaran	3 Kegiatan	0 Kegiatan	Alokasi anggaran yang belum mencukupi untuk menyelenggarakan kegiatan promosi dagang	Mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber seperti APBD, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), kerja sama pemerintah dengan swasta (KPS), atau bantuan pihak ketiga	Meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal untuk meningkatkan nilai ekspor
				3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat UTTP berterra sah (%)	100 %	100 %			
				3.30.06.2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat UTTP (Ukuran, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) yang telah dilakukan tera, tera ulang, dan pengawasan dalam 1 tahun anggaran	40 %	100 %			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
				2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				2.18.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				2.18.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen			
				2.18.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepagawaian perangkat daerah	1 Paket	1 Paket			
				2.18.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan			
				2.18.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Barang/Jasa	3 Barang/Jasa			
				2.18.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 Jenis	6 Jenis			
				2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	4.5 %	6.32 %	data termutakhir 2024	data akan diupdate berkala	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase Peningkatan Jumlah Investor (%)	5 %	44.36 %			
								Rasio Investasi Manufaktur terhadap Total Investasi Masuk Daerah ()	65 %	76.70 %			
								Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	80 %	147.75 %			
				2.18.02.2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 Draft	3 Draft			
				2.18.02.2.02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	2 Draft	2 Draft			
				2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal (%)	5 %	30.43 %			
				2.18.03.2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 Jenis	2 Jenis			
				2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	75 %	92.89 %			
								Persentase Penyelesaian Ijin (%)	75 %	447.04 %			
				2.18.04.2.01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan	5083 Pelayanan	26878 Pelayanan			
				2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase kepatuhan perusahaan dalam pelaporan LPKM (%)	30 %	57.48 %			
								Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	90 %	92.6 %			
				2.18.05.2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	152 Kali	152 Kali			Telah dilaksanakan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2 %	0.092 %	Realisasi belum mencapai target karena sebagian besar pemohon lebih banyak mengakses layanan yang berkaitan dengan Kependudu dan Pencatatan Sipil dibandingkan layanan Online Single Submission (OSS), sehingga tingkat pemanfaatan data dan informasi penanaman modal melalui OSS relatif rendah	Melakukan penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai fungsi dan kmananfaat layanan Online Single Submission (OSS) sebagai sarana utama pengurusan perizinan berusaha, termasuk integrasi dan penyesuaian informasi pada website agar lebih mengarahkan pemohon ke layanan OSS	
								Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal (Indeks)	5 Indeks	5 Indeks			
				2.18.06.2.01			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 Jenis	3 Jenis			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
				2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		nilai pengawasan kearsipan internal (%)	34.48 %	27.59 %	Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah terhadap standar pengelolaan kearsipan serta keterbatasan SDM kearsipan di beberapa perangkat daerah	Melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan monitoring evaluasi pengawasan kearsipan internal secara berkala	
								Persentase Pencipta Arsip yang dibina (%)	11.58 %	13.55 %			
				2.24.02.2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dengan Nilai Pengawasan Kategori BAIK (OPD)	30 Perangkat Daerah	24 Perangkat Daerah	Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah terhadap standar pengelolaan kearsipan serta keterbatasan SDM kearsipan di beberapa perangkat daerah	Melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan monitoring evaluasi pengawasan kearsipan internal secara berkala	
				2.24.02.2.02			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola di Lembaga Kearsipan Daerah (Lembar)	114804 Lembar	124476 Lembar			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.24.02.2.03			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasionaal Kabupaten/Kota yang dikelola (Layanan)	1 Layanan	1 Layanan			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PERIKANAN		3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
				3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	A	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			telah dilakukan kajian ulang terhadap kerjasama pemanfaatan lahan tambak yang termasukdalam aset Barang Milik Daerah (BMD) dengan tarif sewa menyesuaikan perbup yang berlaku
				3.25.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	14 Dokumen	14 Dokumen			
				3.25.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	45 Orang			
				3.25.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				3.25.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				3.25.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Persentase pelatihan/pembinaan terhadap kelompok nelayan (%)	43 %	43 %			DInas Perikanan sudah melakukan pemutakhiran data mengenai penerima bantuan rekomendasi
													BBM bersubsidi dan bantuan pokok lainnya
								Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	13958 Ton	18041.36 Ton			
				3.25.03.2.01			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Jumlah Fasiltasi Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap	5 Paket	7 Paket			
				3.25.03.2.02			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Nelayan yang dibina	4.5 %	4.5 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				3.25.03.2.03			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	peningkatan Jumlah layanan TPI yang beroperasi dengan baik	4 Layanan	4 Layanan			
				3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Persentase pelatihan/pembinaa terhadap kelompok budidaya (%)	18 % n	19 %			
								Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	159768 Ton	160439.145 Ton			
				3.25.04.2.02			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Jumlah Fasiltasi Sarana dan Prasarana budidaya	4 Paket	4 Paket			
				3.25.04.2.04			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Jumlah Pembudidaya ikan yang dibina	10 Kelompok	10 Kelompok			
				3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Rasio kepatuhan pelaku usaha budidaya dan penangkapan ikan sesuai ketentuan (%)	38 %	38.1 %			
				3.25.05.2.01			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dan dibina	20 Pelaku Usaha	21 Pelaku Usaha			
				3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Pertumbuhan angka konsumsi ikan (Ton/Tahun)	1.5 Ton	1.75 Ton			telah dilakukan penandatanganan berita acara pada tanggal 23 Juli 2025 bahwa UPI (Unit Pelayanan Ikan) di Kec. Sidayu telah menjadi tanggung jawab pengelola aset (Bidang Aset BPPKAD), Dinas Perikanan hanya monitoring UPI- NT
				3.25.06.2.01			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	30 Dokumen	30 Dokumen			
				3.25.06.2.03			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan	200000 Ton	178480 Ton	jumlah produksi olahan hasil perikanan didapatkan dari jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya pada tahun tersebut	target belum tercapai karena jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya pada tahun 2025 adalah 178.480 ton	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
				2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (Orang)	150000 Orang	150000 Orang			
				2.22.02.2.01			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Budaya yang dikelola, dikembang dan dimanfaatkan	10 Objek	10 Objek			
				2.22.02.2.02			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
				2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	10 %	50 %			
								Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	4 %	4.17 %			
				2.22.05.2.01			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	20 Cagar Budaya	20 Cagar Budaya			
				2.22.05.2.02			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	11 Cagar Budaya	11 Cagar Budaya			
				2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke museum (%)	7 %	7 %			
				2.22.06.2.01			Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Museum yang dikelola	100 %	100 %			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI		2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN								
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			DAN OLAHRAGA								
				2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.19.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen			
				2.19.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap administrasi keuangan perangkat daerah	1 Fasilitasi	1 Fasilitasi			
				2.19.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap administrasi umum perangkat daerah	7 Fasilitasi	7 Fasilitasi			
				2.19.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
				2.19.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pemeliharaan barang milik daerah yang menunjang urusan pemerintahan	6 Fasilitasi	6 Fasilitasi			
				2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan (%)	35 %	35 %			
								Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0.5 %	0.5 %			
				2.19.02.2.01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula,dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor, Pemuda kader yang difasilitasi dalam Pengembangan Pemuda kabupaten/kota	45 Orang	45 Orang			
				2.19.02.2.02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	80 Orang	80 Orang			
				2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	7.5 %	18.97 %			
								Persentase cabor berprestasi (%)	85 %	85 %			
								Persentase sarana prasarana olahraga yang terpelihara (%)	100 %	100 %			
				2.19.03.2.01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpelihara	5 Unit	5 Unit			
				2.19.03.2.02			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor yang mengikuti Kejuaraan	3 Cabor	3 Cabor			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.19.03.2.04			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	2 Organisasi/Kelom	2 nok/Orang Insagsi/Kelo m			
				2.19.03.2.05			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Perserta Pembinaan Olahraga Rekreasi	100 Orang	100 Orang			
				2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	95 %	96.39 %			
				2.19.04.2.01			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
				3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase destinasi wisata yang difasilitasi dan dikembangkan (melalui OPD dan kemitraan) (%)	50 %	50 %			
				3.26.02.2.01			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Terhadap Daya Tarik Wisata	2 Kegiatan	2 Kegiatan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
													c.Promosi destinasi wisata unggulan (seperti Pantai Dalegan, Makam Sunan Giri) dengan melibatkan masyarakat lokal.Disparekrafb mendorong setiap desa untuk aktif di mediasosial, marketplace wisata, dan website resmi pariwisata Gresik. inovasi yang saat ini yang telah dilakukan Disparekrafbudpor Kab Gresik antara lain :- Saat ini telah dibentuk Tim Operator Data Kunjungan WisataOnline (DAKUWISON) dengan Surat Keputusan Kepala Disparekrafbudpor Nomor 556/005/437.59/ 2025 tanggal 2 Januari 2025 yang berjumlah 35 org berasal ODTW di Kab Gresik- Melalui Website Disparekrafbudpor (www.disparekrafb berisi banyak informasi terkait kondisi eksisting di Objek Daya Tarik Wisatadan Desa Wisata- Membuat website SIPATU (Sistem
				3.26.02.2.02			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis Pariwisata	2 Kawasan	2 Kawasan			
				3.26.02.2.03			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi pariwisata yang dikelola	4 Destinasi	4 Destinasi			
				3.26.02.2.04			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	4 Usaha	4 Usaha			
				3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Nilai survey perspektif masyarakat terhadap pariwisata gresik (Nilai)	70 Nilai	70 Nilai			
				3.26.03.2.01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata dalam dan luar negeri	2281275 Orang	4830070 Orang			
				3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif (%)	4.5 %	6.13 %			
				3.26.05.2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	40 Orang	76 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				3.26.05.2.02			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	40 Usaha	40 Usaha			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
				3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	A	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	154.75 %			
				3.27.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	40 Dokumen	40 Dokumen			
				3.27.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah buku laporan keuangan	118 Laporan	118 Laporan			
				3.27.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	108 Laporan	108 Laporan			
				3.27.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90 Laporan	90 Laporan			
				3.27.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit			
				3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		persentase alsintan dalam kondisi baik (%)	90 %	92.43 %			
								Persentase realisasi pupuk bersubsidi (%)	90 %	98.53 %			Di tahun 2025 realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 81,3% menjadi 98,53%
				3.27.02.2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan dan Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	17 Laporan	17 Laporan			
				3.27.02.2.03			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan	1 Laporan	1 Laporan			
							Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Lahan KP2B yang mendapatkan insentif prasarana pertanian (%)	50.25 %	50.59 %			
								Persentase Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian (%)	32.8 %	32.61 %	Masih banyak Poktan/Gapoktan yang belum terfasilitasi bantuan infrastruktur pertanian karena keterbatasan anggaran	Dinas Pertanian mengusulkan kegiatan bantuan infrastruktur pertanian kepada Poktan/Gapoktan melalui dana lain selain APBD Kab. Gresik, diantaranya melalui danaAPBN, CSR, Dana Desa, dan lain-lain	-Pembuatan dam buka tutup di sungai besar menjadi kewenangan dinas PU kab, prov atau pusat -Ganti rugi petani yang terdampak pipanisasi waduk sukodono dilaksanakan oleh bidangpertanahan dinas PUTR
				3.27.03.2.01			Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan pengembangan prasarana pertanian	2 Laporan	2 Laporan			
				3.27.03.2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	42 Unit	12 Unit	Masih banyak Poktan/Gapoktan yang belum terfasilitasi bantuan infrastruktur pertanian karena keterbatasan anggaran	Mengusulkan kegiatan bantuan infrastruktur pertanian kepada Poktan/Gapoktan melalui dana lain selain APBD Kab. Gresik, diantaranya melalui dana APBN, CSR, Dana Desa, dan lain-lain	
				3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) (%)	90 %	88.37 %	Kurangnya tenaga medik veteriner dan paramedik veteriner	Mengoptimalkan tenaga medik veteriner dan paramedik veteriner	
				3.27.04.2.01			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah	Jumlah laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan	2 Laporan	2 Laporan			
							Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	daerah wabah penyakit hewan menular					
				3.27.04.2.02			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	1 Laporan	1 Laporan			
				3.27.04.2.04			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	1 Laporan	1 Laporan			
				3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG BENCANA PERTANIAN	AN	Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (%)	92 %	100 %			
								Persentase penanganan perubahan iklim terhadap pertanian (%)	90 %	94.99 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				3.27.05.2.01			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan			
				3.27.06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Presentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan (%)	100 %	92 %	- Permohonan rekomendasi diajukan pada akhir bulan Desember 2025 - Masih ada unit usaha yang belum memenuhi standar perizinan yang diajukan	- Rekomendasi terbit di bulan Januari 2026 - Untuk unit usaha yang belum memenuhi standart perizinan masih dalam tahap pembinaan	
				3.27.06.2.01			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomtek izin usaha pertanian yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				3.27.06.2.02			Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomtek izin usaha peternakan yang diterbitkan	1 Laporan	1 Laporan			
				3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelompok Tani Semua Jenjang Naik Kelas (%)	1.49 %	2.60 %			
							Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya	40 Poktan	28 Poktan	Adanya regenerasi pengurus kelompok tani sehingga kapasitas SDM dalam pengelolaan manajemen kelompok belum optimal	Dilakukan pelatihan dan pendampingan tentang manajemen kelompok tani	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH		6.01.01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
				6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	95.15 %	97.16 %			
				6.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	8 Dokumen			
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			
				6.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/Bulan	46 Orang/Bulan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	4 Laporan			
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen			
				6.01.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28 Orang	40 Orang			
				6.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Paket	74 Paket			
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Paket	0 Paket			
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 Paket	8 Paket			
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket			
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Dokumen	8 Dokumen			
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	170 Laporan			
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen			
				6.01.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	0 Unit	Melaksanakan efisiensi belanja sesuai Surat Bupati Gresik Nomor 900/2275/437.61/2 tanggal 2 Oktober 2025 Perihal: Pelaksanaan Kegiatan PAPBD Kabupaten Gresik Tahun 2025	Lebih cermat dalam menyusun anggaran di masa yang 02a5kan datang dengan memperhatikan kebijakan yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan yang prioritas dan ketersediaan anggaran KAS nya	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit	27 Unit	Melaksanakan efisiensi belanja sesuai Surat Bupati Gresik Nomor 900/2275/437.61/2 tanggal 2 Oktober 2025 Perihal: Pelaksanaan Kegiatan PAPBD Kabupaten Gresik Tahun 2025	Lebih cermat dalam menyusun anggaran di masa yang 02a5kan datang dengan memperhatikan kebijakan yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan yang prioritas dan ketersediaan anggaran KAS nya	
				6.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4 Laporan			
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 Laporan	8 Laporan			
				6.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit			
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 Unit	16 Unit			
								6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit	48 Unit	Melaksanakan efisiensi belanja sesuai Surat Bupati Gresik Nomor 900/2275/437.61/2tanggal 2 Oktober 2025 Perihal: Pelaksanaan Kegiatan PAPBD Kabupaten Gresik Tahun 2025	Lebih cermat dalam menyusun anggaran di masa yang 02a5kan datangdengan memperhatikan kebijakan yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan yang prioritas dan ketersediaan anggaran KAS nya	
								6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Reh Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit abilitasi	1 Unit			
				6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	AAN	Persentase nilai evaluasi Internal AKIP OPD minimal A (Angka)	87.25 %	95.65 %			
								Persentase tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase tindak lanjut audit eksternal (%)	88.45 %	87.33 %	Penyelesaian tindak lanjut pada pemeriksaan eksternal oleh BPK belummaksimal karena : a. Temuan sudah lama tahun pemeriksaannya (2005-2025) b. Adanya pergantian personil pada OPD dikarenakan mutasi, promosi dan purna tugas. c. Kurangnya pemahaman OPD atas rekomendasi dan dokumen tindak lanjutnya. d.Terdapat temuan dan rekomendasi yang sifat TL nya bertahap dan memerlukan waktu untuk perbaikan sesuai rekomendasi.	a. Melaksanakan monitoring pemenuhan dokumen TL denganberdiskusi terhadap OPD (membuka ruang konsultasi APIP). b. Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi data / dokumen terkait terhadap perangkat daerah. c. Melaksanakan pendampingan dan/atau konsultasi langsung dengan tim verifkasi BPK secara berkala. d. Menambah tim untuk menintensifkan kegiatan tidak lanjut.	
								Persentase tindak lanjut audit internal (%)	100 %	100 %			
				6.01.02.2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35 Laporan	109 Laporan			
								Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35 Laporan	41 Laporan			
								Reviu Laporan Kinerja	22 Laporan	161 Laporan			
								Reviu Laporan Keuangan	60 Laporan	103 Laporan			
								Pengawasan Desa	16 Laporan	5 Laporan	Berdasarkan sampling risiko tertinggi hasil dari evaluasi SISWASKEUDES pada seluruh desa di kab.gresik untuk kemudian menjadi pemeriksaan	Menentukan jumlah target di tahun selanjutnya berdasarkan jumlah sampling hasil dari evaluasi SISWASKEUDES pada seluruh desa di kab.gresik di tahun sebelumnya	
								Kerja Sama Pengawasan Internal	1	2			
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	66 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				6.01.02.2.02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12 Laporan	19 Laporan			
								Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	10 Laporan	a. Jumlah aduan maupun pelimpahan yang jumlahnya naik cukup signifikan tidak sebanding dengan jumlah personil yang menangani. b. Terdapat kasus yang penyelesaiannya tidak bisa segera dikarenakan harus berkoordinasi intens dengan APH dan / BPKP serta OPD terkait.	Koordinasi dan pemantauan secara berkala kepada instansi terkait dan /pihak APH, media pelaporan aduan masyarakat nya inspektorat terkait informasi atau aduan yang diterima dan berkadar pengawasan guna ketepatan jumlah target penugasan tindaklanjutnya	
				6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3 Level	3 Level			
								Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi (%)	100 %	100 %			
				6.01.03.2.01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	5 Rekomendasi	11 Rekomendasi			
				6.01.03.2.02			Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46 Daerah	46 Perangkat			
								Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46 Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah			
								Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	5 Kegiatan	6 Kegiatan			
								Pemberantasan Korupsi					
								Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46 Daerah	46 Perangkat			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
				5.05.02		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				5.05.02.2.02			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentase Fasilitasi Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	100 %			
				5.05.02.2.03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase fasilitasi penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	100 %			
				5.05.02.2.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitia dan pengembangan yang didiseminasikan	100 %	100 %			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		5.01	PERENCANAAN								
				5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100 %	100 %			
				5.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				5.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %			
				5.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				5.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %			
				5.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %			
				5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100 %	100 %			
				5.01.02.2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %			
				5.01.02.2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Persentase Fasilitasi Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				5.01.02.2.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %			
				5.01.02.2.04			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100 %	100 %			
				5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %			
								Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %			
								Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %			
								Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %			
								Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %			
								Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %			
								Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %			
								Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %			
								Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100 %			
				5.01.03.2.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				5.01.03.2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	100 %			
				5.01.03.2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		5.02	KEUANGAN								
				5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	67 %	99.53 %			
				5.02.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 Dokumen	6 Dokumen			
				5.02.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	120 Orang/Bulan	120 Orang/Bulan			
				5.02.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	143 Orang			
				5.02.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				5.02.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD OPD yang diadakan	8 Unit	8 Unit			
				5.02.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				5.02.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD OPD yang terpelihara	637 Unit	636 Unit			
				5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Belanja Modal (%)	70 %	60.61 %			
								Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Infrastruktur (%)	80 %	%	Belum bisa dihitung karena data dari perbendaharaan terkait mandos infrastruktur belum rilis		
								Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran (Predikat)	100 TEPAT	100 TEPAT			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30.48 %	30.48 %			
								Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	35.03 %	35.03 %			
								Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	100 %	88.75 %			
								Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100 %	100 %			
				5.02.02.2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu, Jumlah Dokumen APBD dan PAPBD yang disusun tepat waktu, dan Jumlah Regulasi di bidang penganggaran yang disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku	9 Dokumen	9 Dokumen			
				5.02.02.2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	12 Dokumen	12 Dokumen			
				5.02.02.2.03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Semester, LRA, Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD	5 Laporan	5 Laporan			
				5.02.02.2.04			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	erlaksananya Pencairan Dana Keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
				5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset (%)	100 %	100 %			
								Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	0.04 %	0.05 %			
				5.02.03.2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Daerah yang Tercatat	438737 Unit	1050606 Unit			
				5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Efektifitas pendapatan Daerah (%)	90 %	98.58 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100 %	100 %			
								Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)	5 %	6.52 %			
								Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	32.52 %	38.73 %			1. BPPKAD Kabupaten Gresik sependapat dengan rekomendasi yang telah disampaikan dan secara berkelanjutan telah dan akan melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatandaerah. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan program/kegiatan dengan pencapaian target pendapatan daerah serta sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.2. BPPKAD akan mendorong penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja melalui penajaman indikator kinerja program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, sehingga capaian kinerjaPerangkat Daerah dapat berkontribusi langsung terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).3. BPPKAD
				5.02.04.2.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Capaian Target Pendapatan PBB & BPHTB	100 %	88.42 %			
								Prosentase Capaian Target pendapatan Pajak Daerah Lainnya	100 %	100.28 %			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		5.03	KEPEGAWAIAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				5.03.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap tercapainya laporan kinerja OPD	100 %	100 %			
								Nilai Sakip BKPSDM	89 Sakip	90.04 Sakip			
				5.03.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi tercapainya laporan keungan yang berkualitas	100 %	100 %			
				5.03.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap tercapainya pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100 %	100 %			
				5.03.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi terhadap tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %			
				5.03.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi terhadap tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %			
				5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	100 %	99.5 %	Masih terdapat perangkat daerah yang belum mencapai target kinerja yang diharapkan, sehingga distribusi capaian kinerja menunjukkan adanya pegawai dengan kategori kinerja di bawah baik.	Penguatan pembinaan dan pendampingan kinerja kepada perangkat daerah yang capaiannya masih di bawah ekspektasi, peningkatan kualitas perencanaan kinerja agar lebih selaras dengan target dan indikator kinerja utama, optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, serta penerapan mekanismereward and punishment guna mendorong peningkatan kinerja organisasi.	
								Persentase Kedisiplinan ASN (%)	100 %	93.03 %	Masih adanya pegawai yang belum patuh terhadap ketentuan kehadiran dan jam kerja, lemahnya konsistensi penegakan aturan disiplin di beberapa perangkat daerah, serta belum meratanya pembinaan.	Optimalisasi absensi elektronik, monitoring rutin oleh pimpinan unit kerja, penegakan sanksi disiplin sesuai ketentuan, pembinaan terarah bagi pegawai bermasalah, serta pemberian reward bagi unit kerja dengan tingkat disiplin tertinggi.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian (Index)	95 %	87.34 %	Masih adanya responden yang menilai waktu pelayanan tidak sesuai harapan mereka.	Percepatan proses layanan berbasis digital, standarisasi informasi dan persyaratan layanan serta penguatan respons pengaduan masyarakat.	
								Persentase formasi ASN yang terisi sesuai kebutuhan jabatan (%)	93.5 %	95.75 %			
								Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi (%)	100 %	100 %			
				5.03.02.2.01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi CASN yang terisi sesuai kebutuhan dan ketentuan NSPK	100 %	100 %			
								Persentase tingkat akurasi data kepegawaian	100 %	100 %			
								Persentase peningkatan pembinaan anggota kopri	100 %	100 %			
				5.03.02.2.02			Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengelolaan mutasi dan promosi sesuai NSPK	100 %	100 %			
								Persentase kenaikan pangkat tepat waktu	100 %	100 %			
								Persentase KGB tepat waktu	100 %	100 %			
				5.03.02.2.03			Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pegawai ASN yang mendapatkan kapasitas untuk peningkatan kinerja	100 %	100 %			
				5.03.02.2.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai ASN yang mengumpulkan penilaian kinerja selama tahun berjalan	100 %	100 %			
	UNSUR PENUNJANG	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN												
				5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan sesuai jenjang (%)	58 %	60.04 %			
								Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis 20 JP (%)	72 %	91.99 %			
				5.04.02.2.01			Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pegawai ASN yang lulus mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan jabatan	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				5.04.02.2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pegawai ASN yang lulus mengikuti pelatihan dan pendidikan kepemimpinan pejabat struktural	100 %	100 %			
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH		4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
				4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA							
				4.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disampaikan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan			
				4.01.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %			
				4.01.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pakaian dinas yang disediakan	100 %	100 %			
				4.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang difasilitasi	100 %	100 %			
								Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang difasilitasi	100 %	100 %			
				4.01.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %			
				4.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100 %	100 %			
								Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi	100 %	95 %			
				4.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi	100 %	100 %			
				4.01.01.2.11			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan	100 %	100 %			
								Persentase penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				4.01.01.2.12			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang disediakan	100 %	100 %			
				4.01.01.2.13			Penataan Organisasi	Jumlah Unit Pelayanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"	77 Unit	81 Unit			
								Persentase ketercapaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	82 %	82.13 %			
								Jumlah rancangan peraturan bupati tentang perangkat daerah	5 Rancangan	8 Rancangan			
				4.01.01.2.14			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase realisasi Kegiatan Protokoler.	100 %	100 %			
								Persentase kegiatan pimpinan yang dipublikasikan.	100 %	100 %			
								Persentase kegiatan pimpinan yang didokumentasikan.	100 %	100 %			
				4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
				4.01.02.2.01			Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase data dukung IKK yang diverifikasi	100 %	100 %			
								Persentase pelayanan kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi	100 %	100 %			
								Persentase penegasan batas kecamatan yang dilakukan secara kartometrik	16.66 %	38.88 %			
				4.01.02.2.02			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	12 SK Penetapan	12 SK Penetapan			
				4.01.02.2.03			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi peraturan daerah	100 %	100 %			
								Jumlah perkara hukum yang terselesaikan	26 Perkara	47 Perkara			
								Jumlah peserta yang disuluh	440 Orang	124 Orang			
								Tingkat kematangan layanan produk hukum daerah	5 Indeks	5 Indeks			
				4.01.02.2.04			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	6 MoU	12 MoU			
				4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							
				4.01.03.2.01			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah fasilitasi Administrasi Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 BUMDes	4 BUMDes			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Jumlah Laporan Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah	1 Laporan	1 Laporan			
							Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik yang dilaksanakan	100 %	100 %			
								Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Indeks	3 Indeks			
							Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	32 Dokumen	23 Dokumen			
								Jumlah pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	24 Kali	16 Kali			
				4.01.03.2.04			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Monev Kebijakan SDA	1 Laporan	1 Laporan			
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerjadan Peraturan Di Bidang Cukai	1 Dokumen	1 Dokumen			
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber daya Mineral Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik dan Persendian	1 Dokumen	1 Dokumen			
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan umum, dan Penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen			
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD		4.02	SEKRETARIAT DPRD								
				4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	A	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	86.55 Nilai	86.55 Nilai			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kesekretariatan (Angka)	100 %	100 %			
								Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Angka)	100 %	100 %			
				4.02.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	30 Dokumen	30 Dokumen			
				4.02.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	1253 Dokumen	1352 Dokumen	Adanya penambahan CPNS dan beberapa pegawai yang pensiun		
				4.02.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	35 Dokumen	41 Dokumen	Menyesuaikan undangan		
				4.02.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan	229 Dokumen	576 Dokumen	Kunjungan tamu tidak bisa diprediksi, sesuai dengan undangan		
				4.02.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	2 Unit	199 Unit	Jumlah target pada DPA belum disesuaikan	Berkoodinasi dengan bagian program sebelum merubah uraian belanja pada DPA	
				4.02.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	137 Laporan	131 Laporan	Sub kegiatan yang tidak memenuhi target adalah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor karena sebagian THL telah diangkat menjadi PPPK		
				4.02.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	85 Unit	85 Unit			
				4.02.01.2.15			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	50 Orang	26 Orang	Tidak semua anggota DPRD mengambil Medical Check Up	Lebih intens dalam melakukan sosialisasi pentingnya medical check up untuk anggota dewan	
				4.02.01.2.16			Layanan Administrasi DPRD	Jumlah laporan pelayanan administrasi DPRD yang terpenuhi	10 Laporan	13 Laporan	Menyesuaikan kebutuhan anggota DPRD		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100 %	100 %			
								Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100 %	100 %			
								Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100 %	100 %			
								Presentase Dukungan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Dan Pengawasan DPRD (%) Fungsi	100 %	100 %			
				4.02.02.2.01			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	16 Dokumen	15 Dokumen	Adanya sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD yang di drop di PAPBD		
				4.02.02.2.02			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan hasil kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	26 Dokumen	40 Dokumen	Adanya rapat lanjutan dikarenakan tidak selesai dalam satu kali pembahasan		
				4.02.02.2.03			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	251 Laporan	257 Laporan	Adanya rapat lanjutan tidak selesai dalam satu kali pembahasan		
				4.02.02.2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	292 Dokumen	305 Dokumen	Pada sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat menyesuaikan audiensi yang ada		
				4.02.02.2.05			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	7 Dokumen	7 Dokumen			
				4.02.02.2.06			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	2 Laporan	8 Laporan	Menyesuaikan adanya permasalahan kode etik DPRD		
				4.02.02.2.08			Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD	128 Dokumen	117 Dokumen	Badan musyawarah direncanakan 2 kali dalam sebulan tetapi dalam pelaksanaannya dilaksanakan satu kali per bulan		
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Gresik		7.01	KECAMATAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	2 Laporan	2 Laporan			
				7.01.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap sarana prasarana Aparatur	3 Laporan	3 Laporan			
				7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan			
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Usulan Kegiatan PerencanaanPemb pada Desa dan Kelurahan Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di Fasilitasi	21 Desa/Kelurahan angunan	21 Desa/Kelurahan			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan			
				7.01.04.2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penegakan Perda Koordinasi	12 Laporan	12 Laporan			
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 Laporan	7 Laporan			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kebomas		7.01	KECAMATAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen			
				7.01.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber Daya Aparatur di Kecamatan	2 Kali	2 Kali			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	5 Paket	5 Paket			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	5 Paket	5 Paket			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang dan Aset Milik Daerah yang Terpelihara	5 Paket	5 Paket			
				7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan SPM	10 Desa	10 Desa			
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Urusan Kegiatan Perencanaan Pembangunan pada Desa dan KelurahanJumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100 %	100 %			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan	24 Kali	24 Kali			
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Manyar		7.01	KECAMATAN								
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Rerata Persentase Capaian	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Kinerja Program (%)					
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100 %	100 %			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan akhir	100 %	100 %			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan barang dan jasa administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pembayaran jasa-jasa penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeliharaan barang-barang milik daerah	100 %	100 %			
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan	100 %	100 %			
				7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pembinaan lembaga keamsyarakatan tingkat kecamatan	100 %	100 %			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum dengan TNI, Polri	100 %	100 %			
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang di tetapkan tetap waktu	100 %	100 %			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Cerme		7.01	KECAMATAN								
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	13 Unit	13 Unit			
				7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan publik kecamatan	1 Laporan	1 Laporan			
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Bencana Oleh Desa (%) Penanggulangan	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Pemberdayaan desa	7 Lembaga	7 Lembaga			
				7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	7 Lembaga	7 Lembaga			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.	12 Laporan	12 Laporan			
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rekomendasi	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	25 Desa/Kelurahan	25 Desa/Kelurahan			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Benjeng		7.01	KECAMATAN								
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23 Orang	23 Orang			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2 Unit	2 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	23 Laporan	23 Laporan			
				7.01.02.2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	23 Dokumen	23 Dokumen			
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	23 Laporan	23 Laporan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	23 Lembaga	23 Lembaga			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan			
				7.01.04.2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	23 Laporan	23 Laporan			
				7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.05.2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	23 Orang	23 Orang			
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Balongpanggang		7.01	KECAMATAN								
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	7 Laporan	7 Laporan			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan keuangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitasi pemeliharaan barang milik Daerah	3 Jenis	3 Jenis			
				7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	2 Laporan	2 Laporan			
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	25 Lembaga	25 Lembaga			
				7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 Lembaga	3 Lembaga			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penegakan Konflik	12 Laporan	12 Laporan			
				7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.05.2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penugasan Kepala Daerah	25 Orang	25 Orang			
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	25 Dokumen	25 Dokumen			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Duduksampeyan		7.01	KECAMATAN								
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja SKPD	100 %	100 %			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	100 %	100 %			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum	Tersedianya Barang Persediaan	100 %	100 %			
							Perangkat Daerah	Kebutuhan Penunjang Pelayanan Kantor					
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pembayaran Jasa-Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor dan Gedung Kantor yang dirawat	100 %	100 %			
				7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan	100 %	100 %			
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Desa	100 %	100 %			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %			
				7.01.04.2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %			
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
				2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				2.17.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah seluruh dokumen perencanaan dan monev	6 Dokumen	6 Dokumen			
				2.17.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran pemenuhan administrasi keuangan dinas	12 Bulan	12 Bulan			
				2.17.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	27 Paket	27 Paket			
				2.17.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan			
				2.17.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana dinas	56 Unit	56 Unit			
				2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	67.87 %	61.79 %			
								Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	14.72 %	48 %			
				2.17.03.2.01			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/USP yang telah diperiksa dan dinilai kesehatannya dalam 1 tahun anggaran	25 %	3 %	masih minimnya anggaran APBD sehingga mempengaruhi kinerja pelatihan koperasi sehat ksp/usp	penambahan dana APBD guna memaksimalkan kinerja dikarenakan jumlah koperasi sudah hampir mendekati 2000 koperasi	
				2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase jumlah KSPU/USP Koperasi Sehat (%)	10.07 %	4.74 %	masih minimnya anggaran APBD sehingga mempengaruhi kinerja pelatihan koperasi sehat ksp/usp	penambahan dana APBD guna memaksimalkan kinerja dikarenakan jumlah koperasi sudah hampir mendekati 2000 koperasi	
				2.17.04.2.01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP yang telah dinilai tingkat kesehatannya dalam 1 tahun anggaran	30 %	3 %	masih minimnya anggaran APBD sehingga mempengaruhi kinerja penilaian ksp/usp	penambahan dana APBD guna memaksimalkan kinerja dikarenakan jumlah koperasi sudah hampir mendekati 2000 koperasi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	100 %	100 %			
								Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	10 %	10 %			
				2.17.06.2.01			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	koperasi yang menerima fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan dalam 1 tahun anggaran	20 %	29.40 %			
				2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro (%)	2.71 %	49 %			
				2.17.07.2.01			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang menerima fasilitasi pemberdayaan melalui pendataan, kemitraan, perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi multipihak dalam 1 tahun anggaran.	20 %	5.62 %	Tidak adanya anggaran untuk fasilitasi UMKM dikarenakan devisit anggaran DAU dari pusat	Penambahan anggaran APBD guna peningkatan fasilitas UMKM digresik mengingat jumlah UMKM sudah 83.290	
				2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Rasio jumlah usaha mikro terhadap total usaha yang terdaftar OSS (Rasio)	90 %	0.64 %	Di tahun 2024 terdapat SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal) dari provinsi sehingga pendaftaran UMKM baru di OSS lebih spesifik dan tertata	Peningkatan pemahaman UM dalam hal pendaftaran di OSS sehingga membutuhkan dana tambahan APBD	
				2.17.08.2.01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dalam 1 tahun anggaran	5 %	5 %			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
				2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOAT		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.23.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				2.23.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tercapainya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun			
				2.23.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi perangkat daerah yang terlaksana (Jenis)	5 Jenis	5 Jenis			
				2.23.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan			
				2.23.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	5 Jenis	5 Jenis			
				2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Perpustakaan yang dibina (%)	55.3 %	61.23 %			
								Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan (Nilai)	88.31 Nilai	92.07 Nilai			
				2.23.02.2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan berstandarisasi Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	15 Perpustakaan	0 Perpustakaan	Karena tidak ada program pendampingan dari Perpusnas, Keterbatasan Kesiapan Perpustakaan dan SDMPengelola Perpustakaan serta Rendahnya prioritas dan pemahaman terhadap proses akreditasi	Melakukan penguatan program pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan agar perpustakaandi wilayah Kabupaten Gresik dapat lebih siap dalam mengikuti proses akreditasi pada tahun-tahun berikutnya.	
								Jumlah Peminjam Koleksi Perpustakaan (Peminjam)	2000 Peminjam	5191 Peminjam			
				2.23.02.2.02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Gemar Membaca pada Perpustakaan Umum (Orang)	8000 Orang	51026 Orang			
								Jumlah masyarakat yang Gemar Membaca pada Perpustakaan Sekolah, Desa dan Khusus (Orang)	2000 Orang	11592 Orang			
				2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	75 %	75 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.23.03.2.01			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno/Muatan Lokal yang dikembangkan, diolah, dan dialihmediakan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Naskah Kuno/Muatan Lokal)	21 Naskah kuno/muatan lokal	21 Naskah kuno/muatan lokal			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
				2.09.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		Jumlah produksi pangan lokal (Ton)	190000 Ton	225679.34 Ton			
								Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	35 %	166.76 %	Saat ini cadangan pangan hanya dihitung berdasarkan ketersediaanstok pangan yang ada di lumbung pangan di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik belum dapat menyelenggarakan cadangan pangan daerah karena 1. Belum ada izin prinsip pengadaan beras dari Perum Bulog 2. Belum keluarnya Harga Pembelian Beras (HAP) untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2025 dari Bapanas RI	Melaksanakan pengadaan cadangan pangan beras kabupaten	
				2.09.02.2.01			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kemandirian pangan yang tersedia	67 Unit	59 Unit	Adanya efisiensi anggaran pada pembangunan infrastruktur kemandirian pangan yang tersedia	Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur kemandirian pangan yang tersedia	
				2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		persentase rumah tangga yang menerapkan pola konsumsi B2SA (%)	40 %	50 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								pertumbuhan skor pola pangan harapan (%)	0.61 %	2.40 %			
				2.09.03.2.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	1 Laporan	1 Laporan			
				2.09.03.2.04			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase kelompok wanita tani yang diberdayakan	21 %	23.03 %			
				2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Penanganan daerah rawan pangan (%)	16 %	15.79 %	Masih adanya masyarakat rentan rawan pangan	Mengoptimalkan bantuan pangan untuk masyarakat rentan rawan pangan	
				2.09.04.2.01			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Informasi desa rawan pangan	1 Laporan	1 Laporan			
				2.09.04.2.02			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanganan kerawanan pangan	4 Laporan	4 Laporan			
				2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase keamanan pangan segar (%)	85.7 %	100 %			
				2.09.05.2.01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar	6 Dokumen	6 Dokumen			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Driyorejo		7.01	KECAMATAN								
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	4 Dokumen			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitasi pemeliharaan barang milik Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	4 Laporan	4 Laporan			
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
				7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wrigninanom		7.01	KECAMATAN								
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen	7 Dokumen			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perkantoran	5 Kegiatan	5 Kegiatan			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Operasional dan Jasa kegiatan 3 Kantor	Jenis	3 Jenis			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di OPD Kecamatan	100 %	100 %			
				7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat	100 %	100 %			
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan peningkatan SDM yang ada di desa	25 Lembaga	25 Lembaga			
				7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	100 %	100 %			
				7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.05.2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kedamean		7.01	KECAMATAN								
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	6 Dokumen			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan keuangan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitasi pemeliharaan barang milik Daerah	10 Bulan	10 Bulan			
				7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
				7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.04.2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi Penerap dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2 Laporan	2 Laporan			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Menganti		7.01	KECAMATAN								
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	6 Dokumen	6 Dokumen			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaa Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %			
				7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %			
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Difasilitasi Dalam Perencanaan Pembangunan	100 %	100 %			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %			
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Persentase Kegiatab Pemerintahab Desa yang Difasilitasi	100 %	100 %			
							dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sidayu		7.01	KECAMATAN								
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Peng dan Evaluasi	13 Dokumen anggaran	13 Dokumen			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Adminmistrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	25 Orang	25 Orang			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum	Jumlah fasilitasi	12 Bulan	12 Bulan			
							Perangkat Daerah	terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah					
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	98.51 Nilai			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	95 %	95 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	93 %	93 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa	28 Kegiatan	28 Kegiatan			
				7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Pelanggaran yang tertangani	100 %	100 %			
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21 Desa	21 Desa			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Ujungpangkah		7.01	KECAMATAN								
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	5 Dokumen	5 Dokumen			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan keuangan	12 Bulan	12 Bulan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitasi pemeliharaan barang milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.02.2.03			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	100 %			
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	5 Dokumen	5 Dokumen			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	5 Dokumen	5 Dokumen			
				7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	13 Dokumen	13 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.04.2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	13 Dokumen	13 Dokumen			
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	13 Dokumen	13 Dokumen			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	13 Dokumen	13 Dokumen			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	13 Dokumen	13 Dokumen			
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	13 Dokumen	13 Dokumen			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Panceng		7.01	KECAMATAN								
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	A	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.02.2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	7 Kegiatan	7 Kegiatan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Bencana Oleh Desa (%) Penanggulangan	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	14 Desa	14 Desa			
				7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditingkat Kecamatan	14 Desa	14 Desa			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.	14 Desa	14 Desa			
				7.01.04.2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	14 Desa	14 Desa			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	14 Desa	14 Desa			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Bungah		7.01	KECAMATAN								
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan administrasi umum Perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tesedia	1 Jenis	1 Jenis			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	95 %	100 %			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.04.2.02			Koordinasi Penerapan dan	Jumlah koordinasi	12 Bulan	12 Bulan			
							Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	penerapan dan penegakan Perda dan Perkada					
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Bulan	12 Bulan			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Dukun		7.01	KECAMATAN								
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan Tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	70 %	70 %			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.04.2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada koordinasi	12 Bulan	12 Bulan			
				7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.05.2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	1 Kali	1 Kali			
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Bulan	12 Bulan			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sangkapura		7.01	KECAMATAN								
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rekening Penyediaan administrasi umum	5 Jenis	5 Jenis			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	3 Jenis	3 Jenis			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang dan Aset Milik Daerah yanng terpelihara	8 Jenis	8 Jenis			
				7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan peningkatan Pelayanan Publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17 Desa	17 Desa			
				7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	17 Lembaga	17 Lembaga			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumah Penanganan Konflik di Kecamatan	24 Kali	24 Kali			
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17 Desa	17 Desa			
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Tambak		7.01	KECAMATAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				7.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	7 Dokumen	7 Dokumen			
				7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen			
				7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumber Daya Aparatur di Kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan			
				7.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	3 Jenis	3 Jenis			
				7.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	3 Jenis	3 Jenis			
				7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100 %	100 %			
								persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				7.01.03.2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25 Lembaga	25 Lembaga			
				7.01.03.2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan	3 Lembaga	3 Lembaga			
				7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN DAN		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100 %	100 %			
				7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan kenyamanan lingkungan	12 Laporan	12 Laporan			
				7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
								Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100 %	100 %			
								Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100 %	100 %			
				7.01.06.2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25 Laporan	25 Laporan			
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
				8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100 %	100 %			
				8.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %			
				8.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyeleseian Administrasi Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	100 %	100 %			
				8.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %			
				8.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				8.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %			
				8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Kecamatan)	18 Kecamatan	18 Kecamatan			
				8.01.02.2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pendidikan yang Menerima Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Lembaga	100 Lembaga			
				8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	7.15 Indeks	7.95 Indeks	Menggunakan hasil pengukuran 2024		
								Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100 %	100 %			
				8.01.03.2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat	100 %	100 %			
				8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100 %	100 %			
								Indeks Kinerja Ormas (Nilai)	71.79 Nilai	71.79 Nilai			
				8.01.04.2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Kode Rekening	Uraian Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100 %	100 %			
				8.01.05.2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang Difasilitasi	100 %	100 %			
				8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Indeks Kewaspadaan Nasional (Nilai)	73.09 Nilai	73.09 Nilai	Hasil pengukuran 2025 sedang dalam proses		
								Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100 %	100 %			
				8.01.06.2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembinaan FKDM	100 %	100 %			

3.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.4.1 Capaian Indikator Tujuan

Capaian indikator tujuan dalam RPJMD merupakan gambaran tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan arah pembangunan jangka menengah sebagaimana yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator-indikator tujuan, secara umum menunjukkan perkembangan yang positif, dimana sebagian besar indikator telah mencapai atau mendekati target yang ditetapkan pada periode berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan. Beberapa indikator tujuan RPJMD Kabupaten Gresik antara lain :

1. Indeks Pembangunan Manusia
2. Indeks Pembangunan Gender
3. Indeks Kesalhena Sosial
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB);
6. Penurunan Emisi GRK;
7. Indeks Reformasi Birokrasi;
8. Tingkat Kemiskinan;
9. Tingkat Pengangguran Terbuka.

3.4.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator dalam pengukuran untuk mencapai pembangunan manusia dalam suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

IPM mencakup tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat diukur melalui Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yang merujuk pada jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS mencerminkan rata-rata lama pendidikan formal bagi penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan lamanya sekolah formal yang diharapkan akan ditempuh oleh anak pada umur tertentu di masa depan. Standar hidup layak tercermin dalam pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang dihitung dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Untuk data capaian IPM kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Indeks Pembangunan Manusia	76,98	77,62	78,44	78,93	79,84 - 80,19	79,69

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. IPM Kabupaten Gresik meningkat dari 76,98 pada tahun 2021 menjadi 77,62 pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 78,44 pada tahun 2023 dan 78,93 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, realisasi IPM kembali mengalami peningkatan menjadi 79,69. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Gresik terus mengalami perbaikan secara berkelanjutan pada seluruh dimensi pembentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Peningkatan yang terjadi mencerminkan adanya perbaikan akses dan kualitas layanan kesehatan, peningkatan capaian pendidikan masyarakat, serta penguatan daya beli masyarakat.

Pada Tahun 2025, target IPM ditetapkan pada rentang 79,84–80,19, sementara realisasi mencapai 79,69. Dengan demikian, capaian tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, namun selisih yang terjadi relatif kecil dan menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia tetap berada pada jalur yang positif dan mendekati sasaran. Secara umum, tren kenaikan IPM yang konsisten setiap tahun mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Gresik. Adapun penghambat keberhasilan IPM tidak mencapai target disebabkan oleh peningkatan komponen IPM tidak berlangsung merata, khususnya pada dimensi pendidikan dan standar hidup layak, yang masih dipengaruhi oleh ketimpangan akses layanan dan daya beli masyarakat pada kelompok tertentu serta waktu dan efektivitas intervensi pembangunan manusia memerlukan jeda (time lag), sehingga program-program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024–2025 belum sepenuhnya tercermin dalam capaian IPM Tahun berjalan.

Tabel 3. 2 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Gresik	76,98	77,62	78,44	78,93	79,69
2	Provinsi Jawa Timur	73,48	74,05	74,65	75,35	76,13
3	Nasional	73,16	73,77	74,39	75,02	75,90

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2021-2025 menunjukkan pola yang semakin meningkat. IPM Kabupaten Gresik meningkat dari 76,98 pada tahun 2021 menjadi 79,69 pada tahun 2025. Capaian ini secara konsisten berada di atas IPM Jawa Timur yang meningkat dari 73,48 menjadi 76,13, serta di atas IPM nasional yang naik dari 73,16 menjadi 75,90 pada periode yang sama.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Gresik relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, serta mengalami pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, dan standar hidup Masyarakat

3.4.1.2 Indeks Pembangunan Gender

Sebagai perkembangan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengadopsi baik metodologi maupun konsep definisi yang sama dengan IPM. Perbedaannya terletak pada pengkategorian berdasarkan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur capaian pembangunan manusia dengan memperhatikan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPG menunjukkan sejauh mana perempuan memperoleh akses dan manfaat pembangunan yang setara dengan laki-laki. Perkembangan IPG selama periode pelaporan menunjukkan adanya peningkatan yang mencerminkan semakin membaiknya kesetaraan gender dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Peningkatan nilai IPG mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin menurun, serta adanya perbaikan kualitas hidup perempuan.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Indeks Pembangunan Gender	90,20	90,78	91,01	91,25	91,06 – 91,26	92,01

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Berdasarkan data capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten. Nilai IPG meningkat dari 90,20 pada tahun 2021 menjadi 90,78 pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 91,01 pada tahun 2023 dan 91,25 pada tahun 2024. Pada tahun 2025,

realisasi IPG tercatat sebesar 92,01. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Gresik semakin mengecil. Peningkatan IPG mencerminkan perbaikan akses dan partisipasi perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi yang semakin setara dengan laki-laki.

Pada tahun 2025, target IPG ditetapkan pada rentang 91,06–91,26 dan realisasi mencapai 92,01. Dengan demikian, capaian tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan dan berada pada batas atas rentang target. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan responsif gender dan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gresik berjalan efektif.

Secara umum, capaian IPG yang stabil dan meningkat ini menjadi indikator bahwa pembangunan daerah telah mengarah pada prinsip kesetaraan dan keadilan gender, serta memberikan manfaat yang relatif seimbang bagi laki-laki dan perempuan. Ke depan, diperlukan penguatan kebijakan dan intervensi yang lebih terarah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian IPG secara berkelanjutan.

Tabel 3.4 Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Gresik	90,20	90,78	91,01	91,25	92,01
2	Provinsi Jawa Timur	91,67	92,08	92,15	92,19	92,19*
3	Nasional	91,27	91,63	91,85	91,85	91,85*

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Capaian IPG Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang fluktuatif namun relatif stabil pada kisaran angka 90–91. Pada tahun 2021 IPG Gresik tercatat sebesar 90,20, kemudian meningkat menjadi 90,78 pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 91,01 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 capaian meningkat lebih signifikan menjadi 91,25, dan pada tahun 2025 tetap berada pada level yang sama yaitu 91,25.

Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional, IPG Kabupaten Gresik masih berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional. Pada tahun 2025, IPG Jawa Timur tercatat sebesar 92,19 dan nasional sebesar 91,85. Meskipun demikian, selisih capaian Gresik dengan nasional relatif tipis, yang menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Gresik semakin membaik dan mendekati rata-rata nasional. Secara umum, tren peningkatan IPG Gresik dalam lima tahun terakhir mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi perempuan dibandingkan laki-laki. Namun demikian, masih diperlukan penguatan kebijakan dan intervensi yang lebih terarah untuk mempercepat peningkatan kualitas pembangunan

gender agar mampu melampaui capaian provinsi serta memperkecil kesenjangan yang masih ada.

3.4.1.3 Indeks Kesalehan Sosial

Definisi kesalehan sosial secara konseptual yaitu sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial tersebut diantaranya adalah solidaritas sosial, toleransi, mutualitas atau kerjasama, tengah-tengah, dan stabilitas. Penilaian Indeks Kesalehan Sosial diukur melalui indikator sikap memberi, sikap peduli, menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan, tidak memaksakan nilai, tidak menghina nilai, keterlibatan dalam demokrasi, keterlibatan dalam perbaikan kinerja pemerintahan, mencegah kekerasan, konservasi lingkungan dan restorasi lingkungan.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Indeks Kesalehan Sosial	-	79,16	80,32	82,43	80,52 – 81,12	81,10

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024, Indeks Kesalehan Sosial tercatat sebesar 82,43 yang menunjukkan tingkat kesalehan sosial masyarakat berada pada kategori baik dan mencerminkan kuatnya nilai kepedulian, toleransi, serta partisipasi sosial. Pada Tahun 2025, indeks terealisasi sebesar 81,10 dari target yang ditetapkan sebesar 80,52–81,12. Nilai tersebut berada dalam rentang target yang telah ditetapkan dan mendekati batas atas target, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kesalehan sosial masyarakat telah berkembang secara positif. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepedulian sosial, solidaritas, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan dapat dikatakan berjalan dengan efektif.

3.4.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam jangka panjang. Kinerja perekonomian daerah Kabupaten Gresik dan Jawa Timur menunjukkan dinamika yang relatif sejalan dengan perkembangan perekonomian Nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik dan Jawa Timur bergerak mengikuti siklus pemulihan dan stabilisasi ekonomi Indonesia, dengan perbedaan kinerja yang mencerminkan karakteristik struktur ekonomi regional. Pada periode ini, Kabupaten Gresik mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kompetitif, bahkan pada tahun 2022

mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan Nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan ekonomi baik secara Nasional dan Regional tumbuh positif dengan laju pertumbuhan yang fluktuatif.

Tabel 3.6 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Tahunan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Laju Pertumbuhan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Gresik	3,70	5,31	5,05	5,03	5,11
2	Provinsi Jawa Timur	3,56	5,34	4,95	4,93	5,33
3	Nasional	3,79	7,38	4,62	4,79	4,91

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Nasional, 2025
Tahun 2024: Angka Sementara
Tahun 2025: Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 3,56 persen, menunjukkan perbedaan sedikit di bawah capaian Kabupaten Gresik sebesar 3,79 dan Nasional sebesar 3,70 persen. Kondisi ini mencerminkan fase awal pemulihan ekonomi daerah pascapandemi COVID-19, di mana aktivitas ekonomi mulai bergerak kembali namun belum sepenuhnya pulih. Kinerja ekonomi Jawa Timur mengalami akselerasi signifikan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,34 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31 persen, namun tidak lebih tinggi dari Kabupaten Gresik sebesar 7,38 persen. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas pemulihan ekonomi daerah yang ditopang oleh penguatan permintaan domestik dan meningkatnya aktivitas sektor produksi utama. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melambat menjadi 4,95 persen, lebih tinggi dari Kabupaten Gresik sebesar 4,62 persen. Sementara itu, Nasional tumbuh sebesar 5,05 persen. Perlambatan ini mencerminkan proses normalisasi pertumbuhan setelah fase pemulihan cepat pada tahun sebelumnya. Stabilitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 4,93 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,03 persen namun lebih tinggi dari Kabupaten Gresik sebesar 4,79. Memasuki tahun 2025 hingga Triwulan III, kinerja perekonomian Jawa Timur menunjukkan penguatan dengan pertumbuhan mencapai 5,33 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen dan Kabupaten Gresik sebesar 4,91 persen. Peningkatan ini mengindikasikan membaiknya kinerja ekonomi daerah, terutama dari sisi produksi dan permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga kembali menguat seiring meningkatnya pendapatan masyarakat dan stabilnya aktivitas ekonomi. Investasi mulai menunjukkan akselerasi, khususnya pada sektor-sektor unggulan daerah yang memiliki keterkaitan kuat dengan industri pengolahan, perdagangan, dan logistik. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya daya saing ekonomi Jawa Timur serta efektivitas kebijakan pembangunan daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif.

Tabel 3.7 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Tahun	Laju Pertumbuhan (y-on-y) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Kabupaten Gresik (Persen)				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
2021	-	-	-	-	3,79
2022	6,47	9,43	9,95	3,88	7,38
2023	3,69	5,4	3,92	5,48	4,62
2024	5,18	4,06	5,82	4,11	4,79
2025	3,92	4,62	4,12	-	4,91

Sumber: Tabel Dinamis BPS Jawa Timur, 2025

*Keterangan : *)Tahun 2023: Angka Sementara*

**) Tahun 2024: Angka Sangat Sementara*

**) Tahun 2025: Angka Sangat Sangat Sementara*

Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Gresik berada pada fase pemulihan awal setelah mengalami kontraksi cukup dalam pada tahun 2020 akibat pandemi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik yang tercatat sekitar 3,79 persen pada tahun 2021 mencerminkan mulai pulihnya aktivitas produksi dan konsumsi seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta adaptasi pelaku usaha terhadap kondisi *new normal*. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi masih relatif terbatas karena daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, aktivitas industri masih menghadapi gangguan rantai pasok akibat adanya pembatasan di beberapa wilayah, dan investasi belum kembali ke tingkat optimal. Tahun 2022 menjadi periode akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik dengan laju pertumbuhan yang meningkat secara signifikan mencapai 7,38 persen lebih tinggi dari Jawa Timur dan Nasional. Kinerja ini dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas industri secara masif. Sejumlah sub sektor industri besar di Kabupaten Gresik kembali beroperasi optimal, didukung oleh meningkatnya permintaan domestik dan ekspor barang, serta adanya realisasi investasi baru di kawasan industri dan kawasan ekonomi strategis seperti JIIPE. Memasuki tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami normalisasi dan melambat ke nilai 4,62 persen. Perlambatan ini bukan merupakan indikasi pelemahan struktural, melainkan penyesuaian setelah pertumbuhan tinggi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik kembali mengalami kenaikan yang relatif stabil di 4,79 persen. Stabilitas ini mencerminkan kondisi ekonomi daerah yang cukup resilien di tengah tantangan global, termasuk perlambatan ekonomi dunia dan tekanan geopolitik. Struktur ekonomi Gresik yang didominasi industri tetap memberikan kontribusi besar, meskipun ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi sangat sensitif terhadap dinamika eksternal. Pada tahun 2025, kinerja pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 4,91 persen.

Secara keseluruhan, kinerja perekonomian Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan ketahanan dan daya adaptasi yang baik terhadap dinamika ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Fluktuasi pertumbuhan yang terjadi bersifat moderat dan lebih mencerminkan penyesuaian siklus ekonomi dibandingkan kontraksi struktural. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, sementara sektor industri pengolahan berperan strategis dalam menentukan arah dan kecepatan pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik. Ke depan, tantangan utama pembangunan ekonomi daerah terletak pada upaya meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui penguatan investasi produktif, peningkatan nilai tambah industri, serta diversifikasi struktur ekonomi agar pertumbuhan yang dicapai lebih berkelanjutan dan inklusif.

3.4.1.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen utama dalam penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui pendekatan pengeluaran, yang merepresentasikan aktivitas investasi riil dalam perekonomian daerah. PMTB mencerminkan perubahan aset tetap yang digunakan dalam proses produksi dengan umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak bersifat konsumtif. Oleh karena itu, PMTB sering digunakan sebagai indikator kapasitas produksi jangka menengah dan panjang suatu wilayah.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Uraian	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Gresik (Miliar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
PMTB ADHB (Miliar Rupiah)	34.548,61	39.489,56	41.840,39	44.480,90	48.234,89
PMTB ADHK (Miliar Rupiah)	23.038,88	24.466,84	25.806,50	27.047,97	28.654,74

Sumber: BPS Gresik, 2025
*Keterangan : *Tahun 2024: Angka Sementara*
**Tahun 2025: Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik, nilai PMTB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2024, dari Rp. 34.548,61 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp. 44.480,90 miliar pada tahun 2024. Peningkatan nominal ini sejalan dengan dinamika harga dan aktivitas ekonomi yang tercermin dalam nilai transaksi investasi barang modal di Kabupaten Gresik. Namun demikian, untuk melihat pertumbuhan riil investasi, indikator yang lebih relevan adalah PMTB atas dasar harga konstan (ADHK). Nilai PMTB ADHK Kabupaten Gresik juga mengalami kenaikan secara berkelanjutan, dari Rp. 23.038,88 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp. 27.047,97 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini

mengindikasikan adanya penambahan aset tetap secara riil, baik berupa bangunan, infrastruktur, mesin, maupun peralatan produksi, yang memperluas kapasitas produksi daerah. Dari sisi laju pertumbuhan, PMTB ADHK Kabupaten Gresik tumbuh sebesar 1,83 persen pada tahun 2021, meningkat signifikan menjadi 6,20 persen pada tahun 2022, kemudian melambat menjadi 5,48 persen pada tahun 2023 dan 4,81 persen pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan bahwa setelah mengalami percepatan pertumbuhan investasi pascapemulihan ekonomi, laju pertumbuhan PMTB cenderung mengalami normalisasi. Secara teoritis, kondisi ini lazim terjadi dalam fase transisi dari pemulihan menuju stabilisasi ekonomi, di mana ekspansi investasi tetap berlangsung namun dengan laju yang lebih moderat. Pada tahun 2025, PMTB ADHK Kabupaten Gresik kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 48.234,89 miliar.

3.4.1.6 Penurunan Emisi GRK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pengendalian perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Gresik telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Pelaksanaan program tersebut merupakan bagian dari komitmen daerah dalam mendukung kebijakan nasional pembangunan rendah karbon dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Upaya penurunan emisi gas rumah kaca dilaksanakan melalui pendekatan lintas sektor yaitu sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, persampahan, pengolahan air limbah domestik dan blue carbon. Berdasarkan hasil pelaporan melalui Aplikasi AKSARA https://pprk.bappenas.go.id/aksara yang dikelola oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, capaian penurunan emisi gas rumah kaca Kabupaten Gresik pada tahun 2025 tercatat sebesar 52.525,84 ton CO_2eq. Capaian tersebut merupakan akumulasi kontribusi dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dilaporkan secara terintegrasi dari tahun tahun sebelumnya. Aksi mitigasi yang dilaporkan terdiri dari sub kegiatan air limbah, blue carbon, kehutanan dan lahan gambut, persampahan dan pertanian. Wujud pelaksanaan aksi mitigasi masing - masing sub kegiatan terdiri dari kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, penanaman Mangrove, penanaman pohon, Pembangunan TPS3R, Operasionalisasi Bank Sampah dan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional. Selanjutnya rekapitulasi capaian komulatif penurunan emisi gas rumah kaca bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Penurunan Emisi GRK Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Penurunan Emisi GRK	15.331,25	16.814,00	25.731,52	40.177,72	40.331,31	52.525,84

Sumber: Aplikasi Aksara Bappenas, 2025

Secara umum, capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada indikator penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Gresik menunjukkan hasil yang positif. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Gresik akan terus meningkatkan sinergi lintas perangkat daerah serta memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna menjaga keberlanjutan capaian dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah.

3.4.1.7 Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam kurun waktu tahun 5 Tahun kebelakang menunjukkan tren peningkatan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Indeks Reformasi Birokrasi	69,47	68,93	86,84	85,55	86,17	88,01

Sumber : KemenPAN-RB, 2025

Peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 didukung oleh perbaikan pada sejumlah komponen Reformasi Birokrasi general. Hal ini tercermin dari meningkatnya beberapa indikator kinerja, antara lain tingkat digitalisasi arsip yang meningkat dari 90,19 menjadi 92,91, indeks reformasi hukum dari 96,24 menjadi 99,70, indeks tata kelola pengadaan dari 76,93 menjadi 85,66, indeks pelayanan publik dari 4,16 menjadi 4,35, capaian IKU makro dari 83,28 menjadi 86,97, survei penilaian integritas dari 59,78 menjadi 75,75, serta survei kepuasan masyarakat dari 88,19 menjadi 90,97. Peningkatan pada berbagai indikator tersebut menunjukkan adanya penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan sistem pengawasan dan integritas dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara untuk Komponen RB tematik juga mengalami peningkatan di tahun 2025 di bandingkan dengan tahun 2024, yaitu Pengentasan Kemiskinan dari skor 0.67 menjadi 0.75 dan Realisasi investasi dari skor 0.5 menjadi 0.73

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan mencapai 88,01, Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, yang pada tahun 2025 memiliki Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 93,82, capaian Kabupaten Gresik menunjukkan kesenjangan yang relatif kecil dan mencerminkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di tingkat kabupaten telah berjalan cukup efektif dan selaras dengan arah kebijakan reformasi birokrasi di tingkat provinsi. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian reformasi birokrasi secara nasional, nilai IRB Kabupaten Gresik juga menunjukkan posisi yang relatif baik karena telah berada pada kategori A (sangat baik), yang menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah telah semakin efektif, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Upaya yang menunjang peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui peran aktif beberapa perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam penguatan tata kelola pemerintahan. Seperti Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam penyusunan arsitektur dan peta rencana pengembangan sistem digital sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan. Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi melaksanakan pendampingan serta evaluasi mandiri terhadap kualitas pelayanan publik, sekaligus melakukan pemantauan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada seluruh perangkat daerah secara berkala setiap bulan. Selanjutnya, Inspektorat melakukan sosialisasi dan penguatan integritas kepada seluruh perangkat daerah guna meningkatkan budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, Sekretariat Daerah melalui Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa melakukan monitoring dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam pencatatan pengadaan non-transaksional guna meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan. Selain itu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah berperan dalam melakukan kajian serta harmonisasi terhadap kebijakan yang disusun, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih selaras, berkualitas, dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Peningkatan capaian indeks tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain melalui penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan internal pemerintah, pengembangan inovasi daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3.4.1.8 Tingkat Kemiskinan

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Fenomena angka kemiskinan yang meningkat terjadi hampir di semua wilayah Jawa Timur hingga tahun 2021. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga berdampak menurunnya perekonomian wilayah. Kelompok paling rentan yang terjun di bawah garis kemiskinan ialah pekerja informal. Tabel di bawah ini memperlihatkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin wilayah Gerbangkertosusila, Jawa Timur, dan Nasional tahun 2021 – 2025.

Tabel 3.11 Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Tingkat Kemiskinan	12,42	11,06	10,96	10,32	8,47 - 9,95	9,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2025, tingkat kemiskinan di wilayah Gerbangkertasusila selama periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan pada sebagian besar kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Gresik. Tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik mengalami penurunan secara konsisten dari 12,42% pada tahun 2021 menjadi 11,06% pada tahun 2022, 10,96% pada tahun 2023, 10,32% pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 9,95% pada tahun 2025. Penurunan sebesar 2,47 poin persentase dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Tabel 3.12 Capaian Tingkat Kemiskinan Gerbangkertasusila Tahun 2021 - 2025

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Gresik	12,42	11,06	10,96	10,32	9,95
2	Kabupaten Bangkalan	21,57	21,57	21,57	21,57	18,25
3	Kabupaten Mojokerto	10,62	10,62	10,62	10,62	8,79

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
4	Kota Mojokerto	6,39	6,39	6,39	6,39	5,05
5	Kota Surabaya	5,02	5,02	5,02	5,02	3,56
6	Kabupaten Sidoarjo	5,59	5,59	5,59	5,59	4,40
7	Kabupaten Lamongan	13,85	13,85	13,85	13,85	12,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

Jika dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Gerbangkertasusila, tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik berada pada posisi menengah. Angka kemiskinan Gresik masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan seperti Kota Surabaya (3,56% pada 2025), Kota Mojokerto (5,05%), dan Kabupaten Sidoarjo (4,40%). Namun, kondisi Gresik lebih baik dibandingkan Kabupaten Bangkalan yang masih mencatat angka kemiskinan cukup tinggi sebesar 18,25% pada tahun 2025 serta Kabupaten Lamongan sebesar 12,03%. Sementara itu, Kabupaten Mojokerto juga menunjukkan penurunan signifikan menjadi 8,79% pada tahun 2025. Secara umum, wilayah dengan karakteristik perkotaan dan basis industri serta perdagangan yang kuat cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan wilayah dengan dominasi sektor pertanian dan kepulauan.

Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan daerah, termasuk perluasan perlindungan sosial, penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja, memberikan dampak positif. Namun demikian, dengan posisi kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata beberapa daerah penyangga perkotaan, diperlukan strategi yang lebih terarah untuk mempercepat penurunan kemiskinan, terutama pada kelompok rentan dan wilayah kantong kemiskinan.

3.4.1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator fundamental dalam menilai kualitas pembangunan ekonomi suatu daerah, karena secara langsung mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Gresik, dinamika ketenagakerjaan dalam periode 2021–2025 menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan, namun masih menyisakan tantangan struktural apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik menurun dari 8,00 persen pada tahun 2021 menjadi 5,47 persen pada tahun 2025. Penurunan ini sejalan dengan tren nasional yang turun dari 6,49 persen menjadi 4,85 persen, serta tren Jawa Timur yang menurun lebih cepat dari 5,74 persen menjadi 3,88 persen. Meskipun arah pergerakan TPT Kabupaten Gresik bersifat positif, secara

konsisten tingkat pengangguran di Gresik masih berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, yang menunjukkan bahwa proses pemulihan ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik belum sepenuhnya optimal dan inklusif.

Tabel 3.13 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,00	7,84	6,82	6,45	6,91 - 6,00	5,47

Sumber: Tabel Dinamis BPS Gresik, Jawa Timur, Nasional 2025

Tabel 3.14 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Gresik	8,00	7,84	6,82	6,45	5,47
2	Provinsi Jawa Timur	5,74	5,49	4,88	4,19	3,88
3	Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85

Sumber: Tabel Dinamis BPS Gresik, Jawa Timur, Nasional 2025

Tingginya TPT Kabupaten Gresik tidak dapat dilepaskan dari karakteristik struktur ekonominya yang sangat didominasi oleh sektor industri pengolahan skala besar. Sebagai salah satu pusat industri utama di Jawa Timur, Gresik memiliki konsentrasi industri semen, petrokimia, pupuk, logam, serta kawasan pergudangan dan logistik yang berorientasi pada pasar regional dan nasional. Dari perspektif teori pembangunan ekonomi, khususnya konsep *jobless growth*, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor padat modal dan berteknologi tinggi cenderung menghasilkan peningkatan output yang besar, tetapi tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sebanding. Kondisi ini relevan dengan realitas ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik, di mana pertumbuhan PDRB yang relatif tinggi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja baru dalam jumlah besar, terutama bagi tenaga kerja lokal dengan tingkat pendidikan menengah dan rendah. Selain itu, tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik juga dipengaruhi oleh adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kualitas dan relevansi keterampilan tenaga kerja merupakan faktor kunci dalam menentukan peluang kerja. Di Gresik, industri besar cenderung membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian spesifik, pengalaman kerja, serta sertifikasi tertentu, sementara sebagian besar angkatan kerja lokal masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah yang belum sepenuhnya siap memasuki pasar kerja industri modern. Kondisi ini menyebabkan terjadinya *mismatch* tenaga kerja, di mana lowongan kerja tersedia namun tidak dapat diakses

secara optimal oleh pencari kerja lokal, sehingga tingkat pengangguran tetap relatif tinggi meskipun aktivitas industri terus berjalan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, struktur perekonomian Gresik relatif kurang terdiversifikasi. Jawa Timur memiliki komposisi ekonomi yang lebih seimbang antara sektor industri, perdagangan, pertanian, jasa, serta sektor informal dan UMKM yang berperan penting sebagai penyangga ketenagakerjaan. Keberadaan sektor-sektor padat karya dan usaha mikro di Jawa Timur memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyerap tenaga kerja, terutama pada masa pemulihan pascapandemi COVID-19. Hal ini menjelaskan mengapa penurunan TPT Jawa Timur berlangsung lebih cepat dan mampu mencapai tingkat yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Gresik. Di sisi lain, ketergantungan Gresik pada sektor formal modern menyebabkan pasar tenaga kerjanya cenderung lebih rigid dan selektif. Dampak pandemi COVID-19 pada periode 2020–2021 juga memberikan tekanan yang relatif lebih besar terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik. Gangguan rantai pasok global, pembatasan aktivitas industri, serta penyesuaian produksi menyebabkan peningkatan pengangguran yang cukup tajam pada tahun 2021. Meskipun pemulihan ekonomi mulai terjadi sejak 2022, terutama melalui kembali beroperasinya industri dan meningkatnya aktivitas konstruksi serta logistik, proses pemulihan ketenagakerjaan di Gresik berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya merata. Penurunan TPT hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja kembali berjalan, namun masih bersifat sektoral dan belum mampu menjangkau seluruh kelompok angkatan kerja.

3.4.2 Capaian Indikator Sasaran

Capaian indikator sasaran dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan ukuran keberhasilan dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah. Beberapa indikator Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun;
2. Harapan Lama Sekolah;
3. Usia Harapan Hidup (UHH);
4. Indeks Perlindungan Anak;
5. Indeks Pemberdayaan Gender;
6. Indeks Ketimpangan Gender;
7. Indeks Inklusi (GEDSI);
8. Indeks Harmoni;
9. Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur;
10. Rasio Net Ekspor;
11. Incremental Capital - Output Ratio (ICOR);
12. Rasio Government Expenditure;
13. Indeks Daya Saing Daerah;
14. Indeks Infrastuktur;

15. Indeks Konektivitas Wilayah;
16. Indeks Risiko Bencana;
17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
18. Indeks Pemerintah Digital;
19. Nilai Akuntabilitas Intansi Pemerintahan;
20. Indeks Sistem Merit;
21. Indeks Pelayanan Publik;
22. Indeks Kemiskinan Multidimensi;
23. Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin;
24. Rasio Gini;
25. Rasio Penyerapan Tenaga Kerja.

3.4.2.1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Indikator ini menggambarkan jumlah rata-rata tahun yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Data RLS secara resmi dirilis oleh Badan Pusat Statistik sebagai bagian dari komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan RLS menjadi prioritas pembangunan daerah karena berpengaruh terhadap peningkatan daya saing, produktivitas tenaga kerja, serta kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.15 Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun	-	-	-	10,01	10,37	10,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2025

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun tahun 2025 sebesar 10.13 persen meningkat 0,10 persen dari tahun 2024 yang nilainya sebesar 10.01 persen. namun capaian relaisasi tahun 2025 tidak maksimal dibandingkan dengan targetnmya, Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural dan demografis, antara lain: Karakteristik Demografis Penduduk Usia Dewasa dan Lansia, Masih Adanya Penduduk dengan Pendidikan Tidak Tamat SMA/Sederajat, Mobilitas dan Dinamika Penduduk dan Sifat Indikator yang Bersifat Kumulatif dan Jangka Panjang. Meskipun belum mencapai target, realisasi sebesar 10,13 tahun menunjukkan tren yang tetap stabil dan

mendekati target, serta mencerminkan keberlanjutan akses pendidikan menengah bagi generasi muda.

Tindak Lanjut ke depan untuk meningkatkan capaian RLS, diperlukan langkah strategis seperti: Peningkatan akses pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C), Pencegahan putus sekolah melalui intervensi sosial dan ekonomi, Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan partisipasi pendidikan menengah, Dukungan bagi keluarga rentan agar anak tetap melanjutkan pendidikan minimal hingga SMA/sederajat.

3.4.2.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HLS menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke atas di suatu daerah, dengan asumsi pola partisipasi sekolah saat ini tetap. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor pendidikan dalam meningkatkan akses dan kesempatan belajar masyarakat.

Tabel 3.16 Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Harapan Lama Sekolah (Persen)	13,77	13,96	13,97	13,97	13,99	13,99

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Berdasarkan tabel diatas, capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 adalah sebesar 13,99 tahun, mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 13,98 tahun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata anak usia sekolah memiliki peluang menempuh pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi. Target Harapan Lama Sekolah dalam RPJMD Tahun 2025 ditetapkan sebesar 13,99 tahun. Realisasi pada Tahun 2025 mencapai 13,99 tahun atau sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan.

Untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah, Pemerintah Daerah telah melaksanakan beberapa program, antara lain: Peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah, Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, Program wajib belajar 12 tahun, Penguatan pendidikan nonformal dan kesetaraan (Paket A, B, dan C), Kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung keberlanjutan pendidikan. Secara umum,

capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang naik setiap tahunnya. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan akses pendidikan guna mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.4.2.3 Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah indikator yang mengukur rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang individu dalam suatu wilayah. Angka ini mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat pada suatu waktu, dan biasanya dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR). Perhitungan UHH dapat dilakukan melalui catatan registrasi mortalitas yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu atau dengan menggunakan program analisis data seperti MortpakLite. Grafik perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Gresik dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17 Capaian Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Usia Harapan Hidup (Persen)	72,67	72,99	74,24	74,48	74,57	74,90

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Berdasarkan tabel di atas mengenai Capaian Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, terlihat bahwa UHH menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 UHH tercatat sebesar 72,67 tahun, kemudian meningkat menjadi 72,99 tahun pada tahun 2022. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2023 menjadi 74,24 tahun dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 74,48 tahun. Pada tahun 2025, target UHH ditetapkan sebesar 74,57 tahun, sedangkan realisasinya mencapai 74,90 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, dengan selisih sebesar 0,33 tahun.

Secara umum, peningkatan Usia Harapan Hidup ini mencerminkan perbaikan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Gresik, yang dipengaruhi oleh meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan, perbaikan gizi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam penguatan layanan kesehatan promotif dan preventif agar tren peningkatan UHH dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

3.4.2.4 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan di bidang perlindungan anak, meliputi aspek pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Indeks ini menjadi tolok ukur komitmen dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tabel 3.18 Capaian Indikator Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Indeks Perlindungan Anak (Indeks)	67,07	71,85	71,57	81,39	71,62 - 72,00	81,39*

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025
*Keterangan : *) Angka sementara*

Berdasarkan Tabel di atas mengenai Capaian Indikator Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, terlihat bahwa capaian indeks menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 nilai indeks tercatat sebesar 67,07, kemudian meningkat menjadi 71,85 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 capaian relatif stabil di angka 71,57, sebelum mengalami lonjakan cukup tinggi pada tahun 2024 menjadi 81,39. Pada tahun 2025, target Indeks Perlindungan Anak ditetapkan pada kisaran 71,62–72,00, sedangkan realisasinya masih menggunakan angka sementara sebesar 81,39 seperti tahun sebelumnya dikarenakan belum munculnya data realisasi 2025 dari website SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dan mampu mempertahankan peningkatan signifikan sebagaimana capaian tahun sebelumnya.

Secara umum, peningkatan ini mencerminkan penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, melalui penguatan regulasi, kelembagaan Gugus Tugas KLA, peningkatan layanan pengaduan dan pendampingan kasus, serta perluasan akses anak terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi capaian, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan seluruh anak di Kabupaten Gresik memperoleh perlindungan yang optimal dan berkelanjutan.

Upaya preventif dan responsif juga terus ditingkatkan melalui sosialisasi pencegahan perkawinan anak, penguatan pola asuh keluarga, pembentukan forum anak, serta penyediaan layanan ramah anak di fasilitas publik. Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menciptakan

lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

3.4.2.5 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan publik. IDG mengukur sejauh mana perempuan memiliki akses dan peran strategis dalam parlemen, posisi manajerial/profesional, serta kontribusi dalam pendapatan ekonomi.

Tabel 3.19 Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	71,48	70,13	70,47	62,32	70,72-71,50	62,32*

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
Keterangan : *) Angka sementara

Berdasarkan tabel di atas, Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 2021–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021 capaian IDG sebesar 71,48, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 70,13 dan relatif stabil pada tahun 2023 sebesar 70,47. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 62,32. Pada tahun 2025, target IDG Kabupaten Gresik ditetapkan pada rentang 70,72–71,50. Hingga periode pelaporan, realisasi IDG tahun 2025 tercatat termutakhir sebesar 62,32 dikarenakan belum munculnya data realisasi 2025 dari Badan Pusat Statistik. Capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan upaya strategis dan intervensi program yang lebih terfokus, khususnya dalam peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, serta jabatan manajerial dan profesional. Hal ini dipengaruhi oleh belum meratanya partisipasi perempuan pada jabatan strategis, keterbatasan akses dan kesempatan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif, serta belum optimalnya integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program perangkat daerah

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa penguatan pemberdayaan perempuan masih menjadi tantangan, dan perlu didukung melalui sinergi lintas perangkat daerah, peningkatan akses dan kesempatan bagi perempuan, serta penguatan kebijakan yang responsif gender guna mendorong peningkatan IDG di tahun-tahun mendatang.

3.4.2.6 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang mengukur tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian pembangunan manusia pada tiga dimensi utama, yaitu:

Kesehatan reproduksi, yang diukur melalui:

1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Angka Kelahiran Remaja

Pemberdayaan, yang diukur melalui:

1. Persentase keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen
2. Proporsi penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA

Partisipasi ekonomi, yang diukur melalui:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan laki-laki

Tabel 3.20 Capaian Indikator Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Indeks Ketimpangan Gender (Indeks)	0,404	0,407	0,409	0,335	0,402	0,335*

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025
*Keterangan : *) Angka sementara*

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2021 nilai IKG tercatat sebesar 0,404, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi 0,407, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,409. Kenaikan nilai tersebut menunjukkan bahwa pada periode 2021–2023 ketimpangan gender di Kabupaten Gresik cenderung meningkat, meskipun dalam skala yang relatif kecil.

Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,335, yang berarti terjadi perbaikan kondisi ketimpangan gender. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa data termutakhir IKG masih berada di 0,335 poin. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan), serta partisipasi ekonomi. Semakin kecil nilai IKG semakin baik, hal ini menunjukkan bahwa upaya pengarusutamaan gender dan program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gresik memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat ketimpangan gender.

3.4.2.7 Indeks Inklusi (GEDSI)

GEDSI adalah singkatan dari *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*, yang dalam bahasa Indonesia berarti Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial. Ini adalah pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan isu-isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam semua aspek perencanaan dan implementasi kebijakan. Lebih detailnya, GEDSI mencakup:

a. Kesetaraan Gender: Memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama.
b. Disabilitas: Memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, serta tidak mengalami diskriminasi.
c. Inklusi Sosial: Menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua orang, termasuk mereka yang terpinggirkan atau rentan, agar dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Pendekatan GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan SDM di Gresik benar - benar inklusif dan tidak meninggalkan kelompok rentan. Beberapa tantangan utama dalam konteks GEDSI di Gresik meliputi kesenjangan gender dalam akses pendidikan dan pekerjaan, keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas, serta marginalisasi kelompok sosial tertentu. Dengan menerapkan pendekatan GEDSI, pembangunan SDM di Gresik dapat menjadi lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam kemajuan daerah. Indikator ini merupakan Indikator baru sehingga belum ada perhitungan capaian di 3 (tiga) tahun sebelumnya.

Tabel 3. 21 Capaian Indikator Indeks GEDSI Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Indeks GEDSI (Indeks)	-	-	-	56,2	60	63,41

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Indikator GEDSI merupakan indikator baru yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, maka dari itu pengukuran baru dilakukan di Tahun 2024 sebagai baseline dan Tahun 2025. Berdasarkan dari tabel di atas, bahwa realisasi Indeks GEDSI mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 7,21 poin dari Tahun 2024. Disamping itu, realisasi Indeks GEDSI juga telah melampaui 3,41 poin dari target yang ditetapkan.

Ke depan, upaya peningkatan Indeks GEDSI perlu terus diperkuat melalui penguatan kebijakan yang responsif gender dan inklusif, peningkatan aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan pendekatan pembangunan yang inklusif tersebut, diharapkan seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat

pembangunan secara adil dan merata sehingga kualitas kesejahteraan sosial dapat terus meningkat.

3.4.2.8 Indeks Harmoni

Indeks Harmoni atau Index of Harmony adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat harmoni atau keselarasan dalam berbagai aspek kehidupan atau masyarakat. Indeks ini bisa mencakup berbagai faktor seperti kualitas hidup, lingkungan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan individu. Variabel yang digunakan meliputi; Ketahanan pangan, Keadilan kesejahteraan, Pluralism keberagaman, Pelayanan pendidikan, Pelayanan Kewarnegaraan, Akulturasi budaya, Kearifan lokal, Kebijakan beragama, Partisipasi ormas, Moderasi beragama. Indeks Harmoni merupakan indikator baru yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang diampu oleh badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang mana data capaian ada di tahun 2024-2025 sebagaimana berikut :

Tabel 3. 22 Capaian Indikator Indeks Harmoni Tahun 2024-2025

Indikator	Tahun		
	2024	2025	
		Target	Realisasi
Indeks Harmoni (Indeks)	3,77	3,78	3,56

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, 2025

Nilai Indeks Harmoni Kabupaten Gresik mencapai 3,56 yang maknanya masuk dalam kategori Indeks Harmoni Tinggi (Inklusif) dengan kategori “Tinggi”yang menunjukkan kohesi sosial relatif baik, meski variasi antarkawasan tetap menuntut penguatan berkelanjutan agar stabilitas sosial tetap terjaga. Terdapat tiga simpul perbaikan yang harus dipacu diantaranya keadilan kesejahteraan, mutu pendidikan (kualitas tenaga pendidik), dan akuntabilitas layanan kewarganegaraan.

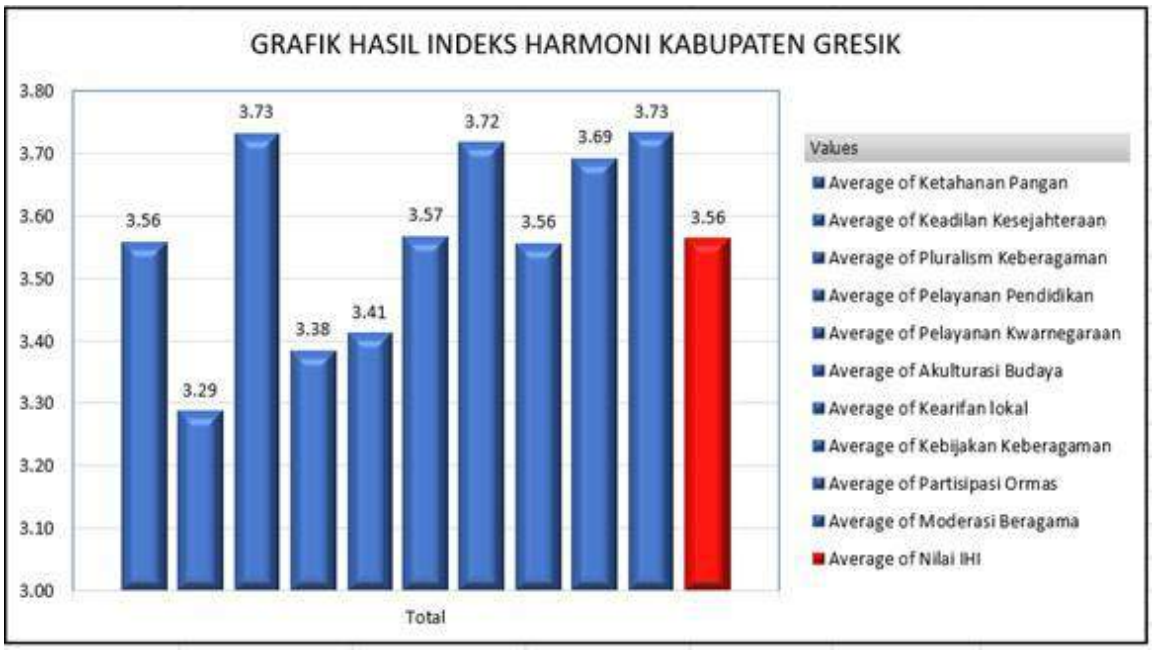

Gambar 3. 1 Hasil Indeks Harmoni Kabupaten Gresik

Hasil Indeks Hamoni Kabupaten Gresik menunjukkan pilar toleransi Gresik sudah kuat terutama pada pluralisme, moderasi, partisipasi ormas, dan kerangka kebijakan namun tiga simpul perbaikan harus dipacu agar tidak menjadi sumber kerawanan. Pertama, keadilan kesejahteraan (3,29) perlu ditangani melalui audit manfaat pembangunan yang transparan di sekitar kawasan industri dan kepulauan, local hiring/procurement bertahap, serta kanal pengaduan yang dapat dilacak hingga tuntas. Kedua, mutu pendidikan (kualitas tenaga pendidik 3,30) perlu dinaikkan dengan pelatihan pedagogik, literasi digital, dan pendidikan multikultur sehingga ketahanan warga terhadap disinformasi SARA meningkat merata. Ketiga, akuntabilitas layanan kewarganegaraan (3,35) harus diperkuat melalui service charter, tracking daring, papan skor kinerja per kecamatan, dan layanan keliling untuk desa terpencil serta pulau-pulau. Upaya ini akan memperkuat rasa adil, meningkatkan interaksi positif, dan menguatkan kepercayaan terhadap institusi.

3.4.2.9 Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur

Rasio kontribusi industri manufaktur merupakan indikator yang menunjukkan besarnya peranan sektor industri pengolahan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah pada periode tertentu. Rasio ini dihitung sebagai perbandingan antara nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan terhadap total nilai tambah bruto seluruh lapangan usaha dalam perekonomian daerah, kemudian dinyatakan dalam persentase. Rasio kontribusi industri pengolahan mencerminkan struktur ekonomi suatu wilayah. Semakin besar nilai rasionya, semakin dominan peran sektor industri dalam menopang aktivitas ekonomi daerah tersebut. Sebaliknya, apabila rasionya relatif kecil, maka struktur ekonomi cenderung lebih ditopang oleh sektor lain seperti pertanian, pertambangan, atau jasa. Dengan demikian, rasio ini digunakan untuk

membaca karakteristik ekonomi daerah, apakah berbasis industri, berbasis sumber daya alam, atau berbasis jasa. Rasio kontribusi tidak menggambarkan tingkat pertumbuhan sektor maupun tingkat keuntungan industri, melainkan hanya menunjukkan proporsi sumbangan sektor tersebut terhadap total perekonomian.

Tabel 3. 23 Capaian Indikator Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur Kabupaten Gresik Tahun 2025

No	Indikator	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	
						Target	Realisasi
1	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur (Persen)	49,16	49,78	49,84	50,57	50,32 - 51,20	51,86

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2026, Data Diolah Bappeda, 2025

Keterangan : *) Tahun 2024: Angka Sementara

*) Tahun 2025: Angka Sangat Sementara

Rasio kontribusi Sektor Manufaktur terhadap perekonomian daerah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 kontribusi tercatat sebesar 49,16 persen, meningkat menjadi 49,78 persen pada 2022 dan 49,84 persen pada 2023. Pada tahun 2024 (angka sementara) kontribusi mencapai 50,57 persen dan kembali meningkat pada tahun 2025 (angka sangat sementara) menjadi 51,86 persen. Secara deskriptif, terdapat kenaikan sebesar 2,70 poin persentase dalam kurun waktu 2021–2025. Peningkatan ini berlangsung secara bertahap setiap tahun tanpa adanya kontraksi, yang menunjukkan penguatan peran sektor manufaktur dalam struktur perekonomian daerah. Sejak tahun 2024, kontribusi sektor manufaktur telah melampaui 50 persen, yang berarti lebih dari separuh pembentukan nilai tambah bruto daerah bersumber dari aktivitas industri pengolahan.

Struktur PDRB Kabupaten Gresik selama beberapa tahun terakhir menunjukkan dominasi kategori Industri Pengolahan dibandingkan lapangan usaha lainnya. Data PDRB ADHK 2010 Kabupaten Gresik konsisten menempatkan industri pengolahan sebagai kontributor terbesar dalam distribusi PDRB menurut lapangan usaha, sehingga angka rasio yang disajikan pada tabel sejalan dengan gambaran struktur ekonomi daerah. Kecenderungan peningkatan kontribusi ini juga mengindikasikan semakin terkonsentrasinya struktur ekonomi daerah pada sektor sekunder, khususnya manufaktur. Secara struktural, kondisi ini mempertegas karakteristik Kabupaten Gresik sebagai daerah industri, di mana pembentukan nilai

tambah lebih banyak ditopang oleh aktivitas produksi barang olahan dibandingkan sektor primer maupun sebagian besar sektor tersier.

3.4.2.10 Rasio Net Ekspor

Rasio Net Ekspor merupakan indikator yang menggambarkan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor dalam satu periode tahun anggaran. Indikator ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan surplus perdagangan serta menunjukkan daya saing produk unggulan di pasar internasional.

Tabel 3. 24 Capaian Indikator Rasio Net Ekspor Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2025

No	Indikator	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	
						Target	Realisasi
1	Rasio Net Ekspor (Persen)	98,23	68,94	97,22	65,26	10,77 - 11,80	62,88

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2025
Data Diolah Bappeda, 2025

Perkembangan Rasio Net Ekspor Kabupaten Gresik selama periode 2020–2025 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan tetap berada pada kondisi surplus perdagangan. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 98,23 persen, yang menunjukkan kinerja ekspor relatif kuat dibandingkan impor. Tahun 2021 mengalami penurunan signifikan menjadi 68,94 persen, yang mengindikasikan terjadinya perlambatan surplus perdagangan, sejalan dengan dinamika pemulihan ekonomi dan gangguan rantai pasok global. Pada tahun 2022, rasio kembali meningkat menjadi 97,22 persen, mencerminkan pemulihan dan penguatan kinerja perdagangan luar negeri daerah. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami koreksi menjadi 65,26 persen, menunjukkan adanya tekanan eksternal terhadap ekspor maupun peningkatan impor.

Tahun 2024 mencatat capaian tertinggi selama periode pengamatan, yaitu sebesar 99,25 persen, yang menunjukkan kondisi perdagangan luar negeri yang sangat kuat dan hampir mencapai rasio optimal. Selanjutnya pada tahun 2025, rasio kembali mengalami penurunan menjadi 62,88 persen, sekaligus menjadi capaian terendah dalam enam tahun terakhir. Secara umum, meskipun terjadi fluktuasi tahunan, Rasio Net Ekspor Kabupaten Gresik tetap menunjukkan struktur perdagangan yang berada dalam posisi surplus. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, harga komoditas, permintaan pasar internasional, serta struktur industri daerah yang berbasis manufaktur dan kawasan industri.

Ke depan, diperlukan penguatan strategi stabilisasi melalui diversifikasi pasar ekspor, peningkatan nilai tambah produk unggulan, serta pengendalian impor berbasis substitusi produk lokal guna menjaga konsistensi surplus perdagangan dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

3.4.2.11 Incremental Capital – Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara penambahan modal dengan penambahan output yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Dalam kerangka perencanaan pembangunan, ICOR berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai efisiensi investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Secara konseptual, ICOR berangkat dari pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu akumulasi modal dan produktivitas faktor produksi. ICOR mengukur seberapa besar tambahan investasi, yang direpresentasikan oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Semakin rendah nilai ICOR, semakin efisien proses transformasi modal menjadi output ekonomi, sedangkan nilai ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa tambahan modal yang masuk belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan output yang proporsional.

Tabel 3. 25 Capaian Indikator *Incremental Capital Output Ratio* Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Incremental Capital Output Ratio (Persen)	6,22	3,27	5,13	4,96	4,60	4,90**

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2026, Data Diolah Bappeda, 2025
Keterangan : *) Tahun 2024: Angka Sementara
*) Tahun 2025: Angka Sangat Sementara

Kinerja *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Gresik selama periode 2021–2024 menunjukkan dinamika efisiensi investasi yang berfluktuasi, dengan nilai berada pada kisaran 3,27 hingga 6,22. Kondisi ini mencerminkan bahwa proses transformasi investasi menjadi output ekonomi di Kabupaten Gresik belum berlangsung secara stabil, namun masih berada dalam koridor yang wajar bagi daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri pengolahan padat modal. Capaian ICOR dalam RPJMD memiliki implikasi langsung terhadap realistis atau tidaknya target pertumbuhan ekonomi daerah. ICOR merupakan indikator kunci yang menggambarkan hubungan antara kebutuhan investasi dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan tambahan

output. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD secara implisit mensyaratkan tingkat efisiensi investasi tertentu.

Fluktuasi ICOR di Kabupaten Gresik menunjukkan adanya perbedaan kecepatan antara pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan pertumbuhan PDRB riil. Pada periode tertentu, peningkatan investasi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan output yang sepadan, yang mengindikasikan adanya jeda waktu antara realisasi investasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam penetapan target pertumbuhan ekonomi RPJMD 2025–2029, perlu diperhatikan kapasitas historis daerah dalam mengonversi investasi menjadi output, agar target yang ditetapkan tetap kredibel dan terukur. Nilai ICOR yang relatif tinggi pada beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan membutuhkan investasi dalam jumlah besar, apabila tidak disertai dengan perbaikan efisiensi. Implikasi langsungnya adalah bahwa penetapan target pertumbuhan ekonomi yang agresif tanpa diimbangi strategi peningkatan kualitas dan produktivitas investasi berpotensi meningkatkan tekanan kebutuhan modal, baik dari sektor swasta maupun belanja modal pemerintah daerah.

Sebaliknya, capaian ICOR yang sempat membaik menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi pemanfaatan investasi yang sudah ada, tanpa semata-mata bergantung pada peningkatan volume PMTB. Hal ini menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah perlu memberikan perhatian pada peningkatan keterkaitan antar sektor, pemanfaatan kapasitas produksi, serta penguatan rantai nilai ekonomi daerah, sehingga investasi yang masuk dapat lebih cepat dan lebih efektif mendorong pertumbuhan PDRB.

3.4.2.12 Rasio Goverment Expenditure

Rasio Government Expenditure merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan antara total Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Penggunaan PDRB ADHK, sebagaimana digunakan dalam metodologi Badan Pusat Statistik, bertujuan untuk mengukur kapasitas ekonomi riil karena telah menghilangkan pengaruh inflasi. Dengan demikian, rasio ini menunjukkan seberapa besar proporsi belanja pemerintah daerah dibandingkan dengan total nilai tambah riil yang dihasilkan oleh perekonomian Kabupaten Gresik dalam satu tahun.

Tabel 3. 26 Capaian Indikator Rasio *Government Expenditure* Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Rasio *Government Expenditure* (Persen)	3,15	3,27	3,00	3,10	1,95	2,75**

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2026, Data Diolah Bappeda, 2025

Keterangan : *) Tahun 2024: Angka Sementara

*) Tahun 2025: Angka Sangat Sementara

Rasio Government Expenditure Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang fluktuatif selama periode tahun 2021-2025. Pada tahun 2021 rasio tercatat sebesar 3,15 persen dan meningkat menjadi 3,27 persen pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan bahwa secara proporsional belanja daerah pada tahun 2022 relatif lebih besar dibandingkan kapasitas ekonomi riil daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 rasio menurun menjadi 3,00 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB ADHK relatif lebih besar dibandingkan peningkatan belanja daerah. Realisasi Belanja pada 2023 mengalami penurunan dari Rp. 3.554.078.352.828 pada tahun 2022 menjadi Rp. 3.418.637.234.690 pada tahun 2023. Dengan demikian, proporsi belanja pemerintah terhadap total output ekonomi daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Tahun 2024 menunjukkan kenaikan kembali menjadi 3,10 persen. Hal ini menandakan adanya peningkatan kembali proporsi belanja terhadap PDRB riil. Selanjutnya, pada tahun 2025 (angka sangat sementara), rasio tercatat sebesar 2,75 persen, yang merupakan level terendah dalam periode pengamatan. Penurunan rasio pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa kapasitas ekonomi riil daerah berkembang lebih besar dibandingkan proporsi belanja pemerintah daerah.. PDRB ADHK tahun 2025 sebesar 125.126,85 miliar mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 119.274,42 miliar. Sedangkan Realisasi Belanja Daerah justru mengalami penurunan dari Rp. 3.697.575.974.929,23 pada tahun 2024 menjadi Rp. 3.445.786.963.672,31 pada tahun 2025.

3.4.2.13 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam menciptakan lingkungan yang produktif dan kompetitif bagi kegiatan ekonomi dan pembangunan. IDSD disusun dan dipublikasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai instrumen analisis untuk menilai kondisi daya saing daerah secara komprehensif serta mendukung penyusunan kebijakan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen utama, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi

yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 12 pilar daya saing. Pada tingkat kabupaten/kota, pengukuran IDSD menggunakan 50 indikator yang bersumber dari berbagai kementerian/lembaga nasional. Skor IDSD dihitung melalui proses standardisasi data menggunakan metode min–max sehingga menghasilkan nilai indeks dalam rentang 0 sampai dengan 5, dimana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat daya saing daerah yang semakin baik.

Perkembangan capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung meningkat dan secara umum mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Perkembangan capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 27 Capaian Indikator Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	2,585	3,42	3,38	3,77	3,75	3,76

Sumber: Buku IDSD, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2025 mencapai 3,76, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 3,75 dengan tingkat capaian sebesar 100,27 persen. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan selama tahun berjalan mampu mendukung penguatan faktor-faktor pembentuk daya saing daerah. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai IDSD Kabupaten Gresik mengalami penurunan yang sangat tipis sebesar 0,01 poin dari 3,77 pada tahun 2024 menjadi 3,76 pada tahun 2025. Meskipun demikian, secara umum capaian tersebut masih menunjukkan kondisi kinerja daya saing daerah yang relatif stabil serta tetap berada pada tingkat capaian yang baik.

Dalam perspektif jangka menengah, perkembangan skor IDSD Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik telah memberikan kontribusi terhadap penguatan daya saing daerah, antara lain melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, pengembangan kawasan industri, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan ekosistem inovasi daerah. Dengan demikian, peningkatan kinerja IDSD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan, meningkatkan produktivitas ekonomi

lokal, serta memperkuat posisi Kabupaten Gresik dalam peta daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

Kabupaten Gresik upaya meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang sejalan dengan kebutuhan industri, penguatan ekosistem inovasi daerah, serta peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong sinergi lintas perangkat daerah serta memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem pembangunan daerah yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan sehingga capaian Indeks Daya Saing Daerah dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

3.4.2.14 Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah ukuran komposit (angka indeks) yang dipakai untuk menilai tingkat ketersediaan, kualitas, dan pemerataan infrastruktur di suatu Kabupaten/kota. Indeks Infrastruktur digunakan sebagai alat ukur untuk menilai tingkat ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan wilayah. Indeks Infrastruktur menilai beberapa komponen Infrastruktur dasar yang meliputi Transportasi, Sumber Daya Air, Permukiman, Energi dan Utilitas, serta Telekomunikasi. Setiap komponen dinilai berdasarkan indikator tertentu, lalu diolah menjadi satu nilai indeks. Nilai dari Indeks Infrastruktur berupa angka 0–1 atau 0–100 yang menunjukkan semakin tinggi angka yang dihasilkan maka infrastruktur dapat dikatakan semakin baik & merata.

Indeks Infrastruktur merupakan indikator baru dalam sistem pengukuran kinerja pembangunan daerah Kabupaten Gresik. Pada tahun pelaporan, indikator ini belum memiliki data pembanding pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, capaian yang disajikan merupakan nilai dasar *(baseline*) Tahun 2024 dan capain tahun 2025 yang akan digunakan sebagai acuan dalam evaluasi kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Tabel 3. 28 Capaian Indikator Indeks Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Indeks Infrastruktur (Indeks)	-	-	-	61,62	63,23	63,47

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran, nilai Indeks Infrastruktur di Kabupaten Gresik pada tahun berjalan menunjukkan kecenderungan kategori cukup. Nilai Indeks Infrastruktur Tahu 2024 sebesar 61,62 menunjukkan bahwa kondisi dan ketersediaan infrastruktur di daerah secara umum telah berada pada tingkat cukup memadai, namun belum sepenuhnya optimal. Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar infrastruktur dasar telah tersedia dan berfungsi, tetapi masih terdapat keterbatasan pada aspek kualitas, kapasitas layanan, maupun pemerataan antarwilayah.

Beberapa tantangan terhadap hasil pengukuran indeks Infrastruktur, antara lain belum meratanya kualitas infrastruktur antar wilayah, keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan, serta belum optimalnya keterpaduan perencanaan lintas sektor. Kondisi ini berdampak pada masih adanya komponen infrastruktur yang capaian kinerjanya belum optimal dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, peningkatan efektivitas program prioritas, serta optimalisasi pemeliharaan infrastruktur eksisting guna mendorong peningkatan kualitas layanan dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

3.4.2.15 Indeks Konektivitas Wilayah

Indeks Konektivitas Wilayah (IKW) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keterhubungan antarwilayah dalam suatu daerah, ditinjau dari aspek jaringan infrastruktur transportasi, aksesibilitas antar pusat kegiatan, serta keterpaduan sistem pelayanan antar kawasan. Indeks ini mencerminkan tingkat keterhubungan wilayah secara fisik dan fungsional dalam mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. IKW menjadi instrumen penting dalam menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada penguatan konektivitas daerah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan pusat kegiatan ekonomi.

Semakin tinggi nilai Indeks Konektivitas Wilayah, semakin baik tingkat keterhubungan antar kawasan, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya efisiensi sistem logistik, penguatan daya saing wilayah, serta integrasi pembangunan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Indikator ini merupakan indikator baru dalam sistem pengukuran kinerja pembangunan daerah Kabupaten Gresik, sehingga pada tahap awal penerapannya belum tersedia data realisasi capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, nilai yang disajikan saat ini masih berupa nilai dasar (*baseline*) tahun 2024 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja pada periode perencanaan selanjutnya.

Tabel 3. 29 Capaian Indikator Indeks Konektivitas Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Indeks Konektivitas Wilayah (Indeks)	-	-	-	0,725	0,745	0,75

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Konektivitas Wilayah Kabupaten Gresik, nilai baseline tahun 2024 tercatat sebesar 0,725 dan target 2025 sebesar 0,745. Nilai tersebut merepresentasikan kondisi awal tingkat keterhubungan wilayah yang diukur berdasarkan ketersediaan dan kualitas jaringan infrastruktur, tingkat aksesibilitas antar pusat kegiatan, serta keterpaduan sistem pelayanan wilayah.

Capaian nilai tersebut menunjukkan bahwa konektivitas wilayah di Kabupaten Gresik berada pada kondisi yang cukup berkembang, namun masih memerlukan peningkatan untuk mencapai tingkat keterhubungan yang lebih optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain belum meratanya kualitas infrastruktur jalan penghubung antarwilayah, keterbatasan integrasi jaringan transportasi, serta belum sepenuhnya terhubungnya kawasan pertumbuhan dengan wilayah penyangga dan kawasan perdesaan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan konektivitas antar pusat pertumbuhan, serta pengembangan sistem transportasi wilayah yang lebih terpadu.

3.4.2.16 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Indeks Risiko Bencana dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan tingkat kerentanan di suatu kabupaten/kota dari waktu ke waktu. IRB dihitung berdasarkan tiga komponen utama, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah.Hasil perhitungan IRB dikelompokkan dalam tiga kategori: tinggi (>144), sedang (13-144), dan rendah (<13).

Berdasarkan capaian Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Gresik dalam beberapa tahun terakhir, terdapat trend penurunan yang cukup baik. Berikut merupakan tabel capaian Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.

Tabel 3. 30 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Indeks Risiko Bencana (Indeks)	96,50	94,89	91,42	105,07	135,90 - 132,58	119,66

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB), Capaian kinerja pengurangan risiko bencana menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun tetap terkendali. Pada tahun 2024, realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB) tercatat sebesar 105,07. Memasuki tahun 2025, angka realisasi mengalami kenaikan menjadi 119,66. Meskipun terjadi kenaikan angka, realisasi tahun 2025 tersebut nyatanya masih jauh (lebih baik) dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2025, yaitu pada rentang 132,58 hingga 135,90. Kenaikan angka ini mengindikasikan perlunya perbaikan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana, baik melalui upaya mitigasi struktural maupun non-struktural, peningkatan kesiapsiagaan, serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana. Selain itu kenaikan ini menunjukkan pula meningkatnya tingkat risiko bencana, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- meningkatnya potensi ancaman bencana,
- bertambahnya tingkat kerentanan wilayah dan masyarakat
- serta belum optimalnya kapasitas penanggulangan bencana dalam menghadapi dinamika risiko terbaru.

Kondisi tersebut menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap komponen pembentuk IRB (ancaman, kerentanan, dan kapasitas), memperkuat program pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, serta meningkatkan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dalam penanggulangan bencana.

Secara keseluruhan, capaian IRB menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana telah memberikan hasil positif hingga tahun 2024, namun memerlukan penguatan kebijakan dan program yang lebih adaptif pada tahun 2025 guna menekan kembali tingkat risiko bencana di daerah.

3.4.2.17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH merupakan konsep *Environmental Performance Index* (EPI) dengan kriteria kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan untuk memberikan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam

periode tertentu serta merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup suatu wilayah. IKLH disusun dari beberapa komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Pada tahun 2021 terdapat evaluasi terhadap target capaian IKLH provinsi, kabupaten dan kota melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, didalamnya memuat pedoman tentang muatan RPJMD terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dijadikan pedoman dalam penetapan target IKLH pada RPJMD Kabupaten Gresik serta terdapat pembaharuan dalam perhitungan IKLH berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang didalamnya memuat pengaturan pada aspek pemilihan lokasi pemantauan, metode pengambilan data, dan perhitungan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gresik dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan tren peningkatan bertahap. Berikut capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024.

Tabel 3. 31 Capaian Indeks Kualitas Lingkunga Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	
						Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	58,34	58,15	58,51	60,12	65,09	65,81

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, 2025

Berdasarkan Tabel di atas, pada Tahun 2024 Nilai IKLH mencapai nilai sebesar 60.12, nilai tersebut berada pada kategori **Sedang** sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta menunjukkan kenaikan signifikan dibanding capaian Tahun 2023 yang berada pada Nilai 58.51. Peningkatan capaian ini disebabkan oleh membaiknya kualitas udara dan lahan sebagai hasil dari penguatan pengendalian pencemaran, pengawasan kegiatan usaha, serta upaya rehabilitasi dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sebagai upaya peningkatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu perlunya menggeser fokus kebijakan dari sekadar pengendalian pencemaran menuju intervensi struktural, khususnya pada peningkatan infrastruktur pengelolaan air limbah, penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan dan baku mutu lingkungan. Dengan penguatan intervensi pada komponen yang menjadi penyumbang utama ketertinggalan capaian, diharapkan peningkatan IKLH pada periode berikutnya dapat berlangsung lebih cepat dan selaras dengan target pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3.4.2.18 Indeks Pemerintah Digital

Indeks Pemerintahan Digital merupakan indikator nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pengukuran Indeks Pemerintahan Digital bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, indeks ini juga menjadi instrumen pembinaan pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Penilaian indeks mencakup beberapa domain utama, meliputi kebijakan, tata kelola, manajemen, serta layanan pemerintahan berbasis elektronik. Pada aspek kebijakan, penilaian difokuskan pada ketersediaan regulasi, strategi, dan arah kebijakan pengembangan pemerintahan digital. Pada aspek tata kelola, penilaian mencakup integrasi proses bisnis, arsitektur SPBE, dan koordinasi antar perangkat daerah. Sementara itu, aspek manajemen menilai pengelolaan teknologi informasi, keamanan informasi, manajemen data, serta manajemen risiko. Adapun pada aspek layanan, penilaian diarahkan pada kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sejalan dengan kebijakan transformasi digital nasional, Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dari pengukuran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Indeks Pemerintahan Digital. Pada masa transisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik masih menggunakan metodologi dan instrumen evaluasi SPBE sebagai dasar pengukuran kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, capaian yang dilaporkan pada Tahun 2025 masih merujuk pada hasil evaluasi SPBE, sementara penyempurnaan kerangka pengukuran Indeks Pemerintahan Digital sedang dipersiapkan untuk diterapkan secara penuh pada periode selanjutnya.

Pada Tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak melaksanakan evaluasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan penilaian mandiri (*self-*

assessment) terhadap penerapan SPBE sebagai bagian dari upaya pemantauan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan transformasi digital pemerintahan daerah. Penilaian mandiri tersebut dilakukan dengan tetap mengacu pada kerangka evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB, yang mencakup domain kebijakan, tata kelola, manajemen, serta layanan SPBE. Hasil penilaian mandiri menunjukkan bahwa Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 4,65 dengan predikat “Memuaskan”. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik telah berjalan dengan sangat baik serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital. Berikut ini merupakan capaian Indikator Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik Tahun 2025 :

Tabel 3. 32 Capaian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik (Indeks)	3,31	3,27	4,28	4,32	4,37	4,65 (Memuaskan)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai indeks pada Tahun 2021 tercatat sebesar 3,31, kemudian meningkat menjadi 4,28 pada Tahun 2023 dan 4,32 pada Tahun 2024. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 4,37, sedangkan hasil realisasi penilaian mandiri mencapai 4,65, sehingga melampaui target yang ditetapkan dan memperoleh kategori “Memuaskan”, yang menunjukkan bahwa penerapan SPBE dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan layanan publik berbasis digital di Kabupaten Gresik telah berjalan dengan baik.

Tabel 3. 33 Tabel Domain, Aspek, dan Bobot Penilaian Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

INDEKS SPBE - PEMERINTAH KAB. GRESIK	4,65 (Memuaskan)

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi SPBE Tahun 2025

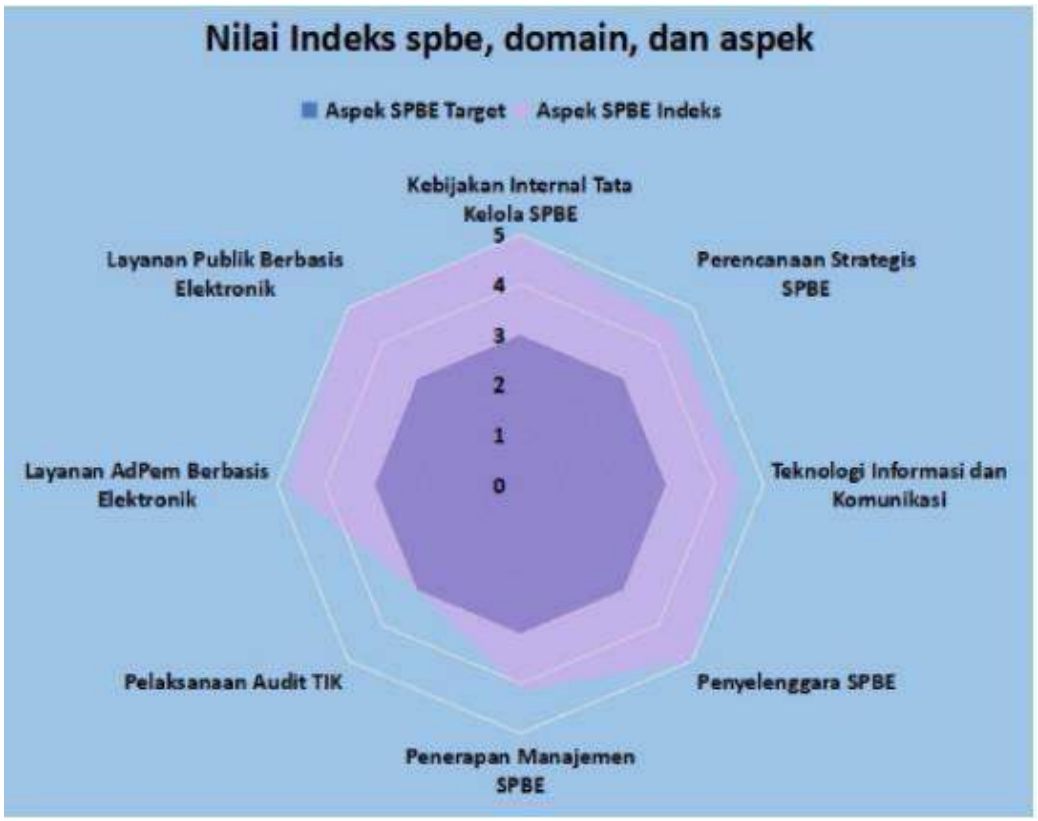

Gambar 3. 2 Gambar Diagram Radar Perbandingan Target dan Capaian Indeks SPBE Berdasarkan Aspek Penilaian Tahun 2025

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi SPBE Tahun 2025

Tabel 3. 34 Tabel Capaian Nilai Indeks SPBE Berdasarkan Domain Tahun 2025

Nama Indeks	Nilai 2025
SPBE	**4,65**
Domain Kebijakan SPBE	5,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*5,00*
Domain Tata kelola SPBE	4,60
Perencanaan Strategis SPBE	*4,50*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*4,50*
Penyelenggara SPBE	*5,00*
Domain Manajemen SPBE	3,82
Penerapan Manajemen SPBE	*4,13*
Audit TIK	*3,00*
Domain Layanan SPBE	4,88
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*4,80*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*5,00*

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi SPBE Tahun 2025

Hasil penilaian mandiri evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik pada beberapa domain penilaian. Domain Tata Kelola SPBE memperoleh nilai 4,60, yang mencerminkan bahwa perencanaan strategis, koordinasi, serta pengelolaan penerapan SPBE telah berjalan secara terarah dan terintegrasi. Pada aspek Perencanaan Strategis SPBE diperoleh nilai 4,50, yang menunjukkan bahwa arah kebijakan dan perencanaan pengembangan SPBE telah mendukung pelaksanaan transformasi digital pemerintahan daerah.

Sementara itu, Domain Manajemen SPBE memperoleh nilai 3,82, yang menggambarkan bahwa pengelolaan sumber daya teknologi informasi, keamanan informasi, serta pengendalian risiko telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Adapun pada Domain Layanan SPBE menunjukkan capaian yang sangat optimal, dengan nilai 4,80 pada Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan 5,00 pada Layanan Publik Berbasis Elektronik, yang menunjukkan bahwa layanan digital yang diberikan kepada masyarakat dan perangkat daerah telah berjalan efektif serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.

3.4.2.19 Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja pada instansi pemerintah yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Implementasi SAKIP bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), melalui penguatan keterkaitan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja. Evaluasi terhadap implementasi SAKIP dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik pada tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, perkembangan capaian nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Gresik dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 34 Tabel Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan Kabupaten Gresik

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	80,86	81,59	81,93	80,6	83,5	77,15

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, capaian nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2025 tercatat sebesar 77,15 dengan predikat “BB” (Sangat Baik). Predikat tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Gresik telah berjalan dengan baik pada sebagian besar unit kerja, yang ditandai dengan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja serta mulai terbangunnya sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai SAKIP Kabupaten Gresik pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 80,60. Penurunan nilai tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan standar evaluasi implementasi SAKIP yang menekankan pada konsistensi antara dokumen perencanaan kinerja, kualitas indikator kinerja, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan, serta penguatan implementasi manajemen kinerja pada seluruh perangkat daerah.

Perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah telah berada pada kategori baik hingga sangat baik. Pada tahun 2021 nilai SAKIP tercatat sebesar 80,86, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 81,59, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 81,93. Selanjutnya pada tahun 2024 nilai SAKIP tercatat sebesar 80,60, dan pada tahun 2025 sebesar 77,15 dengan predikat BB.

Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperkuat implementasi SAKIP, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penyelarasan indikator kinerja antara perangkat daerah dan pemerintah daerah, penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja, serta pemanfaatan sistem informasi manajemen kinerja daerah dalam mendukung pengelolaan kinerja yang lebih efektif dan terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Gresik akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam implementasi SAKIP guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, optimalisasi penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

3.4.2.20 Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi pemerintah. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta dilaksanakan secara objektif, adil, dan tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penilaian Sistem Merit dilakukan berdasarkan delapan aspek utama, yaitu: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian/penghargaan/disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi.

Metodologi penilaian mandiri sebelumnya mengacu pada Peraturan Komisi ASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit. Dalam implementasinya, instansi pemerintah melakukan penilaian mandiri melalui aplikasi SIPINTER dengan mengunggah dokumen eviden sesuai sub-indikator yang ditetapkan. Sejalan dengan penataan regulasi dan kelembagaan, pelaksanaan penilaian dan verifikasi penerapan Sistem Merit saat ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 511 Tahun 2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan bahwa penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik berada pada kategori Baik, dengan Nilai Sistem Merit sebesar 310,5 dan Indeks sebesar 0,76 (nol koma tujuh enam) sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3. 35 Capaian Indikator Indeks Sistem Merit Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Indeks Sistem Merit (Indeks)	-	253	300,5	310,5	315	310,5

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2025

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil melampaui target yang telah ditetapkan untuk Indeks Sistem Merit, dengan realisasi mencapai 310,5, melebihi target sebesar 305. Pencapaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dan konsisten dalam menerapkan prinsip merit dalam pengelolaan ASN, yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Pada Tahun 2025 tidak ada penilaian sistem merit dari BKN, sehingga realisasi tahun 2024 menjadi acuan realisasi tahun 2025. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Gresik tetap berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan, khususnya dalam penguatan sistem talenta (talent management), peningkatan kualitas penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan predikat Indeks Sistem Merit pada tahun-tahun mendatang.

Teknis Pelaksanaan penilaian Sistem Merit saat ini masih menunggu kebijakan BKN. Hal ini disebabkan adanya perubahan dalam kebijakan penilaian Indeks Sistem Merit di Indonesia. Perubahan ini secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Peraturan baru ini mencabut dan menggantikan aturan lama (PermenPANRB No. 40 Tahun 2018) agar lebih relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

3.4.2.21 Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perkembangan Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kebelakang menunjukkan tren peningkatan sebagai berikut:

Tabel 3. 36 Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	-	-	-	4,16	2,25	4,35

Sumber : Kementerian PAN-RB, 2025

Capaian peningkatan Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan berbagai langkah strategis dalam reformasi pelayanan publik, yang meliputi penguatan kualitas sumber daya manusia, penyempurnaan mekanisme pelayanan, peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta konsistensi dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Peningkatan tersebut juga menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik secara berkelanjutan. Melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan internal, serta pengembangan inovasi pelayanan publik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang berada pada angka 4,75, capaian Kabupaten Gresik masih berada sedikit di bawah rata-rata provinsi, dengan selisih sebesar 0,40 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gresik sudah sangat baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat menyamai bahkan melampaui standar pelayanan publik di tingkat provinsi. Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Gresik tersebut diperoleh berdasarkan hasil sampling kualitas pelayanan pada beberapa perangkat daerah strategis, yaitu RSUD Ibnu Sina, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pendidikan. Ketiga unit pelayanan ini merepresentasikan sektor layanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga hasil pengukuran mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas layanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan pendidikan. Adapun faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks pelayanan publik antara lain :

1. Melakukan reviu standar pelayanan, menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat dan menjalankan maklumat pelayanan.
2. Otimalisasi peningkatan profesionalisme SDM dengan cara memberikan motivasi kerja seperti *capacity building*, bimbingan teknis dan pemberian penghargaan bagi petugas layanan yang berprestasi

3. Perbaikan sarana prasarana layanan yang menunjang kelompok rentan
4. Setiap layanan di publikasikan melalui SIPPN
5. Penanganan pengaduan yang kurang dari 1x24 jam
6. Pengembangan inovasi guna menunjang kemudahan layanan
7. Penyelenggaraan penilaian mandiri pada seluruh perangkat daerah dan UPT untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

3.4.2.22 Indeks Kemiskinan Multidimensi

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) adalah ukuran kemiskinan yang tidak hanya melihat dari sisi pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IKM memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Kemiskinan multidimensi mengakui bahwa kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai kekurangan dalam aspek kehidupan lainnya yang penting untuk kesejahteraan. Indikator yang digunakan dalam IKM mencerminkan berbagai dimensi kemiskinan, seperti:

a. Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan, status gizi, dan angka kematian anak;
b. Pendidikan: Akses ke pendidikan dasar dan menengah, lama sekolah, dan partisipasi sekolah; dan
c. Standar Hidup: Akses ke air bersih, sanitasi layak, perumahan yang layak, energi untuk memasak, dan kepemilikan aset.

IKM memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemiskinan dibandingkan dengan hanya melihat kemiskinan berdasarkan pendapatan (kemiskinan moneter). IKM membantu pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi berbagai aspek kemiskinan. IKM memungkinkan perbandingan kemiskinan antar daerah, kelompok sosial, dan antar waktu, sehingga dapat mengidentifikasi area yang paling membutuhkan intervensi. IKM dihitung dengan menggabungkan prevalensi (persentase orang yang mengalami kemiskinan multidimensi) dan intensitas (tingkat keparahan kemiskinan). Rumus umum untuk IKM adalah: MPI = H x A, di mana H adalah insidensi (prevalensi) kemiskinan, dan A adalah intensitas kemiskinan. Nilai IKM berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Indikator ini merupakan Indikator baru sehingga belum ada perhitungan capaian di 3 (tiga) tahun sebelumnya.

Tabel 3. 37 Capaian Indikator Indeks Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun		
	2024	2025	
		Target	Realisasi
Indeks Kemiskinan Multidimensi (Indeks)	48,87	48,00	43,79

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Indeks Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Gresik mengalami penurunan yang signifikan sebesar 5,08% (indikator negatif), yang mana merupakan capaian yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari berbagai dimensi kehidupan lainnya seperti akses pendidikan, kesehatan, serta standar hidup layak. Penurunan tersebut mencerminkan bahwa berbagai program dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat deprivasi yang dialami oleh masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kinerja pembangunan dalam menurunkan kemiskinan multidimensi memerlukan upaya yang terintegrasi antar sektor, khususnya dalam pemenuhan akses layanan dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan perlindungan sosial. Sinergi kebijakan dan program pembangunan diharapkan mampu menekan tingkat deprivasi masyarakat secara berkelanjutan sehingga kualitas kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara lebih merata.

3.4.2.23 Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin

Persentase partisipasi perlindungan sosial bagi keluarga miskin adalah indikator penting untuk menilai efektivitas program dan memastikan bahwa keluarga miskin mendapatkan manfaat yang mereka butuhkan. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rasio partisipasi dan penggunaan data yang akurat dapat membantu perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan. Faktor yang mempengaruhi rasio partisipasi adalah sebagaimana berikut:

a. Program Perlindungan Sosial: Jenis program yang tersedia, seperti bantuan sosial tunai (Program Keluarga Harapan, PKH), bantuan pangan, subsidi beras, dan jaminan kesehatan, serta bagaimana program tersebut dirancang dan diimplementasikan;
b. Akses: Kemudahan akses keluarga miskin terhadap program, termasuk informasi, persyaratan, dan proses pendaftaran;

c. Kondisi Geografis: Wilayah tempat tinggal keluarga miskin dapat mempengaruhi akses mereka terhadap program, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau;
d. Kondisi Sosial Ekonomi: Tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin juga dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam program; dan
e. Kualitas Data: Akurasi dan kelengkapan data mengenai keluarga miskin dapat mempengaruhi identifikasi penerima manfaat dan memastikan bahwa program tepat sasaran.

Pentingnya persentase partisipasi adalah untuk:

a. Mengukur Efektivitas: Persentase partisipasi yang rendah dapat menunjukkan bahwa program perlindungan sosial belum efektif dalam mencapai target sasaran dan memerlukan evaluasi serta perbaikan;
b. Identifikasi Kesenjangan: Persentase partisipasi yang berbeda antar kelompok keluarga miskin dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam akses dan manfaat program; dan
c. Penyusunan Kebijakan: Data persentase partisipasi dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kerentanan.

Persentase Perlindungan Sosial Warga Miskin merupakan jumlah penerima bantuan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang mensejahterakan dibanding dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik yang masuk DTKS.

Tabel 3. 38 Capaian Indikator Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Gresik

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Miskin	89,97	90,66	111,12	118,96	80-95	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Persentase partisipasi perlindungan sosial bagi keluarga miskin di Kabupaten Gresik selama periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 capaian sebesar 89,97%, meningkat menjadi 90,66% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi lonjakan capaian menjadi 111,12%, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 118,96%. Capaian yang melebihi 100%

tersebut dikarenakan satu orang warga miskin bisa mendapatkan lebih dari satu layanan jaminan sosial (numerator) sementara yang menjadi pembandingnya (denominator) adalah seluruh warga miskin yang ada di DTKS. Contohnya satu orang Penyandang Disabilitas miskin bisa mendapatkan jaminan sosial berupa PBI-JK (BPJS), BLT dan alat bantu bagi disabilitas. Pada tahun 2025, target indikator ditetapkan pada rentang 80–95%, dengan realisasi sebesar 100%. Dengan demikian, capaian tahun 2025 telah melampaui batas atas target yang ditetapkan, yang menunjukkan komitmen dan kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memastikan keluarga miskin memperoleh akses terhadap program perlindungan sosial.

Secara umum, capaian ini mencerminkan semakin luasnya jangkauan perlindungan sosial serta meningkatnya efektivitas koordinasi dan validasi data penerima manfaat. Ke depan, diperlukan penguatan akurasi basis data dan pengawasan penyaluran bantuan agar program perlindungan sosial tetap tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik.

3.4.2.24 Rasio Gini

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah adalah menggunakan Rasio gini. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin rendah, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Dengan demikian, indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai pemerataan hasil pembangunan di masyarakat. Perhitungan Rasio Gini biasanya didasarkan pada pendekatan pengeluaran, dengan asumsi bahwa pengeluaran yang lebih besar mencerminkan pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan yang merata diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan sosial masyarakat, mencerminkan tercapainya pembangunan yang lebih inklusif dan adil.

Perkembangan Rasio Gini mencerminkan dinamika distribusi pendapatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, tingkat pendidikan, serta akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Perbaikan nilai Rasio Gini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di masyarakat cenderung lebih merata, yang mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat secara lebih seimbang.

Tabel 3. 39 Capaian Indikator Rasio Gini Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
Rasio Gini (Indeks)	0,313	0,371	0,330	0,33	0,311 - 0,351	0,327

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Perkembangan realisasi Rasio Gini Kabupaten Gresik mengalami trend fluktuatif selama 5 (lima) tahun kebelakang. Terjadi kontraksi pada Tahun 2022 menjadi 0,371 poin turun sebesar 0,058 poin dibandingkan dengan Tahun 2021. Hal ini dikarenakan dampak dari pasca Covid-19, namun Rasio Gini menunjukkan trend yang menurun hingga Tahun 2025. Pada Tahun 2025 realisasi Rasio Gini Kabupaten Gresik sedikit mengalami penurunan sebesar 0,005 poin dibandingkan dengan Tahun 2024, namun dapat melampaui target yang ditetapkan sesuai dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 40 Capaian Indikator Rasio Gini Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

No	Rasio Gini	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Gresik	0,313	0,371	0,330	0,322	0,327
2	Provinsi Jawa Timur	0,374	0,371	0,387	0,372	0,369
3	Nasional	0,384	0,384	0,388	0,379	0,381

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, dan BPS, Profil Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia, berbagai tahun publikasi, 2025

Berdasarkan data pada tabel, perkembangan Rasio Gini Kabupaten Gresik selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif fluktuatif namun cenderung membaik dalam beberapa tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional, Rasio Gini Kabupaten Gresik secara umum berada pada tingkat yang lebih rendah. Pada Tahun 2025 misalnya, Rasio Gini Kabupaten Gresik sebesar 0,327 lebih rendah dibandingkan Rasio Gini Provinsi Jawa Timur sebesar 0,369 maupun nasional sebesar 0,381. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Gresik relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gresik relatif terkendali dan masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Capaian tersebut juga mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan kesempatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial telah memberikan kontribusi dalam menjaga pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Ke depan, upaya pengendalian ketimpangan pendapatan tetap perlu menjadi perhatian melalui penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses masyarakat terhadap peluang usaha dan lapangan kerja sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.4.2.25 Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal merupakan indikator yang menggambarkan proporsi tenaga kerja lokal yang terserap dalam kegiatan ekonomi dan dunia usaha di suatu daerah, khususnya pada sektor-sektor yang berkembang di wilayah tersebut. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai sejauh mana pembangunan ekonomi daerah mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal melalui penciptaan kesempatan kerja. Peningkatan rasio penyerapan tenaga kerja lokal menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang berkembang di daerah mampu diakses dan dimanfaatkan oleh angkatan kerja setempat. Capaian rasio penyerapan tenaga kerja lokal Tahun 2025 mencerminkan hasil dari berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan hubungan antara dunia pendidikan, pelatihan, dan dunia usaha.

Tabel 3. 41 Capaian Indikator Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Gresik Tahun 2025

Indikator	Tahun		
	2024	2025	
		Target	Realisasi
Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal (Persen)	13,52	25-35	30,62

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, 2025

Pada Tahun 2025, capaian Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 30,62 persen. Capaian ini menggambarkan bahwa sebagian tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Gresik berasal dari tenaga kerja lokal. Nilai rasio tersebut juga menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan akses masyarakat lokal terhadap pasar kerja terus dilakukan melalui berbagai program peningkatan kompetensi dan fasilitasi ketenagakerjaan. Peningkatan rasio penyerapan tenaga kerja lokal dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, diantaranya:

1. Kuantitas Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja
   Kuantitas program pelatihan kerja bersertifikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga pelatihan kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal. Program pelatihan yang terstandar dan bersertifikasi dapat meningkatkan pengakuan kompetensi tenaga kerja sehingga lebih mudah diterima oleh dunia usaha.
2. Tingkat Kesesuaian Kompetensi Tenaga Kerja Lokal Dengan Kebutuhan Industri
   Tingkat kesesuaian kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri juga menjadi faktor penentu dalam penyerapan tenaga kerja. Kabupaten Gresik sebagai wilayah dengan basis kegiatan industri pengolahan dan kawasan industri membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut. Semakin tinggi tingkat kesesuaian antara kompetensi

tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, maka semakin besar peluang tenaga kerja lokal untuk terserap dalam kegiatan ekonomi daerah.

3. Preferensi Rekrutmen Dunia Usaha Terhadap Tenaga Kerja Lokal
   Preferensi rekrutmen dunia usaha terhadap tenaga kerja lokal turut mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja daerah. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong kemitraan antara dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta lembaga penempatan tenaga kerja dapat memperkuat mekanisme rekrutmen yang lebih berpihak pada tenaga kerja lokal tanpa mengabaikan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh industri.

3.5 INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

3.5.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar

Fokus layanan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan dasar tersebut meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta urusan sosial. Penyelenggaraan pelayanan dasar ini menjadi prioritas dalam pembangunan daerah karena berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan layanan pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar diarahkan untuk meningkatkan akses, kualitas, serta pemerataan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara layanan, serta penguatan sistem tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan dasar yang layak, merata, dan berkeadilan.

3.5.1.1 Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan pelayanan dasar yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD dan SMP), Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan, Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kewenangan, Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Tabel 3. 42 Capaian Indikator Sasaran Urusan Pendidikan Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (PAUD,SD, SMP)	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD (%)	Persen	77,79	80,76	77,79	80,76
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP (%)	Persen	99,29	99,4	99,29	99,4
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%)	Persen	24,54	29,51	24,54	29,51
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Persen	10,45	11,22	10,45	12,77
Meningkatkan keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim inklusivitas SD (%)	Persen	78,00	78,90	78,00	78,9
	Iklim inklusivitas SMP (%)	Persen	73,00	74,50	73,00	74,5
Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif di sektor pendidikan	Iklim keamanan SD (%)	Persen	62,30	64,80	62,30	64,8
	Iklim keamanan SMP (%)	Persen	61,11	63,51	61,11	63,51
Menurunkan angka putus sekolah untuk memastikan kelanjutan	Angka Putus Sekolah (%)	Persen	1,44	1,42	1,44	1,41

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
pendidikan anak hingga selesai jenjang dasar						
Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	Persen	91,51	94,28	91,51	94,28
	"Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP" (%)	Persen	98,78	98,8	98,78	98,83
Meningkatkan kualitas,akuntabilitas , dan inklusifitas pengendalian dan perizinan pendidikan	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	Persen	91,36	91,77	91,36	91,77
	Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP (%)	Persen	98,78	98,8	98,78	98,83
	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP (%)	Persen	98,78	98,8	98,78	98,83
	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar	Persen	98,78	98,8	98,78	98,83

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
	Penilaian sesuai dengan SNP (%)					
	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP (%)	Persen	100	100	100	100
Meningkatkan Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan Dasar (SD,SMP)	Rata-rata Kemampuan Literasi (%)	Persen	75,62	77,42	75,62	77,42
	Rata-rata Kemampuan Numerasi (%)	Persen	64,66	66,86	64,66	66,86
Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim Kebinekaan SD (%)	Persen	75,57	76,57	75,57	76,57
	Iklim kebinekaan SMP (%)	Persen	72,67	73,67	72,67	73,67
Meningkatkan Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (SD,SMP) di wilayah rentan	Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan (%)	Persen	93,07	93,09	93,07	93,84

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan data capaian indikator sasaran Tahun 2024 dan 2025, secara umum penyelenggaraan urusan pendidikan menunjukkan kinerja yang baik dan cenderung meningkat, dengan sebagian besar indikator mencapai atau melampaui target yang ditetapkan. Upaya peningkatan akses pendidikan menunjukkan capaian yang optimal. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD usia 5–6 tahun meningkat dari

77,79% menjadi 80,76% dan terealisasi sesuai target. APS usia 7–15 tahun mencapai 99,40%, yang menunjukkan hampir seluruh anak usia wajib belajar telah memperoleh layanan pendidikan dasar. APS usia 7–18 tahun meningkat dari 24,54% menjadi 29,51%.Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA/sederajat meningkat dari 10,45% menjadi 12,77%, melampaui target sebesar 11,22%. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kebijakan perluasan akses pendidikan serta penguatan program wajib belajar.

Lingkungan pendidikan yang inklusif dan aman menjadi fokus penguatan. Iklim inklusivitas SD meningkat menjadi 78,90% dan SMP menjadi 74,50%. Iklim keamanan SD meningkat menjadi 64,80% dan SMP menjadi 63,51%. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan satuan pendidikan yang ramah anak, inklusif, serta mendukung keberagaman.

Angka Putus Sekolah berhasil ditekan dari 1,44% menjadi 1,41%, melampaui target sebesar 1,42%. Penurunan ini didukung oleh optimalisasi bantuan pendidikan, penguatan pengawasan partisipasi peserta didik, serta peningkatan koordinasi dengan orang tua dan masyarakat. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan mengalami peningkatan yang signifikan. Proporsi Guru PAUD berkualifikasi S1/D4 meningkat dari 91,51% menjadi 94,28%. Kesesuaian tenaga pendidik dengan Standar Nasional Pendidikan mencapai 98,83%. Hal ini menunjukkan peningkatan profesionalisme guru serta komitmen dalam pemenuhan standar kompetensi.

Upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan menunjukkan hasil optimal. Proporsi satuan PAUD terakreditasi minimal B meningkat menjadi 91,77%. Kesesuaian Standar Isi, Proses, dan Penilaian pada SD dan SMP mencapai 98,83%. Standar Kelulusan mencapai 100%. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan mutu tata kelola dan kualitas layanan pendidikan.

Kemampuan dasar peserta didik menunjukkan tren peningkatan. Rata-rata kemampuan literasi meningkat dari 75,62% menjadi 77,42%. Rata-rata kemampuan numerasi meningkat dari 64,66% menjadi 66,86%. Meskipun menunjukkan progres positif, penguatan numerasi masih menjadi fokus peningkatan ke depan.

Indikator kebinekaan dan kesetaraan gender menunjukkan perbaikan, Iklim kebinekaan SD meningkat menjadi 76,57% dan SMP menjadi 73,67%. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di wilayah rentan meningkat menjadi 93,84%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan setara bagi seluruh kelompok masyarakat.

Secara keseluruhan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024–2025 menunjukkan kinerja yang efektif dan progresif. Mayoritas indikator mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. Ke depan, diperlukan konsistensi kebijakan, penguatan pemerataan mutu, serta peningkatan kualitas pembelajaran guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

3.5.1.2 Kesehatan

Penyelenggaraan urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Ibnu Sina, RSUD Umar Mas’ud dan RSUD Gresik Sehati sebagai bagian

dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, salah satunya adalah bidang kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Sebagai urusan wajib, penyelenggaraan kesehatan tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif, tetapi juga mencakup upaya promotif dan preventif, seperti peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan cakupan imunisasi, serta perluasan kepesertaan jaminan kesehatan. Pemerintah daerah juga berkewajiban memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang kompeten, serta dukungan pembiayaan yang memadai.

Tabel 3. 43 Capaian Indikator Sasaran Urusan Kesehatan Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan individu dan komunitas melalui peningkatan kapasitas operasional sistem kesehatan daerah dengan optimalisasi sumber daya kesehatan dalam mendukung pemberdayaan dan pelayanan	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Per 1000)	Per 1000	4,29	4,29	4,25	7,40
	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	77,59	77,59	76.59-86.99	70,21
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	Persen	100	100	95	93,04
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen	10	8,14	11,03	8,07

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
kesehatan yang paripurna	Cakupan ODHIV on ART (%)	Persen	-	70	72	70
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	-	265	250	238,87
	Cakupan Deteksi Dini Diabetes Melitus (%)	Persen		103,3	60	104,3
	Cakupan Deteksi Dini Hipertensi (%)	Persen	-	93,4	70	96,1
	Cakupan Universal Health Coverage (%)	Persen	100	100	100	100
	Net Death Rate (NDR) (%)	Persen	49,09	39	37	35
	Gross Death Rate (GDR) (%)	Persen	83,44	66	62	60
	Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif (%)	Persen	-	91,9	92,4	97,56
	Persentase Desa/Kelurahan STBM (%)	Persen	-	21,91	25	25

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dengan Nilai SKM >=80% (%)	Persen	100	100	100	100
Meningkatkan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Rasio Puskesmas Ramah Anak (Rasio)	Rasio	-	18:32	26:32	27:32
Perlindungan Sosial Inklusi dan Pemberdayaan Kelompok Rentan	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan (%)	Persen	-	100	100	100
Mengoptimalkan Pendanaan Infrastruktur Sektoral	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Kesehatan (%)	Persen	-	100	100	100
Meningkatkan Akses Keluarga Miskin Terhadap Layanan Dasar Kesehatan	Persentase Kematian Ibu dari Keluarga Miskin (%)	Persen	-	0,130	0,125	0,10
	Persentase Kematian Bayi dari Keluarga Miskin (%)	Persen	-	0,698	0,680	0,680
	Angka Kasus Stunting dari Keluarga Miskin (Angka)	Angka	-	317	317	317

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Partisipasi Perlindungan Sosial dan Inklusi Sosial	Persentase Keluarga Miskin yang telah dijamin dalam UHC dengan status PBIJK dan PBPU BP Pemda (%)	Persen	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2025

Sepanjang tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Berbagai capaian penting ini menjadi bukti nyata dari upaya pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dan mendukung pencapaian pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

1. Penguatan Layanan Primer – Puskesmas Rawat Inap
   Salah satu pencapaian penting adalah perluasan layanan rawat inap di puskesmas. Pada tanggal 2 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Gresik resmi meluncurkan 8 Puskesmas dengan fasilitas rawat inap baru, sehingga total 29 dari 32 puskesmas kini sudah mampu melayani pasien rawat inap di tingkat primer. Ini mencerminkan langkah signifikan dalam pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
2. Capaian Kepesertaan JKN Melampaui Target
   Prestasi lainnya yang patut dicatat adalah keberhasilan Kabupaten Gresik mendapatkan UHC Award tingkat utama pada tahun 2024. Penghargaan ini diraih karena capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 101,9%, menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Kabupaten Gresik terlindungi oleh sistem pembiayaan kesehatan nasional.
3. Perbaikan Indikator Kesehatan Masyarakat
   Menurut data indikator kesehatan, terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang menunjukkan tren perbaikan kondisi kesehatan secara umum di Kabupaten Gresik. Meskipun angka ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, peningkatan IPKM mencerminkan efektivitas kebijakan dan program kesehatan yang dilaksanakan.
4. Penurunan Kasus HIV/AIDS Baru
   Dinas Kesehatan Gresik juga mencatat penurunan jumlah kasus baru HIV/AIDS dari tahun 2024 ke 2025. Pada tahun 2025 terdapat 197 kasus baru HIV, menurun

dibandingkan dengan 298 kasus di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan upaya penguatan deteksi dini, edukasi kesehatan, dan pencegahan penyakit menular yang terus dijalankan.

5. Pemberdayaan Kesehatan Remaja dan Mental Health Awareness
   Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan bersama stakeholder lainnya menyelenggarakan Health Festival yang menekankan pentingnya kesehatan mental dan kesiapan generasi muda menghadapi tantangan kehidupan modern. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan kesehatan gratis, layanan konseling psikologis, dan edukasi gizi untuk remaja dan anak muda sebagai bagian dari promosi kesehatan preventif.
6. Peningkatan Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik
   Selain capaian teknis kesehatan, Kabupaten Gresik juga meraih predikat “Kualitas Tertinggi” kategori A pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024. Prestasi ini mencerminkan tingginya standar layanan publik, termasuk sektor kesehatan, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

3.5.1.3 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan penataan ruang yang berkelanjutan, merata, serta berwawasan lingkungan. Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menunjukkan tren yang positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya kondisi kemantapan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, kapasitas daya tampung waduk, penanggulangan banjir kali lamong, serta meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Untuk memperjelas uraian di atas, data pendukung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 44 Capaian Sasaran Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan (%)	Persen	-	73	72,88	69,29

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	Persen	49.27	50,47	49,85	51.03
	Persentase Kapasitas Daya Tampung Air Waduk Kabupaten (%)	Persen	65.73	66,37	65,86	66.38
	Persentase Realiasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong (%)	Persen	-	9,82	9,82	12.95
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	Persen	76.20	70,94	70,74	71.22
	Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa (%)	Persen	-	69,48	69,86	69.88
Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (%)	Persen	-	3,33	1,34	3.37

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2025

Kinerja pembangunan pada bidang jalan difokuskan pada peningkatan kualitas kemantapan jalan kabupaten serta pemeliharaan infrastruktur eksisting. Capaian persentase kemantapan jalan kabupaten tercatat sebesar 71,22 %, yang menunjukkan peningkatan kondisi jalan kabupaten dalam mendukung mobilitas orang dan barang agar memenuhi standar pelayanan minimum dan mendukung pemerataan pembangunan wilayah. Sedangkan dalam rangka mendukung ketahanan sumber daya air serta keselamatan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, waduk, dan sistem penanggulangan banjir. Capaian persentase panjang jaringan irigasi Kabupaten Gresik dalam kondisi baik tercatat sebesar 51,03 %, yang menunjukkan keberlanjutan upaya pemeliharaan dan peningkatan fungsi irigasi bagi sektor pertanian.

Selanjutnya, persentase kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten mencapai 66,38 %, yang mencerminkan peningkatan kapasitas penyimpanan air guna mendukung kebutuhan air baku, irigasi, dan pengendalian banjir. Selain itu, pelaksanaan penanggulangan banjir Kali Lamong dilaksanakan melalui normalisasi sungai, pembangunan dan perencanaan kolam retarding basin, serta pengadaan lahan, yang secara bertahap memberikan kontribusi terhadap pengurangan risiko banjir.

Pada aspek penataan ruang, kinerja diukur melalui persentase pemanfaatan ruang, yang menunjukkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan tata ruang daerah. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kinerja ekonomi daerah secara berkelanjutan.

3.5.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh hunian yang layak, lingkungan permukiman yang sehat, serta akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada permasalahan utama berupa keberadaan kawasan permukiman dengan kondisi lingkungan tempat tinggal yang belum memenuhi standar kelayakan, serta keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung permukiman.

Tabel 3. 45 Capaian Indikator Sasaran Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Persen	23,41	23,41	23,41	24,22
Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung dan lingkungannya	Persentase penerbitan SPPST Bangunan Gedung (%)	Persen	56,98	50,11	56,98	57,81
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur PSU Perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	Persentase PSU Perumahan dan permukiman tertangani (%)	Persen	0,06	0,06	0,06	2.14

Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya kualitas infrastruktur sistem drainase permukiman dalam kondisi baik	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik (%)	Persen	56,96	64,13	56,96	64,13
Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan melalui Penyediaan Hunian Layak dan Air Minum yang Merata bagi Seluruh Rumah Tangga.	Persentase Capaian Penurunan Backlog Perumahan (%)	Persen	26,05	7	26,05	16,60
	Persentase korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi yang mendapatkan hunian layak dan aman (%)	Persen	100	100	100	100
	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (%)	Persen	11,32	0,01	11,32	0.6
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	82,4	82,4	82,4	86,24
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen	78,81	78,81	78,81	40,24

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Sebagai langkah awal dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, Pemerintah Kabupaten Gresik berfokus pada peningkatan akses sanitasi aman bagi masyarakat. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, tidak mencemari lingkungan, serta terhubung dengan sistem pengelolaan air limbah yang aman, seperti septic tank yang disedot secara berkala. Berdasarkan capaian kinerja, realisasi akses sanitasi aman pada tahun 2025 mencapai 24,22%, sedikit melampaui target sebesar 23,41%, yang menunjukkan adanya peningkatan pelayanan sanitasi dasar bagi masyarakat.

Seiring dengan peningkatan kualitas sanitasi, upaya perbaikan lingkungan permukiman juga dilakukan melalui peningkatan kualitas penataan bangunan gedung dan lingkungannya. Kualitas penataan ini menggambarkan tingkat pemenuhan bangunan gedung terhadap persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025, realisasi penerbitan SPPST bangunan gedung mencapai 57,81%, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 50,11%, yang mencerminkan meningkatnya kepatuhan bangunan gedung terhadap standar teknis dan administratif.

Selain penataan bangunan, kualitas lingkungan permukiman sangat dipengaruhi oleh kondisi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan. Infrastruktur PSU perumahan dan permukiman mencakup jalan lingkungan, saluran lingkungan, serta fasilitas umum lainnya yang berfungsi mendukung kelayakan hunian. Pada tahun 2025, realisasi kualitas infrastruktur PSU mencapai 2,14%, meningkat dibandingkan target sebesar 0,06%. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan infrastruktur permukiman, meskipun masih diperlukan penguatan dan pemerataan penanganan di seluruh wilayah.

Selanjutnya, untuk mendukung fungsi lingkungan permukiman secara lebih optimal, peningkatan kualitas infrastruktur sistem drainase juga menjadi perhatian utama. Sistem drainase permukiman berperan penting dalam mengalirkan air secara efektif guna mencegah genangan dan banjir. Pada tahun 2025, persentase saluran drainase dalam kondisi baik mencapai 64,13% dan telah memenuhi target yang ditetapkan, yang menunjukkan kinerja pengelolaan drainase lingkungan berjalan dengan baik.

Upaya peningkatan kualitas infrastruktur tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan backlog perumahan, yaitu kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Pada tahun 2025, realisasi penurunan backlog perumahan tercatat sebesar 10,87%, melebihi target 7%. Capaian ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat secara bertahap.

Dalam situasi khusus, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi. Masyarakat dalam kelompok ini diupayakan untuk memperoleh hunian pengganti yang layak dan aman. Pada tahun 2025, realisasi capaian indikator ini mencapai 92%, masih di bawah target 100%. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain keterlambatan distribusi material bangunan akibat kondisi geografis wilayah perbukitan di Kepulauan Bawean, keterbatasan mobilisasi material dari Pulau Jawa, kondisi cuaca ekstrem, serta keterbatasan ketersediaan material bangunan di lapangan.

Di sisi lain, peningkatan kualitas hunian juga dilakukan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh. Penanganan ini meliputi perbaikan infrastruktur dasar,

penataan lingkungan, dan peningkatan kualitas hunian pada kawasan yang sebelumnya tidak layak. Pada tahun 2025, realisasi penanganan kawasan permukiman kumuh mencapai 0,6%, yang menunjukkan bahwa cakupan penanganan telah melampaui target yang ditetapkan.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Hunian yang dimaksud tidak hanya memenuhi standar fisik, tetapi juga dapat dijangkau secara ekonomi serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial. Pada tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 86,24%, melampaui target sebesar 82,4%, yang mencerminkan peningkatan kualitas hunian masyarakat secara umum.

Namun demikian, peningkatan kualitas hunian belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan akses air siap minum perpipaan, khususnya di wilayah perkotaan. Akses air minum perpipaan merupakan layanan dasar yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Pada tahun 2025, realisasi akses air minum perpipaan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 39,39%, masih berada di bawah target 78,81%. Kondisi ini dipengaruhi oleh perlunya koordinasi intensif dengan pengelola jaringan perpipaan eksisting terkait penentuan lokasi pemasangan jaringan baru agar tidak merusak pipa yang sudah ada, serta koordinasi dengan Balai Besar Jalan Nasional dalam pelaksanaan pembangunan SPAM.

3.5.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah antara lain Dinas Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 3. 46 Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Menguatkan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Penangangan Gangguan Tibumtranmas yang Diselesaikan	%	100	100	100	100
	Rasio Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup	Rasio	1:1	1:1	1:1	1.1
Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat	Rasio Linmas terhadap RT	Rasio	1	1,1	1,12	1,12

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Capaian indikator Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas yang Diselesaikan menunjukkan hasil optimal dengan realisasi 100% dari target 100%, yang berarti seluruh gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berhasil diselesaikan sesuai ketentuan. Begitu pula dengan Rasio Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup yang mencapai target 1:1, menandakan setiap pelanggaran yang ditangani telah ditindaklanjuti dan diselesaikan secara proporsional. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan efektivitas penegakan peraturan serta komitmen yang kuat dalam menjaga ketertiban, ketenteraman, dan kepastian hukum di masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2025, dari seluruh jumlah kasus gangguan Tibumtranmas yang tercatat sebanyak 4.896 kejadian, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai standar operasional prosedur. Dan seluruh pelanggaran Perda yang tercatat sebanyak 2.170 kasus telah ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui mekanisme pembinaan, peringatan, penutupam/penyegelan sesuai tingkat pelanggaran.

Realisasi rasio sebesar 1,12 menunjukkan bahwa ketersediaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di setiap Rukun Tetangga (RT) telah memenuhi bahkan sedikit melebihi standar minimal yang

direncanakan. Kondisi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas perlindungan masyarakat di tingkat lingkungan, serta optimalisasi proses rekrutmen, pembinaan, dan penempatan anggota Linmas secara proporsional.

Capaian ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam menjaga ketertiban umum, keamanan

lingkungan, serta dukungan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan penanggulangan bencana di tingkat RT. Ke depan, diperlukan upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas sumber daya Linmas melalui pembinaan berkelanjutan, peningkatan kompetensi, dan penguatan koordinasi dengan perangkat kewilayahan agar rasio yang telah tercapai tetap efektif dan berkelanjutan.

Tabel 3. 47 Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana, mempercepat respons penanganan kebakaran, dan menurunkan kerugian pasca bencana.	Rerata respon time rate penanganan kebakaran	Menit	-	48,83	48,83	48,82

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2025

Capaian indikator Rerata respon time rate penanganan kebakaran tercapai sebesar 48,82 menit dari target 48,83 menit. Target ini mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia, armada, peralatan, cakupan wilayah kerja, serta kondisi infrastruktur. Capaian Rerata Response Time Rate Penanganan Kebakaran jika dibandingkan dengan standar response time penanganan kebakaran di Indonesia mengacu pada waktu tanggap maksimal 15 menit sejak laporan diterima hingga unit pemadam tiba di lokasi kejadian, menunjukkan masih adanya kendala dalam kecepatan respons penanganan kebakaran, yang dapat dipengaruhi oleh faktor jarak tempuh, kondisi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, maupun jumlah personel dan pos layanan yang tersedia. Ke depan, diperlukan evaluasi menyeluruh serta penguatan sistem kesiapsiagaan, penambahan titik layanan, dan optimalisasi.

Tabel 3. 48 Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana	Rasio Desa Tangguh Bencana (Rasio)	Rasio	79,55	0,46	0,40	0,47
	Penurunan kerugian pasca bencana (%)	Persen	0	30 %	30 %	30 %
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana	Rasio	0	0,28	0,28	0,28

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, 2025

Pelaksanaan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebencanaan yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan pada peningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana serta pengurangan kerugian pasca bencana. Capaian kinerja sub urusan ini diukur melalui 3 indikator indikator meliputi Rasio Desa Tangguh Bencana, Persentase penurunan kerugian pasca bencana, serta Rasio Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana.

Pada tahun 2024, realisasi indikator tersebut mencapai 0,40, masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 0,46. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum meratanya pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana, keterbatasan sumber daya pendukung di tingkat desa, serta belum optimalnya integrasi perencanaan kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan desa. Pada tahun 2025, realisasi indikator meningkat menjadi 0,47, melampaui target tahun berjalan, seiring dengan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas aparatur desa, pembinaan relawan kebencanaan, serta peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan bencana Indikator Penurunan Kerugian Pasca Bencana menunjukkan capaian yang sesuai dengan target. Pada tahun 2025, target penurunan kerugian pasca bencana sebesar 30 persen telah tercapai dan konsisten dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Capaian ini didukung oleh peningkatan kecepatan respons penanganan bencana, perbaikan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan kegiatan mitigasi struktural dan nonstruktural yang lebih terarah pada lokasi rawan bencana.

Selanjutnya, indikator Rasio Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing terealisasi sebesar 0,28, sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana, seperti sosialisasi, simulasi kebencanaan, dan pembentukan relawan, telah berjalan secara berkelanjutan. Namun demikian, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, khususnya pada desa dan kelurahan dengan tingkat risiko bencana sedang hingga tinggi.

Secara keseluruhan, kinerja Sub Urusan Kebencanaan pada Urusan menunjukkan tren peningkatan, terutama pada aspek ketangguhan desa dan efektivitas penurunan dampak kerugian pasca bencana. Ke depan, Pemerintah Daerah akan fokus pada pemerataan penguatan Desa Tangguh Bencana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan di tingkat desa, serta penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3.5.1.6 Sosial

Penyelenggaraan urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Urusan Sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, termasuk perlindungan dan penanganan terhadap masyarakat yang mengalami masalah sosial.

Sebagai urusan wajib, penyelenggaraan bidang sosial menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, korban bencana, serta kelompok masyarakat yang mengalami kerentanan sosial lainnya. Pelayanan sosial tidak hanya bersifat responsif terhadap permasalahan, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, guna mencegah munculnya permasalahan sosial baru serta memulihkan keberfungsian sosial individu maupun keluarga.

Pelaksanaan urusan sosial diwujudkan melalui berbagai program, antara lain pemberian bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan korban bencana. Pemerintah daerah juga berperan dalam melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial, penguatan kelembagaan sosial masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, urusan sosial memiliki kontribusi strategis terhadap penurunan angka kemiskinan, pengurangan ketimpangan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan sosial yang optimal akan memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan menciptakan kondisi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tabel 3. 49 Capaian Indikator Sasaran Sosial Tahun 2024-2025

Sasaran	Indikator	Satuan	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan (%)	Persen	-	28	28	28,64
Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral (%)	Persen	-	3	0	0
	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)	Persen		15	16	19,42
	Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)	Persen		18	22	22,64
Mewujudkan pengurangan ketimpangan	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk (%)	Persen		21	20	24,14

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gresik, 2025

Dinas Sosial Kabupaten Gresik secara konsisten telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan strategis yang menyentuh lapisan masyarakat rentan, memperkuat jaring pengaman sosial, serta meningkatkan efektivitas pelayanan sosial di wilayah Kabupaten Gresik. Berbagai capaian ini mencerminkan upaya nyata dalam menjamin kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dinas sebagai pelaksana urusan sosial.

1. Capaian 100% Pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

   Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Sosial berhasil mencapai 100 % pelayanan kepada seluruh kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdaftar. Sebanyak lebih dari 53.750 masyarakat rentan telah menerima berbagai bentuk pelayanan, termasuk bantuan sosial, jaminan kesehatan, santunan, pendampingan, dan rehabilitasi sosial. Ini mencakup kelompok seperti anak jalanan, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, korban bencana sosial, dan lainnya — menunjukkan bahwa pelayanan sosial dilaksanakan secara komprehensif dan menyentuh seluruh segmen masyarakat yang membutuhkan.

2. Penguatan Data Terpadu dengan Aplikasi Gresik Soya

   Dinas Sosial mengembangkan dan menerapkan platform digital ‘GresikSoya’ sebagai sistem pendataan terpadu dan real-time bagi masyarakat miskin dan rentan sosial berdasarkan 21 indikator kemiskinan lokal. Aplikasi ini menjadi instrumen penting dalam memastikan program bantuan sosial tepat sasaran, akurat, dan efektif, sekaligus menjadi acuan pemerintah daerah dalam merencanakan intervensi sosial yang lebih strategis.

3. Perbaikan Proses Penyaluran dan Respons Pengaduan Masyarakat

   Dinsos Kabupaten Gresik terus memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial dengan melaksanakan verifikasi lapangan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Insiden bantuan yang belum tepat sasaran langsung ditindaklanjuti

secara cepat oleh dinas untuk memastikan bantuan sosial dapat dinikmati oleh pihak yang benar-benar berhak.

4. Dukungan kepada Kelompok Relawan Siaga Bencana (TAGANA)

   Pada tahun 2025, Dinas Sosial juga mengadakan kegiatan capacity building bagi Sahabat TAGANA, untuk memperkuat kapasitas relawan dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Kegiatan ini memperluas jejaring sosial dan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam respon darurat serta mendorong keterlibatan warga di tingkat lokal.

5. Koordinasi Perencanaan Kebijakan Bantuan Sosial

   Dalam rangka meningkatkan efektivitas program sosial, dinas terlibat dalam pembahasan rancangan kebijakan bantuan sosial dan penguatan program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya bagi keluarga kurang mampu, anak yatim/piatu, janda, penyandang disabilitas, dan lanjut usia — sebagai bagian dari strategi menuju kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan di wilayah.

6. Kolaborasi Penguatan Bantuan Sosial dengan Provinsi Jawa Timur

   Dinas Sosial turut menyukseskan kegiatan bantuan sosial berjumlah lebih dari Rp5,8 miliar yang disalurkan kepada masyarakat Gresik bekerja sama dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu. Kerja sama ini menunjukkan sinergi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial.

3.5.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar

Fokus layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar mencakup berbagai bidang seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, serta kebudayaan.

Penyelenggaraan layanan pada urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui berbagai program

dan kegiatan yang mendukung pengembangan potensi daerah, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan sektor usaha dan investasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3.5.2.1 Ketenagakerjaan

Sasaran ketenagakerjaan Kabupaten Gresik dalam LKPJ merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dijabarkan setiap tahun dalam RKPD, yang secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan perlindungan tenaga kerja di daerah. Sasaran ketenagakerjaan berfungsi sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. Sasaran ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran melalui indikator yang terukur, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja sektor strategis, produktivitas tenaga kerja, partisipasi kelompok rentan (perempuan dan penyandang disabilitas), serta cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyelesaian hubungan industrial.

Tabel 3. 50 Capaian Indikator Sasaran Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya Partisipasi Ketenagakerjaan Perempuan	Rasio Pencari Kerja Perempuan yang mendapatkan Pekerjaan di sektor formal dan informal (%)	Persen	-	30,60	30	30,80
	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	Persen	-	56,84	56,37	52,54
Meningkatnya Partisipasi Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas	Rasio Pekerja Penyandang Disabilitas (%)	Persen	-	0,0013	0,0012	0,01
Meningkatkan rasio pelatihan tenaga kerja terhadap	Rasio Pelatihan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikasi (%)	Persen	-	13,33	13	14,1

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
kebutuhan tenaga kerja bersertifikasi serta mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Manufaktur (%)	Persen	-	42,11	21,65	45,98
Meningkatnya Tingkat Produktivitas Sumber Daya Manusia	Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	Persen	-	1,17	1,15	1,21
	Rasio penempatan kerja terhadap tenaga kerja dilatih (%)	Persen	-	70-73	72,12	71,31
Meningkatkan keberdayaan keluarga miskin dalam mendapatkan akses ketenagakerjaan	Rasio Pekerja dari Keluarga Miskin yang telah dijamin dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Persen	-	40,0	40,0	40,5
Meningkatnya perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Persen	-	72,16	71,61	67,99
Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan dan penyelesaian hubungan industrial yang adil dan inklusif	Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah (%)	Persen	-	47,64	47,64	47,64
	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial (%)	Persen	-	98,5	97,5	100
	Rasio Perusahaan yang telah membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum (%)	Persen	-	90-100	100	96,83
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Persen	-	52,69	52,69	42,06

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, 2026

Pada Tahun 2025, capaian indikator sasaran ketenagakerjaan Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Secara umum, terdapat sejumlah indikator yang berhasil melampaui target, namun terdapat pula beberapa indikator yang belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan bahkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat 7 sasaran urusan ketenagakerjaan, meliputi:

1. Meningkatnya Partisipasi Ketenagakerjaan Perempuan, yang terdiri dari indikator:
   a. Rasio Pencari Kerja Perempuan yang mendapatkan Pekerjaan di sektor formal dan informal (%) yang dihitung berdasarkan Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja perempuan yang terdaftar x 100 % (Melalui Redinaker), dengan capaian tahun 2025 sebesar 30,80%
   b. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%) yang dihitung berdasarkan Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia kerja x 100 %, dengan capaian tahun 2025 sebesar 52,54%. Realisasi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dari target yang ditetapkan karena adanya penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja secara keseluruhan
2. Meningkatnya Partisipasi Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas terdiri dari indikator Rasio Pekerja Penyandang Disabilitas (%) yang dihitung berdasarkan Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas / Jumlah Total Pekerja x 100% dengan capaian tahun 2025 sebesar 0,01%
3. Meningkatkan rasio pelatihan tenaga kerja terhadap kebutuhan tenaga kerja bersertifikasi serta mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur, yang terdiri dari indikator:
   a. Rasio Pelatihan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikasi (%) yang dihitung berdasarkan Jumlah Pencari Kerja yang Telah Dilatih dan Bersertifikat / Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikat x 100%, dengan capaian tahun 2025 sebesar 14,1%
   b. Rasio Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Manufaktur (%) yang dihitung berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Sektor Manufaktur / jumlah total tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri x 100 %, dengan capaian tahun 2025 sebesar 45,98%
4. Meningkatnya Tingkat Produktivitas Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari indikator:
   a. Tingkat produktivitas tenaga kerja (%) yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) / Jumlah Tenaga Kerja x 100% dengan capaian tahun 2025 sebesar 1,21%

b. Rasio penempatan kerja terhadap tenaga kerja dilatih (%) yang dihitung berdasarkan Jumlah Peserta Pelatihan yang Ditempatkan Bekerja / Total Peserta Pelatihan x 100 %, dengan capaian tahun 2025 sebesar 71,31%.

5. Meningkatkan keberdayaan keluarga miskin dalam mendapatkan akses ketenagakerjaan terdiri dari Rasio Pekerja dari indikator Keluarga Miskin yang telah dijamin dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) yang dihitung berdasarkan Jumlah Pekerja dari Keluarga Miskin yang Terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan / Jumlah total tenaga kerja x 100%, dengan capaian tahun 2025 sebesar 40,5%
6. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan terdiri dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Formulasi Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia kerja x 100 %, dengan capaian tahun 2025 sebesar 67,99%. Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang tidak mencapai target 2025 menunjukkan adanya perubahan struktur partisipasi penduduk usia kerja dalam pasar kerja. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi, seperti melanjutkan pendidikan, mengurus rumah tangga, atau tidak aktif mencari pekerjaan. Selain itu, karakteristik Kabupaten Gresik sebagai daerah industri juga memungkinkan terjadinya kompetisi tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja dari luar daerah.
7. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan dan penyelesaian hubungan industrial yang adil dan inklusif, yang terduri dari indikator:
    a. Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah (%) dihitung berdasarkan Jumlah Pekerja Penerima Upah yang Terdaftar di Jaminan Sosial Ketenagakerjaan / Jumlah Total Pekerja Penerima Upah x 100%, dengan capaian tahun 2025 sebesar 47,64%
    b. Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial (%) dihitung berdasarkan Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang Diselesaikan / Jumlah total kasus x 100%, dengan capaian tahun 2025 sebesar 100%
    c. Rasio Perusahaan yang telah membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum (%) Formulasi Jumlah Perusahaan besar dan sedang yang Membayar Gaji Sesuai UMK / Jumlah total perusahaan besar dan sedang x 100%, dengan capaian tahun 2025 sebesar 96,83%
    d. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%), dengan capaian tahun 2025 sebesar 42,06%

3.5.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dan inklusif. Fokus pelaksanaannya meliputi peningkatan kualitas hidup perempuan, pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan daerah, perlindungan hak perempuan dan anak, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 3. 51 Capaian Indikator Sasaran Urusan Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

Sasaran	Indikator	Satuan	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkan Akses Terhadap Layanan Perlindungan Khusus Anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin (%)	Persen	-	10	5,1	11,92*
	Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan (%)	Persen	-	100	100	100
	Persentase Kasus Anak Dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Konprehensif (%)	Persen	100	100	100	100
Meningkatkan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Perempuan dalam Pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan (%)	Persen	25%	40	30	73
	Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif gender (%)	Persen	25	30,43	30	96

Sasaran	Indikator	Satuan	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Perempuan dalam Pembangunan dan Keberdayaan Multidimensi	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Konprehensif (%)	Persen	100	100	100	100
Meningkatkan Akses Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin Terhadap Program Pemberdayaan	Rasio Kepala Rumah Tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan (%)	Persen	-	6,86	6,86	8,64

Sumber : Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, 2025

Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik terus memperkuat pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pendekatan pencegahan, perlindungan, pemberdayaan, serta pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

1. Penguatan Layanan Perlindungan Anak dan Perempuan

   Dinas KBPPPA melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah:

   - Memberikan layanan pengaduan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif (pendampingan hukum, psikologis, dan sosial).
   - Meningkatkan koordinasi lintas sektor (APG, kepolisian, Dinsos, Dinkes, dan lembaga layanan) untuk memastikan penanganan kasus lebih cepat dan terpadu.
   - Mendorong peningkatan persentase kasus kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif sesuai standar pelayanan minimal.

   Upaya ini menunjukkan komitmen daerah dalam memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak.

2. Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Sebagai bagian dari perlindungan anak dan peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja, Dinas KBPPPA:

- Melaksanakan sosialisasi dan edukasi pencegahan perkawinan usia anak di sekolah, desa, dan forum anak.
- Berkoordinasi dengan Pengadilan Agama terkait monitoring dispensasi kawin.
- Menguatkan peran keluarga dan desa dalam pencegahan perkawinan anak.
- Langkah ini diarahkan untuk menekan angka usia kawin pertama ≤ 20 tahun serta menurunkan pengajuan dispensasi kawin

3. Penguatan Kabupaten Layak Anak (KLA)

- Fasilitasi evaluasi dan pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak.
- Penguatan Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- Koordinasi lintas OPD untuk pemenuhan klaster hak anak.

  Ini memperkuat komitmen daerah dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

4. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan akses perempuan dalam pembangunan, telah dilakukan:

- Pendampingan Perangkat Daerah dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- Peningkatan persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Analisa Responsif Gender (ARG).
- Fasilitasi musrenbang perempuan dan pengakomodasian usulan perempuan dalam perencanaan pembangunan daerah.

  Hal ini mendukung peningkatan capaian indikator IPG dan IDG Kabupaten Gresik.

5. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Kepala Rumah Tangga Perempuan

Upaya pemberdayaan dilakukan melalui:

- Fasilitasi pelatihan keterampilan dan akses program pemberdayaan bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) miskin.
- Sinergi dengan OPD teknis dan mitra untuk penguatan ekonomi perempuan.
- Peningkatan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial dan ekonomi.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi kerentanan multidimensi perempuan.

6. Perlindungan Anak dalam Situasi Khusus
   - Memberikan layanan terhadap Anak Dalam Situasi Khusus (ADSK).
   - Memfasilitasi perlindungan bagi anak pekerja migran pasca pemulangan.
   - Menguatkan sistem rujukan dan pendampingan berbasis kasus.

3.5.2.3 Pangan

Urusan Pangan pada Tahun 2025 di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik melalui program dan kegiatan yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pasokan pangan, keamanan pangan, pengendalian kerawanan pangan, serta peningkatan keamanan pangan segar. Selain itu, pelaksanaannya juga mengacu pada regulasi teknis dan kebijakan daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan ketahanan pangan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Capaian kinerja Urusan Pangan Tahun 2025 difokuskan pada tiga sasaran, yaitu: (1) Meningkatnya ketahanan pangan dan (2) Meningkatnya pengendalian inflasi sektor pertanian (3) Meningkatnya kesejahteraan petani sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 52 Capaian Indikator Sasaran Urusan Pangan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya ketahanan pangan	Rasio ketersediaan pangan per kapita (Kg/KAP/TH)	Kg/KAP/TH	190	184,88	184,04	170
	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	Nilai	-	94,17	93,60	95,85
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	Persen	-	2,88	2,9	3,51

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	Indeks	-	80,61	90,9	78,46
Meningkatnya pengendalian inflasi sektor pertanian	stabilitas harga pangan utama (%)	Persen	-	4,68	9,39	3,18
Meningkatnya kesejahteraan petani	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	Persen	-	0,73-2,30	1,63	3,37

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, Rasio Ketersediaan Pangan per Kapita pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 184,88 kg/kapita/tahun, dengan realisasi sebesar 170 kg/kapita/tahun, hal tersebut dikarenakan adanya standar perhitungan konversi Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) dari BPS Gresik sebesar 83,38%, Kondisi ini menunjukkan masih perlunya penguatan pada aspek peningkatan produksi, optimalisasi cadangan pangan daerah, serta kelancaran distribusi guna menjaga ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 94,17, dengan realisasi sebesar 95,85. Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat menuju pola konsumsi yang lebih beragam, bergizi seimbang, dan aman. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,88 persen, dengan realisasi sebesar 3,51 persen. Hal ini mengindikasikan masih adanya kelompok masyarakat yang rentan terhadap keterbatasan akses pangan, sehingga diperlukan penguatan intervensi melalui perlindungan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat dan mengoptimalkan bantuan pangan untuk masyarakat rentan rawan pangan.Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2025 ditargetkan sebesar 80,61, dengan realisasi sebesar 78,46. Capaian tersebut masih belum sesuai target, Hal ini dikarenakan terdapat penambahan indikator dalam perhitungan IKP dari awalnya cuma 9 Indikator menjadi 12 Indikator, sehingga diperlukan peningkatan sinergi lintas sektor dalam memperkuat pilar ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan guna mendukung ketahanan pangan daerah secara komprehensif.

Stabilitas harga pangan utama pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 4,68 persen, dengan realisasi sebesar 3,18 persen. Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan efektivitas pengendalian inflasi sektor pangan serta keberhasilan menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis di daerah.

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Tahun 2025 ditargetkan berada pada kisaran 0,73–2,30 persen, dengan realisasi sebesar 1,63 persen. Capaian tersebut berada dalam rentang target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa sektor pertanian dalam arti luas tetap tumbuh positif dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Urusan Pangan menunjukkan kinerja yang positif dalam mendukung ketahanan pangan, pengendalian inflasi sektor pertanian, kesejahteraan petani. meskipun masih diperlukan optimalisasi di beberapa indikator untuk mencapai target secara penuh.

3.5.2.4 Pertanahan

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan penataan ruang pada kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kinerja ekonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pembebasan lahan pada lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang. Upaya ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur strategis sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah persentase lokasi tanah yang dibebaskan. Pada Tahun 2024 ditetapkan target sebesar 100 %, namun realisasi yang dicapai sebesar 50 %. Capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan karena masih terdapat beberapa kendala, antara lain proses administrasi pertanahan yang memerlukan waktu cukup panjang, koordinasi antar pihak terkait, serta adanya tahapan verifikasi dan validasi data kepemilikan lahan.

Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 60 %, dan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun, realisasi yang dicapai sebesar 100
%. Dengan demikian capaian kinerja pada Tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait, percepatan proses administrasi pembebasan lahan, serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk memperjelas uraian di atas, data pendukung disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 53 Capaian Indikator Sasaran Urusan Pertanahan Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan (%)	Persen	100	60	50	100

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Gresik, 2025

3.5.2.5 Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dasar bidang lingkungan hidup di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Fokus layanan lingkungan hidup dilaksanakan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan persampahan, peningkatan kualitas air dan udara, serta penguatan tata kelola lingkungan hidup yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pada Tahun Anggaran 2025, capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan Lingkungan Hidup menunjukkan tren yang positif dan cukup efektif terutama pada aspek layanan dasar persampahan dan perbaikan kualitas komponen lingkungan. Peningkatan persentase sampah terolah, cakupan layanan pengumpulan sampah, serta akses layanan bagi rumah tangga miskin menandakan penguatan fungsi pelayanan publik. Hal ini diperkuat oleh realisasi belanja infrastruktur yang menjaga keberlanjutan operasional layanan. Untuk memperjelas uraian di atas, secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 54 Capaian Indikator Sasaran Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun			
			2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Mewujudkan Lingkungan yang bersih, indah dan Sehat	Persentase RTH (%)	Persen		11,65	12.07	12.07
	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	Persen		24,44	25.66	25.66*
	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh	Persen		58,7	58.72	58,8*
	Pengumpulan Sampah (%)					
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Indah & Inklusif terhadap Kelompok Rentan	Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan untuk Kelompok Rentan (%)	Persen		14	14	14.29
	Indeks Kualitas Air (Indeks)	Indeks		50	61.58	73.07
	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	Indeks		35,3	47,54	49,19
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	Indeks		82,94	77.83	74,45
	Rasio Perusahaan yang menerapkan Green Industry (%)	Persen		5,26	6.67	6.86
Mewujudkan Lingkungan Masyrakat yang sejahtera	Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan (%)	Persen		67	67	67.44
Optimalisasi Pendanaan Infrastruktur Sektoral	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup (%)	Persen		80	80	80

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, 2025

Pada aspek kualitas lingkungan hidup, persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) mencapai 12,07% di tahun 2025 yang menunjukkan adanya peningkatan luasan RTH sebesar 0,42 dibanding Tahun 2024 yang menandakan kenaikan positif tetapi jika disandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Gresik, capaian tersebut perlu adanya peningkatan penyediaan RTH melalui optimalisasi lahan publik, revegetasi, dan kewajiban RTH pada pengembangan kawasan.

Sebagai upaya untuk peningkatan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan persampahan, telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai program kegiatan. Dalam hal peningkatan perilaku masyarakat dilakukan melalui pembinaan dan pembentukan Bank Sampah yang berbasis ekonomi sirkuler, kemudian melalui program GKMS (Gresik Kawasan Merdeka Sampah) yang mengusung konsep pentahelix dan desentralisasi dalam pengelolaan persampahan dengan gerakan Zero Waste pada kawasan yang belum memiliki TPS3R dan Pengelolaan Sampah Kawasan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki TPS3R. Untuk mendukung hal tersebut, juga perlu diimbangi dengan infrastruktur persampahan yang memadai. Secara kinerja aspek persampahan, dicapai melalui 3 indikator pada Tahun 2025, yaitu Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah dengan capaian kinerja 25,66% yang menandakan peningkatan kapasitas layanan dan kinerja fasilitas pengolahan, namun kebutuhan akan infrastruktur diperlukan sebagai bagian optimalisasi layanan. Indikator lainnya adalah proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah dengan perolehan realisasi kinerja layanan sebesar 58,72% yang menunjukkan penguatan akses layanan dasar persampahan dan pengurangan praktik pembuangan telah terkendali tetapi perlu peningkatan perluasan jangkauan ke wilayah yang belum terlayani, optimasi rute angkut, serta perluasan integrasi skema berbasis masyarakat khususnya melalui program GKMS menjadi faktor penentu peningkatan cakupan, serta Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Gresik Capaian 67,44% menegaskan keberpihakan layanan pengelolaan persampahan kepada kelompok rentan.

Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) yang merupakan salah satu komponen utama penyusun IKLH mengalami peningkatan signifikan dari 50 menjadi 73,07 pada tahun 2025 yang menunjukkan optimalisasi pengendalian pencemaran air khususnya pada aktivitas domestik terutama pada peningkatan akses sanitasi, sektor pertanian, hingga industri yang berdampak pada capaian IKA berjalan dengan baik. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Gresik menunjukkan kenaikan pada Tahun 2025 menjadi 49,19 yang menunjukkan dampak positif dari upaya rehabilitasi lahan tetapi kondisi kualitas lahan masih memerlukan peningkatan secara signifikan. Nilai tersebut menggambarkan adanya keterbatasan daya dukung lingkungan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri maupun perumahan, degradasi tanah akibat intensitas pemanfaatan yang tinggi, serta

keterbatasan upaya konservasi lahan. Kondisi IKL yang masih rendah ini berimplikasi pada berkurangnya kemampuan lahan dalam mendukung ketahanan pangan, penyediaan ruang untuk kegiatan ekonomi, serta fungsi ekologis. Hal ini menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memperkuat kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, meningkatkan program rehabilitasi dan konservasi, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan agar keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan kelestarian lingkungan dapat tercapai. Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2025 mencapai 74,45 dan lebih rendah dibanding tahun 2024 sebesar 82.94, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemantauan gas buang Emisi kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Gresik dan masih banyak sumber Emisi fugitif yang belum dikelola dengan baik (Emisi fugitif adalah emisi yang secara teknis tidak dapat melewati cerobong, ventilasi atau sistem pembuangan Emisi yang setara, misalnya debu dari pipa di dalam pabrik yang tidak melalui cerobong, debu kendaraan, dst). Sebagai upaya meningkatkan capaian tersebut diperlukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berkomitmen dalam meningkatkan pengendalian pencemaran udara khususnya dari sektor industri dan transportasi.

Di sisi lain, dalam hal peningkatan kepatuhan sektor industri terhadap lingkungan melalui Green Industry yang merupakan sebuah konsep menjalankan proses produksi secara efisien dalam penggunaan sumber daya dan minim dampak lingkungan, sekaligus tetap menjaga daya saing ekonomi, Realisasi Tahun 2025 diperoleh sebesar 6,86% industri yang telah menerapkan konsep tersebut, nilai tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mencapai 5,26%.

Namun demikian, kinerja belum sepenuhnya optimal karena kualitas udara masih dipengaruhi tekanan aktivitas ekonomi dan persentase RTH belum memadai untuk menopang fungsi ekologis wilayah. Dengan demikian, kinerja tahun 2025 dapat dikategorikan baik namun memerlukan penguatan pada pengendalian emisi dan perluasan RTH agar peningkatan kualitas lingkungan berlangsung lebih seimbang dan berkelanjutan.

3.5.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menyediakan data kependudukan yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan pembangunan. Pelaksanaan urusan ini berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya. Fokus layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan pada Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan, Pemutakhiran dan Validasi Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Perencanaan dan Pelayanan Publik.

Tabel 3. 55 Capaian Indikator Sasaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil	Pertumbuhan kepemilikan KIA (%)	Persen	0,08	0,024	0,08	0,066
Meningkatkan Manajemen Pelayanan	Persentase pemutakhiran data dan dokumen kependudukan (%)	Persen	83	84,00	83,00	98,16
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP (%)	Persen	99,53	99,56	99,53	99,22
	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	Persen	61,04	65,00	61,04	65,93
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	Indeks	90,6	90,61	90,60	90,77
Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin (%)	Persen	88	88,33	88,33	99,96
	Persentase kepemilikan AKta Kelahiran untuk Keluarga Miskin (%)	Persen	88,65	88,67	88,67	100

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk	Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk (%)	Persen	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, 2025

Indikator pertumbuhan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan realisasi sebesar 0,066% pada Tahun 2025, melampaui target 0,024%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan identitas hukum anak serta optimalisasi pelayanan penerbitan KIA. Di samping itu, Persentase pemutakhiran data dan dokumen kependudukan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 98,16%, melampaui target 84,00%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan administrasi kependudukan, termasuk validasi dan integrasi data yang semakin akurat dan mutakhir.

Beberapa indikator utama menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu Persentase kepemilikan KTP-el terealisasi sebesar 98,6% dari target 99,56%. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran meningkat menjadi 65,93%, melampaui target 65,00%. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan mencapai 90,77, melebihi target 90,61. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan semakin responsif, transparan, dan akuntabel.

Upaya peningkatan akses bagi keluarga miskin menunjukkan hasil signifikan, Persentase kepemilikan KTP-el untuk keluarga miskin mencapai 99,96%, melampaui target 88,33%. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran untuk keluarga miskin mencapai 100%, melampaui target 88,67%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan strategi pelayanan inklusif, termasuk pelayanan jemput bola dan integrasi layanan dengan program perlindungan sosial. Di samping itu, Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan mencapai 100%, sesuai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan dukungan optimal terhadap legalitas dokumen kependudukan sebagai persyaratan administratif ketenagakerjaan.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024–2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan mayoritas indikator melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan signifikan terlihat pada aspek pemutakhiran data, pelayanan kepada keluarga miskin, serta peningkatan kepuasan masyarakat. Kedepannya fokus perbaikan lebih diarahkan pada Peningkatan cakupan kepemilikan KTP-el hingga mencapai target maksimal,

Percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran secara menyeluruh, Penguatan digitalisasi layanan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, Pemutakhiran data kependudukan secara berkelanjutan guna mendukung perencanaan pembangunan berbasis data. Dengan capaian tersebut, penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan telah berkontribusi signifikan terhadap tertib administrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta akurasi data pembangunan daerah.

3.5.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah dalam urusan ini mencerminkan efektivitas program yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa dan masyarakat. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan dapat memberikan dampak postif dalam mengurangi ketimpangan desa-kota, meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup warga desa, menciptakan lapangan kerja baru dari pengembangan BUMDes dan sektor ekonomi lokal, meningkatkan kemandirian desa, serta mempercepat digitalisasi layanan desa sehingga menciptakan efisiensi administrasi dan pelayanan publik.

Tabel 3. 56 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi Daerah dan Desa	Return of Aset Usaha Desa (BUMDesa dan Koperasi Merah Putih) (%)	Persen	-	2,09	1,94	11.47
	Rasio Pendapatan Asli Desa (%)	Persen	-	0,0541	0,053	0.08
	Persentase Desa Mandiri (%)	Persen	-	47,58	100	100
	Return of Investment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih) (%)	Persen	-	25,29	25,07	25.66

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan kualitas Tata Kelola Kelembagaan Desa	Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa (Indeks)	Indeks	-	60	60	62.05
Meningkatkan Keberdayaan Multidimensi Kemasyarakatan Desa	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Desa (%)	Persen	-	91,81	91,81	97.56
	Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa -(%)	Persen	-	0,84	0,84	0.97

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan data table diatas Return of Asset Usaha Desa (BUMDes dan Koperasi Merah Putih) (%) Pada tahun 2024, tingkat pengembalian aset usaha desa belum optimal, yang mengindikasikan efektivitas pemanfaatan aset BUMDes dan koperasi masih perlu diperkuat, baik dari sisi manajemen usaha, diversifikasi unit usaha, maupun tata kelola keuangan. Namun pada tahun 2025 terjadi lonjakan sangat signifikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan profesionalitas pengelolaan usaha desa, optimalisasi aset produktif, atau adanya ekspansi usaha yang berdampak pada peningkatan laba.

Capaian 2024 untuk Persentase Rasio Pendapatan Asli Desa relatif mendekati target, menunjukkan stabilitas PADes meskipun belum optimal. Pada 2025 terjadi peningkatan cukup signifikan yang mencerminkan:

- Penguatan peran BUMDes,
- Optimalisasi pemanfaatan aset desa,
- Peningkatan kontribusi unit usaha desa terhadap pendapatan desa.

Realisasi Persentase Desa Mandiri tahun 2024 menunjukkan seluruh desa telah mencapai status mandiri (berdasarkan indikator yang digunakan). Capaian ini sangat progresif dan menunjukkan:

- Keberhasilan intervensi pembangunan desa,
- Meningkatnya kapasitas sosial-ekonomi desa,
- Penguatan tata kelola dan kemandirian fiskal desa.

Tahun 2025 mempertahankan capaian tersebut, menunjukkan keberlanjutan performa pembangunan desa.

Kinerja investasi usaha desa relatif stabil dan konsisten. Tahun 2024 Persentase Return of Investment Usaha Desa (BUMDes dan Koperasi Merah Putih) hampir memenuhi target, sedangkan tahun 2025 menunjukkan peningkatan efisiensi investasi dan penguatan kinerja usaha. Hal ini mengindikasikan tata kelola investasi desa semakin produktif dan terukur.

Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2024 menunjukkan pencapaian sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Peningkatan pada tahun 2025 mencerminkan:

- Efektivitas program pelatihan dan peningkatan kapasitas,
- Meningkatnya kompetensi administratif dan manajerial aparatur desa,
- Penguatan sistem tata kelola berbasis akuntabilitas dan digitalisasi.

Persentase Realisasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Desa Tahun 2024 menunjukkan konsistensi pelaksanaan program sesuai perencanaan. Peningkatan pada 2025 mengindikasikan percepatan dan perluasan cakupan program pengentasan kemiskinan serta meningkatnya sinergi lintas sektor. Sedangkan capaian 2024 untuk persentase Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa sesuai target menunjukkan program perlindungan sosial tenaga kerja desa berjalan sesuai rencana. Tahun 2025 terjadi peningkatan cakupan perlindungan sosial, yang berarti semakin banyak pelaku ekonomi desa (perangkat desa, pengurus BUMDes, pekerja informal desa) yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

3.5.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan pada:

- Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- Penurunan angka kelahiran pada usia remaja;
- Peningkatan usia kawin pertama;
- Penurunan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*);
- Peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga melalui pembangunan keluarga.

Melalui berbagai program dan kegiatan tersebut, Dinas KBPPPA berperan dalam mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera, sekaligus mendukung pencapaian indikator pembangunan daerah seperti Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Tabel 3. 57 Capaian Indikator Sasaran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran	Indikator	Satuan	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun (%)	Persen	12,15	9,27	9,27	8,21
	Total Fertility Rate (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	1,9-2	1,92	1.92-2	1,92
Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	Indeks	-	65,72	66,72	76,9
Menurunkan Ketimpangan Kesehatan Reproduksi	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Persen	9,6	9,18	9,17	7,91%
Meningkatkan Akses Terhadap Layanan Perlindungan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin (%)	Persen	-	9	9	10,60%

Sumber : Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, 2025

Pada Tahun 2025, Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik terus memperkuat pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan urusan ini difokuskan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas keluarga, serta penguatan pelayanan keluarga berencana. Salah satu capaian utama adalah meningkatnya kualitas pembangunan keluarga yang tercermin dari perbaikan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah.

Dalam aspek pelayanan keluarga berencana, Dinas KBPPPA berhasil memperluas akses pelayanan kepada pasangan usia subur melalui penguatan peran penyuluh KB, peningkatan cakupan peserta KB aktif, serta optimalisasi pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Pelayanan KB juga dilaksanakan secara terpadu melalui momentum kegiatan pelayanan serentak dan integrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.

Upaya pengendalian penduduk juga dilakukan melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan edukasi kesehatan reproduksi remaja. Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta kegiatan sosialisasi di sekolah dan masyarakat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap perencanaan kehidupan berkeluarga dan pengendalian kelahiran usia remaja. Selain itu, penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) menjadi fokus perhatian melalui peningkatan konseling, pendataan keluarga, serta pendekatan berbasis keluarga oleh kader dan penyuluh KB. Langkah ini memastikan pelayanan KB lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) juga diperkuat melalui pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas serta kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Program ini berperan dalam membangun ketahanan keluarga secara menyeluruh. Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik telah berhasil mengoptimalkan pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui pendekatan preventif, edukatif, dan pemberdayaan keluarga, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3.5.2.9 Perhubungan

Perhubungan berperan sebagai penggerak utama dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur serta layanan transportasi yang efisien. Cakupan layanan transportasi merupakan gambaran sejauh mana sistem transportasi mampu menjangkau wilayah dan melayani kebutuhan mobilitas masyarakat dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan berapa banyak jumlah ruas jalan kabupaten di Kabupaten Gresik yang dilalui trayek angkutan.

Nilai VC Jalan Kabupaten Gresik merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara volume lalu lintas yang melewati suatu ruas jalan dengan kapasitas ruas jalan tersebut. Dalam hal ini dilihat berdasarkan jumlah ruas jalan kabupaten di area perkotaan yang memiliki

Nilai VC Ratio kurang dari 0,50 berbanding dengan Nilai Volume to Capacity (VC) digunakan untuk menunjukkan apakah ruas jalan tersebut sudah mendekati kapasitas maksimalnya dan berpotensi mengalami kemacetan.

Sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi merupakan upaya strategis dalam mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pengembangan sektor perhubungan diarahkan pada penggunaan teknologi hemat energi serta pemanfaatan sumber energi bersih guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menekan emisi gas rumah kaca. Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi merupakan perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana Perhubungan yang ramah energi dengan jumlah sarana dan prasarana perhubungan. Ada 8 (delapan) jenis sarana dan prasarana perhubungan yang dimaksud yaitu PJU lampu LED, PJU PLTS, parkir, transportasi elektrikal, traffic light ATCS, traffic light solar cel, jalur pesepeda, traffic light adaptive.

Tabel 3. 58 Capaian Indikator Sasaran Urusan Perhubungan

Indikator	Capaian Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan layanan transportasi (%)				36,31	36,31
Nilai volume to capacity (VC) ratio jalan kabupaten gresik (%)	41,67	41,67	50,00	52,17	80,43
Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi (%)				50,00	50,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, 2026

3.5.2.10 Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan. Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Pelaksanaan urusan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, pelaksanaannya juga mengacu pada regulasi teknis dan kebijakan daerah yang mendukung penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika.

Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 difokuskan pada dua sasaran, yaitu: (1) meningkatnya digitalisasi layanan dan (2) meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi. Indikator, target, dan realisasi kinerja Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3. 59 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Sasaran	Indikator	Satuan	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya digitalisasi Layanan	Persentase digitalisasi layanan	Persen	-	43	-	43
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi	Nilai keterbukaan informasi publik (Nilai)	Nilai	-	40	-	89,67
	persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan (%)	Persen	92,2	97,10	97,10	96,8

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, persentase digitalisasi layanan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 41% dengan realisasi mencapai 43%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya percepatan transformasi layanan pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi, nilai keterbukaan informasi publik ditargetkan sebesar 35,77 dan terealisasi sebesar 89,67. Capaian ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan dan

penyediaan informasi publik sebagai wujud implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sementara itu, persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 97,10% dengan realisasi sebesar 96,8%. Capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat telah berjalan dengan baik dan responsif, meskipun masih diperlukan optimalisasi untuk mencapai target secara penuh.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 melalui 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan menunjukkan kinerja yang positif dalam mendukung digitalisasi pemerintahan, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta penguatan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusi pada PDRB serta penguatan struktur ekonomi berbasis potensi lokal.

Dalam aspek ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi sektor utama penyerap tenaga kerja sehingga membantu menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM turut mendukung penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan melalui perluasan akses usaha dan pembiayaan bagi masyarakat. Penguatan daya saing produk unggulan daerah, peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, serta fasilitasi perizinan dan akses pasar juga mendorong peningkatan kemandirian ekonomi daerah dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 3. 60 Capaian Indikator Sasaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan Koperasi aktif (%)	Persen	51,18	1,84	8,96	48,59
Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif	Pertumbuhan Usaha Mikro (%)	Persen	1,93	0,63	33,81	0.64

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Gresik, 2025

Indikator yang digunakan adalah Pertumbuhan Koperasi Aktif (%), dengan formulasi:
(Jumlah koperasi aktif tahun n – jumlah koperasi aktif tahun n-1) / jumlah koperasi aktif tahun n-1 x 100), yang mana target yang ditetapkan sebesar 51,18 persen pada tahun 2024 dan 1,84 persen pada tahun 2025. Realisasi capaian sebesar 8,96 persen pada tahun 2024 dan 48,59 persen pada tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga tingkat capaian kinerja tergolong belum optimal. Namun pada tahun 2025, realisasi meningkat signifikan dan jauh melampaui target, sehingga masuk dalam kategori sangat berhasil. Kondisi ini menunjukkan adanya percepatan peningkatan jumlah koperasi aktif pada tahun 2025 yang berdampak pada penguatan kelembagaan dan daya saing koperasi.

Indikator yang digunakan adalah Pertumbuhan Usaha Mikro (%), dengan formulasi:
(Jumlah usaha mikro tahun n – jumlah usaha mikro tahun n-1) / jumlah usaha mikro tahun n-1 x 100), yang mana target yang ditetapkan sebesar 1,93 persen pada tahun 2024 dan 0,63 persen pada tahun 2025.
Realisasi capaian sebesar 33,81 persen pada tahun 2024 dan 0,64 persen pada tahun 2025. Pada tahun 2024, capaian realisasi jauh melampaui target yang ditetapkan sehingga termasuk kategori sangat berhasil, yang menunjukkan pertumbuhan usaha mikro yang signifikan. Sementara itu, pada tahun 2025 realisasi sebesar 0,64 persen sedikit melampaui target 0,63 persen, sehingga tetap masuk kategori berhasil/tercapai.

3.5.2.12 Penanaman Modal

Sasaran Penanaman Modal Kabupaten Gresik dalam LKPJ merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dijabarkan setiap tahun dalam RKPD, yang secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kualitas kinerja penanaman modal di daerah. Sasaran penanaman modal berfungsi sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Sasaran ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran melalui indikator yang terukur, seperti pertumbuhan realisasi investasi.

Tabel 3. 61 Capaian Indikator Sasaran Urusan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis	Realisasi Investasi (triliyun) (Rp)	Triliyun (Rp)	-	20,00	37,9	29,49
	Realisasi investasi sektor manufaktor (triliun rupiah)	Triliyun (Rp)	-	13,00	32,5	22,62
	Pertumbuhan realisasi investasi (%)	Persen	41,99	0,50	22,66	-22,21
	Pertumbuhan investasi sektor manufaktur (%)	Persen	-	65	-28,52	-30,4
	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	-	50,33	51,25	52,58
	Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (%)	Persen	-	25:800	0:00	38 : 800
Meningkatkan kemudahan layanan investasi	Nilai survey kepuasan masyarakat untuk layanan perijinan dan penanaman modal (Predikat)	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Gresik, 2026

Pada Tahun 2025, capaian indikator sasaran penanaman modal Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Terdapat sejumlah indikator yang mengalami pertumbuhan, namun terdapat pula yang menghasilkan realisasi minus. Terdapat 2 sasaran urusan penanaman modal, meliputi:

1. Meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis, yang terdiri dari indikator:
   a. Realisasi Investasi (triliyun) (Rp) dihitung berdasarkan Besaran nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang direalisasikan, dilaporkan oleh pelaku usaha serta tercatat pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tahun n, dengan capaian tahun 2025 sebesar 29,49%
   b. Realisasi investasi sektor manufaktor (triliun rupiah) dihitung berdasarkan Besaran nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bidang industri pengolahan yang direalisasikan, dilaporkan dan tercatat pada Kementerian Investasi/BKPM di tahun n, dengan capaian tahun 2025 sebesar 22,62%
   c. Pertumbuhan realisasi investasi (%) dihitung berdasarkan (Realisasi investasi tahun n - realisasi investasi tahun n-1)/realisasi investasi tahun n-1 x 100, dengan capaian tahun 2025 sebesar -22,21. Menurunnya realisasi investasi pada sektor industri besar dan manufaktur, yang pada tahun sebelumnya menjadi kontributor utama investasi, namun pada tahun 2025 belum terdapat proyek berskala besar yang terealisasi secara optimal.
   d. Pertumbuhan investasi sektor manufaktur (%) dihitung berdasarkan (Realisasi investasi sektor manufaktur tahun n - realisasi investasi sektor manufaktur tahun n-1)/realisasi investasi sektor manufaktur tahun n-1 x 100, dengan capaian tahun 2025 sebesar -30,4%. Menurunnya pertumbuhan investasi sektor manufaktur diakibatkan Belum terealisasinya proyek manufaktur berskala besar yang telah berkomitmen berinvestasi di Kabupaten Gresik dimana hingga tahun pelaporan belum melakukan proses konstruksi, perusahaan pada tahun sebelumnya menjadi kontributor utama investasi telah menyelesaikan tahap konstruksi dan commissioning sehingga pada tahun berjalan nilai realisasi investasinya mengalami penurunan.
   e. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%) dihitung berdasarkan $PDRB\ ADHB\ Industri\ Pengolahan$ / PDRB ADHB Total x 100%, dengan capaian tahun 2025 sebesar 52,58%
   f. Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (%) dihitung berdasarkan Perbandingan jumlah perusahaan usaha besar yang bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik, dengan capaian tahun 2025 sebesar 38: 800
2. Meningkatkan kemudahan layanan investasi, terdiri dari indikator Nilai survey kepuasan masyarakat untuk layanan perijinan dan penanaman modal (Predikat) dihitung berdasarkan Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka berdasarkan sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan capaian Sangat Baik pada tahun 2025

3.5.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan potensi generasi muda dan pembinaan prestasi olahraga. Pada aspek kepemudaan, program pemberdayaan dan pengembangan kapasitas pemuda berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, penguatan kewirausahaan muda, serta peningkatan indeks pembangunan pemuda. Hal ini mendukung terciptanya SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing.

Pada aspek olahraga, pembinaan atlet, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, serta penyelenggaraan kompetisi mendorong peningkatan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik. Kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penguatan citra daerah melalui capaian prestasi.

Tabel 3. 62 Capaian Indikator Sasaran Kepemudaan dan Olahraga

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya Prestasi Pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Berprestasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Persen	42.95	43	42,98	44.35
Perlindungan Sosial Inklusi dan Pemberdayaan Kelompok Rentan	Persentase Pembinaan Atlit Disabilitas (%)	Persen	-	10	10	19.61

Sumber : Dinas Parekrafbudpora, 2025

Indikator Persentase Pemuda Berprestasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga menargetkan peningkatan prestasi pemuda pada bidang kepemudaan dan olahraga. Pada tahun pertama, target ditetapkan sebesar 42,95% dengan realisasi 42,98%, sehingga capaian memenuhi target. Pada tahun berikutnya, target sebesar 43% dengan realisasi 44,35%, sehingga melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan efektivitas program pembinaan, fasilitasi kompetisi, serta peningkatan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga.

Dalam rangka mendukung perlindungan sosial, inklusi, dan pemberdayaan kelompok rentan, ditetapkan target sebesar 10%, dengan realisasi mencapai 19,61%, sehingga capaian melampaui target secara signifikan. Hal ini mencerminkan penguatan komitmen daerah terhadap pembinaan atlet disabilitas melalui peningkatan akses pelatihan, pendampingan, dan partisipasi dalam ajang kompetisi.

3.5.2.14 Statistik

Penyelenggaraan Urusan Statistik pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan. Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola data serta pelayanan informasi publik sebagai bagian dari penguatan pemerintahan berbasis data.

Tabel 3. 63 Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Persen	-	100	-	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, 2025

Adapun capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2025 difokuskan pada sasaran, yaitu: Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut : Berdasarkan data pada tabel tersebut, persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data

statistik sektoral dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan pada Tahun 2025 mencapai target 100% dengan realisasi sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah memanfaatkan data statistik sektoral sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan, sebagaimana dihimpun melalui rekap data statistik sektoral pada SIPD e-Walidata.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang optimal dalam mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data, di mana pemanfaatan data statistik sektoral oleh seluruh Perangkat Daerah telah menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta proses monitoring dan evaluasi pembangunan, sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, terukur, dan akuntabel.

3.5.2.15 Persandian

Urusan Persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan. Urusan ini berperan strategis dalam memastikan keamanan informasi serta perlindungan sistem elektronik pemerintah daerah seiring dengan meningkatnya digitalisasi layanan pemerintahan. Capaian kinerja Urusan Persandian Tahun 2025 difokuskan pada peningkatan implementasi persandian pada layanan digital pemerintah daerah. Indikator dan realisasi kinerja selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 64 Capaian Indikator Sasaran Urusan Persandian Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya implementasi Persandian pada digitalisasi layanan	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian	Persen	-	15,78	-	15,78

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan data pada tabel tersebut, persentase digitalisasi layanan yang telah menerapkan persandian pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 15,78% dan terealisasi sebesar 15,78%. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan aspek keamanan informasi melalui mekanisme persandian telah dilaksanakan sesuai dengan target pada layanan digital yang tersedia. Realisasi tersebut didukung oleh

rekap laporan pengecekan kerentanan keamanan (uji pentest) serta laporan hasil tindak lanjut perbaikan atas temuan kerentanan, sehingga memperkuat perlindungan sistem elektronik pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sesuai dengan target, khususnya dalam mendukung keamanan sistem elektronik pemerintah daerah. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang aman, terlindungi, dan terpercaya.

3.5.2.16 Kebudayaan

Urusan Kebudayaan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah, khususnya pada aspek pembangunan manusia, penguatan identitas daerah, dan peningkatan daya saing berbasis kearifan lokal. Pelestarian dan pengembangan nilai budaya berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), penguatan karakter masyarakat, serta ketahanan sosial. Aktivitas seni, tradisi, dan warisan budaya juga mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat kohesi sosial sebagai fondasi stabilitas pembangunan daerah. Selain itu, pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan ekonomi kreatif berbasis budaya memberikan nilai tambah ekonomi melalui peningkatan kunjungan, event budaya, dan produk kreatif lokal. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah serta perluasan kesempatan kerja.

Tabel 3. 65 Capaian Indikator Sasaran Urusan Kebudayaan Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	Persentase Warisan budaya yang dilestarikan (%)	Persen	-	4	4	4,17

Sumber : Dinas Parekrafbudpora, 2025

Indikator Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Target kinerja ditetapkan sebesar 4%, dengan realisasi mencapai 4,17%, sehingga capaian melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pelestarian warisan budaya serta peningkatan komitmen dalam penguatan objek pemajuan kebudayaan.

3.5.2.17 Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang bertujuan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat, memperluas akses informasi, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Penyelenggaraan urusan perpustakaan diarahkan untuk Meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat, Menyediakan layanan perpustakaan yang merata dan berkualitas, Mengembangkan koleksi dan sistem layanan berbasis teknologi informasi, Mendukung penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal, Melestarikan karya cetak dan karya rekam sebagai bagian dari memori kolektif daerah.

Tabel 3. 66 Capaian Indikator Sasaran Urusan Perpustakaan Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan Literasi Gemar Membaca Daerah	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	Nilai	67,51	69,51	67,51	67,04
	Tingkat ketercukupan bahan pustaka (%)	Persen	0,27	2	0,27	2,02

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik

Dalam rangka mewujudkan peningkatan literasi gemar membaca masyarakat, ditetapkan dua indikator kinerja, yaitu: Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat, Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 69,51, namun realisasi yang dicapai sebesar 67,04 atau belum memenuhi target yang ditetapkan (selisih sebesar 2,47 poin). Capaian tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan target tahun berjalan, sehingga diperlukan evaluasi dan penguatan strategi dalam meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat. Sedangkan untuk indikator Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka, Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 2%, dengan realisasi sebesar 2,02% atau melampaui target sebesar 0,02%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan koleksi bahan pustaka, baik cetak maupun non-cetak, telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan layanan perpustakaan.

Secara umum, indikator ketercukupan bahan pustaka telah menunjukkan kinerja yang baik dan bahkan melampaui target pada Tahun 2025. Namun demikian, peningkatan ketersediaan koleksi belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap

peningkatan nilai kegemaran membaca masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang lebih komprehensif, antara lain melalui penguatan program literasi, optimalisasi promosi dan layanan perpustakaan, peningkatan kualitas kegiatan literasi berbasis komunitas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung akses dan minat baca masyarakat.

3.5.2.18 Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna menjamin terciptanya tertib arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan. Arsip memiliki peran strategis sebagai alat bukti yang sah, sumber informasi, serta memori kolektif daerah yang mendukung akuntabilitas dan transparansi publik.

Tabel 3. 67 Capaian Indikator Sasaran Urusan Kearsipan Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan kualitas pelayanan menjadi landasan dalam upaya memperkuat nilai pengawasan kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal (Nilai)	Nilai	88,41	90-100	88,41	89,58

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik

Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal, Indikator ini mengukur hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan secara eksternal, biasanya oleh lembaga pembina kearsipan, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia. Nilai ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah.

Capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem pengelolaan arsip, pembinaan, serta pengawasan internal berjalan sesuai perencanaan. sedangkan Realisasi tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024 (dari 88,41 menjadi 89,58). Namun demikian, capaian tersebut masih sedikit di bawah batas minimal target tahun 2025 (90). Dengan demikian, target belum sepenuhnya tercapai. Terdapat tren peningkatan nilai pengawasan kearsipan dari tahun 2024 ke 2025, meskipun meningkat, nilai tahun 2025 belum mencapai target minimal yang

ditetapka, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek pengelolaan arsip yang perlu diperkuat, seperti: Kepatuhan terhadap Jadwal Retensi Arsip (JRA), Pengelolaan arsip elektronik, Ketersediaan SDM arsiparis dan Kelengkapan sarana dan prasarana kearsipan.

3.5.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

3.5.3.1 Pariwisata

Urusan Pariwisata berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisata, perputaran ekonomi lokal, dan penguatan sektor pendukung seperti perhotelan, kuliner, transportasi, serta ekonomi kreatif. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan PDRB sektor jasa, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, pengembangan destinasi, penyelenggaraan event, dan promosi terpadu mendukung peningkatan daya saing daerah serta memperkuat citra dan branding wilayah. Pariwisata juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi sektor pariwisata. Dengan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal, urusan pariwisata menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tabel 3. 68 Capaian Indikator Sasaran Urusan Pariwisata Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Pertumbuhan Kunjungan Wisata (%)	Persen	3-5	7	5	7

Sumber : Dinas Parekrafbudpora Kabupaten Gresik, 2025

Dalam rangka mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisata berbasis potensi budaya daerah, ditetapkan target pertumbuhan sebesar **5%**, dengan realisasi mencapai **7,00%**, sehingga melampaui target kinerja. Capaian Persentase **Pertumbuhan Kunjungan Wisata** ini mencerminkan meningkatnya daya tarik destinasi dan event berbasis budaya serta penguatan promosi dan pengelolaan sektor pariwisata daerah.

3.5.3.2 Perdagangan

Urusan Perdagangan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa, stabilitas

harga, serta penguatan struktur perdagangan dalam dan luar daerah. Kinerja sektor perdagangan berkontribusi terhadap peningkatan PDRB, pengendalian inflasi daerah, serta pertumbuhan nilai transaksi dan neraca perdagangan. Penguatan pasar rakyat, fasilitasi promosi dan kemitraan usaha, serta perlindungan konsumen mendorong terciptanya sistem perdagangan yang efisien, transparan, dan berkeadilan.

Selain itu, pengembangan akses pasar bagi pelaku usaha lokal, termasuk UMKM, memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan daya saing produk daerah. Dengan demikian, urusan perdagangan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 3. 69 Capaian Indikator Sasaran Urusan Perdagangan Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (%)	Persen	0.05	0,05	33,34	33,25

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Gresik, 2025

Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, ditetapkan sasaran Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor dengan indikator sasaran Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (%) dalam satuan persen. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 0,05 persen pada tahun 2024 dan 0,05 persen pada tahun 2025. Realisasi capaian pada tahun 2024 tercatat sebesar 33,34 persen, sedangkan pada tahun 2025 sebesar 33,25 persen. Dengan demikian, realisasi pada kedua tahun tersebut jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, tingkat capaian kinerja berada di atas 100 persen dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi (Sangat Berhasil). Capaian ini menunjukkan adanya pertumbuhan nilai neraca perdagangan yang signifikan, yang mengindikasikan penguatan kinerja perdagangan daerah serta meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap aktivitas ekspor. Meskipun capaian kinerja sangat baik, perbedaan yang cukup besar antara target dan realisasi mengindikasikan perlunya penyesuaian metode perumusan target pada periode berikutnya agar lebih realistis, terukur, dan mencerminkan potensi pertumbuhan riil.

3.5.3.3 Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2025 di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gresik melalui program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya, produksi usaha garam rakyat, penguatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaannya juga pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, penguatan sarana dan prasarana perikanan, serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Seluruh penyelenggaraan urusan ini mengacu pada regulasi teknis dan kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan kelautan dan perikanan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah berbasis potensi pesisir.

Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 difokuskan pada tiga sasaran, yaitu: (1) Meningkatkan Gizi Masyarakat dalam mengkonsumsi ikan (2) Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan (3) Meningkatkan kualitas Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh nelayan dan pembudidaya sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3. 70 Capaian Indikator Sasaran Urusan Kelautan dan Perikanan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan Gizi Masyarakat dalam mengkonsumsi ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	Kg/KAP/ TH	55,75	57,73	56,6	58,36
Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	Persen	1,95	3,23	3,22	4,17
	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	Persen	3,05	2,43	2,24	2,44
	Pertumbuhan produksi usaha garam rakyat (%)	Persen	-	0,96	-31,2	0,97
Meningkatkan kualitas Pengelolaan	Persentase penurunan konflik nelayan (%)	Persen	-	2,78	-18,29	2,78

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
sumberdaya kelautan dan perikanan oleh nelayan dan pembudidaya	Pengawasan pengelolaan perairan umum dan darat (jumlah pelaku usaha) (Angka)	Angka	-	20	15	21
	Persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan (%)	Persen	-	43	42,8	43
	Persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan (%)	Persen	-	17,6	58,8	17,84

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2025, Angka Konsumsi Ikan ditargetkan sebesar 57,73 kg/kapita/tahun, dengan realisasi sebesar 58,36 kg/kapita/tahun. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi ikan sebagai sumber protein hewani guna mendukung perbaikan gizi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor perikanan, pertumbuhan produksi perikanan tangkap pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,23%, dengan realisasi sebesar 4,17%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah hari melaut yang didukung kondisi cuaca relatif kondusif serta optimalisasi sarana prasarana penangkapan ikan. Sementara itu, pertumbuhan produksi perikanan budidaya ditargetkan sebesar 2,43%, dengan realisasi sebesar 2,44%, sehingga capaian berada pada kategori memenuhi target. Namun bila diabandingan dengan Tahun sebelumnya mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan budidaya tambak, serta belum tersedianya dukungan pupuk bersubsidi yang memengaruhi produktivitas perikanan budidaya. Upaya yang dilakukan yakni dilakukan pengoptimalan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran secara lebih prioritas pada kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis budidaya, termasuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna mengupayakan dukungan sarana produksi seperti pupuk bersubsidi bagi pembudidaya. Selain itu, akan dilakukan peningkatan pembinaan kepada kelompok pembudidaya serta monitoring berkala terhadap sentra

budidaya untuk memastikan intervensi yang diberikan tepat sasaran dan mampu mendorong peningkatan produktivitas secara berkelanjutan. Adapun pertumbuhan produksi usaha garam rakyat ditargetkan sebesar 0,96%, dengan realisasi sebesar 0,97%, yang juga telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian ini didorong oleh perbaikan tata kelola tambak garam dan dukungan sarana produksi, meskipun tetap dipengaruhi oleh faktor cuaca dan musim.

Pada indikator pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, persentase penurunan konflik nelayan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,78%, dengan realisasi sebesar 2,78%, Hal ini menunjukkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan pengawasan, serta mediasi konflik yang berjalan optimal. Pengawasan pengelolaan perairan umum darat ditargetkan sebanyak 20 pelaku usaha, dengan realisasi sebanyak 21 pelaku usaha, Capaian ini menunjukkan peningkatan kepatuhan dan perluasan cakupan pengawasan oleh aparat terkait. Selanjutnya, persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan ditargetkan sebesar 43%, dengan realisasi sebesar 43%, target tercapai sepenuhnya. Hal ini didukung oleh konsistensi pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan dan pembudidaya. Adapun persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan ditargetkan sebesar 17,6%, dengan realisasi sebesar 17,84%, yang menunjukkan capaian sedikit melampaui target. Capaian ini dipengaruhi oleh optimalisasi fasilitasi bantuan, akses permodalan, serta perlindungan sosial bagi nelayan.

Secara keseluruhan, kinerja urusan kelautan dan perikanan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik, dimana sebagian besar indikator telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas sektor perikanan, penguatan pengelolaan sumber daya, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.

3.5.3.4 Pertanian

Urusan Pertanian pada Tahun 2025 di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Penyelenggaraan urusan ini diarahkan pada peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian, produksi komoditas unggulan perkebunan, dan produksi komoditas unggulan peternakan melalui penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan nilai tambah dan daya saing produk. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara terpadu melalui pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan, serta penerapan teknologi pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Seluruh pelaksanaan urusan mengacu pada kebijakan daerah dan regulasi teknis sebagai landasan dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang efektif, efisien, dan berkelanjutan

Capaian kinerja Urusan Pertanian Tahun 2025 difokuskan pada satu sasaran, yaitu meningkatnya produksi sektor pertanian sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3. 71 Capaian Indikator Sasaran urusan Pertanian Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya produksi sektor pertanian	Pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian (%)	Persen	0,48	0,46	2,87	7,51
	Pertumbuhan produksi komoditas unggulan perkebunan (%)	Persen	0,42	0,45	0,46	0,07
	Pertumbuhan Produksi Komoditas Unggulan Peternakan (%)	Persen	2,03	1,85	2,02	1,85

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian, target tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,46%, sedangkan realisasi mencapai 7,51%. Capaian ini melampaui target secara signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh produksi padi meningkat signifikan karena luas tambah tanam naik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan produksi yang cukup tinggi, yang dipengaruhi oleh perbaikan pola tanam, optimalisasi pemanfaatan lahan, dukungan sarana produksi pertanian, serta kondisi iklim yang relatif mendukung pada musim tanam.

Pada indikator pertumbuhan produksi komoditas unggulan perkebunan, target tahun 2025 sebesar 0,45% dengan realisasi sebesar 0,07%. Capaian ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain luas areal tanam tembakau menurun dari awalnya 255,9 Ha menjadi 171,06 Ha, produktivitas tembakau menurun dikarenakan faktor cuaca kemarau basah dari 12,69 Ton/Ha menjadi 8,7 Ton/Ha, produksi jambu mente mengalami penurunan dari 55,2 ton/Ha menjadi 8,53 Ton/Ha dikarenakan umur tanaman sudah tua sehingga produksi kurang maksimal. Upaya yang dilakukan agar produksi komoditas unggulan perkebunan agar sesuai target ditahun berikutnya yaitu dengan membantu petani tembakau untuk menjalin kemitraan, melakukan peremajaan terhadap tanaman yang sudah tua atau tidak produktif. Sementara itu, pada indikator pertumbuhan produksi komoditas unggulan peternakan, target tahun 2025 sebesar 1,85% dan realisasi tercapai sebesar 1,85%, sehingga target dapat dipenuhi secara

optimal. Capaian ini menunjukkan stabilitas produksi subsektor peternakan yang didukung oleh pengendalian penyakit hewan, peningkatan kualitas pakan, serta pembinaan dan pendampingan kepada kelompok ternak. Ketersediaan bibit ternak yang memadai dan penguatan manajemen usaha peternakan juga menjadi faktor pendukung tercapainya target tersebut.

Secara keseluruhan, kinerja produksi urusan pertanian tahun 2025 menunjukkan tren yang baik, dengan mayoritas indikator mencapai dan melampaui target, meskipun subsektor perkebunan masih memerlukan penguatan intervensi untuk meningkatkan capaian pada tahun berikutnya.

3.5.3.5 Perindustrian

Urusan Perindustrian memegang peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas produksi, pengembangan produk bernilai tambah, dan perluasan kesempatan kerja. Penguatan sektor industri, khususnya industri kecil dan menengah, berkontribusi langsung terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengurangan pengangguran, serta penguatan rantai nilai lokal. Inovasi teknologi dan peningkatan efisiensi produksi mendukung daya saing produk industri di pasar regional, nasional, maupun internasional.

Selain itu, pengembangan klaster industri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor industri menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, urusan perindustrian menjadi pilar strategis dalam memperkuat struktur ekonomi daerah dan mendukung pembangunan yang berdaya saing.

Tabel 3. 72 Capaian Indikator Sasaran urusan Perindustrian Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan IKM (%)	Persen	1,03	0,92	1,14	1,26

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Gresik, 2025

Sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan indikator Pertumbuhan IKM (%) dalam satuan persen. Indikator ini dihitung dengan formulasi: (Jumlah IKM tahun n – jumlah IKM tahun n-1) / jumlah IKM tahun n-1 x 100. Target pertumbuhan IKM ditetapkan sebesar 1,03 persen pada tahun 2024 dan 0,92 persen pada tahun 2025. Adapun realisasi capaian tercatat sebesar 1,14 persen pada tahun

2024 dan 1,26 persen pada tahun 2025. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, capaian tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan, demikian pula pada tahun 2025 realisasi berada di atas target. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja pada kedua tahun tersebut termasuk dalam kategori berhasil hingga sangat berhasil.

Capaian ini menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah IKM yang konsisten dan positif dari tahun ke tahun, yang mencerminkan efektivitas program pembinaan, fasilitasi, dan penguatan kapasitas pelaku IKM. Ke depan, diperlukan konsistensi dukungan kebijakan dan peningkatan kualitas intervensi agar pertumbuhan IKM tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga semakin kompetitif dan berdaya saing.

3.5.4 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang Urusan

Fokus layanan urusan pemerintahan penunjang urusan merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan lainnya. Urusan penunjang berperan dalam memastikan bahwa proses perencanaan, pengelolaan sumber daya, serta tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara optimal sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Urusan pemerintahan penunjang meliputi beberapa bidang strategis, antara lain perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta fungsi lain yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui penyelenggaraan urusan penunjang tersebut, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

3.5.4.1 Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan Urusan Perencanaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif. Indeks ini mencerminkan sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, partisipatif, dan berbasis kinerja, mulai dari tahap perumusan dokumen hingga keterkaitannya dengan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. IPPD memiliki keterkaitan erat dengan kualitas dokumen perencanaan daerah, khususnya konsistensi antara RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, serta dokumen penganggaran. Perencanaan yang selaras antar dokumen menunjukkan adanya

kesinambungan kebijakan dan arah pembangunan daerah, yang menjadi prasyarat utama dalam mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan berpotensi menurunkan kualitas implementasi kebijakan dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah.

Selain itu, IPPD juga berkaitan dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan pembangunan. Penguatan perencanaan berbasis data, pemanfaatan sistem informasi perencanaan, serta pelaksanaan forum koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas perencanaan dan berkontribusi terhadap pembentukan nilai IPPD. Capaian IPPD Tahun 2025 ditopang melalui tiga aspek yaitu sinergi, kualitas perencanaan, serta keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja. Secara substantif, capaian tersebut mengindikasikan bahwa keterkaitan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, khususnya RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah, telah terbangun dengan lebih konsisten. Hal ini mencerminkan adanya kejelasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang diterjemahkan secara sistematis ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Tabel 3. 73 Capaian Indikator Sasasaran Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Indeks	80	80,5	80	80,7625

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik, 2025

3.5.4.2 Keuangan

Sasaran Keuangan Kabupaten Gresik dalam LKPJ merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dijabarkan setiap tahun dalam RKPD, yang secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kualitas kinerja keuangan di daerah. Sasaran keuangan berfungsi sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan seperti realisasi pendapatan pemanfaatan aset daerah, realisasi PAD, realisasi pajak daerah dan opini BPK atas Laporan Keuangan.

Tabel 3. 74 Capaian Indikator Sasaran Keuangan Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2024	2025	2024	2025
Meningkatnya Pemanfaatan Aset	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah (%)	-	70	70	112,13
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))	-	0,7	0,7	0.84
	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)	-	85	85	94,08
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	(Belum rilis)*

Sumber : BPKAD Kabupaten Gresik, 2025
*Keterangan : *) Angka belum rilis*

Pada Tahun 2025, capaian indikator sasaran keuangan di Kabupaten Gresik telah melampaui Target Tahun 2025. Terdapat 3 sasaran urusan Keuangan, meliputi:

1. Meningkatnya pemanfaatan aset yang terdiri dari indikator Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah (%), yang dihitung berdasarkan Realisasi Pendapatan pemanfaatan aset / target Pendapatan pemanfaatan aset *100, dengan capaian tahun 2025 sebesar 112,13%
2. Meningkatnya pendapatan asli daerah, yang terdiri dari indikator:
   a. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%)) yang dihitung berdasarkan Realisasi pajak (n-1) / PDRB (n-1) * 100, dengan capaian tahun 2025 sebesar 0,84%
   b. Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah (%) dengan capaian tahun 2025 sebesar 94,08%
   3. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terdiri dari indikator Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)

3.5.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaranan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2025 dengan Sasaran ”Meningkatnya Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan” dan ”Meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara” dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 75 Capaian Indikator Sasaran Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan	Rasio Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah	%	-	31	30,57	34
Meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	89,8	89	88,87	89,75

Sumber : BKPSDM Kabupaten Gresik, 2025

Latar belakang sasaran Meningkatnya Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan pada BKPSDM didasarkan pada pentingnya mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan gender, mengingat keterlibatan perempuan, khususnya pada jabatan strategis, masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih representatif dan responsif. Oleh karena itu, BKPSDM berperan dalam merumuskan kebijakan dan strategi guna mendorong peningkatan partisipasi perempuan melalui pemberian kesempatan yang setara, pendidikan, dan pelatihan, sehingga perempuan memiliki akses yang adil dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan.

Capaian Rasio Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah dengan realisasi mencapai 34%. Hal ini menandakan adanya peningkatan keterwakilan perempuan dalam struktur jabatan pemerintahan daerah serta keberhasilan upaya mendorong kesetaraan gender dalam pengisian jabatan. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan yang setara dan memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan serta penyelenggaraan pemerintahan.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks diatur dalam Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), hasil Pendataan Ulang PNS (e-

PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Indeks profesionalitas ASN Nasional dihitung rata-rata dari hasil pengukuran seluruh ASN. Selanjutnya hasil pengukuran diklasifikasi dengan kategori mulai sangat tinggi sampai dengan sangat rendah.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Gresik Tahun 2025 tercatat sebesar 89,75, menunjukkan tingkat profesionalitas ASN yang sangat tinggi. Hasil ini mencerminkan kinerja, kompetensi, disiplin, dan integritas aparatur yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Capaian tersebut juga menandakan efektivitas program pembinaan dan pengembangan SDM ASN di Kabupaten Gresik, serta komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip sistem merit untuk mewujudkan ASN yang kompeten, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

3.5.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Peningkatan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) pada Tahun 2024 dan 2025 merupakan hasil dari penguatan tata kelola inovasi daerah yang semakin sistematis dan terintegrasi. Penyempurnaan regulasi, optimalisasi peran perangkat daerah, serta peningkatan koordinasi dalam ekosistem inovasi telah mendorong pelaksanaan inovasi yang lebih terarah dan selaras dengan indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah. Di samping itu, perbaikan dalam mekanisme pendokumentasian dan pelaporan inovasi turut meningkatkan akurasi serta kelengkapan data yang dinilai secara nasional.

Selain itu, kenaikan nilai Indeks Inovasi Daerah juga dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas inovasi yang dihasilkan, baik dalam aspek pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun transformasi digital. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan berkelanjutan, serta komitmen pimpinan daerah dalam membangun budaya inovasi menjadi faktor pendukung utama yang secara kolektif berkontribusi terhadap perbaikan capaian indeks secara berkelanjutan.

Tabel 3. 76 Capaian Indikator Sasaran Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya peraan riset	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Indeks	47,8	54,71	54,53	57,98

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah						

Sumber: Kementrian dalam Negeri, 2025

3.5.4.5 Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik. Capaian urusan Kesatuan Bangsa Politik sebagaimana berikut :

Tabel 3. 77 Capaian Indikator Sasaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya hubungan yang harmoni antar kelompok berbagai kelompok sosial, budaya dan agama di masyarakat	Indeks Kesadaran Berbangsa	Indeks	-	73,09	72,89	79,4
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif	Indeks	3,94	3,95	3,96	4,00

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, 2025

Indeks Kesadaran Berbangsa adalah ukuran atau instrumen penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku individu maupun kelompok masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Indeks ini umumnya mengukur sejauh mana masyarakat memiliki komitmen terhadap Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui pengukuran tersebut,

pemerintah dapat menilai tingkat nasionalisme, rasa persatuan, toleransi, kepatuhan terhadap hukum, serta partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil indeks ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembinaan wawasan kebangsaan dan penguatan karakter kebangsaan di berbagai sektor.

Capaian Indeks Kesadaran Berbangsa Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar 79,4 dari target 73,09 menunjukkan kinerja sangat baik dalam upaya peningkatan kesadaran berbangsa di masyarakat. Hasil ini mencerminkan efektivitas program dan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan nilai-nilai Pancasila, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Capaian ini juga menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan, toleran, dan berintegritas.

Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh seluruh BNNP dan BNNK kepada Penggiat P4GN. Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Indeks ini menggambarkan sejauh mana masyarakat, instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, swasta, dan komunitas memiliki kesadaran, inisiatif, serta kemampuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba secara mandiri dan berkelanjutan.

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Kabupaten Gresik Tahun 2025 mencapai nilai 4,00 dengan kategori Sangat Mandiri. Pengukuran IKP umumnya mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, kegiatan pencegahan, partisipasi aktif, serta keberlanjutan program. Hasil indeks ini menjadi dasar bagi BNN dalam menentukan tingkat kemandirian suatu wilayah atau institusi serta merumuskan strategi penguatan peran serta masyarakat dalam mendukung Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

3.5.4.6 Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan bebas dari praktik penyimpangan, Inspektorat menetapkan sasaran perangkat daerah yang berorientasi pada

peningkatan kualitas pengawasan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan Pengawasan pada Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Inspektorat dengan Indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3. 78 Capaian Indikator Sasaran Urusan Pengawas Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal (%)	Persen	100	90,05	88,41	90,26
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	Nilai	86	86,57	86,37	86,88
Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui PM SPIP Terintegrasi	Nilai maturitas SPIP (Nilai)	Nilai	3	3,35	3,34	3,343
	Nilai kapabilitas APIP (Nilai)	Nilai	3	3,095	3,085	3,085

Sumber : Inspektorat Kabupaten Gresik, 2025

Dengan tercapainya sasaran tersebut, Inspektorat diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi *assurance* dan *consulting*, sehingga tata kelola pemerintahan daerah semakin berkualitas dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

3.5.4.7 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi keuangan;
3. Fasilitasi kegiatan persidangan dan rapat-rapat DPRD;
4. Penyusunan risalah, dokumentasi, dan publikasi kegiatan DPRD;
5. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
6. Fasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Tabel 3. 79 Capaian Indikator Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Dukungan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan (%)	Persen	100	100	100	100
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD (%)	Persen	100	100	100	100
	Persentase Dukungan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas DPRD (%)	Persen	100	100	100	100
	Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Nilai)	Persen	90	96,25	96,25	99

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD telah menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Capaian kinerja diukur melalui beberapa indikator utama sebagai berikut:

1. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan

   Indikator ini diukur melalui perbandingan jumlah pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan yang diselenggarakan dengan jumlah pelayanan administrasi yang direncanakan, dikalikan 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pelayanan administrasi dan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pelayanan meliputi pengelolaan surat-menyurat, kepegawaian, penatausahaan keuangan, serta dukungan administratif lainnya yang menunjang kelancaran tugas DPRD.

2. Persentase Dukungan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD
   Indikator ini dihitung dari jumlah fasilitasi kegiatan DPRD sesuai fungsi (legislasi, anggaran, dan pengawasan) dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam Renja DPRD. Realisasi 100% menunjukkan bahwa seluruh agenda kegiatan DPRD yang meliputi rapat paripurna, rapat alat kelengkapan, pembahasan rancangan peraturan daerah, pembahasan anggaran, serta kegiatan pengawasan telah difasilitasi secara optimal.

3. Persentase Dukungan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas DPRD
   Pengukuran indikator ini didasarkan pada jumlah kegiatan DPRD sesuai tugas yang dipenuhi dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam Renja DPRD. Capaian tersebut menggambarkan konsistensi Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan teknis dan administratif terhadap seluruh tugas DPRD secara tepat waktu, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
   Indikator ini diperoleh dari hasil survei Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Hasil survei menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap kualitas pelayanan Sekretariat DPRD. Realisasi tahun 2024 telah melampaui target sebesar 96,25%, dan pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 99%. Hal ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam aspek ketepatan waktu pelayanan, kualitas administrasi, responsivitas, serta profesionalisme aparatur.

Secara umum, seluruh indikator kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan 2025 telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian 100% pada indikator pelayanan administrasi serta dukungan fasilitasi menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Peningkatan signifikan pada Indeks Kepuasan Anggota DPRD menjadi 99% pada Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Peningkatan koordinasi internal;
2. Optimalisasi sistem administrasi dan pelaporan;
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan

3.5.4.8 Kesekretariat Daerah

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang memiliki tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Guna menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik memiliki fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;

3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Pada tataran program, Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program dengan 31 indikator kinerja program dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 80 Capaian Indikator Sasaran Urusan Kesekretariatan Daerah Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI	
		2024	2025	2024	2025
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP â‰¥ 80 (Persentase)	86,96	87	86,96	100
Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi	Hasil Evaluasi Kelembagaan (Angka)	96,8	96,8	96,8	96,7
Meningkatnya mutu pelayanan publik	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik (Angka)	95,88	96	95,88	Belum rilis*
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD (Nilai)	3,3	3,4	3,07	3,4093
Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks (Skala 0-100))	84,45	84,5	84,45	82,85
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah (Indeks (Skala 0-100))	88,19	88,23	88,19	89,85

SASARAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI	
		2024	2025	2024	2025
Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))	76,93	77	76,93	85,66
Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah	Angka Inflasi (Angka)	1,85	3,5	1,85	2,44
Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum	Nilai Peduli HAM (Nilai)	90,95	90,96	90,95	Belum rilis*
Meningkatnya akses keuangan daerah yang inklusif, merata dan berkelanjutan	Indeks Akses Keuangan Daerah	4,58	4,62	-	Belum rilis*

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, 2025

Capaian indikator sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024–2025 secara umum menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berjalan selaras dengan arah kebijakan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Indikator strategis yang mencakup aspek akuntabilitas kinerja, kualitas kelembagaan, mutu pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, pengendalian inflasi, serta pemenuhan hak masyarakat mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang terintegrasi. Di sisi lain, pembinaan kelembagaan dan penyempurnaan tata laksana organisasi terus dilakukan untuk mendukung penerapan sistem merit dan optimalisasi kinerja internal.

Dalam bidang pelayanan publik, berbagai langkah perbaikan prosedur, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan pengawasan terus diupayakan guna menjaga kualitas layanan dan mencegah terjadinya maladministrasi. Peningkatan kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator bahwa upaya perbaikan pelayanan berjalan secara konsisten. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata kelola pengadaan barang dan jasa juga menunjukkan penguatan melalui koordinasi lintas perangkat daerah serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, pengendalian inflasi daerah dilaksanakan melalui sinergi kebijakan dan monitoring yang berkesinambungan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Komitmen terhadap pemenuhan hak masyarakat atas bantuan hukum serta peningkatan akses keuangan yang inklusif tetap menjadi bagian dari prioritas, sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan hak masyarakat dan penguatan ekonomi daerah. Secara keseluruhan, capaian indikator sasaran pada periode ini menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan pada beberapa aspek, meskipun tetap diperlukan evaluasi dan penguatan berkelanjutan guna memastikan tercapainya sasaran strategis secara optimal.

3.5.4.9 Kewilayahan

Penyelenggaraan urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh 18 Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Capaian urusan Kecamatan diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Permen PAN No. 14 Tahun 2017 dan Rasio Pendanaan program prioritas daerah ditigkat desa/kelurahan:

Tabel 3. 81 Capaian Indikator Sasaran Urusan Kewilayahan Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks				
Gresik			85	90	85	92,34
Kebomas			92	88	87,84	93,52
Manyar			92	93	92,22	93,08
Cerme			88	89	88	91,78
Benjeng			92	98	97	98,10
Balongpanggang			97	98,25	98	98,73
Duduksampeyan			98,5	93,35	92,92	96,5
Driyorejo			95	97	95	97,31
Wringinanom			95	95	94	94,25
Kedamean			93	93,5	93	93,54
Menganti			92	93	91	94,10
Sidayu			88	98	98,87	98,51
Ujungpangkah			90	93	90	93,72
Panceng			86	93	90	92,43
Bungah			83	89	88,98	90,19
Dukun			93	95	94	95
Sangkapura			87	97	98	96,50
Tambak			93	94,68	94,68	97,63

Sumber : Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025

Tabel 3. 82 Capaian Indikator Sasaran Urusan Kewilayahan Kabupaten Gresik

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI	
			2024	2025	2024	2025
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Rasio	-	1:1	1:1	1:1
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Rasio	-	1:1	1:1	1:1
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Rasio	-	1:1	1:1	1:1
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Rasio	-	1:1	1:1	1:1
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Rasio	-	1:1	1:1	1:1
	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Rasio	-	1:1	1:1	1:1

Sumber : Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan

Rasio Pendanaan program prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan merupakan indikator baru yang digunakan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Tercapainya rasio 1:1 ini mencerminkan keberhasilan sinkronisasi pendanaan antara program prioritas pemerintah daerah dengan realisasi anggaran di tingkat desa/kelurahan untuk mendukung pembangunan yang merata dan terintegrasi. Capaian indikator rasio pendanaan program prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan hasil optimal dengan keberhasilan mencapai target rasio ideal 1:1 secara menyeluruh pada seluruh bidang prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga infrastruktur dan penanggulangan bencana. Angka ini merefleksikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan realisasi anggaran di

tingkat desa, sehingga memastikan program-program strategis kabupaten terakomodasi secara proporsional dalam APBDes. Konsistensi capaian ini menjadi bukti nyata adanya sinkronisasi kebijakan yang efektif dan penguatan tata kelola keuangan desa dalam mendukung pemerataan standar pelayanan publik serta ketahanan wilayah bagi seluruh masyarakat di tingkat perdesaan maupun kelurahan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan, pembagian urusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Pada Tahun 2025 Kabupaten Gresik tidak melaksanakan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Gresik tidak menerima penugasan dari Pemerintah Pusat melalui mekanisme Tugas Pembantuan. Dengan tidak adanya alokasi tersebut, maka tidak terdapat pelaksanaan program, kegiatan, maupun pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik selama tahun pelaporan. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pengalokasian program dan kegiatan Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional serta kebutuhan daerah tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pelaporan, program dan kegiatan yang menjadi prioritas kementerian/lembaga tidak dialokasikan melalui skema Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik.

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya

Sehubungan dengan kondisi tidak adanya penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Gresik, tidak terdapat hambatan maupun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi Sebagai upaya untuk meningkatkan peluang perolehan penugasan melalui mekanisme Tugas Pembantuan pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional, serta meningkatkan kesiapan program dan kegiatan yang berpotensi untuk didukung melalui skema Tugas Pembantuan. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memperoleh dukungan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat guna mendukung percepatan pembangunan daerah.

BAB V
PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir Tahun Anggaran 2025, pada dasarnya merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dengan berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagai Penjabaran Tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang mencakup seluruh penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2025 merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Bupati Gresik kepada DPRD Kabupaten Gresik secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gresik Akhir Tahun Anggaran 2025.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2025 patut disyukuri. Selanjutnya sebagai implementasi hubungan kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD maka diharapkan adanya saran konstruktif berupa rekomendasi dari DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Gresik. Dengan demikian, hubungan timbal balik yang seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjalin secara harmonis dan konstruktif.

Demikian Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2025 ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan hidayah dan meridhloi usaha kita bersama untuk menghadirkan Gresik yang lebih baik.

Gresik, Maret 2026

BUPATI GRESIK

H. FANDI AHMAD YANI, SE, M.MB

Lampiran 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025
Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET		REALISASI		Perangkat Daerah	Sumber Data	Permasalahan	Tindak Lanjut Permasalahan	Keterangan
					2024	2025	2024	2025					
1	Misi 1 : Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah MISI 2: Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing MISI 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. MISI 4: Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi masyarakat MISI 5: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,24	79,84 - 80,19	78,93	79,69	BAPPEDA	BPS https://gresikkab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/12/01/861/ipm-kabupaten-gresik-tahun-2025-mencapai-79-69-atau-meningkat-sebesar-0-96-persen-dibandingkan-tahun-2024.html			
			Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,42	91.06 - 91.26	91,25	92,01	Dinas KBPPPA	BPS https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI=/indeks-pembangunan-gender--ipg-.html			Menggunakan data termutakhir hasil rilis BPS 15 April 2025
			Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	69,42	80,52 - 81,12	82,43	81,10	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Dokumen laporan akhir penyusunan Indeks Kesalehan Sosial yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik			
2		Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekenomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00	4,72 - 5,32	4,79	4,91*	BAPPEDA	BPS https://gresikkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/5cb431e28582e365334b4ed7/kabupaten-gresik-dalam-angka-2026.html			PDRB ADHK 2025 : Angka Sangat Sementara
3		Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen		22,77 - 23,48	23,58	23.88**	DPMPTSP	BPS https://gresikkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/5cb431e28582e365334b4ed7/kabupaten-gresik-dalam-angka-2026.html			PDRB ADHB 2025 : Angka Sangat Sementara
4			Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	39.540,50	40.331,31	40.177,72	52,525,84	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi Aksara Kementerian PPN/Bappenas			
5		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,42	86,17	85,94	88,01	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	Belum rilis, belum tepat waktunya Perangkat Daerah dalam mengisi realisasi Rencana Aksi RB General dan Tematik	Melakukan monitoring secara berkala terkait pengisian realisasi rencana aksi RB general dan tematik	

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET		REALISASI		Perangkat Daerah	Sumber Data	Permasalahan	Tindak Lanjut Permasalahan	Keterangan
					2024	2025	2024	2025					
6		Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan	Tingkat kemiskinan	Persen	9,7-10	8,47 - 9,95	10,32	9,95	BAPPEDA	https://gresikkab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/22/856/profil-kemiskinan-kabupaten-gresik-maret-2025.html			
7			Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks	6,40	6,91 - 6,00	6,45	5,47	Dinas Tenaga Kerja	https://gresikkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/5cb431e28582e365334b4ed7/kabupaten-gresik-dalam-angka-2026.html			

Lampiran 2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET		REALISASI		Perangkat Daerah	Sumber Data	Permasalahan	Tindak Lanjut Permasalahan	Keterangan
				2024	2025	2024	2025					
1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	Persen	-	10,37	10,01	10,35	Dinas Pendidikan	BPS	Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural dan demografis, antara lain: Karakteristik Demografis Penduduk Usia Dewasa dan Lansia, Masih Adanya Penduduk dengan Pendidikan Tidak Tamat SMA/Sederajat, Mobilitas dan Dinamika Penduduk dan Sifat Indikator yang Bersifat Kumulatif dan Jangka Panjang.	meningkatkan capaian RLS, diperlukan langkah strategis seperti: Peningkatan akses pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C), Pencegahan putus sekolah melalui intervensi sosial dan ekonomi, Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan partisipasi pendidikan menengah, Dukungan bagi keluarga rentan agar anak tetap melanjutkan pendidikan minimal hingga SMA/sederajat.	
2		Harapan Lama Sekolah	Persen	-	13,99	13,97	13,99	Dinas Pendidikan	BPS			
3	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Persen	-	74,57	74,48	74,90	Dinas Kesehatan	BPS			
4	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	-	71,62 - 72,00	81,39	81,39**	Dinas KBPPPA	website SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) Kementerian PPPA	Masih menggunakan realisasi Tahun 2024, dikarenakan nilai belum rilis		https://siga.kemenpppa.go.id/beranda
5	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	-	70,72 - 71,50	62,32	62,32**	Dinas KBPPPA	BPS	Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh belum meratanya partisipasi perempuan pada jabatan strategis, keterbatasan akses dan kesempatan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif, serta belum optimalnya integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program perangkat daerah	Memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) lintas perangkat daerah melalui peningkatan koordinasi, integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas aparatur. Selain itu, dilakukan penguatan peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan, pendampingan, dan perluasan akses terhadap sumber daya, disertai dengan penguatan monitoring dan evaluasi capaian indikator gender secara berkala.	https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender--idg-.html
6		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	-	0,402	0,335	0,335**	Dinas KBPPPA	BPS	Masih menggunakan realisasi Tahun 2024, dikarenakan nilai belum rilis		https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5NiMy/indeks-ketimpangan-gender--ikg-.html

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET		REALISASI		Perangkat Daerah	Sumber Data	Permasalahan	Tindak Lanjut Permasalahan	Keterangan
				2024	2025	2024	2025					
7		Indeks Inklusi (GEDSI)	Indeks	-	60	56,2	63,41	BAPPEDA	Bappeda Gresik			
8	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Harmoni	Indeks	-	3,78	3,77	3,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dokumen laporan akhir penyusunan Indeks Harmoni Sosial yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik	Hasil pengukuran Indeks Harmoni Kabupaten Gresik Tahun 2025 mengalami penurunan nilai. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi Indeks Harmoni Kabupaten Gresik Tahun 2024 mencapai nilai 3,77, sedangkan realisasi pada tahun 2025 hanya mencapai nilai 3,56. Meskipun keduanya masih berada pada kategori "Tinggi" (inklusif), penurunan nilai sebesar 0,21 tersebut menunjukkan adanya degradasi dalam pilar-pilar sosial atau pelayanan publik.	Perlu disusunnya strategi implementasi kebijakan dan pengembangan program dalam upaya penguatan harmoni di Kabupaten Gresik secara terintegrasi dan berbasis data. Terdapat tiga simpul perbaikan yang harus dipacu diantaranya keadilan kesejahteraan, mutu pendidikan (kualitas tenaga pendidik), dan akuntabilitas layanan kewarganegaraan.	
9	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	Persen	-	50,32 - 51,20	50,57	51,86**	BAPPEDA	https://gresikkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/8191309d38d85206ff25c33b/kabupaten-gresik-dalam-angka-2025.html			Formulasi : PDRB ADHK Industri Pengolahan/ PDRB ADHK x 100 PDRB ADHK 2025 : Angka Sangat Sementara
10	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor	Persen	-	10,77 - 11,80	10,51	62,88	Dinas Koperindag	ESKA Aplikasi untuk membuat Surat Keterangan Asal (SKA) dari Kementerian Perdagangan	Data Rilis Dinas Koperindag Belum Sesuai dengan Data BPS	Akan dilakukan Koordinasi Bersama dengan BPS terkait Sinkronisasi Realisasi Rasio Net Ekspor Tahun 2020-2025	
11	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	Persen	-	4,6	4,96	4,90**	DPMPTSP	BPS https://gresikkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/5cb431e28582e365334b4ed7/kabupaten-gresik-dalam-angka-2026.html, Data Diolah			Formulasi : PMTB Tahun N / PDRB ADHK 2010 Perubahan x 100 PDRB ADHK 2025 : Angka Sangat Sementara
12	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio Government Expenditure	Persen	-	1,95	1,91	2,75**	BPPKAD	BPS https://gresikkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/5cb431e28582e365334b4ed7/kabupaten-gresik-dalam-angka-2026.html, Data Diolah dengan LRA Reviu Tahun 2025			Formulasi : Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 / PDRB ADHK 2010 Tahun 2025 x 100 PDRB ADHK 2025 : Angka Sangat Sementara
13		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	-	3,75	3,77	3,76	BAPPEDA	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)			https://penerbit.brin.go.id/others/catalog/book/2438

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET		REALISASI		Perangkat Daerah	Sumber Data	Permasalahan	Tindak Lanjut Permasalahan	Keterangan
				2024	2025	2024	2025					
14	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Infrastuktur	Indeks	-	63,23	61,62	63,47	BAPPEDA	Kajian Bappeda Gresik	Indeks Infrastruktur di Tahun 2025 saat ini masih dalam proses analisa, direncanakan akan dirilis pada bulan maret		
15		Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	-	0,745	0,725	0,75	BAPPEDA	Kajian Bappeda Gresik	Indeks Infrastruktur di Tahun 2025 saat ini masih dalam proses analisa, direncanakan akan dirilis pada bulan maret		
16	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	-	135,90 - 132,58	91,42	119, 66	BNPB	Inarisk.bnpb.go.id/ admin	Nilai IRB Tahun 2025 dihitung menggunakan baseline yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan kerentanan, sehingga tidak bisa disandingkan dengan hasil perhitungan IRB ditahun 2024.		Nilai realisasi Tahun 2025 sudah melampaui target IRB RPJMD Tahun 2025.
17	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,68	65,09	60,12	65,81	SITALA	Berdasarkan Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Aplikasi SITALA	- Keterbatasan periode & titik lokasi uji air dan udara	Optimalisasi upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup melalui pengawasan , pengujian dan lain2	
18	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	3,86	4,37	4,32	4,65	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi SPBE Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan surat Sekretaris Daerah nomor 043/20/437.87/2026 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi SPBE Tahun 2025	-	-	target dan realisasi tahun 2024 dan 2025 menggunakan indeks SPBE
19		Nilai Akuntabilitas Intansi Pemerintahan	Nilai	-	80,9	80,62	77,15	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Laporan hasil Evaluasi SAKIP	Seluruh tindaklanjut pada Penilaian sementara SAKIP Triwulan II Tahun 2025 telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025	
20		Indeks Sistem Merit	Indeks	305	315	310,5	310,5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penilaian dari BKN	Belum optimalnya pelaksanaan manajemen talenta dan pengembangan karier berbasis sistem merit	Penguatan pelaksanaan manajemen talenta sebagai dasar pengembangan karier ASN	Tahun 2025 tidak ada penilaian sistem merit dari BKN, sehingga realisasi tahun 2024 menjadi acuan realisasi tahun 2025
21		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	-	2,25	4,16	4,35	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi PEKPPP	Nihil. Nilai Sudah sangat baik.	Nihil	
22	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi	Indeks	-	48,00	48,87	43,79	BAPPEDA	Kajian BAPPEDA			

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET		REALISASI		Perangkat Daerah	Sumber Data	Permasalahan	Tindak Lanjut Permasalahan	Keterangan
				2024	2025	2024	2025					
23	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	Persen	-	80-95	80-95	100	Dinas Sosial	SIKS-NG/DTKS/DTSEN			
24	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio Gini	Indeks	-	0,311 - 0,351	0,33	0,327	BAPPEDA	BPS			https://jatim.bps.go.id/en/statistics-table/2/NDg4IzI=/gini-ratio-by-regency-city-in-east-java.html
25	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Persen	-	25 - 35	13,52	30,62	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja			

Lampiran 3

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
DINAS PENDIDIKAN														
1	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan	Meningkatkan Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (PAUD,SD,SMP)	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD (%)	Σpenduduk usia 3-6 tahun yang tamat atau sedang belajar di PAUD / Σ penduduk usia 3-6 th x 100	Persen	77,79	80,76	77,79	80,76	Dinas Pendidikan			
2	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP (%)	Σ penduduk usia 7-12 tahun yang tamat atau sedang belajar di SD, MI dan MDT Ula /Σ penduduk usia 7- 12 th x 100	Persen	99,29	99,4	99,29	99,4	Dinas Pendidikan			
3	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%)	Σpenduduk usia 13-15 tahun yang tamat atau sedang belajar di SMP, MTs dan MDT Wustha / Σ penduduk usia 13-15 th x 100	Persen	24,54	29,51	24,54	29,51	Dinas Pendidikan			
4	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	-	Persen	10,45	11,22	10,45	12,77	SAKERNAS 2024			SAKERNAS 2025 Belum rilis
5	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan	Meningkatkan keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim inklusivitas SD (%)	-	Persen	78,00	78,90	78,00	78,9	Rapor Pendidikan 2025			
6	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan		Iklim inklusivitas SMP (%)	-	Persen	73,00	74,50	73,00	74,5	Rapor Pendidikan 2025			
7	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan	Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif di sektor pendidikan	Iklim keamanan SD (%)	-	Persen	62,30	64,80	62,30	64,8	Rapor Pendidikan 2025			
8	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan		Iklim keamanan SMP (%)	-	Persen	61,11	63,51	61,11	63,51	Rapor Pendidikan 2025			
9	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan	Menurunkan angka putus sekolah untuk memastikan kelanjutan pendidikan anak hingga selesai jenjang dasar	Angka Putus Sekolah (%)	Σ Peserta didik putus sekolah / Σ peserta didik x 100	Persen	1,44	1,42	1,44	1,41	Dinas Pendidikan			Indikator negatif
10	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	-	Persen	91,51	94,28	91,51	94,28	Rapor Pendidikan 2025			
11	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan		"Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP" (%)	(Σ Sekolah SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP/ Σ sekolah SD X 100) + (Σ Sekolah SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP/ Σ sekolah SMP X 100) / 2	Persen	98,78	98,8	98,78	98,83	Dinas Pendidikan			
12	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	-	Persen	91,36	91,77	91,36	91,77	Rapor Pendidikan 2025			
13	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan		Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP (%)	(Σ lembaga SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP/ Σ lembaga SD X 100) + (Σ lembaga SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP/ Σ lembaga SMP X 100) / 2	Persen	98,78	98,8	98,78	98,83	Dinas Pendidikan			

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
14	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan	Meningkatkan kualitas,akuntabilitas, dan inklusifitas pengendalian dan perizinan pendidikan	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP (%)	(Σ lembaga SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP/ Σ lembaga SD X 100) + (Σ lembaga SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP/ Σ lembaga SMP X 100) / 2	Persen	98,78	98,8	98,78	98,83	Dinas Pendidikan			
15	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP (%)	(Σ lembaga SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP/ Σ lembaga SD X 100) + (Σ lembaga SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP/ Σ lembaga SMP X 100) / 2	Persen	98,78	98,8	98,78	98,83	Dinas Pendidikan			
16	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan		Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP (%)	(Σ lembaga SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP/ Σ lembaga SD X 100) + (Σ lembaga SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP/ Σ lembaga SMP X 100) / 2	Persen	100,00	100	100	100	Dinas Pendidikan			
17	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan	Meningkatkan Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan Dasar (SD,SMP)	Rata-rata Kemampuan Literasi (%)	-	Persen	75,62	77,42	75,62	77,42	Rapor Pendidikan 2025			
18	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan		Rata-rata Kemampuan Numerasi (%)	-	Persen	64,66	66,86	64,66	66,86	Rapor Pendidikan 2025			
19	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender dalam pembangunan Daerah dan Desa di sektor pendidikan	Iklim Kebinekaan SD (%)	-	Persen	75,57	76,57	75,57	76,57	Rapor Pendidikan 2025			
20	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan		Iklim kebinekaan SMP (%)	-	Persen	72,67	73,67	72,67	73,67	Rapor Pendidikan 2025			
21	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan	Meningkatkan Partispasi Murni Pendidikan Dasar (SD,SMP) di wilayah rentan	Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan (%)	(APM Perempuan di Wilayah Rentan / Angka Partisipasi Murni Laki-laki jenjang SD di Wilayah Rentan x 100) + (APM Perempuan di Wilayah Rentan / Angka Partisipasi Murni Laki-laki jenjang SMP di Wilayah Rentan x 100) / 2	Persen	93,07	93,09	93,07	93,84	Dinas Pendidikan			
DINAS KESEHATAN														
23	DINAS KESEHATAN	Kesehatan		Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Per 1000)	Angka Kematian Bayi/100 Ribu Kelahiran Hidup	Per 1000	4,29	4,25	4,29	7,40	MPDN (Maternal Perinatal Death Notification)	Capaian naik dibandingkan dengan tahun lalu	1. Penguatan AMPSR (Audit Maternal Perinatal Survelan Respon) 2. Pelacakan kasus kematian 3. Pendampingan ibu hamil resiko tinggi 4. Peningkatan kapasitas bagi nakes ttng kegawatdaruratan maternal neonatal 5. Peningkatan program QIC (Quality Improvmant Collaborative) dalam penurunan AKI AKB 6. Penguatan layanan ANC, persalinan aman dan rujukan cepat dan tepat 7. Fasilitasi penampungan sementara / RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) bagi ibu hamil dari daerah terpencil/sulita akses khususnva Bawean sebelum	Indikator negatif

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
24	DINAS KESEHATAN	Kesehatan		Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka Kematian Ibu/100 Ribu Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	77,59	76.59-86.99	77,59	70,21	MPDN (Maternal Perinatal Death Notification)	Capaian turun dibandingkan dengan tahun lalu	1. Penguatan AMPSR (Audit Maternal Perinatal Survelan Respon) 2. Pelacakan kasus kematian 3. Pendampingan ibu hamil resiko tinggi 4. Peningkatan kapasitas bagi nakes ttng kegawatdaruratan maternal neonatal 5. Peningkatan program QIC (Quality Improvmant Collaborative) dalam penurunan AKI AKB 6. Penguatan layanan ANC, persalinan aman dan rujukan cepat dan tepat 7. Fasilitasi penampungan sementara / RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) bagi ibu hamil dari daerah terpencil/sulita akses khususnva Bawean sebelum	Indikator negatif
25	DINAS KESEHATAN	Kesehatan		Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari: satu dosis Imunisasi Hepatitis B, satu dosis imunisasi BCG, empat dosis imunisasi Polio oral, satu dosis imunisasi IPV, tiga dosis imunisasi DPT-HB-Hib, dan satu dosis imunisasi Campak Rubella dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah bayi yang diperkirakan hidup usia 0-11 bulan (Surviving Infant) selama kurun waktu yang sama dikali 100	Persen	100	95	100	93,04	Web Imunisasi Provinsi Jatim	Capaian indikator Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap pada tahun berjalan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Adanya bayi dengan status drop out imunisasi, terutama pada imunisasi lanjutan. 2. Mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga terdapat bayi yang belum terpantau atau berpindah domisili. 3. Penolakan atau keraguan orang tua terhadap imunisasi, akibat kurangnya pemahaman maupun isu misinformasi.	1. Melakukan pemutakhiran sinkronisasi dan validasi data sasaran bayi 2. Peningkatan sweeping dan tracking drop out 3. Penguatan edukasi dan komunikasi publik pentingnya imunisasi	
26	DINAS KESEHATAN	Kesehatan	Mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan individu dan komunitas melalui peningkatan kapasitas operasional sistem kesehatan daerah dengan optimalisasi sumber daya kesehatan dalam	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Jumlah balita stunting dibagi total jumlah balita yang ditimbang atau diukur	Persen	10	11,03	8,14	8,07	Aplikasi EPPGBM	1. Adanya ibu balita yang tidak mau anaknya dirujuk ke rumah sakit untuk diperiksa dokter spesialis anak dan mendapatkan resep susu PKMK untuk intervensi stunting. 2. Terbatasnya susu PKMK untuk intervensi balita stunting. 3. Pola asuh ibu balita yang masih salah. 4. Penyakit infeksi berulang pada balita.	1. Melakukan pendampingan balita dan ibu balita yang sudah mau dirujuk setelah dijelaskan oleh tenaga kesehatan. Untuk balita yang tidak mau dirujuk, dicoba konsulkan dengan dokter spesialis anak via online walaupun dengan segala keterbatasan pemeriksaan. 2. - Koordinasi dengan perusahaan di wilayah terkait CSR kesehatan untuk membantu pengadaan susu PKMK. - Koordinasi dengan puskesmas dan desa terkait dana desa yang mungkin bisa dialokasikan untuk pengadaan susu PKMK. - Melakukan usulan susu PKMK ke Kementrian	Indikator negatif

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
27	DINAS KESEHATAN	Kesehatan	mendukung pemberdayaan dan pelayanan kesehatan yang paripurna	Cakupan ODHIV on ART (%)	Jumlah ODHIV yang menerima obat Antiretroviral dalam jangka waktu tertentu dibagi jumlah ODHIV yang ada di Kabupaten Gresik dikali 100 persen	Persen	-	72	70	70	SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS)	1. Penyangkalan (Denial): Ketidakmampuan untuk menerima diagnosis dan keyakinan salah bahwa virus tidak berbahaya atau tidak ada. 2. Stigma Diri (Self-Stigma) & Takut Dikucilkan: Banyak ODHIV merasa malu dan takut status mereka diketahui oleh masyarakat, yang menyebabkan keengganan untuk mencari pengobatan. 3. Kesehatan yang Terasa Masih Baik: ODHIV sering menunda pengobatan karena merasa tubuhnya masih sehat, padahal virus terus berkembang biak. 4. Depresi dan Kebosanan: Rasa putus asa atau bosan harus rutin kontrol dan minum obat (factor kebosanan). 5. Keterbatasan Akses: Masalah logistik seperti domisili tidak	1. Edukasi dan Konseling: Memberikan pemahaman bahwa ARV dapat meningkatkan kualitas hidup dan membuat ODHIV tetap produktif. 2. Penghapusan Stigma: Mengedukasi masyarakat untuk mengurangi pelabelan negatif terhadap ODHIV. 3. Dukungan Teman Sebaya: Melibatkan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) untuk membantu ODHIV baru menerima kondisinya. 4. Akses Layanan yang Mudah: Mempermudah layanan pengambilan obat untuk mengatasi keterbatasan waktu dan mobilitas.	
28	DINAS KESEHATAN	Kesehatan		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Jumlah pasien Tuberkulosis baru yang ditemukan dalam 1 tahun berjalan dibagi 100.000 dikali jumlah penduduk	Per 100.000 Penduduk	-	250	265	238,87	Dinas Kesehatan			Indikator negatif
29	DINAS KESEHATAN	Kesehatan		Cakupan Deteksi Dini Diabetes Melitus (%)	Jumlah penduduk usia ≥ 40 tahun dan penduduk usia 15-39 tahun dengan obesitas dan atau hipertensi yang diperiksa Gula Darah dibagi Jumlah sasaran penduduk usia ≥ 40 tahu dan penduduk usia 15-39 tahun dengan obesitas di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%. Perhitungan penduduk usia 15-39 tahun dengan obesitas adalah jumlah penduduk usia 15-39 tahun x prevalensi obesitas per wilayah (hasil SKI 2023) dan penduduk usia 15 - 39 tahun dengan hipertensi (Hasil SKI tahun 2023)	Persen		60	103,3	104,3	SIPPTIMEWA			
30	DINAS KESEHATAN	Kesehatan		Cakupan Deteksi Dini Hipertensi (%)	Jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang diperiksa tekanan darah dibagi Jumlah sasaran penduduk usia ≥ 15 tahun di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	Persen	-	70	93,4	96,1	SIPPTIMEWA			
31	DINAS KESEHATAN	Kesehatan		Cakupan Universal Health Coverage (%)	Jumlah penduduk yang terdaftar JKN dibagi dengan total jumlah penduduk	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan			
32	DINAS KESEHATAN	Kesehatan		Net Death Rate (NDR) (%)	Jumlah pasien meninggal setelah 48 jam dirawat dibagi jumlah total pasien keluar	Persen	49,09	37	39	35	Dinas Kesehatan			Indikator negatif
33	DINAS KESEHATAN	Kesehatan		Gross Death Rate (GDR) (%)	Jumlah pasien meninggal dibagi jumlah total pasien keluar	Persen	83,44	62	66	60	Dinas Kesehatan			Indikator negatif
34	DINAS KESEHATAN	Kesehatan		Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif (%)	Jumlah Posyandu Siklus Hidup yang aktif dibagi jumlah seluruh posyandu x 100%	Persen	-	92,4	91,9	97,56	Laporan Microsite (KOMDAT PROMKES)	Dari 1.517 Posyandu di Kab. Gresik, 1.480 posyandu di wilayah kabupaten Gresik telah memenuhi indikator Posyandu Siklus Hidup yang Aktif pada Tahun 2025 dan sebanyak 91,10% (1382 posy) selalu buka/ memberikan layanan setiap bulan selama periode Januari s/d Desember 2025.	Penambahan Jumlah Kader pada Posyandu yang jumlah kadernya tidak sesuai standar, Menambah jam hari buka layanan Posyandu agar Posyandu dapat memberikan layanan Siklus Hidup (pelayanan siklus hidup di posyandu diatur sesuai jadwal dan sesuai kesepakatan antara sasaran dengan petugas/ kader dan nakes)	
35	DINAS KESEHATAN	Kesehatan		Persentase Desa/Kelurahan STBM (%)	Jumlah desa atau kelurahan menerapkan STBM dibagi jumlah seluruh desa atau kelurahan dikali 100%	Persen	-	25	21,91	25	Dinas Kesehatan			

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
36	DINAS KESEHATAN	Kesehatan		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dengan Nilai SKM >=80% (%)	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali 100%	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan			
37	DINAS KESEHATAN	Kesehatan	Meningkatkan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Rasio Puskesmas Ramah Anak (Rasio)	Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitas ruang menyusui dan tempat bermain anak yang aman dan nyaman dibagi jumlah semua puskesmas	Rasio	-	26:32	18:32	27:32	Dinas Kesehatan			
38	DINAS KESEHATAN	Kesehatan	Perlindungan Sosial Inklusi dan Pemberdayaan Kelompok Rentan	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan (%)	Jumlah warga negara 60 thn atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar min. 1x dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah semua warga negara usia 60 tahun atau lebih x 100%	Persen	-	100	100	100	Dinas Kesehatan			
39	DINAS KESEHATAN	Kesehatan	Mengoptimalkan Pendanaan Infrastruktur Sektoral	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Kesehatan (%)	Jumlah infrastruktur kesehatan yang direncanakan terhadap yang dibelanjakan	Persen	-	100	100	100	Dinas Kesehatan			
40	DINAS KESEHATAN	Kesehatan	Meningkatkan Akses Keluarga Miskin Terhadap Layanan Dasar Kesehatan	Persentase Kematian Ibu dari Keluarga Miskin (%)	Jumlah Kematian Ibu dari Keluarga Miskin	Persen	-	0,125	0,130	0,10	Aplikasi MPDN	Data kemiskinan hrusnya dari OPD terkait	Koordinasi lintas OPD terkait data kemiskinan di Kabupaten	Indikator negatif
41	DINAS KESEHATAN	Kesehatan		Persentase Kematian Bayi dari Keluarga Miskin (%)	Jumlah Kematian Bayi dari Keluarga Miskin	Persen	-	0,680	0,698	0,680	Aplikasi MPDN	Data kemiskinan hrusnya dari OPD terkait	Koordinasi lintas OPD terkait data kemiskinan di Kabupaten	Indikator negatif
42	DINAS KESEHATAN	Kesehatan		Angka Kasus Stunting dari Keluarga Miskin (Angka)	Jumlah Kasus Stunting dari Keluarga Miskin	Angka	-	317	317	317	Aplikasi GUS	Data kemiskinan hrusnya dari OPD terkait	Koordinasi lintas OPD terkait data kemiskinan di Kabupaten	Indikator negatif
43	DINAS KESEHATAN	Kesehatan	Partisipasi Perlindungan Sosial dan Inklusi Sosial	Persentase Keluarga Miskin yang telah dijamin dalam UHC dengan status PBIJK dan PBPU BP Pemda (%)	Jumlah peserta PBIJK dan PBPU BP Pemda dibagi dengan masyarakat miskin yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG														
44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing Daerah	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan (%)	Rata-rata realisasi anggaran program sumber daya air ditambah program penyelenggaran jalan dibagi rata-rata anggaran program sumber daya air ditambah program penyelenggaran jalan yang ditetapkan dalam APBD tiga tahun terakhir kali seratus persen	Persen	-	73	72,88	69,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pekerjaan fisik telah selesai dilaksanakan, namun beberapa administrasi keuangan pekerjaan belum dapat dituntaskan sehingga tercatat sebagai kurang bayar	Administrasi akan diselesaikan pada tahun 2026	
45	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (Meter) dibagi Total Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten (Meter)	Persen	49,27	50,47	49,85	51,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
46	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten (%)	Vol Daya Tampung Waduk Kab (m3)/Vol Daya Tampung Kapasitas Waduk (Kapasitas Ideal) m3	Persen	65,73	66,37	65,86	66,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
47	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong (%)	*) persentase capaian normalisasi sungai ditambah persentase capaian Pembangunan retarding basin ditambah persentase capaian Pengadaan Lahan ditambah persentase capaian Perencanaan Retarding Basin dibagi empat kegiatan ditambah persentase capaian N-1	Persen	-	9,82	9,82	12,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
48	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	(Kondisi Jalan Baik ditambah Sedang) Jalan Kabupaten (kilometer) dibagi Panjang Total Jalan Kabupaten(kilometer) kali seratus persen	Persen	76,20	70,94	70,74	71,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
49	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa (%)	Kondisi Jalan Baik ditambah Sedang Jalan Poros Desa (kilometer) dibagi Panjang Total Jalan Poros Desa (kilometer) kali seratus persen	Persen	-	69,48	69,86	69,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (%)	Luas kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (Ha) dibagi Luas ruang daratan yang diatur dalam rencana tata ruang (Ha) kali seratus persen	Persen	-	3,33	1,34	3,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
51	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan (%)	Jumlah lokasi yang dibebaskan / Jumlah lokasi yang direncanakan	Persen	100	60	50	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
52	DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T ditambah Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dibagi jumlah rumah tangga seluruhnya dikali seratus persen	Persen	23,41	23,41	23,41	24,22	1. BPS 2. Data Penyedotan Lima Tahun Terakhir UPT PLCD			
53	DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung dan lingkungannya	Persentase penerbitan SPPST Bangunan Gedung (%)	Jumlah pengajuan SPPST dibagi jumlah penerbitan SPPST dikali seratus persen	Persen	56,98	50,11	56,98	57,81	DCKPKP			
54	DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur PSU Perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	Persentase PSU Perumahan dan permukiman tertangani (%)	Presentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik dijumlah Presentase Saluran Lingkungan dalam kondisi baik dijumlah Presentase PSU makam dalam kondisi baik dibagi tiga	Persen	0,06	0,06	0,06	2,14	DCKPKP			
55	DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur sistem drainase permukiman dalam kondisi baik	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik (%)	Panjang kumulatif drainase yang ditangani dibagi panjang keseluruhan drainase	Persen	56,96	64,13	56,96	64,13	DCKPKP			
56	DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan melalui Penyediaan Hunian Layak dan Air Minum yang Merata bagi Seluruh Rumah Tangga.	Persentase Capaian Penurunan Backlog Perumahan (%)	Backlog tahun ke n dibagi backlog ke n-1 dikali seratus persen	Persen	26,05	7	26,05	16,60	DCKPKP			
57	DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Persentase korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi yang mendapatkan hunian layak dan aman (%)	Jumlah korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi yang mendapatkan hunian layak dan aman dibagi jumlah total korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi yang membutuhkan hunian layak dan aman dikali seratus persen	Persen	100	100	100	100	DCKPKP			
58	DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Persentase Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (%)	Luas kawasan kumuh tertangani dibagi basline luas kawasan kumuh	Persen	11,32	0,01	11,32	0,6	DCKPKP/BAPPEDA			
59	DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan dibagi Jumlah rumah tangga dikali seratus persen.	Persen	82,4	82,4	82,4	86,24	BPS			
60	DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Jumlah rumah tangga dengan akses Perpipaan di Perkotaan / Jumlah Rumah Tangga Perkotaan x 100%	Persen	78,81	78,81	78,81	40,24	PDAM, BBPKAD	Penyesuaian target renstra 2021-206	Alokasi peningkatan kerangka pendanaan	
DINAS SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA														
61	DINAS SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Menguatkan Keamanan dan	Persentase Penangangan Gangguan Tibumtranmas yang Diselesaikan (%)	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Yang Ditangani dibagi Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Yang Diselesaikan x 100%	Persen	100	100	100	100	Laporan Bidang Trantibum Satpol PP Gresik 2025	Jumlah personel Satpol PP belum ideal dibanding luas wilayah & jumlah kasus	Pembagian group kerja sesuai wilayah dan disesuaikan dengan jumlah, potensi serta kapasitas personil	

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
62	DINAS SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Keamanan dan Ketertiban	Rasio Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup (Rasio)	Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran Perda yang Terdidentifikasi	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	Laporan Bidang Penegakan Perda Satpol PP Gresik 2025	Anggaran penegakan Perda belum memadai untuk operasi rutin dan penindakan terpadu	Memaksimalkan anggaran yang ada untuk operasi rutin dan penindakan terpadu	
63	DINAS SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat	Rasio Linmas terhadap RT (per RT) (Rasio)	Jumlah Anggota Linmas dibagi Jumlah RT	Rasio	1.	1,1	1.	1,12	Laporan Bidang Perlindungan Masyarakat Dinas Satpol PP 2025	Peran Linmas belum dipahami sebagai kebutuhan bersama	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peran linmas dalam ketentraman dan ketertiban	
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN														
64	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana, mempercepat respons penanganan kebakaran, dan menurunkan kerugian pasca bencana.	Rerata Respon Time Rate Penanganan Kebakaran (Menit)	Satuan pengukuran adalah menit, dengan rentang 0–60 menit. target kinerja mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia, armada, peralatan, cakupan wilayah kerja, serta kondisi infrastruktur. berdasarkan rpjmd kabupaten gresik tahun 2025–2029, indikator ini dinyatakan tercapai sempurna apabila rata-rata response time pelayanan pemadaman kebakaran setiap tahun tidak melebihi 48,83 menit	Menit	48,83	48,83	48,83	48,82	Pencatatan Internal / Data Layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Capaian indikator rerata response time tahun 2025 menunjukkan angka 48,82 menit dari target 48,83 menit, yang secara administratif telah memenuhi sasaran. Namun, angka tersebut menyimpan paradoks kinerja karena masih terdapat wilayah yang berada di luar radius efektif 7,5 km dari pos eksisting (Gresik Kota, Dukun, Menganti, Driyorejo). Kondisi ini menimbulkan disparitas spasial, di mana wilayah perkotaan relatif terlayani dengan baik, sementara wilayah penyangga dan kepulauan seperti Pulau Bawean, Duduk Sampeyan, Wringinanom, Manyar, Bungah sisi Pantura, dan Panceng mengalami waktu tanggap jauh di atas standar SPM 15 menit. Selain itu, terdapat hambatan aksesibilitas pada titik-titik mikro	Untuk memperkuat capaian sekaligus mengurangi disparitas spasial, strategi utama adalah melakukan dekonsentrasi layanan melalui pembangunan pos penunjang di wilayah blindspot. Penempatan pos baru secara strategis di Pulau Bawean, Duduk Sampeyan, dan Wringinanom akan memperkecil radius layanan, sehingga rata-rata waktu tanggap dapat ditekan mendekati standar ideal 15 menit. Langkah ini akan memastikan bahwa capaian administratif benar-benar mencerminkan perlindungan yang merata bagi seluruh masyarakat. Selain itu, diperlukan	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														
65	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana	penurunan kerugian pasca bencana (%)	Jumlah Early Warning System yang terpasang/ sistem peringatan dini	Persen	-	30	30	30	BPBD	Formulasi perhitungan di Tahun 2024 dan 2025 berbeda. Keterbatasan anggaraan menyebabkan peningkatan dan monitoring pembentukan destana masih kurang maksimal.	Peningkatan Efisiensi melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan pelaporan daring dalam monitoring dan evaluasi Desa Tangguh Bencana untuk mengurangi kebutuhan biaya operasional lapangan.	
66	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penanggulangan Bencana Daerah		Rasio Desa Tangguh Bencana (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibanding jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik dikali 100%	Rasio	-	0,46	0,40	0,47	BPBD	Belum maksimalnya penghimpunan data kerugian pasca bencana pada berbagai sektor di Perangkat Daerah terkait	Meningkatkan koordinasi antara BPBD dengan perangkat daerah teknis terkait (PU, Perkim, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, dan OPD lainnya) melalui penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas dalam penghimpunan data kerusakan dan kerugian pasca bencana.	

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
67	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana (Rasio)	Jumlah masyarakat yang mengikuti partisipasi pra mitigasi dibanding dengan Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana dikali 100%	Rasio	-	0,28	0,28	0,28	BPBD	Kolaborasi antar pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat masih belum efektif dalam partisipasi mitigasi bencana	Penyusunan Program Mitigasi Kolaboratif Berbasis Wilayah Mengembangkan program mitigasi bencana yang disusun dan dilaksanakan secara kolaboratif antar pemangku kepentingan dengan fokus pada wilayah rawan bencana, sehingga peran masing-masing pihak dapat saling melengkapi.	
DINAS SOSIAL														
68	DINAS SOSIAL	Sosial	Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan (%)	Jumlah masyarakat rentan yang mendapat perlindungan sosial dibagi jumlah DTKS/DTSEN x 100%	Persen	-	28	28	28,64	DTKS/DTSEN			
69	DINAS SOSIAL	Sosial	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral (%)	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dibagi dengan keluarga rentan yang tergraduasi x 100%	Persen	-	0	3	0	DTKS/DTSEN			
70	DINAS SOSIAL	Sosial		Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat program perlindungan sosial dibagi jumlah disabilitas x 100%	Persen	-	16	15	19,42	DTKS/DTSEN			
71	DINAS SOSIAL	Sosial		Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)	Jumlah lansia miskin yang mendapatkan program perlindungan sosial dibagi jumlah lansia dalam DTKS/DTSEN x 100%	Persen	-	22	18	22,64	DTKS/DTSEN			
72	DINAS SOSIAL	Sosial	Mewujudkan pengurangan ketimpangan	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk (%)	Jumlah Desil 1-2 dibagi dengan jumlah penduduk x 100%	Persen	-	20	21	24,14	DTKS/DTSEN			
DINAS TENAGA KERJA														
73	DINAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	Meningkatnya Partisipasi Ketenagakerjaan Perempuan	Rasio Pencari Kerja Perempuan yang mendapatkan Pekerjaan di sektor formal dan informal (%)	Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja perempuan yang terdaftar* 100 % (Melalui Redinaker)	Persen	-	30,60	30	30,80	Dinas Tenaga Kerja			
74	DINAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia kerja * 100 %	Persen	-	56,84	56,37	52,54	BPS	Perubahan struktur partisipasi penduduk usia kerja dalam pasar kerja. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk perempuan yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi, seperti melanjutkan pendidikan, mengurus rumah tangga, atau tidak aktif mencari pekerjaan.	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja perempuan	
75	DINAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	Meningkatnya Partisipasi Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas	Rasio Pekerja Penyandang Disabilitas (%)	Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas / Jumlah Total Pekerja * 100%	Persen	-	0,0013	0,0012	0,01	Dinas Tenaga Kerja			

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
76	DINAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	Meningkatkan rasio pelatihan tenaga kerja terhadap kebutuhan tenaga kerja bersertifikasi serta mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.	Rasio Pelatihan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikasi (%)	Jumlah Pencari Kerja yang Telah Dilatih dan Bersertifikat / Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikat * 100%	Persen	-	13,33	13	14,1	Dinas Tenaga Kerja			
77	DINAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja		Rasio Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Manufaktur (%)	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Sektor Manufaktur / jumlah total tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri * 100 %	Persen	-	42,11	21,65	45,98	Dinas Tenaga Kerja			
78	DINAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	Meningkatnya Tingkat Produktivitas Sumber Daya Manusia	Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) / Jumlah Tenaga Kerja * 100%	Persen	-	1,17	1,15	1,21	BPS, Data Diolah			
79	DINAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja		rasio penempatan kerja terhadap tenaga kerja dilatih (%)	Jumlah Peserta Pelatihan yang Ditempatkan Bekerja / Total Peserta Pelatihan * 100 %	Persen	-	70-73	72,12	71,31	Dinas Tenaga Kerja			
80	DINAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	Meningkatkan keberdayaan keluarga miskin dalam mendapatkan akses ketenagakerjaan	Rasio Pekerja dari Keluarga Miskin yang telah dijamin dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Jumlah Pekerja dari Keluarga Miskin yang Terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan / Jumlah total tenaga kerja *100%	Persen	-	40,0	40,0	40,5	Dinas Tenaga Kerja			
81	DINAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia kerja * 100 %	Persen	-	72,16	71,61	67,99	BPS	Perubahan struktur partisipasi penduduk usia kerja dalam pasar kerja. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi, seperti melanjutkan pendidikan, mengurus rumah tangga, atau tidak aktif mencari pekerjaan. Selain itu, karakteristik gresik sbg daerah industri juga memungkinkan terjadinya kompetisi tenaga kerja dengan pekerja dari luar daerah.	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja 2. Penguatan sistem informasi pasar kerja	
82	DINAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan dan penyelesaian hubungan industrial yang adil dan inklusif	Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah (%)	Jumlah Pekerja Penerima Upah yang Terdaftar di Jaminan Sosial Ketenagakerjaan / Jumlah Total Pekerja Penerima Upah * 100%	Persen	-	47,64	47,64	47,64	Dinas Tenaga Kerja			
83	DINAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja		Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial (%)	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang Diselesaikan / Jumlah total kasus * 100%	Persen	-	98,5	97,5	100	Dinas Tenaga Kerja			
84	DINAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja		Rasio Perusahaan yang telah membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum (%)	Jumlah Perusahaan besar dan sedang yang Membayar Gaji Sesuai UMK / Jumlah total perusahaan besar dan sedang * 100%,	Persen	-	90-100	100	96,83	Dinas Tenaga Kerja			
85	DINAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Jumlah peserta aktif BPJS / Jumlah Tenaga Kerja	Persen	-	52,69	52,69	42,06	BPJS	1. Dominasi pekerja informal 2. Kepatuhan perusahaan yang belum optimal 3. Banyak UMKM belum terdaftar 4. Mobilitas tenaga kerja tinggi 5. Data ketenagakerjaan belum terintegrasi 6. Sosialisasi program masih terbatas	1. Penguatan kepatuhan perusahaan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 2. Perluasan Kepesertaan Pekerja Sektor Informal 3. Penguatan Sistem Pendataan dan Integrasi Data Tenaga Kerja 4. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 5. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah	

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
DINAS LINGKUNGAN HIDUP														
86	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup	Mewujudkan Lingkungan yang bersih, indah dan Sehat	Persentase RTH (Persentase)	(Luas RTH (km2) / luas wilayah (km2)) x 100	Persen	2,5	12,07	11,65	12,07	SIPSN	Masih tingginya alih fungsi lahan berdampak pada keterbatasan ruang untuk penambahan RTH. Proses deliniasi penambahan RTH yang masih mengandalkan citra Google Earth serta mekanisme input data pada aplikasi SIPSN yang dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus menyebabkan proses penginputan data menjadi kurang efisien dan memerlukan waktu yang relatif lama.	Melakukan peningkatan akurasi dan pemutakhiran data spasial penambahan RTH, serta pengaturan perencanaan dan penjadwalan input data ke dalam aplikasi SIPSN agar lebih tertib, terintegrasi, dan efisien.	
87	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup		Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	Prosentase timbulan sampah (jumlah pengurangan dan penanganan sampah) dibagi dengan jumlah timbulan sampah . Jumlah pengurangan adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat dan penanganan adalah yang dilakukan oleh pemerintah.	Persen	0	25,66	24,44	25.66*	SIPSN	Kurangnya Perilaku dan kesadaran masyarakat dalam aktif untuk ikut mengelola sampah. Kertbatasan fasilitas pelayanan persampahan terhadap timbulan sampah	optimlisasi pelayanan persampahan, pembinaan dan penyuluhan bank sampah ,GKMS	Jumlah Penduduk yang digunakan masih menggunakan data penduduk semester I dispendukcapil.
88	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup		Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	(Jumlah rumah tangga yang terlayani persampahan / jumah total rumah tangga)*100	Persen	0	58,72	58,7	58.8*	Hasil Analisa DLH, 2025	Kurangnya Perilaku dan kesadaran masyarakat dalam aktif untuk ikut mengelola sampah. Kertbatasan fasilitas pelayanan persampahan terhadap timbulan sampah	optimlisasi pelayanan persampahan, pembinaan dan penyuluhan bank sampah ,GKMS	
89	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup		Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan untuk Kelompok Rentan (%)	(Jumlah taman ramah anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia / Jumlah taman publik yang terkelola) x 100	Persen	0	14	14	14,29	Hasil Analisa DLH, 2025	Capaian rasio taman ramah kelompok rentan telah sesuai target, namun masih diperlukan peningkatan pemenuhan standar aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan secara merata pada seluruh taman yang dikelola.	Untuk meningkatkan capaian persentase taman ramah anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan jumlah taman yang telah tersertifikasi ramah melalui penataan dan peningkatan kualitas taman eksisting agar memenuhi standar ramah anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, serta mendorong proses sertifikasi taman ramah sesuai ketentuan yang berlaku.	
90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Indah &	Indeks Kualitas Air (Indeks)	hasil rerata indeks kualitas air seluruh titik pantau/jumlah titik pantau	Indeks	50,4	61,58	50	73,07	Berdasarkan Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Aplikasi SITALA	Potensi kegagalan dapat terjadi apabila: 1) Pengawasan oleh DLH terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan dan pemantauan Air Limbah yang dibuang ke badan air permukaan tidak dijalankan dengan maksimal; 2) Rendahnya kolaborasi antara DLH dengan perusahaan/pelaku usaha untuk senantiasa menjaga kualitas air permukaan/sungai; 3) Tidak ada kebijakan DLH yang mendorong pelaku usaha agar melakukan pemanfaatan Air Limbah yang telah diolah untuk aplikasi ke tanah / untuk kegiatan penyiraman	1) Pengawasan maksimal oleh DLH terhadap pelaku usaha yang membuang Air Limbahnya ke Badan Air Permukaan di Kab. Gresik, baik pengawasan langsung di lapangan maupun pengawasan tidak langsung (pelaporan online); 2) Melakukan kolaborasi aktif antara DLH dengan perusahaan/pelaku usaha untuk senantiasa menjaga kualitas air permukaan/sungai; 3) Mendorong pelaku usaha untuk melakukan pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi ke Tanah atau penyiraman dari air limbah yang telah diolah dalam hal perizinan Air Limbah yang diajukan	

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
91	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup	yang Tidak & Inklusif terhadap Kelompok Rentan	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	100 - [84,3 - (Tutupan Lahan x 100)] x (50/54,3)	Indeks	35,52	47,54	35,3	49,19	Berdasarkan Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Aplikasi SITALA	Masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan tutupan lahan akibat keterbatasan lahan, tekanan alih fungsi lahan, serta kebutuhan pemeliharaan yang berkelanjutan. Serta terdapat perbedaan metodologi tersebut menyebabkan keterbatasan dalam membandingkan capaian antar tahun secara langsung.	Melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah, peningkatan kegiatan penanaman dan pemeliharaan vegetasi, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam upaya penambahan dan perlindungan tutupan lahan hijau.	
92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	100 - [84,3 - (Tutupan Lahan x 100)] x (50/54,3)	Indeks	83,84	77,83	82,94	74,45	Berdasarkan Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Aplikasi SITALA	1) Kurangnya pemantauan gas buang Emisi kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Gresik 2) Masih banyak sumber Emisi fugitif yang belum dikelola dengan baik (Emisi fugitif adalah emisi yang secara teknis tidak dapat melewati cerobong, ventilasi atau sistem pembuangan Emisi yang setara, misalnya debu dari pipa di dalam pabrik yang tidak melalui cerobong, debu kendaraan, dst), 3) Terdapat penambahan parameter uji PM2,5 dan perubahan perhitungan rumus IKU berdasarkan PermenLH/BPLH No.14 Tahun 2025 sehingga mempengaruhi nilai IKU dan ketercapaian target	1) Koordinasi dengan OPD/instansi terkait agar mensyaratkan perpanjangan STNK dengan mewajibkan Lolos Uji Emisi Kendaraan Bermotor; 2) Memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau dengan tanaman yang dapat berfungsi sebagai green belt dan menyerap Emisi fugitif	
93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup		Rasio Perusahaan yang menerapkan Green Industry (%)	Jumlah perusahaan ramah lingkungan (Green Industry) / Jumlah total perusahaan	Persen	0	6,67	5,26	6,86	Hasil Analisa DLH, 2025	Potensi ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perizinan terkait lingkungan dan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung serta melakukan sosialisasi terkait kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan	
94	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup	Mewujudkan Lingkungan Masyrakat yang sejahtera	Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan (%)	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan / Jumlah seluruh rumah tangga miskin	Persen	0	67	67	67,44	Hasil Analisa DLH, 2025	Perilaku dan kesadaran masyarakat dalam aktif untuk ikut mengelola sampah. Kertbatasan fasilitas pelayanan persampahan terhadap timbulan sampah	optimlisasi pelayanan persampahan, pembinaan dan penyuluhan bank sampah ,GKMS	
95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup	Optimalisasi Pendanaan Infrastruktur Sektoral	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup (%)	(Realisai Belanja Program yang terkait Infrastruktur Lingkungan Hidup/ Pagu Anggaran Program yang terkait Infrastruktur LIngkungan Hidup) x 100%	Persen	0	80	80	80	Hasil Analisa DLH, 2025	kebutuhan Belanja Infrastruktur 90% untuk operasional persampahan dan pertamanan diakibatkan pertumbuhan jumlah penduduk, sedangkan kemampuan yang ada masih sekitar 80%	optimlisasi pelayanan persampahan dan pengelolaan RTH publik	

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL														
96	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil	Pertumbuhan kepemilikan KIA (%)	Jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) tahun n dikurangi jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA tahun n-1 DIBAGI jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA tahun n-1 DIKALI 100%	Persen	0,08	0,024	0,08	0,066	Agregat bulanan Database SIAK			Di tahun 2024, capaian lebih tinggi dari tahun 2025 dikarenakan tahun 2024 terdapat program percepatan kepemilikan KIA, sehingga dilakukan pembuatan KIA secara kolektif massal dari pengajuan sekolah (TK, SD dan SMP)
97	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan Manajemen Pelayanan	Persentase pemutakhiran data dan dokumen kependudukan (%)	Jumlah KK (Kartu Keluarga) belum barcode yang telah dimutakhirkan menjadi KK barcode DIBAGI jumlah KK DIKALI 100%	Persen	83	84,00	83,00	98,16	Agregat bulanan Database SIAK			
103	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP (%)	Jumlah penduduk yang memiliki e-KTP DIBAGI jumlah penduduk wajib KTP DIKALI 100%	Persen	99,53	99,56	99,53	99,22	Agregat semester II Database SIAK	adanya pertambahan penduduk wajib KTP yakni yang usia 16 tahun menjadi 17 tahun serta adanya keterbatasan ketersediaan blanko KTP-el	peningkatan pelaksanaan jemput bola perekaman dan pencetakan KTP dan sosialisasi kesadaran adminduk	
104	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran DIBAGI jumlah seluruh penduduk DIKALI 100%	Persen	61,04	65,00	61,04	65,93	Agregat bulanan Database SIAK			
105	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.	Indeks	90,6	90,61	90,60	90,77	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
106	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin (%)	jumlah penduduk miskin yang telah memiliki e-KTP DIBAGI dengan jumlah seluruh penduduk miskin DIKALI 100%	Persen	88	88,33	88,33	99,96	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
107	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Persentase kepemilikan AKta Kelahiran untuk Keluarga Miskin (%)	jumlah penduduk miskin yang telah memiliki Akta Kelahiran DIBAGI dengan jumlah seluruh penduduk miskin DIKALI 100%	Persen	88,65	88,67	88,67	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
108	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperluas Kesempatan Kerja Melalui Pelayanan Adminduk	Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk (%)	Jumlah pekerja migran yang mengajukan permohonan pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan DIBAGI jumlah dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan DIKALI 100%	Persen	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
112	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Return of Aset Usaha Desa (BUMDesa dan Koperasi Merah Putih) (%)	((Laba bersih bumdes+ Laba Bersih Koperasi Desa Merah Putih) dibagi total hasil aset desa) dikali 100%	Persen	-	2,09	1,94	11,47	DDC			Pada tahun 2025 terbatas hanya menghitung Laba Bersih dari BUMDes, sebab Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) masih dalam proses pendirian belum operasional.
113	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam	Rasio Pendapatan Asli Desa (%)	(PADes dibagi Total pendapatan desa)	Persen	-	0,0541	0,0534	0,08	SISKEUDES			

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
114	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	perdesaan dalam mendukung kinerja ekonomi Daerah dan Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	(jumlah desa mandiri dibagi total desa) x 100%	Persen	-	47,58	100	100	INDEKS DESA			
115	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Return of Investment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih) (%)	(keuntungan investasi dibagi total investasi) x 100%	Persen	-	25,29	25,07	25,66	DDC			Pada tahun 2025 terbatas hanya menghitung Laba Bersih dari BUMDes, sebab Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) masih dalam proses pendirian belum operasional.
116	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Kelembagaan Desa	Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa (Indeks)	(Nilai standar kompetensi aparatur desa + nilai kualifiasi pendidikan aparatur desa+nilai prodiktivitas aparatur desa+Nilai integritas aparatur desa)/4	Indeks	-	60	60	62,05	LAPORAN HASIL SURVEY NILAI INDEKS APARATUR PEMERINTAH DESA YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS PMD			
117	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Keberdayaan Multidimensi Kemasyarakatan Desa	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Desa (%)	REALISASI (BLT + KETAHANAN PANGAN + STUNTING) dibagi PAGU PERENCANAAN (BLT + KETAHANAN + STUNTING) X 100%	Persen	-	91,81	91,81	97,56	SISKEUDES			
118	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa (%)	jumlah aparatur pemerintah desa (BPD+RT/RW yang ,mendapat BPJS ketenagakerjaan) dibagi jumlah aparatur pemerintah desa(BPD+RT/RW)	Persen	-	0,84	0,84	0,97	SIPP(Aplikasi BPJS)			
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK														
125	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun (%)	$UKP_{\leq 20}(\%) = \frac{\text{Jumlah perempuan menikah pertama kali usia} \leq 20 \text{ tahun}}{\text{Total perempuan menikah pertama kali}} \times 100$	Persen	12,15%	9,27	9,27	8,21	Laporan Tahunan Cakupan Usia Kawin Pertama			Indikator negatif
126	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Total Fertility Rate (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ ASFRi : ASFR untuk wanita pada kelompo usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	1,9-2	1.92-2	1,92	1,92	aplikasi SIPERINDU			Tahun 2024
127	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Akses Terhadap Layanan Perlindungan Khusus Anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin (%)	$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah kasus anak dalam situasi khusus dengan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah seluruh kasus anak dalam situasi khusus}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah seluruh anak pekerja migran yang dipulangkan}}{\text{Jumlah seluruh anak pekerja migran yang dipulangkan}} \times 100$	Persen	-	5,1	10	11,92%*	Data pengajuan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama			Tahun 2024
128	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan (%)	$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah kasus anak dalam situasi khusus dengan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah seluruh kasus anak dalam situasi khusus}} \times 100$	Persen	-	100	100	100%	Laporan Penanganan Kasus di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak			

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
129	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Persentase Kasus Anak Dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Konprehensif (%)	$UN(\%) = \frac{\text{Jumlah perempuan yang kebutuhan ber-KB-nya tidak terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100$	Persen	100	100	100	100%	Laporan Penanganan Kasus di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak			
130	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	Indeks dihitung berdasarkan survei atau data lapangan terkait indikator turunan dari dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga Satuan: Skor indeks (0–100) Rentang nilai: 0–40 = Rentan 40–70 = Berkembang ≥70 = Tangguh Periode penghitungan: 1 tahun	Indeks	65,72	66,72	65,72	76,9	aplikasi SIPERINDU			
131	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Perempuan dalam Pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan (%)	$\text{Rasio}(\%) = \frac{\text{Jumlah usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan}}{\text{Jumlah seluruh usulan yang diajukan oleh perempuan}} \times 100$	Persen	25%	30	40	73%	- Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, Renja OPD, RPJMD) - Berita acara Musrenbang atau forum partisipasi lainnya			
132	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif gender (%)	$\text{Presentase}(\%) = \frac{\text{Jumlah perangkat daerah dengan} \geq 30\% \text{ kegiatan dilengkapi dokumen ARG}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \times 100$	Persen	25	30	30,43	96%	- Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) perangkat daerah - Dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) perangkat daerah - Laporan evaluasi pelaksanaan PUG dari Bappeda atau instansi terkait			
133	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Menurunkan Ketimpangan Kesehatan Reproduksi	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)		Persen	9,6	9,17	9,18	7,91%	Aplikasi SIGA BKKBN			
134	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Akses Terhadap Layanan Perlindungan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin (%)	$UKP_{\leq 20,KM}(\%) = \frac{\text{Jumlah catin keluarga miskin usia} \leq 20 \text{ tahun}}{\text{Jumlah seluruh catin keluarga miskin}} \times 100$	Persen	-	9	9	10,60	Laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	perkawinan usia anak lahir dari berbagai permasalahan yang saling terkait, antara lain kemiskinan, nilai / beliefs, akses terhadap pendidikan dan infformasi serta berbagai faktor lain. Oleh karena itu, menurunkan kasus perkawinan usia anak membutuhkan proses yang panjang, serta rencana yang terstruktur dan berkelanjutan	Akan disusun serta dilaksanakan rencana invertensi lintas sektoral untuk meminimalkan terjadinya perkawinan anak	

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
135	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Perempuan dalam Pembangunan dan Keberdayaan Multidimensi	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Konprehensif (%)	$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dengan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan}} \times 100$	Persen	100	100	100	100%	Laporan Penanganan Kasus di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak			
136	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Akses Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin Terhadap Program Pemberdayaan	Rasio Kepala Rumah Tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan (%)	$\text{Rasio (\%)} = \frac{\text{Jumlah KRT perempuan miskin yang menerima program pemberdayaan}}{\text{Jumlah seluruh KRT perempuan miskin}} \times 100$	Persen	-	6,86	6,86	8,64%	Data program pemberdayaan dari dinas/instansi pelaksana (Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja, dll.) Data kepala rumah tangga perempuan miskin dari DTSEN Kementerian Sosial			
DINAS PERHUBUNGAN														
137	DINAS PERHUBUNGAN	Perhubungan	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi, untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	Cakupan layanan transportasi (%)	Jumlah Ruas Jalan di Kabupaten Gresik yang terlayani Angkutan Umum ---------- ----------x100 Jumlah Ruas Jalan di Kabupaten Gresik	Persen	36,31	36,31	36,31	36,31%	Data Trayek Angkutan Umum Tahun 2025 dan SK Bupati Penetapan Tuas Jalan	sejalan dengan perkembangan kota, masih terdapat ruas jalan yang belum terlayani angkutan umum terutama ruas jalan yang menghubungkan perpindahan antar moda transportasi	melaksanakan revitalisasi trayek angkutan dan menetapkan Angkutan Feeder sebagai penghubungn antar Moda transportasi	
138	DINAS PERHUBUNGAN	Perhubungan		Nilai volume to capacity (VC) ratio jalan kabupaten gresik (%)	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di Area Perkotaan yang memiliki Nilai VC Ratio <0,50 ---------- ----------x100 Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di Area Perkotaan	Persen	80,43	80,43	80,43	80,43%	Dokumen Kajian Lalu Lintas Harian Rata rata dan SK Bupati Penetapan Ruas Jalan	masih adanya Ruas Jalan perkotaan yang tidak bisa ditingkatkan Kelas Jalannya seiring dengan pertumbuhan kota sehingga mengakibatkan hambatan hambatan yang disebabkan karena blm terdapat Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas serta adanya parkir parkir liar di tepi Jalan umum.	Berkoordinasi dengan Dinas PU terkait Kelas Jalan, penempatan personil di titik lokasi yang rawan kemacetran, pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas serta penertiban parkir liar di Tepi Jalan Umum	
139	DINAS PERHUBUNGAN	Perhubungan	Meningkatkan transportasi dan infrastruktur ramah lingkungan serta mendorong penerapan energi hijau dan tanggung jawab lingkungan oleh sektor publik dan swasta	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi (%)	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Ramah Energi ---------- ----------x100 Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	50	50	50	50	Database Sarana dan prasarana Perhubungan	Penggunaan Kendaraan Pribadi merupakan salah satu penyumbang emisi yang besar di sektor transportasi selain itu penggunaan Lampu jenis mercury juga menggunakan energy yang sangat besar.	Melaksanakan Kajian Angkutan Feeder dengan alternativ menggunakan Kendaraan Angkutan Umum berbbahan bakar listrik serta mengganti Lampu PJU yang masih menggunakan Mercury dengan Lampu LED ramah energy	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
140	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya digitalisasi Layanan	Persentase digitalisasi layanan (%)	jumlah layanan yang telah terdigitalisasi (layanan yang sudah dapat diakses dan/atau diselesaikan secara digital) terhadap total jumlah layanan yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah dikali 100 %	Persen	-	43	41	43	SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Daftar Layanan Digital			
141	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persandian	meningkatnya implementasi Persandian pada digitalisasi layanan	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian (%)	Jumlah layanan digital yang sudah menerapkan persandian dibagi jumlah layanan yg terdigitalisasi X 100%	Persen	-	15,78	15,78	15,78	- Data digitalisasi layanan - Rekap laporan pengecekan kerentanan keamanan (uji pentest) - Rekap laporan hasil perbaikan uji pentest			

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
142	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Statistik	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (%)	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dibagi jumlah seluruh perangkat daerah X 100%	Persen	100	100	100	100	Rekap data statistik sektoral dari SIPD E-Walidata			
143	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi	Nilai keterbukaan informasi publik (Nilai)	Nilai SAQ E-Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik	Nilai	-	40	35,77	89,67	Nilai Self-Assessment Questionnaire (SAQ) E-Monev keterbukaan informasi publik	Nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dicapai melalui kelengkapan regulasi		
144	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika		persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan (%)	jumlah pengaduan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100%	Persen	-	97,10	97,10	96,8	Rekap data pengaduan dari aplikasi SP4N - Lapor	Terjadi error akibat maintenance system	- Tindak lanjut aduan menjadi kewenangan opd terdisposisi, diskominfo sebagai pejabat pelaksana pengaduan daerah yg mana secara fungsi hanya memiliki kewenangan untuk mendistribusikan dan memantau pengaduan yg masuk ke daerah -. Aplikasi span-lapor beberapa kali mengalami gangguan teknis, sehingga menghambat pengelolaan pengaduan	
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
145	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan Koperasi aktif (%)	(Jumlah koperasi aktif tahun n - jumlah koperasi aktif tahun n-1)/jumlah koperasi aktif tahun n -1 x 100	Persen	-	1,84	8,96	48,59	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan			Adanya peningkatan lonjakan koperasi dikarenakan pembetukan koperasi desa merah putih sebanyak 356 kopdes
146	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif	Pertumbuhan Usaha Mikro (%)	(jumlah usaha mikro tahun n - jumlah usaha mikro tahun n-1)/ jumlah usaha mikro tahun n-1 x 100	Persen	-	0,63	33,81	0,64	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan			Di tahun 2024 terdapat SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal) dari provinsi sehingga ditahun 2025 untuk penambahan usaha mikro menjadi menurun
147	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perdagangan	Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (%)	(Nilai neraca perdagangan tahun n - nilai neraca perdagangan tahun n -1)/ nilai neraca perdagangan tahun n-1 x 100	Persen	-	0,05	33,34	33,25	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan			Penurunan nilai neraca perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2025 dipengaruhi oleh meningkatnya impor bahan baku industri, melemahnya permintaan ekspor global, fluktuasi harga komoditas ekspor, serta tingginya ketergantungan struktur industri terhadap bahan baku impor.

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
148	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perindustrian	Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan IKM (%)	(Jumlah IKM tahun n - jumlah IKM tahun n-1)/ jumlah IKM tahun n-1 x 100	Persen	-	0,92	1,14	1,26	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan			Tahun 2022 ada perubahan dari sebelumnya Industri Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi Industri Kecil, Menengah Saja
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
151	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penanaman Modal	Meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis	Realisasi Investasi (triliyun) (Rp)	Besaran nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang direalisasikan, dilaporkan oleh pelaku usaha serta tercatat pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tahun n	Rp	-	20,00	37,9	29,49	DPMPTSP	-	-	-
152	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penanaman Modal		Realisasi investasi sektor manufaktor (triliun rupiah)	Besaran nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bidang industri pengolahan yang direalisasikan, dilaporkan dan tercatat pada Kementerian Investasi/BKPM di tahun n	Triliun rupiah	-	13,00	32,5	22,62	DPMPTSP	-	-	-
153	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penanaman Modal		Pertumbuhan realisasi investasi (%)	(Realisasi investasi tahun n - realisasi investasi tahun n-1)/realisasi investasi tahun n-1 x 100	Persen	41,99	0,50	22,66	-22,21	DPMPTSP	Menurunnya realisasi investasi pada sektor industri besar dan manufaktur, yang pada tahun sebelumnya menjadi kontributor utama investasi, namun pada tahun 2025 belum terdapat proyek berskala besar yang terealisasi secara optimal.	Melakukan promosi dan penjajakan investasi secara lebih intensif dan terarah, termasuk kepada investor potensial baru untuk memperluas basis investasi.	-
154	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penanaman Modal		Pertumbuhan investasi sektor manufaktur (%)	(Realisasi investasi sektor manufaktur tahun n - realisasi investasi sektor manufaktur tahun n-1)/realisasi investasi sektor manufaktur tahun n-1 x 100	Persen	-	65	-28,52	-30,4	DPMPTSP	Belum terealisasinya proyek manufaktur berskala besar yang telah berkomitmen berinvestasi di Kabupaten Gresik dimana hingga tahun pelaporan belum melakukan proses konstruksi, perusahaan pada tahun sebelumnya menjadi kontributor utama investasi telah menyelesaikan tahap konstruksi dan commissioning sehingga pada tahun berjalan nilai realisasi investasinya mengalami penurunan.	Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta mendorong perusahaan untuk segera merealisasikan komitmen investasi melalui percepatan pelaksanaan pembangunan/konstruksi proyek.	-
155	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penanaman Modal		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	*PDRB ADHB Industri Pengolahan* / PDRB ADHB Total *x* 100%	Persen	-	50,33	51,25	52.58**	BPS			PDRB ADHB 2025 : Angka Sangat Sementara
156	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penanaman Modal		Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (%)	Perbandingan jumlah perusahaan usaha besar yang bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik	Persen	-	25:800	0:00	38 : 800	DPMPTSP	-	-	-
157	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penanaman Modal	Meningkatkan kemudahan layanan investasi	Nilai survey kepuasan masyarakat untuk layanan perijinan dan penanaman modal (Predikat)	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka berdasarkan sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	DPMPTSP	-	-	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN														
158	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Perpustakaan	Meningkatkan Literasi Gemar Membaca Daerah	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	-	Nilai	67,51	69,51	67,51	67,04	Perpusnas	Koleksi perpustakaan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Masyarakat lebih tertarik pada media sosial, video, dan hiburan daring dibandingkan membaca buku.	Memperbanyak koleksi buku sesuai kebutuhan dan minat masyarakat Menambah koleksi baca dalam bentuk media yang mudah diakses masyarakat secara online	

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
161	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Perpustakaan		Tingkat ketercukupan bahan pustaka (%)	Jumlah penambahan bahan pustaka di tahun n / jumlah bahan pustaka baseline tahun 2024 x 100%	Persen	0,27	2	0,27	2,02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
162	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Kearsipan	Meningkatkan kualitas pelayanan menjadi landasan dalam upaya memperkuat nilai pengawasan kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal (Nilai)	-	Nilai	88,41	90-100	88,41	89,58	ANRI	Kebijakan mengenai kode klasifikasi belum sesuai dengan Permenpan No 83 Tahun 2022. Perbup No 101 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kode Wilayah Kearsipan dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik baru disahkan pada bulan Desember 2025	Perbup sudah dikirimkan ke ANRI dan sudah di verifikasi	penilaian dilakukan di bulan desember 2025 sebelum perbup disahkan
DINAS PERIKANAN														
163	DINAS PERIKANAN	Perikanan	Meningkatkan Gizi Masyarakat dalam mengkonsumsi ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	Perhitungan Konsumsi = A+B-C+15% D A = Hasil Produksi (segar dan Olahan yang dikonversi segar) B = Pemasukan Ikan dari Luar Daerah (Segar dan Olahan yang dikonversi segar) dalam Kg C = Pengiriman ikan ke Luar Daerah (segar dan olahan yang sudah dikonversi segar) dalam Kg D = Jumlah Penduduk (orang) Hasil dari perhitungan angka konsumsi ikan adalah yaitu Kg/Kapita/Tahun.	Kg/KAP/TH	55,75	57,73	56,6	58,36	BPS			
164	DINAS PERIKANAN	Perikanan	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	Jumlah produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi jumlah produksi perikanan tangkap tahun n-1 dibagi jumlah produksi perikanan tangkap tahun n-1 dikali 100%	Persen	1,95	3,23	3,22	4,17	Dinas Perikanan			
165	DINAS PERIKANAN	Perikanan		Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	Jumlah produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi jumlah produksi perikanan budidaya tahun n-1 dibagi jumlah produksi perikanan budidaya tahun n-1 dikali 100% (seratus persen).	Persen	3,05	2,43	2,24	2,44	Dinas Perikanan	Berdasarkan capaian indikator Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%), realisasi belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan produksi belum optimal dibandingkan dengan tahun sebelumnya.kondisi tersebut akibat keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan budidaya tambak, serta belum tersedianya dukungan pupuk bersubsidi yang memengaruhi produktivitas perikanan budidaya.	dilakukan pengoptimalan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran secara lebih prioritas pada kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis budidaya, termasuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna mengupayakan dukungan sarana produksi seperti pupuk bersubsidi bagi pembudidaya. Selain itu, akan dilakukan peningkatan pembinaan kepada kelompok pembudidaya serta monitoring berkala terhadap sentra budidaya untuk memastikan intervensi yang diberikan tepat sasaran dan mampu mendorong peningkatan	
166	DINAS PERIKANAN	Perikanan		Pertumbuhan produksi usaha garam rakyat (%)	Jumlah produksi usaha garam rakyat tahun n dikurangi jumlah produksi usaha garam rakyat tahun n-1 dibagi jumlah produksi usaha garam rakyat tahun n-1 dikali 100%	Persen	-	0,96	-31,2	0,97	Dinas Perikanan	Indikator kinerja merupakan indikator baru yang belum tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya, sehingga pada Tahun 2024 belum terdapat penetapan target maupun data pembanding (baseline)	Menetapkan capaian Tahun 2025 sebagai baseline dalam pengukuran kinerja periode selanjutnya serta melakukan penyelarasan dan penguatan indikator dalam dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) agar terintegrasi secara konsisten dalam siklus perencanaan dan penganggaran.	

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
167	DINAS PERIKANAN	Perikanan	Meningkatkan kualitas Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh nelayan dan pembudidaya	Persentase penurunan konflik nelayan (%)	Jumlah konflik nelayan tahun n-1 dikurangi jumlah konflik nelayan tahun n dibagi jumlah konflik nelayan tahun n-1 dikali 100%	Persen	-	2,78	-18,29	2,78	Dinas Perikanan	Indikator kinerja merupakan indikator baru yang belum tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya, sehingga pada Tahun 2024 belum terdapat penetapan target maupun data pembanding (baseline)	Menetapkan capaian Tahun 2025 sebagai baseline dalam pengukuran kinerja periode selanjutnya serta melakukan penyelarasan dan penguatan indikator dalam dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) agar terintegrasi secara konsisten dalam siklus perencanaan dan penganggaran.	
168	DINAS PERIKANAN	Perikanan		Pengawasan pengelolaan perairan umum dan darat (jumlah pelaku usaha) (Angka)	Jumlah Kawasan perairan umum dan darat yang dikelola dan diawasi setiap tahun	Angka	-	20	15	21	Dinas Perikanan	Indikator kinerja merupakan indikator baru yang belum tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya, sehingga pada Tahun 2024 belum terdapat penetapan target maupun data pembanding (baseline)	Menetapkan capaian Tahun 2025 sebagai baseline dalam pengukuran kinerja periode selanjutnya serta melakukan penyelarasan dan penguatan indikator dalam dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) agar terintegrasi secara konsisten dalam siklus perencanaan dan penganggaran.	
169	DINAS PERIKANAN	Perikanan		Persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan (%)	jumlah pelatihan terhadap kelompok nelayan tahun n dikurangi jumlah pelatihan terhadap kelompok nelayan tahun n-1 dibagi jumlah pelatihan terhadap kelompok nelayan tahun n-1 dikali 100%	Persen	-	43	42,8	43	Dinas Perikanan	Indikator kinerja merupakan indikator baru yang belum tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya, sehingga pada Tahun 2024 belum terdapat penetapan target maupun data pembanding (baseline)	Menetapkan capaian Tahun 2025 sebagai baseline dalam pengukuran kinerja periode selanjutnya serta melakukan penyelarasan dan penguatan indikator dalam dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) agar terintegrasi secara konsisten dalam siklus perencanaan dan penganggaran.	
170	DINAS PERIKANAN	Perikanan		Persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan (%)	jumlah penerima bantuan social dibagi jumlah nelayan kusuka yang terdaftar dikali 100%	Persen	-	17,6	58,8	17,84	Dinas Perikanan	Indikator kinerja merupakan indikator baru yang belum tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya, sehingga pada Tahun 2024 belum terdapat penetapan target maupun data pembanding (baseline)	Menetapkan capaian Tahun 2025 sebagai baseline dalam pengukuran kinerja periode selanjutnya serta melakukan penyelarasan dan penguatan indikator dalam dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) agar terintegrasi secara konsisten dalam siklus perencanaan dan penganggaran.	
DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA														
171	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Prestasi Pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga (%)	Jumlah Pemuda Berprestasi di bagi Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Lomba dikali 100%	Persen	-	43	42,98	44,35	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Ketidakjelasan kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor di tingkat Nasional, yang awalnya kegiatan diselenggarakan oleh Kementrian Kepemudaan dan Olahraga tetapi pada tahun 2025 dialihkan ke Kementrian Pemberdayaan Desa tetapi sosialisasi belum maksimal	Koordinasi dengan DISPORA PROV.JATIM terkait penyelengaaraan Pemilihan Pemuda Pelopor	

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
172	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kepemudaan	Perlindungan Sosial Inklusi dan pemberdayaan kelompok rentan	Persentase Pembinaan Atlit Disabilitas (%)	Jumlah atlit disabilitas yang dibina dibagi jumlah atlit disabilitas di Kabupaten Gresik dikali 100%	Persen	-	10	10	19,61	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Para penyandang disabilitas masih kurang membuka diri sehingga banyak dari mereka belum bisa tersentuh oleh pemerintah	Melakukan pendekatan kepada para penyandang disabilitas dan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah	
173	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kebudayaan	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan (%)	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan dibagi jumlah warisan budaya yang sudah ditetapkan dikali 100%	Persen	-	4	4	4,17	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	belum adanya peraturan bupati untuk penjabaran perda pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang telah ada untuk memperjelas regulasi urusan kebudayaan	melakukan pembahasan peraturan bupati tentang pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	
174	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Kebudayaan	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Pertumbuhan Kunjungan Wisata (%)	Jumlah Kunjungan wisata Tahun n di kurangi Jumlah Kunjungan wisata Tahun (n-1) dibagi Jumlah Kunjungan Wisata Tahun (n-1) dikali 100%	Persen	3-5	7	5	7,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1. Akses menuju destinasi wisata belum merata (wisata bahari & desa wisata) 2. Promosi wisata Gresik masih kalah dibanding daerah sekitar 3. Wisata religi masih bersifat kunjungan singkat 4. Pengelolaan wisata bahari (Pulau Bawean) belum optimal 5. SDM pariwisata lokal belum terlatih secara professional 6. Kebersihan dan pengelolaan sampah di lokasi wisata 7. Kurangnya event wisata rutin 8. Kolaborasi antar stakeholder belum maksimal 9. Kurangnya inovasi produk wisata	1. Penguatan Strategi Promosi dan Branding Daerah 2. Peningkatan Kualitas dan Daya Tarik Destinasi 3. Diversifikasi Event dan Aktivitas Wisata 4. Penguatan Kemitraan dan Jejaring 5. Optimalisasi Sistem Pendataan Kunjungan 6. Strategi Antisipatif terhadap Faktor Eksternal	
175	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah	Pertumbuhan pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah (%)	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Tahun n di kurangi Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Tahun (n-1) dibagi Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Tahun (n-1) dikali 100%	Persen	-	2	2	2	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Belum adanya Regulasi baik tingkat daerah maupun pusat untuk menetapkan kriteria subsektor Ekraf unggulan.	Tim Ekraf melakukan kurasi secara mandiri untuk menetapkan subsektor unggulan	
DINAS PERTANIAN														
176	DINAS PERTANIAN	Pertanian	Meningkatnya produksi sektor pertanian	Pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian (%)	Jumlah produksi komoditas unggulan pertanian tahun n - Jumlah produksi komoditas unggulan pertanian tahun n-1 ---------- ----------x 100% Jumlah produksi komoditas unggulan pertanian tahun n-1	Persen	0,48	0,46	2,87	7,51	Dinas Pertanian	-	-	Produksi Padi Meningkat Signifikan karena Luas Tambah Tanam Naik
177	DINAS PERTANIAN	Pertanian		Pertumbuhan produksi komoditas unggulan perkebunan (%)	Jumlah produksi komoditas unggulan perkebunan tahun n - Jumlah produksi komoditas unggulan perkebunan tahun n-1 ---------- --- x 100% Jumlah produksi komoditas unggulan perkebunan tahun n-1	Persen	0,42	0,45	0,46	0,07	Dinas Pertanian	1. Luas areal tanam tembakau menurun dari awalnya 255,9 Ha menjadi 171,06 Ha 2. Produktivitas tembakau menurun dikarenakan faktor cuaca kemarau basah dari 12,69 Ton/Ha menjadi 8,7 Ton/Ha 3. Produksi jambu mente mengalami penurunan dari 55,2 ton/Ha menjadi 8,53 Ton/Ha dikarenakan umur tanaman sudah tua sehingga produksi kurang maksimal	-Membantu petani tembakau untuk menjalin kemitraan -Melakukan peremajaan terhadap tanaman yang sudah tua atau tidak produktif	

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
178	DINAS PERTANIAN	Pertanian		Pertumbuhan Produksi Komoditas Unggulan Peternakan (%)	Jumlah produksi komoditas unggulan peternakan tahun n - Jumlah produksi komoditas unggulan peternakan tahun n-1 ---------- --- x 100% Jumlah produksi komoditas unggulan peternakan tahun n-1	Persen	2,03	1,85	2,02	1,85	Dinas Pertanian	-	-	
179	DINAS PERTANIAN	Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Rasio ketersediaan pangan per kapita (Kg/KAP/TH)	Jumlah Ketersediaan Pangan (Beras) ---------- x 100% Jumlah Penduduk	Kg/KAP/TH	190	184,88	184,04	170	Dinas Pertanian	Adanya standar perhitungan konversi Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) dari BPS Gresik sebesar 83,38%	Meningkatkan produktivitas komoditas tanaman padi	Tahun 2024 belum ada Konversi Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG)
180	DINAS PERTANIAN	Pangan		Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	Data bersumber dari Bapanas (Badan Pangan Nasional)	Niali	-	94,17	93,60	95,85	Bapanas	-	-	Indikator baru di Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029
181	DINAS PERTANIAN	Pangan		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	Data bersumber dari Bapanas (Badan Pangan Nasional)	Persen	-	2,88	2,9	3,51	Bapanas	Masih adanya masyarakat rentan rawan pangan	Mengoptimalkan bantuan pangan untuk masyarakat rentan rawan pangan	Indikator baru di Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029
182	DINAS PERTANIAN	Pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	Data bersumber dari Bapanas (Badan Pangan Nasional)	Indeks	-	80,61	90,9	78,46	Bapanas	Terdapat Penambahan Indikator dalam Perhitungan IKP dari awalnya cuma 9 Indikator menjadi 12 Indikator	Mengoptimalkan pembangunan bidang pangan (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan)	Indikator baru di Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029
183	DINAS PERTANIAN	Pangan	Meningkatnya pengendalian inflasi sektor pertanian	stabilitas harga pangan utama (%)	Standart Deviasi (Beras) ---------- x 100% Rata-rata harga	Persen	-	4,68	9,39	3,18	Dinas Pertanian	-	-	Indikator baru di Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 (indikator negatif)
184	DINAS PERTANIAN	Pangan	Meningkatnya kesejahteraan petani	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	((PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun n - PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun n-1)/ PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun n-1) x 100	Persen	-	0.73-2.30	1,63	3,37	BPS			PDRB ADHK 2025 : Angka Sangat Sementara
SEKRETARIAT DAERAH														
185	SEKRETARIAT DAERAH	organisasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP >= 80 (Persentase)	Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP >= 80 dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%	Persen	83,33	87	86,96	100	LHE SAKIP INTERNAL	Beberapa dokumen SAKIP Perangkat Daerah masih butuh perbaikan minor	Melakukan asistensi kepada Perangkat Daerah secara intensif	
186	SEKRETARIAT DAERAH	organisasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi	Hasil Evaluasi Kelembagaan (Angka)	Hasil evaluasi kelembagaan adalah hasil penilaian mandiri terkait kematangan perangkat daerah yang dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menggambarkan sejauh mana struktur dan proses organisasi instansi pemerintah telah memenuhi prinsip tepat fungsi, tepat struktur, dan tepat proses.	Angka	96,8	96,8	96,8	96,7	Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan	Terdapat perubahan formulasi perhitungan di Tahun 2025, sehingga nilai masih menggunakan nilai Tahun sebelumnya	Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi telah melakukan simulasi perhitungan Evaluasi Kelembagaan.	
187	SEKRETARIAT DAERAH	organisasi	Meningkatnya mutu pelayanan publik	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik (Angka)	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah nilai yang dikeluarkan oleh Ombudsman sebagai upaya percepatan dan pemerataan mutu pelayanan publik. mengacu pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Angka	95,88	96	95,88	Belum rilis nilai akhir	Laporan Hasil Evaluasi Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman	Nihil. Nilai Sudah sangat baik.	Nihil	
188	SEKRETARIAT DAERAH	Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD (Nilai)	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2029 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,25	3,4	3,3	3.409	SK Hasil EPPD tahun 2023 rilis tahun 2025			

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
189	SEKRETARIAT DAERAH	Hukum	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks (Skala 0-100))	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Formulasi perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dikembangkan oleh LAN RI didasarkan pada pendekatan self-assessment berbasis bukti, mengukur empat dimensi utama: perencanaan (20%), implementasi (25%), evaluasi (30%), serta partisipasi publik (15%), dengan tambahan poin 10% untuk keterlibatan analis kebijakan	Indeks	84,50	84,50	84,45	82,85	Aplikasi IKK	Pemenuhan data dukung berupa implementasi dan evaluasi Perda atau Perbup masih kurang optimal karena masih baru diundangkan	Pemilihan sampel kebijakan (perda atau Perbup) yang lebih optimal implementasi dan evaluasinya.	
190	SEKRETARIAT DAERAH	organisasi	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah (Indeks (Skala 0-100))	Berdasarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima	Indeks	88	88,23	88,19	89,85	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Semester II	Nihil. Nilai Sudah sangat baik.	Nihil	
191	SEKRETARIAT DAERAH	ULP	Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))	Indeks Tata Kelola Pengadaan didasarkan pada tiga aspek utama: pemanfaatan sistem pengadaan, kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan UKPBJ. Skor ITKP dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang indikator-indikator tersebut, yang mencakup e-purchasing, e-tendering, dan e-kontrak, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi.	Indeks	0	77	76,93	85,66	https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/b83d1eb2-dda8-4248-bb04-2714e4c4b9e1/page/p_z03at3tpyd			
192	SEKRETARIAT DAERAH	Perekonomian	Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah	Angka Inflasi (Angka)	IHK tahun (n) di kurangi IHK tahun (n-1) di bagi IHK tahun (n-1) dikali 100%	Indeks	3,5	3,5	1,85	2,44	Rilis BPS	Baik	Baik	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024, sasaran inflasi ditetapkan sebesar 2,5% dengan deviasi 1% yaitu di kisaran 1,5% - 3,5%. Artinya apabila angka inflasi suatu daerah berada di antara 1,5% - 3,5% maka diartikan bahwa inflasi di daerah tersebut terkendali. Berdasarkan hal tersebut maka realisasi angka inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar 2,44% telah mencapai target. (indikator negatif)
193	SEKRETARIAT DAERAH	Hukum	Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum	Nilai Peduli HAM (Nilai)	Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, yang bertujuan menilai dan memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang berupaya meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM	Nilai	75	90,96	90,95	Belum Rilis				Penilaian Tahun 2025 ditiadakan oleh Kementerian HAM RI karena indikator-indikatornya perlu dievaluasi ulang

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
194	SEKRETARIAT DAERAH	Perekonomian	Meningkatnya kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten Gresik	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman	Indeks	4,58	4,62	4,58	Belum Rilis	BAPPENAS	indeks Akses Keuangan Daerah belum rilis dari BAPPENAS	Akan dilakukan koordinasi dengan Bappenas agar dapat segera diperoleh angka Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) tersebut.	
SEKRETARIAT DPRD														
195	SEKRETARIAT DPRD		Meningkatnya kualitas pelayanan atas dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan (%)	(Jumlah Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan yang diselenggarakan / Jumlah Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan sesuai Renja) x 100%	Persen	100	100	100	100	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sekretariat DPRD			
196	SEKRETARIAT DPRD			Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD (%)	(Jumlah Fasilitasi Kegiatan DPRD sesuai Fungsinya yang dipenuhi/Jumlah Kegiatan DPRD sesuai Fungsinya Berdasarkan Renja DPRD) x 100%	Persen	100	100	100	100	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sekretariat DPRD			
197	SEKRETARIAT DPRD			Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD (%)	(Jumlah Fasilitasi Kegiatan DPRD sesuai Fungsinya yang dipenuhi/Jumlah Kegiatan DPRD sesuai Fungsinya Berdasarkan Renja DPRD) x 100%	Persen	100	100	100	100	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sekretariat DPRD			
198	SEKRETARIAT DPRD			Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Nilai)	Nilai Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD)	Nilai	100	96,25	96,25	99	Laporan Hasil Survey Semester I Bulan Agustus Semester II Bulan Desember			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														
199	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Perencanaan	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		Indeks	80	80,5	80	80,7625	Kajian Dokumen IPPD	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan sampai saat ini belum dapat disampaikan karena masih dalam proses pengolahan dan validasi oleh pihak pelaksana swakelola guna memastikan akurasi data, kelengkapan indikator, serta konsistensi hasil pengukuran sebelum dipublikasikan secara resmi.		
200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)		Indeks	47,8	54,71	54,53	57,98	SK Kemendagri Nomor 400.10.11/6097/ 2025			
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH														
201	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Keuangan	Meningkatnya Pemanfaatan Aset	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah (%)	Realisasi Pendapatan pemanfaatan aset / target Pendapatan pemanfaatan aset *100	Persen	-	70	70	112,13	BPPKAD			
202	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Keuangan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))	Realisasi pajak (n-1) / PDRB (n-1) * 100	Persen	-	0,7	0,7	0,84	BPPKAD dan BPS			
203	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Keuangan		Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah = Realisasi PAD / Target PAD * 100	Persen	-	85	85	94,08	BPPKAD			

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
204	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Belum rilis	BPPKAD	Belum rilis dari BPK untuk Opini tahun 2025		
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														
205	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kepegawaian	Meningkatnya Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan	Rasio Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah (%)	Jumlah pejabat struktural perempuan dibagi Jumlah semua pejabat Struktural x 100%	Persen	-	31	30,57	34	Data Kepegawaian BKPSDM			
206	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kepegawaian	Meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks (Skala 0-100))	Formulasi perhitungan dilakukan oleh BKN	Indeks	89,8	89	88,87	89,75	Hasil Penilaian dari BKN pada Aplikasi SIASN			
INSPEKTORAT														
207	INSPEKTORAT	Inspektorat	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal (%)	JUMLAH REKOMENDASI ATAS PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN KINERJA YANG DITINDAKLANJUTI YANG BERSTATUS TELAH SELESAI DIBAGI JUMLAH SELURUH REKOMENDASI DIKALI 100%	Persen	100	90,05	88,41	90,26	Laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan hasil pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan.			
208	INSPEKTORAT	Inspektorat	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	NILAI RATA-RATA DARI TOTAL JUMLAH NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DIBAGI JUMLAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Nilai	86	86,57	86,37	86,88	Laporan rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik			
209	INSPEKTORAT	Inspektorat	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui PM SPIP Terintegrasi	Nilai maturitas SPIP (Nilai)	NILAI YANG DIBERIKAN OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PADA LAPORAN HASIL PELAKSANAAN EVALUASINYA ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK	Nilai	3	3,35	3,34	3.343	Berdasarkan hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Tidak tercapainya nilai target dikarenakan : a. adanya kebijakan baru dan metode evaluasi dari TIM BPKP yang lebih mengacu pada substansi dan dampak SPIP. b. diberlakukan baseline baru SPIP kepada semua pemerintah daerah sehingga tidak ada yang mengalami kenaikan level/point nilai dari tahun sebelumnya.	Melaksanakan evaluasi dan upaya pemenuhan peningkatan nilai/skor penilaian maturitas SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat dan OPD yang terkait dengan: a. Memenuhi dukungan data/dokumen pada setiap elemen hingga terjamin kualitasnya pada tahun selanjutnya. b. Melaksanakan rekomitmen bagi pejabat existing pada semua OPD untuk penerapan SPIP Terintegrasi dan, C. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasinya	

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
210	INSPEKTORAT	Inspektorat		Nilai kapabilitas APIP (Nilai)	Nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri kapabiltas APIP Level 3 pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gresik	Nilai	3	3,095	3,085	3.085	Berdasarkan hasil Penilaian Kapabiltas APIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Belum rilis		
KECAMATAN GRESIK														
211	KECAMATAN GRESIK	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	90	85	92,34	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
212	KECAMATAN GRESIK	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
213	KECAMATAN GRESIK	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
214	KECAMATAN GRESIK	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
215	KECAMATAN GRESIK	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
216	KECAMATAN GRESIK	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
217	KECAMATAN GRESIK	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN KEBOMAS														
218	KECAMATAN KEBOMAS	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	92	88	87,84	93,52	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
219	KECAMATAN KEBOMAS	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
220	KECAMATAN KEBOMAS	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
221	KECAMATAN KEBOMAS	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
222	KECAMATAN KEBOMAS	Kewilayahan	ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
223	KECAMATAN KEBOMAS	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
224	KECAMATAN KEBOMAS	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN MANYAR														
225	KECAMATAN MANYAR	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	92	93	92,22	93,08	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
226	KECAMATAN MANYAR	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
227	KECAMATAN MANYAR	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
228	KECAMATAN MANYAR	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
229	KECAMATAN MANYAR	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
230	KECAMATAN MANYAR	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
231	KECAMATAN MANYAR	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN CERME														
232	KECAMATAN CERME	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	89	88	91,78	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
233	KECAMATAN CERME	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
234	KECAMATAN CERME	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
235	KECAMATAN CERME	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
236	KECAMATAN CERME	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
237	KECAMATAN CERME	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
238	KECAMATAN CERME	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN BENJENG														
239	KECAMATAN BENJENG	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	92	98	97	98,10	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
240	KECAMATAN BENJENG	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
241	KECAMATAN BENJENG	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
242	KECAMATAN BENJENG	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
243	KECAMATAN BENJENG	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
244	KECAMATAN BENJENG	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
245	KECAMATAN BENJENG	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN BALONGPANGGANG														
246	KECAMATAN BALONGPANGGANG	Kewilayahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	97	98,25	98	98,73	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
247	KECAMATAN BALONGPANGGANG	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
248	KECAMATAN BALONGPANGGANG	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
249	KECAMATAN BALONGPANGGANG	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
250	KECAMATAN BALONGPANGGANG	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
251	KECAMATAN BALONGPANGGANG	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
252	KECAMATAN BALONGPANGGANG	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN														
253	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	98,5	93,35	92,92	96,5	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
254	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
255	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
256	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
257	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
258	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
259	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN DRIYOREJO														
260	KECAMATAN DRIYOREJO	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	97	95	97,31	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
261	KECAMATAN DRIYOREJO	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
262	KECAMATAN DRIYOREJO	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
263	KECAMATAN DRIYOREJO	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
264	KECAMATAN DRIYOREJO	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
265	KECAMATAN DRIYOREJO	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
266	KECAMATAN DRIYOREJO	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN WRINGINANOM														
267	KECAMATAN WRINGINANOM	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	95	94	94,25	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
268	KECAMATAN WRINGINANOM	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
269	KECAMATAN WRINGINANOM	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
270	KECAMATAN WRINGINANOM	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
271	KECAMATAN WRINGINANOM	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
272	KECAMATAN WRINGINANOM	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
273	KECAMATAN WRINGINANOM	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN KEDAMEAN														

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
274	KECAMATAN KEDAMEAN	Kewilayahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	93	93,5	93	93,54	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
275	KECAMATAN KEDAMEAN	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/ kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
276	KECAMATAN KEDAMEAN	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
277	KECAMATAN KEDAMEAN	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
278	KECAMATAN KEDAMEAN	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
279	KECAMATAN KEDAMEAN	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
280	KECAMATAN KEDAMEAN	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN MENGANTI														
281	KECAMATAN MENGANTI	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	92	93	91	94,10	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
282	KECAMATAN MENGANTI	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
283	KECAMATAN MENGANTI	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
284	KECAMATAN MENGANTI	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
285	KECAMATAN MENGANTI	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
286	KECAMATAN MENGANTI	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
287	KECAMATAN MENGANTI	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
KECAMATAN SIDAYU														
288	KECAMATAN SIDAYU	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	98	98,87	98,51	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
289	KECAMATAN SIDAYU	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
290	KECAMATAN SIDAYU	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
291	KECAMATAN SIDAYU	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
292	KECAMATAN SIDAYU	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
293	KECAMATAN SIDAYU	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
294	KECAMATAN SIDAYU	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN UJUNGPANGKAH														
295	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	93	90	93,72	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
296	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
297	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
298	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
299	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
300	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
301	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN PANCENG														
302	KECAMATAN PANCENG	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	93	90	92,43	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
303	KECAMATAN PANCENG	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
304	KECAMATAN PANCENG	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
305	KECAMATAN PANCENG	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
306	KECAMATAN PANCENG	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
307	KECAMATAN PANCENG	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
308	KECAMATAN PANCENG	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN BUNGAH														
309	KECAMATAN BUNGAH	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	89,00	88,98	90,19	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
310	KECAMATAN BUNGAH	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
311	KECAMATAN BUNGAH	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
312	KECAMATAN BUNGAH	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
313	KECAMATAN BUNGAH	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
314	KECAMATAN BUNGAH	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
315	KECAMATAN BUNGAH	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN DUKUN														
316	KECAMATAN DUKUN	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	93	95	94	95	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
317	KECAMATAN DUKUN	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
318	KECAMATAN DUKUN	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
319	KECAMATAN DUKUN	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
320	KECAMATAN DUKUN	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
321	KECAMATAN DUKUN	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
322	KECAMATAN DUKUN	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN SANGKAPURA														
323	KECAMATAN SANGKAPURA	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	97	98	96,50	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
324	KECAMATAN SANGKAPURA	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
325	KECAMATAN SANGKAPURA	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
326	KECAMATAN SANGKAPURA	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
327	KECAMATAN SANGKAPURA	Kewilayahan	ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
328	KECAMATAN SANGKAPURA	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
329	KECAMATAN SANGKAPURA	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
KECAMATAN TAMBAK														
330	KECAMATAN TAMBAK	Kewilayahan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Survey Kepuaan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	93	94,68	94,68	97,63	Laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II			
331	KECAMATAN TAMBAK	Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan pembanguna prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Jumlah Desa/Kelurahan yang secara aktif melaksanakan program prioritas dibagi jumlah total desa/kelurahan yang seharusnya menjadi sasaran program tersebut dalam suatu wilayah	Rasio	-	1:1	1:1	1:1	Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan			
332	KECAMATAN TAMBAK	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
333	KECAMATAN TAMBAK	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
334	KECAMATAN TAMBAK	Kewilayahan		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
335	KECAMATAN TAMBAK	Kewilayahan		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
336	KECAMATAN TAMBAK	Kewilayahan		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		Rasio	-	1:1	1:1	1:1				
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
337	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya hubungan yang harmoni antar kelompok berbagai kelompok sosial, budaya dan agama di masyarakat	Indeks Kesadaran Berbangsa (Indeks)	Skor rata-rata aspek yang diukur dikurangi skor minimum dibagi skor maksimum aspek yang diukur dikurangi skor minimum aspek yang diukur dikali 100%	Indeks	-	73,09	72,89	79,4	Dokumen laporan akhir penyusunan Indeks Kesadaran Berbangsa yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik			

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET		REALISASI		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
							2024	2025	2024	2025				
338	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif (Indeks)	Jumlah nilai tiap variabel yang diukur dikali bobot dibagi jumlah variabel yang diukur dikali 100%	Indeks	3,94	3,95	3,96	4	Hasil Pengukuruan Indeks Kemandirian Partisipatif Tahun 2025 berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/4636/XI/DE/PM/2025/BNN			